



BUPATI BADUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, akuntabel, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diperlukan kejelasan tahapan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa pembangunan daerah sebagai upaya sistematis pemanfaatan sumber daya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah perlu didukung suatu perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan periode RPJMD;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

- (2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 20 Agustus 2025


BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 20 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I GUSTI NGURAH SURYA SUAMBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI:
(6 , 38 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025–2029

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah

bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029	I-12
1.4.1 Maksud	I-12
1.4.2 Tujuan	I-12
1.5 Sistematika RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029	I-12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-15
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ..	II-21
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-29
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-35
2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	II-42
2.1.1.7 Demografi	II-44
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-53
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-53
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua.....	II-70
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-77
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-83
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-84
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.....	II-86
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-96
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-96
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.....	II-102
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-108
2.1.3.4 Transformasi Digital.....	II-111
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-118
2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-124

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	II-127
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-128
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-128
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	II-133
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	II-135
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.....	II-137
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II-181
2.1.6 Arahan Pembangunan Wilayah Kabupaten Badung.....	II-185
2.1.7 BUMD Pendukung Pembangunan Kabupaten Badung	II-192
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-197
2.2.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir ...	II-197
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024	II-202
2.2.1.2 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-232
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah	II-235
2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah	II-235
2.2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah	II-238
2.2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	II-239
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-240

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung 2025-2029	III-2
3.2 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029	III-12
3.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029.....	III-21
3.4 Strategi Pembangunan Jangka Menengah	III-31
3.5 Arah Kebijakan Daerah	III-51
3.6 Program Prioritas Daerah	III-53

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-42

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung	II-2
Tabel 2. 2	Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2. 3	Nilai PDRB Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali 2020-2024	II-11
Tabel 2. 4	Banyaknya Penerbangan dan Penumpang di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	II-14
Tabel 2. 5	Luas Pemeliharaan Ikan, Produksi dan Nilainya di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2. 6	Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2. 7	Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2. 8	Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Badung	II-23
Tabel 2. 9	Status Daya Dukung Air Kabupaten Badung	II-26
Tabel 2. 10	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di 2- Provinsi Bali	II-28
Tabel 2. 11	Defisit Air di Provinsi Bali	II-29
Tabel 2. 12	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2024	II-29
Tabel 2. 13	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali (%)	II-31
Tabel 2. 14	Konsumsi Listrik di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2. 15	Banyaknya Pelanggan Air Bersih Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali 2020-2024	II-34
Tabel 2. 16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dan Provinsi Bali 2024	II-36
Tabel 2. 17	Timbulan Sampah yang ditangani Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2. 18	Persentase Jumlah Sampah Tertangani Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2. 19	Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali 2020-2024	II-42
Tabel 2. 20	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung 2020-2024	II-45
Tabel 2. 21	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Tahun 1961-2020	II-47
Tabel 2. 22	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022-2024	II-49
Tabel 2. 23	Laju Pertumbuhan, Persentase dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Badung 2023 (data terakhir)	II-50
Tabel 2. 24	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2025-2030 Menurut Kecamatan	II-52

Tabel 2. 25	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2. 26	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2. 27	Gini Rasio Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2019-2024	II-65
Tabel 2. 28	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2. 29	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Badung Tahun 2024	II-77
Tabel 2. 30	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2. 31	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2. 32	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Komponennya Tahun 2024	II-82
Tabel 2. 33	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung 2020-2024	II-87
Tabel 2. 34	Indikator, Dimensi dan indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bali Tahun 2022-2023	II-95
Tabel 2. 35	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2024	II-97
Tabel 2. 36	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2. 37	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2. 38	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2. 39	Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	II-103
Tabel 2. 40	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung	II-106
Tabel 2. 41	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2024	II-108
Tabel 2. 42	Indeks Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali dan Lainnya Tahun 2022-2023	II-114
Tabel 2. 43	Jumlah Penduduk diatas 5 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi Tahun 2020-2023 (dalam %)... ..	II-116
Tabel 2. 44	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2. 45	Ekspor Barang Provinsi Bali Menurut 10 Komoditas Utama Keadaan Bulan Juni 2023, Mei 2024 dan Juni 2024	II-122
Tabel 2. 46	Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Badung Tahun 2020-2023	II-126
Tabel 2. 47	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung 2021-2024	II-130
Tabel 2. 48	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2024	II-137
Tabel 2. 49	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Badung.....	II-138
Tabel 2. 50	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024	II-182
Tabel 2. 51	Sasaran Pembangunan Kabupaten Badung.....	II-185

Tabel 2. 52	Highlight Intervensi Pembangunan di Wilayah Kabupaten Badung.....	II-187
Tabel 2. 53	Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali di Kabupaten Badung	II-191
Tabel 2. 54	Penyertaan Modal BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Badung	II-194
Tabel 2. 55	Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2020-2024.....	II-198
Tabel 2. 56	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-204
Tabel 2. 57	Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %)	II-205
Tabel 2. 58	Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %)	II-207
Tabel 2. 59	Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-210
Tabel 2. 60	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam Rp)	II-212
Tabel 2. 61	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-215
Tabel 2. 62	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %).....	II-218
Tabel 2. 63	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %).....	II-219
Tabel 2. 64	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Modal Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %).....	II-220
Tabel 2. 65	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %)	II-221
Tabel 2. 66	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Transfer Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %).....	II-223
Tabel 2. 67	Perkembangan Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-226
Tabel 2. 68	Perkembangan Struktur Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-228
Tabel 2. 69	Perkembangan Struktur Pembiayaan Netto Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-230
Tabel 2. 70	Perkembangan Struktur Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2020-2024.....	II-232
Tabel 2. 71	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-234
Tabel 2. 72	Proyeksi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030	II-237
Tabel 2. 73	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030	II-238
Tabel 2. 74	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030	II-240
Tabel 2. 75	Perumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Badung.....	II-242
Tabel 3. 1	Keselarasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya.	III-7

Tabel 3. 2	Keselaran Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 terhadap Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.....	III-13
Tabel 3. 3	Keselaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III-19
Tabel 3. 4	Keselaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	III-20
Tabel 3. 5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029	III-23
Tabel 3. 6	Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.....	III-33
Tabel 3. 7	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung	III-52
Tabel 3. 8	Program Prioritas Daerah yang Diselaraskan dengan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Badung	III-55
Tabel 3. 9	Program Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030	III-60
Tabel 3. 10	Penetapan Target Kinerja dan Pagu Program Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030.....	III-68
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030	IV-2
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Badung Tahun 2026-2030	IV-44
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030	IV-48
Tabel 4.4	Penetapan Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026-2030.....	IV-78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-11
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung	II-5
Gambar 2. 2 Perbandingan Nilai PDRB Kabupaten Badung dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	II-12
Gambar 2. 3 Perkembangan IKLH Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-37
Gambar 2. 4 Rasio Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung 2019-2024	II-54
Gambar 2. 6 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung (dalam %).	II-55
Gambar 2. 7 Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Badung	II-57
Gambar 2. 8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung 2020-2024 (%)	II-62
Gambar 2. 9 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (%)	II-64
Gambar 2. 10 Perkembangan Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Badung (dalam %) 2020-2024	II-67
Gambar 2. 11 Usia Harapan Hidup Kabupaten Badung 2020-2024 (tahun) ...	II-71
Gambar 2. 12 Angka Kematian Bayi Kabupaten Badung 2020-2024	II-72
Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu Kabupaten Badung 2020-2024	II-74
Gambar 2. 14 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-83
Gambar 2. 15 Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2022 -2024	II-85
Gambar 2. 16 Grafik Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	II-104
Gambar 2. 17 Perkembangan Ekspor Brang dan Jasa Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-123
Gambar 2. 18 Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai RTR Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-125
Gambar 2. 19 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Periode 2020-2024	II-128
Gambar 2. 20 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2021-2024	II-129
Gambar 2. 21 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Badung 2020-2024	II-132
Gambar 2. 22 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-134
Gambar 2. 23 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	II-203
Gambar 2. 24 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam Rp)	II-214

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025–2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Pembangunan yang terencana, sistematis, dan terintegrasi merupakan dasar yang kuat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan yang matang dan terpadu tidak hanya mencakup aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, lingkungan, dan budaya.

Daerah yang berkembang dengan perencanaan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi dipandu oleh visi dan strategi pembangunan yang jelas dan terarah. Visi ini harus mampu mencerminkan aspirasi masyarakat, potensi ekonomi, serta tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut. Perencanaan yang matang memungkinkan penetapan tujuan dan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan dapat diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebuah rencana yang baik tidak hanya mempertimbangkan jangka pendek, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kedepannya. Visi jangka panjang ini harus mampu meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan dengan menciptakan ekonomi yang kuat, serta masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Secara keseluruhan, perencanaan pembangunan yang terencana, sistematis, dan terintegrasi adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan komitmen, visi, dan kerjasama dari semua pihak terkait, serta pendekatan yang menyeluruh dan inklusif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat sekarang dan di masa depan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan pembangunan yang sistematis dan terintegrasi untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKP). Dokumen RPJP memiliki periode implementasi selama 20 tahun, yang kemudian dirinci ke dalam dokumen RPJM dengan periode lima tahunan dan dokumen RKP untuk pembangunan tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan ini harus disusun secara berkesinambungan untuk memastikan pembangunan selalu terarah dan terencana secara sistematis dan terintegrasi.

Kabupaten Badung telah mencapai perkembangan ekonomi yang signifikan dan kesejahteraan masyarakat yang merata, namun untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, diperlukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui dokumen perencanaan yang komprehensif dan berbasis data, pemerintah Kabupaten Badung dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada masa depan demi optimalisasi pembangunan di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung saat ini memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang akan segera berakhir perodesasi implementasinya. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, perlu dilaksanakan persiapan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

Pada Tanggal 27 November Tahun 2024, Kabupaten Badung bersama dengan seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Serangkaian dengan pilkada tersebut, pada Tahun 2025 Kabupaten Badung secara resmi telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru dengan periode jabatan 2025-2030. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah terpilih memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RPJMD sebagai dokumen penjabaran visi dan misinya. Dokumen RPJMD ini selain penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, juga menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah di daerah. Sehingga dokumen RPJMD ini wajib untuk dimiliki dan disusun oleh kepala daerah bersama perangkat daerah dengan mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan perlunya pemerintah daerah memastikan penyusunan RPJMD mengacu

pada standar indikator minimal, selaras dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, dan memuat hasil evaluasi RPJMD sebelumnya secara lengkap. Inmen ini juga mengarahkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data capaian pembangunan 2020–2024, memperkuat pendekatan teknokratik, dan menyiapkan dokumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan lintas sektor.

Untuk mendukung proses ini, penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi sangat penting. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak nasional Tahun 2024, salah satunya dengan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut pada Tahun Anggaran 2025 ini Bappeda Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 yang memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah agar dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah selama 5 tahun mendatang.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJM merupakan salah satu dokumen yang harus disusun dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan baik nasional maupun daerah akan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RKP). Dokumen RPJP memiliki periode implementasi selama 20 tahun yang kemudian diperinci ke dalam dokumen RPJM dengan periode 5 tahunan dan dokumen RKP untuk pembangunan tahunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan keterpaduan, konsistensi, dan sinergi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. RPJMD Kabupaten Badung harus selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, serta kebijakan daerah jangka panjang agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Berikut adalah hubungan antara RPJMD Kabupaten Badung dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi visi besar pembangunan Indonesia dalam 20 tahun ke depan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 harus selaras dengan agenda strategis nasional yang tercantum dalam RPJPN, terutama dalam aspek peningkatan daya saing daerah, pembangunan ekonomi yang

inklusif, pelestarian lingkungan, dan pembangunan sumber daya manusia.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 juga mengadopsi prinsip Indonesia Emas 2045, yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan global.

2. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat nasional. RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan prioritas pembangunan nasional yang harus diterjemahkan dalam kebijakan daerah, sehingga RPJMD Kabupaten Badung harus mendukung pencapaian sasaran nasional dalam sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Badung harus menyelaraskan program dan kebijakan daerah dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029

3. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 merupakan dokumen yang mengatur arah pembangunan Bali dalam jangka panjang, dengan menitikberatkan pada pembangunan yang berbasis kearifan lokal, pelestarian budaya, serta keseimbangan lingkungan dan ekonomi. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 harus mengacu pada sasaran strategis dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, khususnya dalam aspek:

- Penguatan budaya dan adat Bali sebagai identitas daerah, termasuk pengembangan pariwisata berbasis budaya.
- Pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, terutama dalam mendukung industri kreatif, UMKM, dan ekonomi desa.
- Pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Badung harus menerjemahkan arah pembangunan jangka panjang provinsi ke dalam kebijakan daerah yang lebih spesifik dan operasional.

4. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang mengarahkan prioritas pembangunan lima tahunan di tingkat provinsi, yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten/Kota. RPJMD Kabupaten Badung harus selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi, terutama dalam aspek:

- Pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Bali berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
- Peningkatan daya saing daerah dalam sektor ekonomi kreatif, industri berbasis budaya, dan pertanian organik.
- Pembangunan infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sistem transportasi dan energi provinsi.
- Pelestarian adat, tradisi, seni, dan budaya sebagai pilar utama pembangunan Bali.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Badung berperan dalam mengimplementasikan kebijakan provinsi dalam skala lokal agar tujuan pembangunan Bali dapat tercapai secara menyeluruh.

5. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi kerangka utama dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari implementasi tahap awal RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, sehingga harus mendukung pencapaian visi jangka panjang pembangunan daerah pada awal implementasinya. Beberapa aspek utama dalam RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 yang menjadi acuan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 meliputi:

- Pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai sektor unggulan daerah.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan kewirausahaan.
- Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Dengan demikian, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 harus menjamin kesinambungan kebijakan pembangunan daerah, agar visi jangka panjang yang telah dirancang dalam RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dapat diwujudkan secara bertahap.

6. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Badung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD. RKPD disusun setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga memiliki peran penting dalam mengoperasionalkan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Hubungan antara RPJMD dan RKPD meliputi:

- RKPD merupakan turunan langsung dari RPJMD, sehingga seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dalam RKPD harus selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- RKPD menjabarkan prioritas pembangunan tahunan berdasarkan tahapan pencapaian target RPJMD, sehingga setiap tahun ada evaluasi dan penyesuaian strategi untuk memastikan target lima tahunan dapat tercapai.
- RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga seluruh program pembangunan dalam RPJMD dapat didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai dan berkelanjutan.
- Melalui RKPD, pemerintah daerah dapat mengakomodasi dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari segi kebijakan nasional, kondisi ekonomi, maupun aspirasi masyarakat, tanpa mengabaikan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan demikian, RPJMD memberikan arah strategis jangka menengah, sementara RKPD memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara nyata setiap tahunnya. Keselarasan antara kedua dokumen ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, efektivitas kebijakan daerah, serta optimalisasi penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Badung.

7. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Badung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD adalah dokumen yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Hubungan antara RPJMD dan KLHS meliputi:

- Identifikasi dampak lingkungan dari kebijakan pembangunan daerah.
- Penetapan indikator pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai dalam RPJMD.
- Strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Badung harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

8. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Badung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung merupakan dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Badung, sehingga harus menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJMD.

Hubungan RPJMD dengan RTRW mencakup:

- Kesesuaian antara kebijakan pembangunan dengan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.
- Pembangunan infrastruktur, perumahan, kawasan industri, dan kawasan pariwisata harus sesuai dengan zonasi yang diatur dalam RTRW.
- Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Dengan demikian, RPJMD harus memastikan bahwa seluruh program pembangunan tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang daerah, guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

9. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih, sekaligus menjadi instrumen utama dalam mengarahkan

pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Bali secara keseluruhan, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 disusun secara selaras dan konsisten dengan arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125). Haluan tersebut merupakan dokumen strategis pembangunan jangka panjang yang menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali, termasuk kabupaten/kota, dalam membangun Bali secara menyeluruh, berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, *Tri Hita Karana*, serta prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 secara substansial telah mencerminkan enam bidang prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, yaitu:

1. **Penguatan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bali**,
→ Diterjemahkan dalam misi pelestarian budaya dan penguatan desa adat di Kabupaten Badung.
2. **Pembangunan Manusia Unggul yang Berkarakter**,
→ Direspon melalui program peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
3. **Transformasi Ekonomi Kerthi Bali**,
→ Diterapkan melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM, serta pariwisata berkualitas yang berkelanjutan.
4. **Pembangunan Infrastruktur Merata dan Ramah Lingkungan**,
→ Diterjemahkan dalam pengembangan infrastruktur publik dan konektivitas kawasan pariwisata-permukiman secara terpadu.
5. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Bersih**,
→ Diakomodasi melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
6. **Pembangunan Wilayah yang Berbasis Keunggulan dan Ketahanan Daerah**,
→ Diterjemahkan dalam strategi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan perlindungan kawasan strategis.

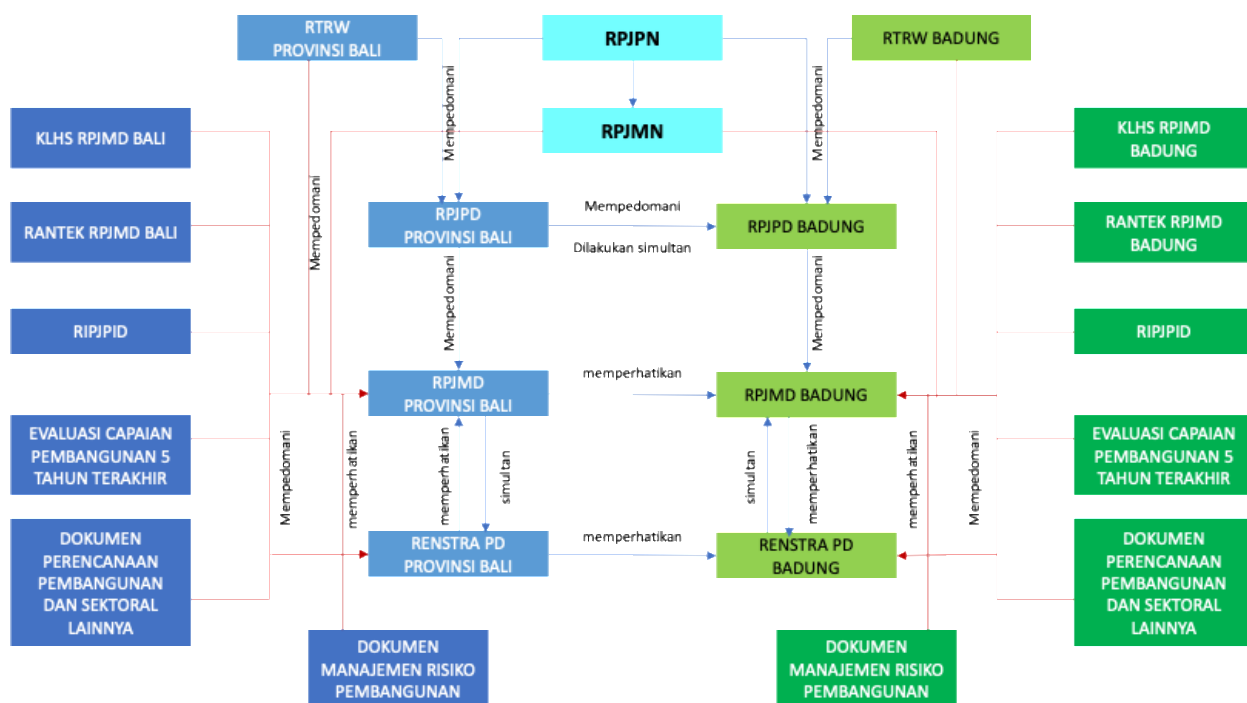
Dengan penyelarasan tersebut, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknokratik, tetapi juga sebagai instrumen sinergi dalam mengawal arah transformasi Bali menuju Pulau yang hijau, tangguh, berbudaya, dan sejahtera secara berkelanjutan dalam kerangka Bali Era

Baru. Melalui pendekatan Semesta Berencana, Kabupaten Badung berkomitmen menjadi bagian aktif dalam pembangunan Bali yang berorientasi pada harmoni antara manusia, alam, dan budaya, sebagaimana visi besar yang dicanangkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan.

RPJMD Kabupaten Badung memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Keselarasan dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk menjamin efektivitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Badung. Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Badung terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **gambar 1.1** berikut.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2029

1.4.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 ini adalah untuk memastikan kesinambungan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Badung guna mewujudkan pembangunan yang terencana, sistematis dan terintegrasi sesuai dengan amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 adalah untuk membangun dasar yang kokoh bagi perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Badung, dengan menggunakan analisis teknis dan fakta empiris serta pendekatan yang rasional dan efisien. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 ini menyajikan data yang objektif, terukur dan dapat diandalkan, sehingga kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dapat dirumuskan dengan akurat.

1.5 SISTEMATIKA RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2029

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 memuat substansi sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN:**

Bagian ini membuka dokumen RPJMD dengan memberikan pengantar yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH:**

Bagian ini menyajikan informasi komprehensif tentang: (1) kondisi wilayah secara keseluruhan yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum; (2) Gambaran Kondisi Keuangan Daerah yang menjelaskan situasi keuangan daerah, termasuk sumber-sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran selama tahun 2020-2024; dan (3) Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

- **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH:**

Bagian ini memuat Visi dan Misi pembangunan yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah yang mendukung perwujudan visi pembangunan jangka menengah. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran dilengkapi dengan target capaian selama periode tahun 2025-2029.

- **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:**

Bab ini memuat:

1. Daftar program Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
2. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030.
3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
4. Target penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Badung terletak di bagian tengah Pulau Bali dan membentang dari wilayah tengah hingga ke selatan. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat 8°14'21,285" - 8°50'57,869" Lintang Selatan dan 115°5'2,035" - 115°15'4,994" Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Badung terdiri dari 6 kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Luas wilayahnya mencapai 398,75 km². Pusat pemerintahan Kabupaten Badung berada di Kawasan Perkotaan Mangupura, yang mencakup beberapa kelurahan dan desa, yaitu Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Sading, serta Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Mengwitani, dan Desa Kekeran.

Kabupaten Badung berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Buleleng
Sebelah Timur	: Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Barat	: Kabupaten Tabanan

Untuk luasan masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Luas Wilayah Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
1	Kecamatan Abiansemal		6.616,88	16,61%
		Desa Abiansemal	452,04	
		Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	272,85	
		Desa Angantaka	225,04	
		Desa Ayunan	206,15	
		Desa Blahkiuh	463,59	
		Desa Bongkasa	412,27	
		Desa Bongkasa Pertiwi	243,31	
		Desa Darmasaba	594,01	
		Desa Jagapati	172,99	
		Desa Mambal	340,46	
		Desa Mekar Bhuwana	299,59	
		Desa Punggul	236,71	
		Desa Sangeh	483,77	
		Desa Sedang	367,87	
		Desa Selat	184,50	
		Desa Sibang Gede	587,47	
		Desa Sibang Kaja	360,23	
		Desa Taman	714,04	
2	Kecamatan Kuta		2.223,44	5,58%
		Kelurahan Kedonganan	226,03	
		Kelurahan Kuta	785,46	
		Kelurahan Legian	304,35	
		Kelurahan Seminyak	346,88	
		Kelurahan Tuban	560,73	
3	Kecamatan Kuta Selatan		10.111,96	25,38%
		Desa Kutuh	997,62	
		Desa Pecatu	2.569,67	
		Desa Ungasan	1.582,48	
		Kelurahan Benoa	2.563,80	
		Kelurahan Jimbaran	2.268,13	
		Kelurahan Tanjung Benoa	130,25	
4	Kecamatan Kuta Utara		3.493,01	8,77%
		Desa Canggu	565,26	
		Desa Dalung	682,24	
		Desa Tibebeneng	661,45	
		Kelurahan Kerobokan	442,79	
		Kelurahan Kerobokan Kaja	357,99	
		Kelurahan Kerobokan Kelod	783,28	

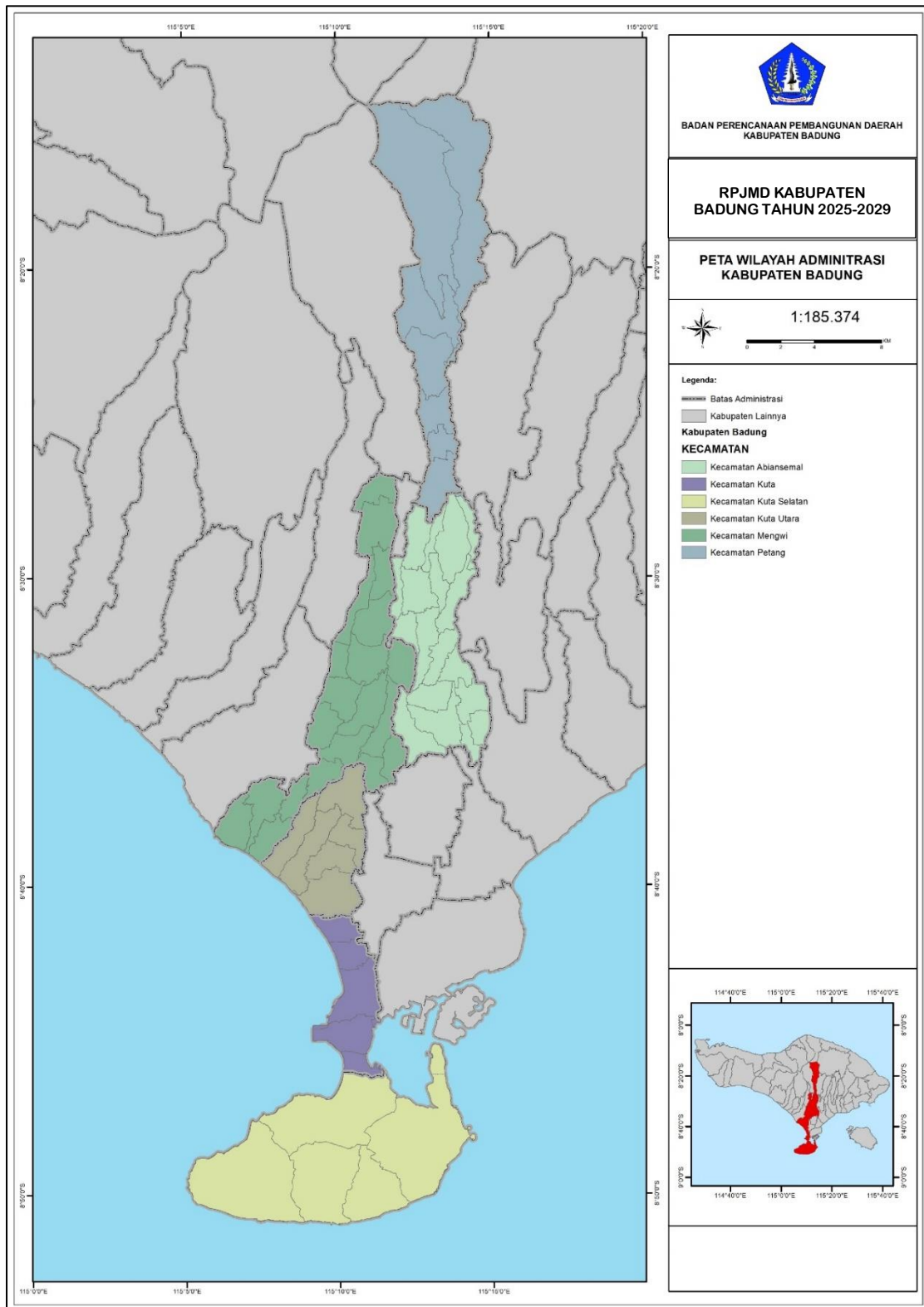
No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
5	Kecamatan Mengwi		8.163,49	20,49%
		Desa Baha	552,25	
		Desa Buduk	326,03	
		Desa Cemagi	484,70	
		Desa Gulingan	527,91	
		Desa Kekeran	403,68	
		Desa Kuwum	343,85	
		Desa Mengwi	216,83	
		Desa Mengwitani	458,51	
		Desa Munggu	542,03	
		Desa Penarungan	409,98	
		Desa Pererenan	386,17	
		Desa Sembung	632,82	
		Desa Sobangan	340,86	
		Desa Tumbakbayuh	267,16	
		Desa Werdi Bhuwana	344,61	
		Kelurahan Abianbase	410,06	
		Kelurahan Kapal	549,50	
		Kelurahan Lukluk	407,99	
		Kelurahan Sading	296,09	
		Kelurahan Sempidi	262,46	
6	Kecamatan Petang		9.233,70	23,18%
		Desa Belok Sidan	2.683,25	
		Desa Carangsari	606,54	
		Desa Getasan	266,39	
		Desa Pangsan	442,13	
		Desa Pelaga	3.386,68	
		Desa Petang	759,81	
		Desa Sulangai	1.088,92	
Kabupaten Badung			39.842,48	

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Badung

Dari data luasan wilayah masing-masing kecamatan dan desa di Kabupaten Badung, diketahui Kecamatan Kuta Selatan memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Badung mencakup lebih dari seperempat total luas kabupaten yaitu 25,38%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor diantaranya potensi pengembangan kawasan hunian, pariwisata, maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Kuta yang memiliki luas hanya sekitar 5,58% dari total luas kabupaten, namun Kecamatan Kuta merupakan wilayah yang lebih berkembang secara ekonomi sehingga memiliki tekanan yang lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur, transportasi dan pengelolaan tata ruang yang lebih kompleks.

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung



B. Kontribusi Ekonomi Berdasarkan PDRB Daerah

1. Nilai Distribusi PDRB Kabupaten Badung

Berdasarkan data dalam Tabel 2.2, perkembangan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Badung selama periode 2020-2024 menunjukkan perubahan struktur ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tetap menjadi kontributor utama terhadap PDRB Kabupaten Badung, meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 24,46% dari total PDRB, sempat menurun ke 23,21% pada 2021, lalu kembali meningkat hingga mencapai 25,72% pada 2024. Tren ini mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi pada sektor pariwisata pada tahun 2020-2021, diikuti oleh pemulihan yang signifikan seiring dengan meningkatnya mobilitas dan wisatawan pada tahun-tahun berikutnya.

Sektor Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan pola yang serupa, dengan kontribusi sebesar 17,10% pada 2020 yang sempat menurun pada 2021 menjadi 12,78%, namun kemudian melonjak tajam hingga mencapai 28,44% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor transportasi, terutama yang terkait dengan pariwisata seperti layanan penerbangan dan angkutan darat, mengalami pemulihan yang kuat pasca-pandemi. Hal ini juga mencerminkan ketergantungan Kabupaten Badung terhadap aktivitas wisatawan domestik maupun mancanegara yang berdampak langsung pada sektor transportasi.

Sebaliknya, sektor Konstruksi mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 11,22% terhadap PDRB, namun kontribusinya terus menurun hingga mencapai 7,91% pada 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berkurangnya proyek-proyek infrastruktur besar serta pergeseran investasi ke sektor lain, terutama sektor jasa yang lebih cepat beradaptasi terhadap pemulihan ekonomi. Sektor Industri Pengolahan juga mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, dari 4,40% pada 2020 menjadi 3,47%

pada 2024, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Badung bukanlah wilayah dengan basis industri manufaktur yang kuat, melainkan lebih bergantung pada sektor tersier.

Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi serta Jasa Keuangan dan Asuransi relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan setelah puncaknya pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan layanan keuangan tetap berkembang meskipun tidak menjadi sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Badung. Sektor Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan mengalami penurunan kontribusi dalam periode ini, yang dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada pemulihan sektor ekonomi utama.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor pariwisata dan turunannya. Pemulihan pasca-pandemi sangat jelas terlihat dalam peningkatan kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi. Namun, beberapa sektor lain seperti industri pengolahan, konstruksi, dan jasa pendidikan mengalami perlambatan. Ke depan, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung akan sangat bergantung pada bagaimana sektor pariwisata beradaptasi terhadap tantangan global seperti perubahan pola wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor tersier semata.

Untuk lebih jelasnya perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga
Berlaku (Persen) tahun 2020-2024

Sektor	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,60	8,51	7,16	6,08	5,88
Pertambangan dan Penggalian	0,34	0,36	0,31	0,26	0,23
Industri Pengolahan	4,40	4,79	4,23	3,58	3,47
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,16	0,14	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,27	0,23	0,20	0,19
Konstruksi	11,22	11,64	10,28	8,53	7,91
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,79	8,55	7,82	6,93	6,69
Transportasi dan Pergudangan	17,10	12,78	20,76	27,97	28,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,46	23,21	23,57	24,67	25,72
Informasi dan Komunikasi	7,97	9,08	7,48	6,16	5,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	3,32	3,17	2,99	3,25
Real Estat	4,10	4,60	3,99	3,33	3,16
Jasa Perusahaan	0,84	0,90	0,83	0,74	0,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	4,46	3,77	3,19	3,27
Jasa Pendidikan	3,91	4,34	3,55	2,90	2,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,76	2,02	1,70	1,44	1,36
Jasa Lainnya	0,96	1,03	0,99	0,89	0,90
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

2. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali

Berdasarkan data dalam Tabel 2.3, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Badung dan wilayah lainnya di Provinsi Bali menunjukkan dinamika yang mencerminkan pola pertumbuhan ekonomi daerah dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Kabupaten Badung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam nilai PDRB-nya, dengan penurunan pada tahun 2021 dari Rp49.026,03 miliar pada 2020 menjadi Rp44.882,08 miliar, sebelum kemudian mengalami pertumbuhan pesat hingga mencapai Rp75.098,20 miliar pada 2024. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 ini sejalan dengan dampak pandemi COVID-19, yang secara langsung menghantam sektor pariwisata dan industri pendukungnya, mengingat Badung merupakan pusat utama destinasi wisata di Bali. Namun, pemulihan yang terjadi setelahnya menunjukkan bahwa sektor ekonomi di Badung, terutama akomodasi, transportasi, dan jasa, berhasil bangkit dengan cepat, didorong oleh meningkatnya kembali kunjungan wisatawan dan investasi di bidang pariwisata.

Perkembangan yang serupa juga terlihat pada Kota Denpasar, yang pada 2020 memiliki nilai PDRB sebesar Rp49.607,46 miliar, meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp65.300,21 miliar pada 2024. Denpasar sebagai ibu kota provinsi memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dibandingkan Badung, dengan kontribusi yang lebih besar dari sektor perdagangan, jasa, dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun terdampak pandemi, pemulihannya lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi sebesar Badung.

Kabupaten lain seperti Tabanan dan Gianyar juga mengalami pertumbuhan PDRB, meskipun dengan angka yang lebih kecil dibandingkan Badung dan Denpasar. Tabanan yang memiliki basis ekonomi pada sektor pertanian dan agroindustri mengalami pertumbuhan moderat dari Rp22.257,58 miliar pada 2020 menjadi Rp27.649,80 miliar pada 2024. Gianyar, yang juga memiliki sektor pariwisata sebagai salah satu penopangnya, mengalami pola pertumbuhan yang lebih stabil, dari

Rp25.841,72 miliar pada 2020 menjadi Rp33.046,80 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pariwisata berkontribusi terhadap ekonomi Gianyar, dampaknya tidak sebesar di Badung, karena perekonomian daerah ini lebih beragam dengan adanya sektor seni, budaya, dan usaha kecil menengah.

Secara keseluruhan, total PDRB Provinsi Bali meningkat secara konsisten dari Rp224.225,72 miliar pada 2020 menjadi Rp298.441,51 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan ekonomi Bali secara keseluruhan setelah pandemi, dengan sektor pariwisata yang kembali menjadi pendorong utama. Kabupaten Badung berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan ini, mencerminkan peran sentralnya dalam ekonomi Bali. Namun, pola fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa ketergantungan pada pariwisata masih menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan penguatan sektor-sektor lain seperti ekonomi kreatif dan digital menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan ketahanan ekonomi di Badung dan Bali secara umum.

Tabel 2. 3

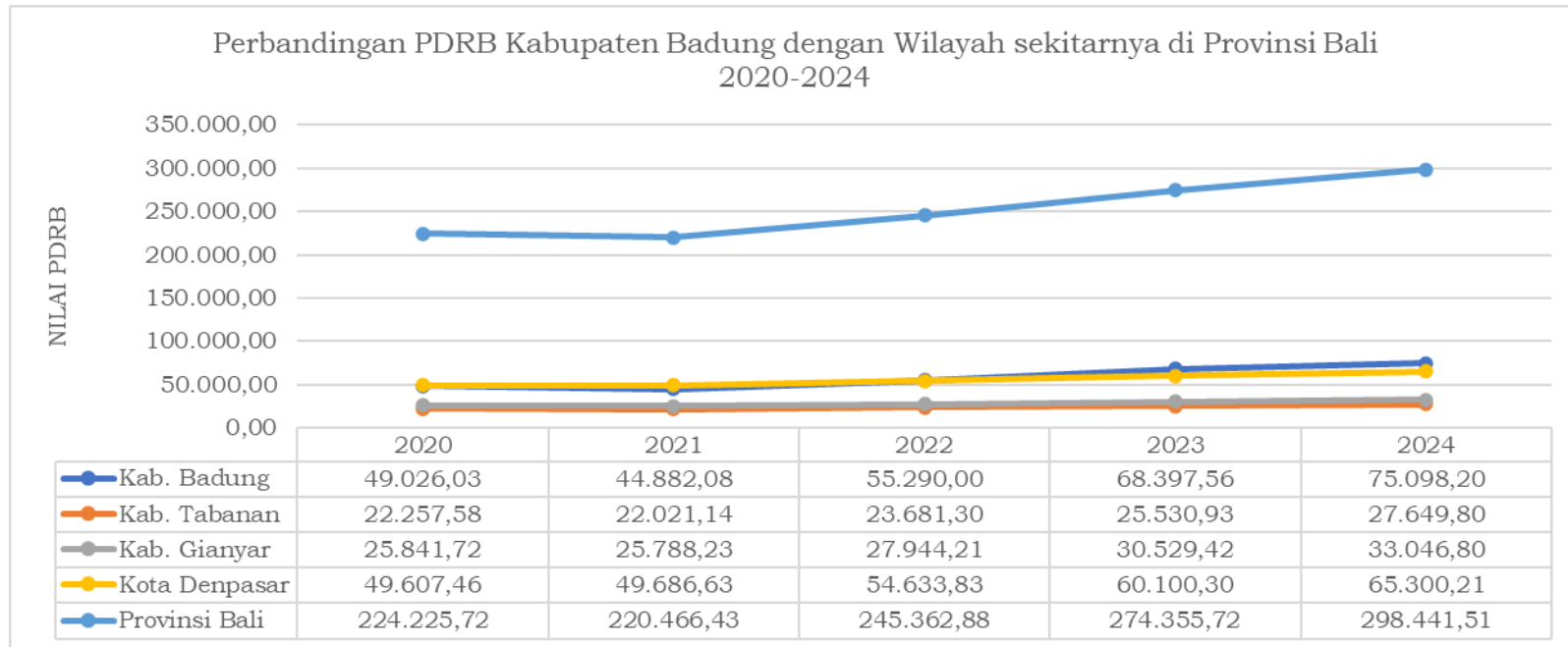
Nilai PDRB Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali 2020-2024

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Badung	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.397,56	75.098,20
Kab. Tabanan	22.257,58	22.021,14	23.681,30	25.530,93	27.649,80
Kab. Gianyar	25.841,72	25.788,23	27.944,21	30.529,42	33.046,80
Kota Denpasar	49.607,46	49.686,63	54.633,83	60.100,30	65.300,21
Provinsi Bali	224.225,72	220.466,43	245.362,88	274.355,72	298.441,51

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Gambar 2. 2

Perbandingan Nilai PDRB Kabupaten Badung dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

C. Kontribusi Infrastruktur Bandara Ngurah Rai Sebagai Pintu Masuk Utama Pulau Bali

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memegang peranan vital sebagai simpul infrastruktur transportasi udara utama di Provinsi Bali. Posisi geografisnya yang strategis di Kabupaten Badung menjadikan bandara ini tidak hanya sebagai gerbang masuk dan keluar utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga sebagai katalisator utama bagi dinamika sosial-ekonomi kawasan.

Data dari BPS Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam volume pergerakan pesawat dan penumpang selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis aktivitas penerbangan, tercermin dari hanya 28.075 pesawat yang tiba dan 28.098 yang berangkat. Jumlah penumpang domestik dan asing juga menurun tajam, dengan penumpang asing tiba hanya sebanyak 1.183 orang—angka yang sangat jauh dari kondisi normal.

Namun, tren pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dan menguat signifikan pada 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023, tercatat 73.545 pesawat tiba dan 73.536 pesawat berangkat, dengan jumlah penumpang domestik tiba dan berangkat masing-masing mencapai lebih dari 5 juta orang. Sementara itu, penumpang asing yang tiba pada tahun 2023 melonjak menjadi 6.138.907 orang, dan terus meningkat hingga 6.982.674 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan akselerasi pemulihan sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali, utamanya di Kabupaten Badung.

Analisis terhadap data ini mengindikasikan bahwa infrastruktur Bandara Ngurah Rai berhasil beradaptasi dan bertransformasi pasca-pandemi, baik dalam aspek pelayanan, konektivitas, maupun keamanan transportasi. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai intervensi kebijakan pemerintah, termasuk pembukaan kembali jalur penerbangan internasional, program vaksinasi massal, dan promosi wisata yang intensif.

Dari sudut pandang perencanaan wilayah dan pembangunan daerah, peran Bandara Ngurah Rai sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah sangat signifikan. Bandara ini tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat konektivitas perdagangan, investasi, serta

pergerakan sumber daya manusia. Keberadaan bandara tersebut menjadi faktor determinan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung, sebagaimana akan dituangkan dalam dokumen RPJMD 2025–2029.

Dengan demikian, Bandara Ngurah Rai tidak semata infrastruktur transportasi, melainkan juga aset strategis yang mengintegrasikan dimensi mobilitas, ekonomi, dan pengembangan wilayah. Optimalisasi peran bandara ini perlu terus dikawal melalui kebijakan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, guna menjaga resiliensi dan daya saing Kabupaten Badung dalam skala nasional maupun global.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 4

Banyaknya Penerbangan dan Penumpang di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No.	Indikator Penerbangan	Banyaknya Penerbangan dan Penumpang di Provinsi Bali				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pesawat Tiba	28.075	21.753	43.787	73.545	71.081
2	Pesawat Berangkat	28.098	21.768	43.790	73.536	71.088
3	Penumpang Domestik Tiba	1.735.628	2.277.471	3.978.953	5.333.319	4.901.759
4	Penumpang Domestik Berangkat	1.775.741	2.190.093	3.878.209	5.053.688	4.719.044
5	Penumpang Domestik Transit	145.929	81.931	89.965	263.760	223.836
6	Penumpang Asing Tiba	1.183.054	3.072	2.332.339	6.138.907	6.982.674
7	Penumpang Asing Berangkat	1.356.003	3.484	2.212.411	6.128.531	7.041.983
8	Penumpang Asing Transit	42.419	33	30.523	12.029	61.603

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor penerbangan di Bali sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, terutama pada tahun 2020 dan 2021, di mana terjadi penurunan drastis dalam jumlah penerbangan serta jumlah penumpang baik domestik maupun internasional. Namun, sejak tahun 2022, pemulihan mulai terlihat, didorong oleh pelonggaran kebijakan perjalanan dan meningkatnya minat wisatawan domestik dan mancanegara. Tahun 2023 menjadi titik pemulihan penuh bagi industri penerbangan Bali, dengan

jumlah penerbangan dan penumpang yang hampir menyamai atau bahkan melampaui kondisi sebelum pandemi. Ini menegaskan bahwa Bali tetap menjadi destinasi wisata utama yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan mobilitas udara.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Bahari

Kabupaten Badung memiliki potensi bahari yang tidak hanya terletak pada sektor kelautan dan wisata pesisir, tetapi juga pada kegiatan perikanan budidaya air tawar yang secara konsisten menunjukkan perkembangan selama periode 2020–2024. Tabel 2.5 menyajikan data mengenai luas pemeliharaan ikan, produksi, dan nilai produksi dari kegiatan budidaya perikanan di kolam dan sawah, yang mengindikasikan bahwa sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama pada subsektor budidaya kolam.

Selama lima tahun terakhir, luas pemeliharaan ikan di kolam berkisar antara 43 hingga 45 hektar, dengan sedikit penurunan menjadi 31 hektar pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan luas kolam di tahun terakhir, produksi ikan di kolam tetap tinggi, mencapai 547,79 ton pada 2024, dan secara keseluruhan stabil di atas 600 ton per tahun sejak 2020. Nilai ekonomi dari hasil budidaya kolam ini juga tercermin dari peningkatan nilai produksi, yang mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan Rp16,96 miliar, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi Rp13,92 miliar.

Sementara itu, budidaya ikan di sawah, meskipun dilakukan pada skala lahan yang lebih kecil (sekitar 14 hektar dari 2020–2023 dan 4,8 hektar di 2024), tetap menunjukkan pertumbuhan nilai ekonomi yang signifikan. Produksi ikan di sawah meningkat dari hanya 5 ton pada 2020 menjadi 15,54 ton pada 2024. Kenaikan ini diiringi dengan lonjakan nilai produksi dari Rp68,49 juta menjadi Rp543,84 juta. Hal ini mencerminkan efektivitas pemanfaatan lahan pertanian multiguna (padi-ikan) yang turut mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi sumber pendapatan petani.

Sektor tambak tidak menunjukkan aktivitas pada periode ini, yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi terbatasnya pengembangan tambak secara struktural, baik karena kendala geografis, kebijakan zonasi wilayah pesisir, maupun prioritas

pembangunan daerah yang lebih mengedepankan sektor pariwisata pesisir daripada tambak budidaya.

Secara umum, data ini mencerminkan bahwa potensi bahari Kabupaten Badung tidak hanya bertumpu pada kelautan wisata, tetapi juga memiliki prospek pengembangan dalam sektor perikanan budidaya berbasis kolam dan sawah. Stabilitas produksi dan peningkatan nilai ekonominya menunjukkan adanya peluang pengembangan lebih lanjut, khususnya melalui intervensi teknologi, dukungan infrastruktur, dan akses pembiayaan. Potensi ini perlu diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah untuk memperkuat pilar ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 5

Luas Pemeliharaan Ikan, Produksi dan Nilainya di Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024

Uraian	Luas Pemeliharaan Ikan, Produksi dan Nilainya di Kabupaten Badung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas pemeliharaan ikan di tambak (Ha)	-	-	-	-	-
Luas pemeliharaan ikan di kolam (Ha)	43	44	44	45	31,00
Luas pemeliharaan ikan di sawah (Ha)	14	14	14	14	4,80
Produksi ikan di tambak (Ton)	-	-	-	-	-
Produksi ikan di kolam (Ton)	619	684	698	668	547,79
Produksi ikan di sawah (Ton)	5	8	8	15	15,54
Nilai produksi ikan di tambak (jutaan rupiah)	-	-	-	-	-
Nilai produksi ikan di kolam (jutaan rupiah)	9.919,09	10.908.400	15.098.510	16.965,57	13.915,42
Nilai produksi ikan di sawah (jutaan rupiah)	68,49	103.230	165.510	368,15	543,84

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Badung dalam beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, di antaranya:

1) Pemulihan Pariwisata dan Permintaan Pasar

Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata di Bali mengalami pemulihan signifikan pasca-pandemi COVID-19. Dengan meningkatnya kembali jumlah wisatawan,

permintaan terhadap produk perikanan, terutama untuk konsumsi di hotel, restoran, dan pusat kuliner, turut meningkat. Hal ini memberikan dampak positif bagi para pembudidaya ikan dalam meningkatkan skala produksi mereka.

2) Dukungan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Badung berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor perikanan melalui berbagai program, seperti bantuan sarana budidaya, pelatihan teknologi perikanan, hingga pemberdayaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam sektor perikanan.

Berdasarkan data dan analisis di atas, sektor perikanan di Kabupaten Badung memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah. Optimalisasi sektor perikanan kedepannya dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, seperti penguatan kelembagaan petani ikan, peningkatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi budidaya yang lebih maju, serta diversifikasi produk berbasis perikanan agar dapat menembus pasar yang lebih luas.

B. Potensi Wisata Alam

Kabupaten Badung memiliki potensi wisata alam yang sangat menonjol, sebagaimana tercermin dari tren kunjungan wisatawan nusantara selama periode 2020–2024. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Badung, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik, dari hanya 82.337 kunjungan pada tahun 2020 menjadi sekitar 698.614 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan yang kuat pascapandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan tajam kunjungan wisatawan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2. 6

Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Uraian	Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Badung (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	11.107	2.486	14.989	37.957	81.433
Februari	11.226	2.317	14.919	33.674	77.816
Maret	9.860	2.219	16.504	35.069	81.400
April	5.543	2.377	17.670	54.421	62.320
Mei	6.178	4.867	18.017	99.819	42.850
Juni	5.170	2.591	56.970	86.075	43.573
Juli	4.932	3.216	48.067	70.832	52.505
Agustus	5.970	2.477	29.118	55.352	62.320
September	5.337	2.821	64.617	25.632	44.769
Oktober	5.568	3.677	58.067	54.697	46.444
November	5.455	3.599	36.199	66.253	49.085
Desember	5.991	10.094	72.807	70.241	54.099
Tahunan/Rata-rata	82.337	42.741	447.944	690.022	698.614

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Data kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 82.337 jiwa, yang kemudian mengalami kontraksi tajam menjadi 42.741 jiwa pada tahun 2021. Penurunan drastis ini sangat terkait erat dengan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat secara nasional akibat pandemi COVID-19, yang berdampak langsung pada sektor pariwisata dan menyebabkan hampir seluruh aktivitas wisata terhenti.

Namun, mulai tahun 2022, sektor pariwisata domestik menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat, dengan kunjungan melonjak menjadi 447.944 jiwa, meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan rebound ekonomi dan sosial yang didorong oleh pelonggaran pembatasan perjalanan, percepatan vaksinasi nasional, serta meningkatnya minat wisatawan domestik terhadap destinasi wisata alam terbuka pascapandemi. Kabupaten Badung, dengan bentang alamnya yang kaya—meliputi pantai seperti Kuta, Seminyak, dan Jimbaran hingga kawasan dataran tinggi seperti Petang dan Plaga—menjadi destinasi pilihan karena menawarkan pengalaman wisata alam yang menyenangkan dan relatif aman secara kesehatan.

Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan total kunjungan mencapai 690.022 jiwa, dan meskipun tahun 2024

menunjukkan sedikit penurunan ke angka 698.614 jiwa, secara rata-rata bulanan terlihat adanya peningkatan yang merata hampir di seluruh bulan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bulan Januari hingga Maret 2024, dengan angka kunjungan bulanan yang mencapai lebih dari 81 ribu jiwa per bulan, hampir mendekati atau melebihi total tahunan pada masa pandemi. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi waktu liburan masyarakat, dari yang sebelumnya terkonsentrasi di pertengahan dan akhir tahun menjadi lebih menyebar ke awal tahun. Faktor-faktor penyebabnya antara lain promosi pariwisata berbasis kalender event daerah, penguatan sinergi antara pelaku usaha wisata dengan pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata.

Secara spasial, Kabupaten Badung juga diuntungkan oleh keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang menjadikannya sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan ke Bali. Hal ini memperbesar peluang Badung untuk menjadi tujuan pertama dan utama bagi wisatawan nusantara sebelum menjelajah ke wilayah lain di Bali. Dengan dukungan infrastruktur jalan yang baik dan konektivitas transportasi antardaerah yang memadai, Kabupaten Badung menjadi destinasi yang secara geografis dan logistik sangat strategis.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi berbasis alam dan budaya turut meningkatkan daya saing pariwisata Badung. Desa wisata, agrowisata, dan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pariwisata berkelanjutan. Kombinasi antara kekuatan alam, budaya, dan dukungan kelembagaan inilah yang mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan sektor wisata domestik di Badung.

Secara keseluruhan, data kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Badung, khususnya wisata alam, telah pulih secara signifikan dan bahkan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan positif yang stabil. Hal ini memperkuat posisi Badung sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Bali berbasis pariwisata domestik. Ke depan, perlu dilakukan diversifikasi produk wisata, peningkatan kualitas layanan, serta pelestarian

lingkungan agar pertumbuhan ini dapat dipertahankan secara inklusif dan berkelanjutan.

C. Potensi Hutan

Hutan memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan lingkungan di suatu wilayah. Kabupaten Badung, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, khususnya di sektor pariwisata dan infrastruktur, menghadapi tantangan dalam menjaga proporsi kawasan lindung agar tetap optimal. Keberadaan kawasan lindung dalam ekosistem hutan tidak hanya penting untuk mitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang mendukung sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap rasio luas kawasan lindung menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tata kelola lingkungan serta dampaknya terhadap kelestarian hutan.

Berdasarkan data rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan di Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir (2020-2024), terlihat adanya fluktuasi dalam persentase luas kawasan lindung. Pada tahun 2020, rasio luas kawasan lindung tercatat sebesar 73,15%, kemudian mengalami penurunan menjadi 71,19% pada tahun 2021 dan 70,46% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 rasio ini kembali meningkat menjadi 71,19% dan mencapai 73,71% pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Badung memiliki komitmen dalam menjaga kawasan lindung, meskipun dalam beberapa tahun terjadi sedikit penurunan yang kemudian diikuti oleh peningkatan kembali.

Tabel 2. 7

Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan (dalam %)	73,15	71,19	70,46	71,19	73,71

Sumber: Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2025

Penurunan rasio luas kawasan lindung yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti alih fungsi lahan hutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, aktivitas pariwisata, serta pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian atau permukiman. Kabupaten Badung sebagai salah satu pusat pariwisata utama di Bali menghadapi tekanan tinggi terhadap penggunaan lahan, terutama dengan adanya permintaan akan fasilitas wisata dan properti yang terus meningkat. Selain itu, faktor seperti kebakaran hutan, perambahan lahan secara ilegal, serta perubahan kebijakan tata ruang juga dapat berkontribusi terhadap fluktuasi dalam luas kawasan lindung.

Namun, peningkatan rasio kawasan lindung yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya upaya konservasi dan rehabilitasi hutan yang lebih intensif. Pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah strategis seperti program reboisasi, penguatan regulasi terkait kawasan lindung, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan. Selain itu, kesadaran masyarakat dan berbagai pihak terkait terhadap pentingnya menjaga keanekaragaman hayati serta ekosistem hutan juga berperan dalam meningkatkan kembali luas kawasan lindung.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Badung memiliki potensi hutan yang cukup besar dalam mendukung keseimbangan ekologis dan konservasi keanekaragaman hayati. Namun, tantangan dalam menjaga stabilitas kawasan lindung tetap ada, terutama di tengah tekanan pembangunan dan ekspansi sektor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk penerapan sistem zonasi yang lebih jelas, penguatan peran masyarakat dalam konservasi hutan, serta optimalisasi program ekowisata berbasis keberlanjutan.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan untuk permukiman merupakan kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk serta dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung lahan sangat penting dalam perencanaan pembangunan atau

perencanaan tata ruang karena dapat memperkirakan apakah ketersediaan lahan di wilayah tersebut mampu menampung kebutuhan lahan untuk permukiman hingga tahun perencanaan. Analisis daya dukung lahan untuk permukiman menggunakan konsep ketersediaan – kebutuhan lahan.

Ketersediaan lahan untuk permukiman (lahan permukiman eksisting dan potensi pengembangannya) di Kabupaten Badung yaitu 28.135,16 ha. Dengan ketersediaan lahan untuk permukiman tersebut, jumlah penduduk yang dapat ditampung dengan asumsi bahwa setiap penduduk harus memiliki ruang untuk melakukan aktivitasnya sebesar 100 m² /jiwa atau 0,01 Ha/jiwa dan untuk perumahan diasumsikan setiap rumah dihuni oleh 5 jiwa (berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang), adalah sebanyak 2.813.516 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2023 sebanyak 503.592 jiwa dan tahun 2043 sebanyak 839.482 jiwa. Dengan demikian status daya dukung lahan permukiman pada tahun 2023 sampai tahun 2043 masih surplus.

Status daya dukung lahan untuk permukiman di semua kecamatan pada tahun 2023 sampai 2043 masih surplus. Dari 62 desa/kelurahan di Kabupaten Badung, hanya terdapat satu desa/kelurahan yang defisit daya dukung lahan permukiman pada tahun 2023 yaitu Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta.

Tabel 2. 8

Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Badung

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)		Selisih Daya Tampung Penduduk (Jiwa)		Status Daya Dukung Lahan Permukiman	
				2023	2043	2023	2043	2023	2043
A	Kecamatan Abiansemal	4896,83	489.683	97.710	162.881	391.973	326.801	Surplus	Surplus
1	Abiansemal	265,42	26.542	8.018	13.366	18.524	13.176	Surplus	Surplus
2	Angantaka	216,4	21.640	4.140	6.901	17.500	14.739	Surplus	Surplus
3	Ayunan	164,73	16.473	2.516	4.194	13.957	12.279	Surplus	Surplus
4	Blahkiuh	415,96	41.596	6.320	10.535	35.276	31.060	Surplus	Surplus
5	Bongkasa	268,27	26.827	6.276	10.462	20.551	16.365	Surplus	Surplus
6	Bongkasa Pertiwi	201,12	20.112	2.633	4.389	17.479	15.723	Surplus	Surplus
7	Darmasaba	416,61	41.661	10.675	17.795	30.986	23.866	Surplus	Surplus
8	Dauh Yeh Cani	213,44	21.344	6.328	10.549	15.016	10.795	Surplus	Surplus
9	Jagapati	158,82	15.882	4.029	6.716	11.853	9.166	Surplus	Surplus
10	Mambal	223,1	22.310	5.353	8.923	16.957	13.387	Surplus	Surplus
11	Mekar Bhuwana	145,27	14.527	5.193	8.657	9.334	5.870	Surplus	Surplus
12	Punggul	180,51	18.051	3.305	5.509	14.746	12.541	Surplus	Surplus
13	Sangeh	257,65	25.765	4.776	7.962	20.989	17.804	Surplus	Surplus
14	Sedang	346,62	34.662	4.404	7.341	30.258	27.320	Surplus	Surplus
15	Selat	121,1	12.110	2.458	4.097	9.652	8.013	Surplus	Surplus
16	Sibang Gede	514,07	51.407	7.441	12.404	43.966	39.003	Surplus	Surplus
17	Sibang Kaja	296,89	29.689	6.836	11.396	22.853	18.293	Surplus	Surplus
18	Taman	490,84	49.084	7.009	11.684	42.075	37.400	Surplus	Surplus
B	Kecamatan Kuta	953,86	95.386	50.678	84.480	44.708	10.907	Surplus	Surplus
1	Kedonganan	121,56	12.156	7.364	12.276	4.792	-120	Surplus	Defisit
2	Kuta	322,47	32.247	17.643	29.411	14.604	2.836	Surplus	Surplus
3	Legian	129,1	12.910	5.372	8.955	7.538	3.955	Surplus	Surplus
4	Seminyak	290,76	29.076	3.870	6.451	25.206	22.624	Surplus	Surplus
5	Tuban	89,99	8.999	16.429	27.387	-7.430	-18.388	Defisit	Defisit
C	Kecamatan Kuta Selatan	6391,1	639109,53	115.020	191.737	524.090	447.372	Surplus	Surplus
1	Benoa	1184,01	118.401	32.759	54.609	85.642	63.792	Surplus	Surplus
2	Jimbaran	1428,1	142.810	49.119	81.881	93.691	60.929	Surplus	Surplus
3	Kutuh	693,03	69.303	5.257	8.763	64.046	60.540	Surplus	Surplus
4	Pecatu	1843,74	184.374	8.235	13.728	176.139	170.646	Surplus	Surplus
5	Tanjung Benoa	96,19	9.619	5.815	9.694	3.804	-75	Surplus	Defisit
6	Ungasan	1146,02	114.602	13.835	23.063	100.767	91.540	Surplus	Surplus
D	Kecamatan Kuta Utara	2660,17	266.017	80.174	133.649	185.843	132.368	Surplus	Surplus
1	Canggu	423,81	42.381	6.976	11.629	35.405	30.752	Surplus	Surplus
2	Dalung	511,48	51.148	23.109	38.522	28.039	12.626	Surplus	Surplus
3	Kerobokan	325,82	32.582	10.062	16.773	22.520	15.809	Surplus	Surplus
4	Kerobokan Kaja	343,3	34.330	17.408	29.019	16.922	5.311	Surplus	Surplus
5	Kerobokan Kelod	619,99	61.999	10.768	17.950	51.231	44.049	Surplus	Surplus
6	Tibubeneng	435,77	43.577	11.851	19.755	31.726	23.821	Surplus	Surplus
E	Kecamatan Mengwi	6233,23	623.323	127.389	212.356	495.934	410.967	Surplus	Surplus
1	Abianbase	268,01	26.801	7.022	11.706	19.779	15.096	Surplus	Surplus
2	Baha	507,96	50.796	3.950	6.585	46.846	44.211	Surplus	Surplus
3	Buduk	262,64	26.264	8.553	14.258	17.711	12.006	Surplus	Surplus
4	Cemagi	415,78	41.578	5.271	8.787	36.307	32.791	Surplus	Surplus
5	Gulingan	443,79	44.379	8.450	14.086	35.929	30.292	Surplus	Surplus
6	Kapal	457,65	45.765	11.639	19.402	34.126	26.363	Surplus	Surplus
7	Kekeran	373,77	37.377	3.837	6.396	33.540	30.981	Surplus	Surplus
8	Kuwum	148,73	14.873	3.134	5.224	11.739	9.649	Surplus	Surplus
9	Lukluk	372,25	37.225	8.025	13.378	29.200	23.847	Surplus	Surplus
10	Mengwi	184,22	18.422	8.087	13.481	10.335	4.941	Surplus	Surplus
11	Mengwitani	260,03	26.003	7.941	13.238	18.062	12.766	Surplus	Surplus
12	Munggu	510,6	51.060	7.255	12.094	43.805	38.966	Surplus	Surplus
13	Penarungan	388,62	38.862	7.126	11.879	31.736	26.983	Surplus	Surplus
14	Pererenan	292,14	29.214	3.268	5.448	25.946	23.767	Surplus	Surplus
15	Sading	211,25	21.125	8.293	13.824	12.832	7.301	Surplus	Surplus
16	Sembung	352,15	35.215	5.895	9.827	29.320	25.388	Surplus	Surplus
17	Sempidi	218,64	21.864	6.916	11.529	14.948	10.335	Surplus	Surplus
18	Sobangan	220,92	22.092	3.942	6.571	18.150	15.521	Surplus	Surplus
19	Tumbakbayuh	157,92	15.792	3.423	5.706	12.369	10.086	Surplus	Surplus
20	Werdi Bhuwana	186,17	18.617	5.362	8.938	13.255	9.678	Surplus	Surplus
F	Kecamatan Petang	6999,96	699.996	32.621	54.379	667.375	645.618	Surplus	Surplus
1	Belok Sidan	2162,95	216.295	5.587	9.313	210.708	206.982	Surplus	Surplus
2	Carangsari	529,77	52.977	6.011	10.020	46.966	42.956	Surplus	Surplus
3	Getasan	200,26	20.026	2.180	3.634	17.846	16.392	Surplus	Surplus
4	Pangsari	349,48	34.948	2.920	4.868	32.028	30.081	Surplus	Surplus
5	Pelaga	2205,2	220.520	6.649	11.084	213.871	209.436	Surplus	Surplus
6	Petang	703,65	70.365	4.435	7.393	65.930	62.972	Surplus	Surplus
7	Sulangai	848,66	84.866	4.839	8.067	80.027	76.799	Surplus	Surplus
	TOTAL	28135,16	2.813.516	505.615	841.525	2.311.947	1.976.077	Surplus	Surplus

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045

2. Daya Dukung Air

Daya dukung air ditentukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air ditentukan dengan metode koefisien limpasan berdasarkan penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sedangkan kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Dengan metode tersebut dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di wilayah tersebut dalam keadaan surplus atau defisit. Daya dukung air surplus apabila nilai ketersediaan lebih besar daripada nilai kebutuhan, dan daya dukung air defisit apabila ketersediaan air lebih kecil dibandingkan kebutuhan air.

Daya dukung air suatu wilayah adalah “perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air” di wilayah yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penentuan daya dukung air adalah metode koefisien limpasan yang didasarkan atas data penggunaan lahan, dan data curah hujan tahunan. Sementara kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak penduduk akan air yang ditentukan oleh besarnya populasi manusia di suatu wilayah. Merujuk Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang telah memberikan suatu angka konstanta tentang tingkat konsumsi air yang berasal dari tingkat konsumsi air kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan buah yang disetarakan dengan kebutuhan air dan juga dari pemanfaatan air-air virtual untuk menghasilkan satu satuan produk.

Ketersediaan (supply) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan besaran cadangan air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik) dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Ketersediaan air bersumber dari air permukaan dan air bawah tanah yang pada prinsipnya semua berasal dari air hujan. Tingkat ketersediaan air pada suatu wilayah, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu; curah hujan, koefisien limpasan tertimbang, dan luas wilayah. Sedangkan kebutuhan (demand) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan suatu gambaran besarnya kebutuhan air untuk keperluan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik)

dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil analisis data koefisien limpasan, luas wilayah, dan curah hujan diketahui ketersediaan air di Kabupaten Badung sebanyak 13.147.319 m³/tahun. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 503.592 jiwa dan tahun 2043 sebanyak 839.482 jiwa maka kebutuhan air di Kabupaten Badung pada tahun 2023 sebesar 22.057.330 m³/tahun dan tahun 2043 sebesar 36.769.317 m³/tahun. Dengan demikian status daya dukung air pada tahun 2023 adalah surplus. Status daya dukung air sampai tahun 2043 masih surplus. Jika dirinci menurut kecamatan, status daya dukung air di semua kecamatan sampai tahun 2043 masih surplus.

Tabel 2. 9
Status Daya Dukung Air Kabupaten Badung

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Air	Penduduk (Jiwa)		Kebutuhan Air (M3/Tahun)		Status Daya Dukung Air	
			2023	2043	2023	2043	2023	2043
A	Kecamatan Abiansemal	8.160.877	97.710	162.881	4.279.698	7.134.208	Surplus	Surplus
1	Abiansemal	389.876	8.018	13.366	351.188	585.427	Surplus	Defisit
2	Angantaka	313.519	4.140	6.901	181.332	462.033	Surplus	Defisit
3	Ayunan	317.879	2.516	4.194	110.201	302.278	Surplus	Surplus
4	Blahkiuh	241.975	6.320	10.535	276.816	183.703	Defisit	Surplus
5	Bongkasa	611.006	6.276	10.462	274.889	461.449	Surplus	Surplus
6	Bongkasa Pertiwi	394.063	2.633	4.389	115.325	458.237	Surplus	Defisit
7	Darmasaba	492.594	10.675	17.795	467.565	192.246	Surplus	Surplus
8	Dauh Yeh Cani	611.970	6.328	10.549	277.166	779.426	Surplus	Defisit
9	Jagapati	233.296	4.029	6.716	176.470	294.174	Surplus	Defisit
10	Mambal	327.719	5.353	8.923	234.461	390.844	Surplus	Defisit
11	Mekar Bhuwana	213.390	5.193	8.657	227.453	379.162	Defisit	Defisit
12	Punggul	265.152	3.305	5.509	144.759	241.312	Surplus	Surplus
13	Sangeh	633.667	4.776	7.962	209.189	348.715	Surplus	Surplus
14	Sedang	509.151	4.404	7.341	192.895	321.554	Surplus	Surplus
15	Selat	177.891	2.458	4.097	107.660	179.469	Surplus	Defisit
16	Sibang Gede	755.122	7.441	12.404	325.916	543.298	Surplus	Surplus
17	Sibang Kaja	951.609	6.836	11.396	299.417	499.124	Surplus	Surplus
18	Taman	720.997	7.009	11.684	306.994	511.756	Surplus	Surplus
B	Kecamatan Kuta	12.744.497	50.678	84.480	2.219.696	3.700.209	Surplus	Surplus
1	Kedonganan	1.083.108	7.364	12.276	322.543	537.676	Surplus	Surplus
2	Kuta	4.661.543	17.643	29.411	772.763	1.288.188	Surplus	Surplus
3	Legian	1.277.999	5.372	8.955	235.294	392.232	Surplus	Surplus
4	Seminyak	2.457.446	3.870	6.451	169.506	282.565	Surplus	Surplus
5	Tuban	3.264.401	16.429	27.387	719.590	1.199.549	Surplus	Surplus
C	Kecamatan Kuta Selatan	60.291.364	115.020	191.737	5.037.876	8.398.082	Surplus	Surplus
1	Benoa	15.527.104	32.759	54.609	1.434.844	2.391.869	Surplus	Surplus
2	Jimbaran	16.891.201	49.119	81.881	2.151.412	3.586.380	Surplus	Surplus
3	Kutuh	4.033.830	5.257	8.763	230.257	383.835	Surplus	Surplus
4	Pecatu	16.234.832	8.235	13.728	360.693	601.271	Surplus	Surplus
5	Tanjung Benoa	431.866	5.815	9.694	254.697	424.577	Surplus	Surplus
6	Ungasan	7.172.531	13.835	23.063	605.973	1.010.150	Surplus	Surplus
D	Kecamatan Kuta Utara	13.583.238	80.174	133.649	3.511.621	5.853.833	Surplus	Surplus
1	Canggu	2.480.497	6.976	11.629	305.549	509.346	Surplus	Surplus
2	Dalung	2.556.257	23.109	38.522	1.012.174	1.687.283	Surplus	Surplus
3	Kerobokan	478.603	10.062	16.773	440.716	734.668	Surplus	Defisit
4	Kerobokan Kaja	1.064.012	17.408	29.019	762.470	1.271.029	Surplus	Defisit
5	Kerobokan Kelod	4.306.691	10.768	17.950	471.638	786.216	Surplus	Surplus
6	Tibubeneng	2.697.178	11.851	19.755	519.074	865.290	Surplus	Surplus
E	Kecamatan Mengwi	15.416.091	127.389	212.356	5.579.638	9.301.193	Surplus	Surplus
1	Abianbase	798.989	7.022	11.706	307.564	512.705	Surplus	Surplus
2	Baha	746.146	3.950	6.585	173.010	288.406	Surplus	Surplus
3	Buduk	385.797	8.553	14.258	374.621	624.490	Surplus	Defisit
4	Cemagi	1.800.364	5.271	8.787	230.870	384.857	Surplus	Surplus
5	Gulingan	1.085.323	8.450	14.086	370.110	616.969	Surplus	Surplus
6	Kapal	672.255	11.639	19.402	509.788	849.811	Surplus	Defisit
7	Kekran	549.033	3.837	6.396	168.061	280.155	Surplus	Surplus
8	KuwuM	446.135	3.134	5.224	137.269	228.826	Surplus	Surplus
9	Lukluk	546.796	8.025	13.378	351.495	585.938	Surplus	Defisit
10	Mengwi	785.228	8.087	13.481	354.211	590.465	Surplus	Surplus
11	Mengwitani	1.259.859	7.941	13.238	347.816	579.805	Surplus	Surplus
12	Munggu	1.217.707	7.255	12.094	317.769	529.717	Surplus	Surplus
13	Penarungan	570.848	7.126	11.879	312.119	520.298	Surplus	Surplus
14	Pererenan	703.023	3.268	5.448	143.138	238.610	Surplus	Surplus
15	Sading	310.310	8.293	13.824	363.233	605.506	Surplus	Defisit
16	Sembung	1.051.044	5.895	9.827	258.201	430.418	Surplus	Surplus
17	Sempidi	654.874	6.916	11.529	302.921	504.966	Surplus	Surplus
18	Sobangan	1.045.097	3.942	6.571	172.660	287.822	Surplus	Surplus
19	Tumbakbayuh	231.968	3.423	5.706	149.927	249.927	Surplus	Defisit
20	Werd Bhuwana	555.294	5.362	8.938	234.856	391.502	Surplus	Surplus
F	Kecamatan Petang	23.951.251	32.621	54.379	1.428.800	2.381.793	Surplus	Surplus
1	Belok Sidan	8.059.373	5.587	9.313	244.711	407.930	Surplus	Surplus
2	Carangsari	1.580.932	6.011	10.020	263.282	438.888	Surplus	Surplus
3	Getasan	597.943	2.180	3.634	95.484	159.171	Surplus	Surplus
4	Pangsan	1.042.382	2.920	4.868	127.896	213.201	Surplus	Surplus
5	Pelaga	10.390.425	6.649	11.084	291.226	485.471	Surplus	Surplus
6	Petang	1.033.596	4.435	7.393	194.253	323.818	Surplus	Surplus
7	Sulangai	1.246.601	4.839	8.067	211.948	353.315	Surplus	Surplus
	TOTAL	134.147.319	505.615	841.525	22.059.353	36.771.360	Surplus	Surplus

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045

3. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Kabupaten Badung

Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditentukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion, yang meliputi jumlah populasi, potensi dan ketersediaan sumber daya alam, serta bentuk pemanfaatan sumber daya alam untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan: Penghitungan ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun; Ketersediaan air dapat berasal dari air permukaan dan air tanah tidak tertekan atau air tanah bebas; dan Kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air yang mempengaruhi ketersediaan air, periode 1996 sampai dengan 2020.

a) Ketersediaan Air

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, jumlah ketersediaan air di Provinsi Bali adalah 2.078.807.392,80 m³/tahun. Ketersediaan air menurut kabupaten/kota berkisar 34.779.742,42 – 491.070.463,68 m³/tahun. Ketersediaan air di Kabupaten Badung sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun atau 6,08% dari total ketersediaan air di Bali.

b) Kebutuhan Air

Jumlah kebutuhan air di Provinsi Bali yaitu 4.061.324.302,72 m³/tahun, terdiri dari kebutuhan air domestik sebanyak 373.035.456,00 m³/tahun (9,19%) dan kebutuhan lahan untuk pertanian, perikanan dan perkebunan sebanyak 3.688.288.846,72 m³/tahun (90,81%). Kebutuhan air menurut kabupaten/kota berkisar 103.142.016,67 – 834.623.841,58 m³/tahun.

Kebutuhan air di Kabupaten Badung adalah 382.229.377,95 m³/tahun atau 9,41% dari total kebutuhan air di Bali. Kebutuhan air untuk domestik sebanyak

47.361.368,60 m³/tahun atau 12,70% dari total kebutuhan air domestik di Bali. Sedangkan kebutuhan air untuk pertanian, perikanan dan perkebunan sebanyak 334.868.008,35 m³/tahun atau 9,08% dari total kebutuhan air untuk pertanian, perikanan dan Perkebunan di Bali.

c) Indikasi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan jumlah ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air, indikasi status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Badung sebagian besar wilayahnya telah “Terlampau” yaitu mencapai 93,10% dari total luas wilayah sedangkan wilayah yang “Belum Terlampau” sebesar 6,90%. Jumlah defisit air di Kabupaten Badung mencapai (-)255.912.874,36 m³/tahun atau 202,60% dari sediaan air sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun.

Tabel 2. 10

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Sediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air M3/Tahun)			Status		
			Domestik	Lahan	Jumlah		Terlampau	Belum Terlampau
1	Jembrana	324.464.970,07	27.396.230,40	405.193.489,70	432.589.720,10	Terlampau	49.194,72	35.841,97
2	Tabanan	391.015.984,65	39.881.203,20	794.742.638,38	834.623.841,58	Terlampau	72.916,14	11.845,07
3	Badung	126.316.503,59	47.361.369,60	334.868.008,35	382.229.377,95	Terlampau	37.715,98	2.797,44
4	Gianyar	124.233.000,84	44.525.203,20	427.216.531,65	471.741.734,85	Terlampau	36.628,03	5,34
5	Klungkung	142.389.489,81	17.880.566,40	211.093.343,57	228.973.909,97	Terlampau	24.824,61	6.397,42
6	Bangli	165.502.462,10	22.351.852,80	314.739.002,03	337.090.854,83	Terlampau	44.504,46	8.292,81
7	Karangasen	279.034.775,64	42.544.828,80	482.221.332,80	524.766.161,60	Terlampau	69.120,74	14.649,47
8	Buleleng	491.070.463,68	68.427.331,20	677.739.353,97	746.166.685,17	Terlampau	86.403,83	45.674,55
9	Denpasar	34.779.742,42	62.666.870,40	40.475.146,27	103.142.016,67	Terlampau	11.650,43	713,36
	Bali	2.078.807.392,80	373.035.456,00	3.688.288.846,72	4.061.324.302,72	Terlampau	432.958,95	126.217,43

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045

Tabel 2. 11
Defisit Air di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Sediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Defisit Air	
				Jumlah (M3/Tahun)	Persentase (%)
.1	Jembrana	324.464.970,07	432.589.720,10	-108.124.750,03	-33,32
.2	Tabanan	391.015.984,65	834.623.841,58	-443.607.856,92	-113,45
3	Badung	126.316.503,59	382.229.377,95	-255.912.874,36	-202,6
.4	Gianyar	124.233.000,84	471.741.734,85	-347.508.734,01	-279,72
.5	Klungkung	142.389.489,81	228.973.909,97	-86.584.420,17	-60,81
.6	Bangli	165.502.462,10	337.090.854,83	-171.588.392,72	-103,68
.7	Karangasen	279.034.775,64	524.766.161,60	-245.731.385,96	-88,06
.8	Buleleng	491.070.463,68	746.166.685,17	-255.096.221,49	-51,95
.9	Denpasar	34.779.742,42	103.142.016,67	-68.362.274,25	-196,56
.	Bali	2.078.807.392,80	4.061.324.302,72	-1.982.516.909,92	-95,37

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024, Kabupaten Badung mencatat skor IKP sebesar 92,9, menempatkannya pada peringkat ke-5 secara nasional. Capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Badung memiliki tingkat ketahanan pangan yang sangat tinggi, sejalan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Bali, seperti Kota Denpasar (96,37), Gianyar (92,77), dan Tabanan (92,51). Tingginya skor IKP ini menunjukkan bahwa Badung memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat dalam hal ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakatnya.

Tabel 2. 12
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di
Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/Kota	IKP	Peringkat	Kelompok IKP
Jembrana	87,64	60	6
Tabanan	92,51	9	6
Badung	92,9	5	6
Gianyar	92,77	7	6
Klungkung	87,47	67	6
Bangli	77,19	297	6
Karangasem	83,97	142	6
Buleleng	83,26	155	6
Kota Denpasar	96,37	1	6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Keunggulan Kabupaten Badung dalam ketahanan pangan didukung oleh beberapa faktor utama. Infrastruktur pertanian yang memadai serta sistem distribusi pangan yang efisien mendukung akses pangan yang stabil bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan pangan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan skor IKP yang tinggi. Peran sektor pariwisata yang dominan di Kabupaten Badung juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang berdampak pada daya beli yang lebih baik. Di samping itu, meskipun terjadi urbanisasi yang pesat, masih terdapat lahan pertanian produktif yang mendukung produksi pangan lokal. Faktor lain yang turut berperan adalah keberagaman sumber pangan dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, yang memastikan ketahanan pangan tetap terjaga.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan juga terlihat melalui program penyuluhan pertanian, penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien, serta pengembangan pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan seperti alih fungsi lahan pertanian akibat pertumbuhan wilayah dan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah masih perlu diantisipasi dengan strategi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penguatan produksi pangan berbasis lokal, diversifikasi sumber pangan, serta pemanfaatan inovasi dalam sektor pertanian dan distribusi pangan menjadi hal yang krusial dalam menjaga ketahanan pangan Kabupaten Badung kedepan.

B. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Berdasarkan data prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, Kabupaten Badung menunjukkan tren yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, dengan angka sebesar 2,61% pada tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 4,88% pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 4,66% pada tahun 2022, dan mengalami penurunan signifikan ke 1,23% pada tahun 2023. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Bali, mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif baik di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung

memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pangan yang berkualitas, baik dari segi ketersediaan maupun keterjangkauan harga, dibandingkan dengan beberapa wilayah lain yang masih menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Tabel 2. 13

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali (%)

No.	Kota/Kabupaten	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/kota (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembrana	6,59	9,9	11,38	7,6	n/a
2	Tabanan	4,12	6,35	8,57	3,15	n/a
3	Badung	2,61	4,48	4,66	1,23	n/a
4	Gianyar	2,03	3,92	3,89	1,66	n/a
5	Klungkung	5,03	10,9	6,83	4,94	n/a
6	Bangli	4,16	7,25	6,68	3,71	n/a
7	Karangasem	6,71	13,42	13,18	8,43	n/a
8	Buleleng	5,47	10,15	11,74	7,64	n/a
9	Kota Denpasar	2,52	5,79	6,02	1,7	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Badung antara lain adalah daya beli masyarakat yang tinggi, didorong oleh sektor pariwisata yang berkembang pesat, serta ketersediaan berbagai sumber pangan yang mencukupi. Infrastruktur distribusi pangan yang baik, kemudahan akses terhadap pasar, serta dukungan pemerintah dalam program ketahanan pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas konsumsi pangan. Selain itu, Kabupaten Badung memiliki akses yang lebih baik terhadap bahan pangan berkualitas dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya, yang masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan produksi pangan lokal. Dengan adanya konektivitas yang baik antarwilayah, distribusi pangan ke Kabupaten Badung juga menjadi lebih lancar, sehingga menekan angka ketidacukupan konsumsi pangan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan pangan di tengah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang dapat berdampak pada alih fungsi lahan pertanian. Perubahan tata guna lahan menjadi kawasan pariwisata dan hunian mewah berpotensi

mengurangi luas lahan produktif untuk pertanian, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi ketahanan pangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan pangan berbasis produksi lokal, optimalisasi rantai distribusi, serta edukasi masyarakat terkait pola konsumsi pangan yang sehat harus terus dilakukan guna memastikan ketidakcukupan konsumsi pangan tetap berada pada level minimal. Penguatan sektor pertanian modern, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu terus diperhatikan oleh pemerintah daerah guna mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung.

C. Konsumsi Listrik Perkapita

Data konsumsi listrik di Kabupaten Badung dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mencerminkan dinamika pembangunan wilayah serta pertumbuhan aktivitas ekonomi dan kependudukan. Pada tahun 2020, total produksi listrik tercatat sebesar 1.762.459,73 MWh, yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 1.600.003,34 MWh. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan melambatnya kegiatan ekonomi, berkurangnya aktivitas sektor jasa dan pariwisata, serta penurunan konsumsi energi oleh sektor komersial.

Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, produksi listrik kembali mengalami peningkatan secara bertahap, masing-masing sebesar 2.157.352,29 MWh, 2.668.578,16 MWh, hingga mencapai 3.090.968 MWh pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya pemulihan ekonomi yang kuat, ditopang oleh peningkatan aktivitas sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta pertumbuhan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Badung. Sejalan dengan itu, listrik yang terjual juga meningkat tajam, dari 1.570.072,61 MWh di tahun 2021 menjadi 2.965.921 MWh di tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi listrik masyarakat dan dunia usaha.

Menarik untuk dicermati adalah meningkatnya angka susut atau kehilangan energi listrik (losses), yang naik dari 10.248,16 MWh pada 2020 menjadi 113.984 MWh pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan dua hal utama: pertama, secara

teknis meningkatnya beban jaringan dan distribusi akibat pertumbuhan permintaan yang tinggi; dan kedua, secara kelembagaan, adanya tantangan dalam efisiensi distribusi energi, baik akibat teknis (misalnya kabel usang, jarak distribusi) maupun non-teknis (pencurian listrik atau pencatatan tidak akurat). Meskipun demikian, peningkatan angka listrik yang dipakai sendiri oleh penyedia (dari 3.526,16 MWh di tahun 2020 menjadi 11.063 MWh di tahun 2024) juga menggambarkan adanya ekspansi atau peningkatan operasional instalasi kelistrikan di wilayah ini.

Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa konsumsi listrik di Kabupaten Badung tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta kebutuhan terhadap energi yang lebih besar akibat meningkatnya urbanisasi, ekspansi infrastruktur, dan kemajuan teknologi. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Badung perlu memperkuat sinergi dengan penyedia listrik untuk memastikan bahwa pertumbuhan konsumsi ini diimbangi dengan keandalan pasokan, efisiensi distribusi, dan adopsi sumber energi baru dan terbarukan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 14

Konsumsi Listrik di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Listrik (MWh)	1.762.459,73	1.600.003,34	2.157.352,29	2.668.578,16	3.090.968
Listrik Terjual (MWh)	1.718.927,93	1.570.072,61	2.083.796,18	2.563.459,93	2.965.921
Dipakai Sendiri (MWh)	3.526,16	5.303,79	7.937,67	9.638,92	11.063
Susut/Hilang (MWh)	10.248,16	24.626,94	65.618,43	95.479,30	113.984

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2025

Apabila dikaitkan dengan konsumsi listrik per kapita, peningkatan konsumsi listrik secara keseluruhan juga mencerminkan pertumbuhan konsumsi individu yang semakin tinggi, terutama seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan sektor ekonomi. Dengan populasi yang terus bertambah serta meningkatnya standar hidup masyarakat, kebutuhan listrik per kapita di Kabupaten Badung diproyeksikan akan terus meningkat. Hal ini juga didorong oleh

penetrasi teknologi yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan peralatan elektronik yang lebih pesat.

Konsumsi listrik yang terus meningkat di Kabupaten Badung merupakan indikator penting yang merefleksikan pertumbuhan ekonomi, ekspansi wilayah terbangun, serta naiknya kebutuhan rumah tangga dan sektor usaha terhadap energi. Hal ini menuntut perencanaan energi yang adaptif dan inklusif agar ketersediaan energi dapat menjawab kebutuhan masa depan secara berkelanjutan.

D. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Bersih

Jumlah pelanggan air bersih di Kabupaten Badung mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan air bersih tercatat sebanyak 73.281 pelanggan, yang kemudian meningkat secara bertahap menjadi 75.103 pelanggan pada 2021, 75.455 pelanggan pada 2022, dan mencapai 80.792 pelanggan pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses terhadap layanan air bersih, yang kemungkinan besar didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, ekspansi jaringan distribusi oleh penyedia layanan air bersih, serta peningkatan pembangunan infrastruktur perumahan dan komersial di wilayah ini.

Tabel 2. 15

Banyaknya Pelanggan Air Bersih Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali 2020-2024

Kota/Kabupaten	Banyaknya Pelanggan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	24.461	25.073	25.428		26.482
Kab. Tabanan	58.569	60.328	60.959		67.545
Kab. Badung	73.281	75.103	75.455		80.792
Kab. Gianyar	60.084	60.605	60.301		61.062
Kab. Klungkung	42.059	36.255	37.554		41.388
Kab. Bangli	18.899	21.003	21.331		24.054
Kab. Karangasem	38.348	40.693	41.724		43.531
Kab. Buleleng	67.402	73.754	74.961		83.724
Kota Denpasar	87.399	89.126	181.941		91.605
Provinsi Bali	470.502	481.940	579.654		520.183

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025

Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki jumlah pelanggan air bersih yang

relatif tinggi, meskipun masih di bawah Kota Denpasar yang mencatat angka 87.399 pelanggan pada 2020 dan meningkat menjadi 91.605 pelanggan pada 2024. Sebagai pusat pariwisata utama di Bali, Kabupaten Badung memiliki kebutuhan air bersih yang tinggi, tidak hanya untuk rumah tangga tetapi juga untuk sektor perhotelan, restoran, dan usaha jasa lainnya yang mendukung industri pariwisata. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah pelanggan air bersih di wilayah ini.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali, terlihat adanya variasi dalam jumlah pelanggan air bersih. Kabupaten dengan populasi besar seperti Buleleng dan Gianyar juga mencatat angka pelanggan yang tinggi, masing-masing mencapai 83.724 pelanggan dan 61.062 pelanggan pada 2024. Sementara itu, kabupaten dengan kepadatan penduduk lebih rendah dan infrastruktur yang lebih terbatas seperti Bangli dan Klungkung menunjukkan angka pelanggan yang relatif lebih kecil. Kabupaten Bangli misalnya, hanya memiliki 24.054 pelanggan pada 2024, jauh lebih rendah dibandingkan Badung. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor geografis, tingkat urbanisasi, serta kemampuan daerah dalam membangun infrastruktur air bersih yang memadai.

Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun 2023, data mengenai jumlah pelanggan air bersih tidak tersedia di BPS, sehingga tren pada tahun tersebut tidak dapat dianalisis secara pasti. Meskipun demikian, berdasarkan pola pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa terjadi peningkatan yang relatif stabil dalam jumlah pelanggan air bersih di Kabupaten Badung dan kabupaten lainnya.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa cakupan layanan air bersih di Kabupaten Badung semakin meluas dan telah menjangkau sebagian besar rumah tangga, mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur dasar.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data dalam Tabel 2.17, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Badung pada tahun 2024 tercatat sebesar 69,44, lebih rendah dibandingkan dengan rata-

rata IKLH Provinsi Bali yang mencapai 74,88. Perbedaan ini mencerminkan adanya tantangan spesifik yang dihadapi Kabupaten Badung dalam menjaga kualitas lingkungannya. Jika ditinjau dari indikator komponen penyusunnya, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Badung berada pada angka 59,84, lebih rendah dari Provinsi Bali yang mencapai 60,84. Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Badung relatif tinggi, yaitu 91,52, hampir setara dengan Provinsi Bali yang mencatat 92,12. Sementara itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Badung hanya 45,08, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali yang berada di angka 46,49. Perbedaan-perbedaan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor lingkungan dan aktivitas manusia di wilayah tersebut.

Tabel 2. 16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dan Provinsi Bali
2024

IKLH dan Indikatornya	2024
IKLH Provinsi Bali	74,88
Indeks Kualitas Air	60,84
Indeks Kualitas Udara	92,12
Indeks Kualitas Air Laut	86,68
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46,49
IKLH Kabupaten Badung	69,44
Indeks Kualitas Air	59,84
Indeks Kualitas Udara	91,52
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	45,08

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 2025

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya IKLH Kabupaten Badung adalah tekanan yang tinggi terhadap penggunaan lahan akibat urbanisasi dan perkembangan sektor pariwisata. Sebagai pusat destinasi wisata utama di Bali, Badung mengalami konversi lahan yang signifikan, terutama di kawasan pesisir dan wilayah perkotaan, yang berimplikasi pada rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Konversi lahan hijau menjadi area terbangun, seperti hotel, vila, dan infrastruktur pariwisata lainnya, menyebabkan penurunan kapasitas daya dukung lingkungan dalam menyerap emisi karbon, mengatur siklus hidrologi, serta menjaga keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, meskipun Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Badung cukup tinggi dan mendekati rata-rata provinsi, faktor ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh keberadaan angin laut yang membantu penyebaran polutan serta kebijakan lingkungan yang lebih ketat di kawasan wisata internasional seperti Nusa Dua dan Kuta. Namun, tingginya aktivitas transportasi dan industri pariwisata tetap menjadi ancaman yang perlu diantisipasi untuk mempertahankan kualitas udara dalam jangka panjang.

Sementara itu, rendahnya Indeks Kualitas Air menunjukkan adanya potensi pencemaran air yang lebih serius di Kabupaten Badung dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingginya konsumsi air untuk kebutuhan pariwisata, serta potensi pencemaran dari limbah domestik dan industri yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah wisatawan dan ekspansi sektor perhotelan telah meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Limbah cair yang tidak tertangani dengan optimal dapat berdampak pada menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah, yang pada akhirnya berpengaruh pada ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat.

Gambar 2. 3

Perkembangan IKLH Kabupaten Badung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Secara keseluruhan, kondisi IKLH Kabupaten Badung yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait dengan kualitas air dan tutupan lahan. Untuk meningkatkan indeks tersebut, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan tata ruang, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kapasitas infrastruktur lingkungan.

B. Timbulan Sampah yang Ditangani

Selama periode 2020–2024, penanganan timbulan sampah di Kabupaten Badung menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang tertangani sebesar 57.143,52 ton, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 116.731,24 ton dan stabil di angka 119.474,58 ton pada tahun 2022. Peningkatan signifikan pada periode ini mencerminkan adanya perbaikan kapasitas pengelolaan, baik melalui penguatan armada, sistem pengumpulan, maupun meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan persampahan.

Pada tahun 2023, capaian penanganan sampah mencapai 195.222,49 ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan daerah dalam memperluas cakupan layanan dan memperbaiki alur distribusi sampah ke fasilitas pengolahan. Namun, pada tahun 2024 volume sampah yang tertangani menurun menjadi 146.949,00 ton, atau berkurang sekitar 24,7% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kinerja, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur persampahan, ketidakseimbangan antara pertumbuhan timbulan sampah dan peningkatan kapasitas layanan, serta masih terbatasnya penerapan prinsip pengurangan sampah dari sumbernya (*reduce, reuse, recycle*).

Fluktuasi capaian ini memberikan sinyal bahwa meskipun upaya pengelolaan sampah di Badung telah menunjukkan kemajuan, keberlanjutan kinerja belum sepenuhnya terjaga. Tanpa intervensi kebijakan yang konsisten, risiko penumpukan sampah, tekanan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta dampak lingkungan dan sosial yang menyertainya akan meningkat.

Tabel 2. 17

Timbulan Sampah yang ditangani Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Uraian	Jumlah timbulan (Dalam ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah ditangani	57.143,52	116.731,24	119.474,58	195.222,49	146.949,00

Sumber: Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2025

Kabupaten Badung merupakan salah satu pusat ekonomi dan pariwisata utama di Provinsi Bali, sehingga pertumbuhan jumlah timbulan sampah sangat erat kaitannya dengan peningkatan jumlah wisatawan serta perkembangan sektor perhotelan, restoran, dan pusat perbelanjaan. Sektor pariwisata menjadi kontributor utama dalam produksi limbah di daerah ini, terutama karena tingginya konsumsi barang sekali pakai, makanan, dan kemasan plastik dari industri perhotelan dan restoran. Selama periode 2020–2021, peningkatan volume sampah yang ditangani dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, di mana aktivitas bisnis, pariwisata, dan konsumsi masyarakat mulai kembali meningkat setelah mengalami perlambatan signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2023, lonjakan drastis dalam jumlah sampah yang ditangani dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung setelah pembukaan kembali sektor pariwisata secara penuh. Dengan jumlah kunjungan yang meningkat, volume limbah dari hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan juga meningkat, sehingga mempengaruhi kapasitas pengelolaan sampah yang harus ditingkatkan.

Selain faktor pariwisata, peningkatan jumlah sampah yang ditangani juga mencerminkan perbaikan dalam sistem pengelolaan limbah di Kabupaten Badung. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, seperti optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), peningkatan armada pengangkutan sampah, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam pengelolaan limbah. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali

pakai juga mulai menunjukkan dampaknya, meskipun tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi sirkular masih cukup besar. Namun, meskipun volume sampah yang ditangani terus meningkat, hal ini juga menunjukkan bahwa produksi sampah di Kabupaten Badung masih sangat tinggi, yang menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Strategi kedepan perlu yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Badung, mencakup pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, peningkatan kapasitas pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah. Pemerintah daerah juga perlu terus mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti fasilitas daur ulang skala besar dan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, guna mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA).

C. Persentase Jumlah Sampah Tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Badung menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sampah yang tertangani tercatat sebesar 66,85%, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 92,60% dan kembali naik pada tahun 2022 hingga mencapai 93,33%. Namun, pada tahun 2023 persentase ini mengalami penurunan drastis menjadi 63,53%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 73,57%.

Tabel 2. 18
Persentase Jumlah Sampah Tertangani Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah sampah yang tertangani	66.85	92.60	93,33	63,53	73,57

Sumber: Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2025

Peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan persampahan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh perluasan cakupan layanan pengangkutan sampah, penambahan armada, pembangunan dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), serta peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, program sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penegakan regulasi terkait pembuangan sampah liar juga turut mendorong capaian positif tersebut.

Penurunan tajam pada tahun 2023 menjadi indikasi adanya hambatan struktural dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi yang pesat meningkatkan volume timbulan sampah, terutama dari sektor komersial seperti hotel, restoran, dan objek wisata, sehingga melampaui kapasitas pengelolaan yang tersedia. Selain itu, keterbatasan kapasitas TPA yang mulai mendekati batas daya tampung juga berpotensi memperlambat proses pengolahan dan mengurangi efektivitas sistem persampahan.

Kenaikan kembali pada tahun 2024 menjadi 73,57% menunjukkan adanya upaya pemulihan kinerja, meskipun belum mencapai level optimal seperti tahun 2021–2022. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kebijakan operasional, dinamika timbulan sampah, serta partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pada periode 2021–2022 membuktikan bahwa peningkatan kapasitas layanan dan dukungan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan persentase sampah tertangani secara signifikan. Sebaliknya, penurunan tahun 2023 menjadi peringatan bahwa sistem pengelolaan sampah masih rentan terhadap tekanan dari faktor eksternal, seperti lonjakan volume sampah atau keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah berkelanjutan untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, memperluas cakupan layanan, mendorong pengurangan timbulan dari sumbernya, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung terwujudnya sistem persampahan yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Badung menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, Kabupaten Badung memiliki skor IRB sebesar 101,81 dan terus mengalami penurunan menjadi 101,81 (2021), 106,75 (2022), 102,92 (2023), hingga mencapai 94,74 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah yang cukup berhasil dalam mengelola dan memitigasi risiko bencana secara sistematis dan terukur, termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur mitigasi, serta pemetaan kawasan rawan bencana.

Jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, capaian IRB Kabupaten Badung pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tabanan (122,13) dan Kabupaten Gianyar (122,96), yang menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Badung secara relatif lebih rendah. Bahkan, dibandingkan dengan Kota Denpasar yang mencatat skor 90,13, Kabupaten Badung hanya berselisih sedikit, yang menandakan bahwa kedua wilayah ini memiliki karakteristik kerentanan dan kapasitas yang hampir setara dalam menghadapi potensi bencana.

Penurunan nilai IRB Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir juga lebih signifikan dibandingkan rata-rata penurunan yang terjadi di kabupaten lainnya di Bali. Hal ini memperkuat posisi Kabupaten Badung sebagai wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, namun juga memiliki perhatian tinggi terhadap aspek ketangguhan wilayah dalam menghadapi risiko bencana.

Tabel 2. 19

Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana (IRB)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab Jembrana	160,41	152,62	134,94	150,15	133,06
2	Kab Tabanan	153,27	153,27	121,93	136,90	122,13
3	Kab Buleleng	102,05	92,45	91,81	91,49	86,02
4	Kab Gianyar	129,79	129,79	132,38	129,03	122,96
5	Kab Klungkung	133,42	124,22	120,29	126,93	124,33

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana (IRB)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Kab Bangli	139,46	133,69	116,88	125,04	117,37
7	Kab Karangasem	137,94	123,15	103,27	121,24	110,78
8	Kab Badung	101,81	101,81	106,75	102,92	94,74
9	Kota Denpasar	106,70	106,70	98,98	98,18	90,13

Sumber: INARisk BNPB melalui situs <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> yang diakses tahun 2025

Fluktuasi IRB di Kabupaten Badung dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, termasuk karakteristik geografis, tingkat urbanisasi, serta upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Badung memiliki topografi yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga kawasan berbukit, yang membuatnya rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir di daerah pesisir, longsor di wilayah perbukitan, serta ancaman gempa bumi dan tsunami mengingat lokasinya yang berada di zona tektonik aktif. Selain itu, Kabupaten Badung merupakan pusat pariwisata utama di Bali, dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, terutama di kawasan Kuta, Nusa Dua, dan Jimbaran. Peningkatan jumlah bangunan dan infrastruktur di kawasan tersebut berpotensi meningkatkan risiko terhadap bencana, terutama jika tidak disertai dengan perencanaan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana.

Meskipun demikian, tren yang relatif stabil dalam IRB menunjukkan bahwa Kabupaten Badung telah memiliki langkah-langkah mitigasi yang cukup efektif dalam mengurangi dampak bencana. Namun, peningkatan IRB pada tahun 2022 dapat menjadi indikasi bahwa faktor-faktor seperti degradasi lingkungan akibat konversi lahan, peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan, serta perubahan iklim mulai memberikan dampak yang signifikan terhadap risiko bencana di Kabupaten Badung.

Sebagai kesimpulan, meskipun Kabupaten Badung memiliki IRB yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Bali, upaya pengelolaan risiko bencana tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mitigasi bencana, termasuk penguatan regulasi tata ruang berbasis risiko bencana, peningkatan infrastruktur adaptif terhadap bencana, serta edukasi masyarakat dan sektor pariwisata dalam menghadapi potensi bencana.

2.1.1.7. Demografi

A. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan moderat, dari 548,19 ribu jiwa pada 2020 menjadi 587,57 ribu jiwa pada 2024. Sejalan dengan itu, kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan dari 1.31 jiwa/m² pada 2020 menjadi 1.28 jiwa/m² pada 2024, dengan sedikit fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara spasial, Kecamatan Kuta mencatat kepadatan penduduk tertinggi secara konsisten, mencapai 3,31 jiwa/m² pada 2024, meskipun wilayahnya sangat sempit (2,20 km²). Kepadatan tinggi ini mencerminkan konsentrasi kegiatan pariwisata dan ekonomi yang padat di kawasan tersebut.

Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara juga memiliki kepadatan yang relatif tinggi, masing-masing 1,21 jiwa/m² dan 2,65 jiwa/m² pada 2024, menunjukkan tren urbanisasi yang semakin merata di wilayah pesisir selatan.

Sebaliknya, Kecamatan Petang tetap menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 0,25 jiwa/m² pada 2024, meskipun secara jumlah penduduk juga menunjukkan pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih didominasi oleh lahan-lahan kosong atau kawasan konservasi dan pertanian.

Tabel 2. 20

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribuan jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribuan jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kuta Selatan	101,13	131.139	1.297	131,40	1.299	131,40	1.299	118,1	1.185	122,8	1.214
2	Kuta	17,52	59.160	3.377	59,30	3.383	59,30	3.385	56,8	3.271	58,0	3.310
3	Kuta Utara	33,86	95.189	2.811	95,40	2.817	95,40	2.817	87,8	2.611	90,0	2.658
4	Mengwi	82,00	132.786	1.619	133,10	1.623	133,20	1.624	131,6	1.614	133,9	1.632
5	Abiansemal	69,01	98.904	1.433	99,10	1.436	99,10	1.436	98,9	1.440	100,0	1.449
6	Petang	115,00	31.013	270	31,10	270	31,10	270	32,8	287	33,1	288
	Jumlah	418,52	548.191	1.310	549,40	1.312	549,50	1.313	526,0	1.267	537,7	1.285

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan merupakan pusat pariwisata utama di Kabupaten Badung, yang menarik banyak penduduk baik sebagai pekerja sektor pariwisata maupun penduduk urban yang menetap di sekitar kawasan ini. Infrastruktur yang lebih maju, aksesibilitas yang baik, serta peluang ekonomi yang lebih besar menjadikan wilayah-wilayah ini lebih padat dibandingkan kecamatan lainnya. Di sisi lain, Kecamatan Mengwi dan Abiansemai memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan daerah Kuta, meskipun jumlah penduduknya cukup besar. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik wilayah yang lebih luas dengan tata guna lahan yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Kecamatan Petang, dengan luas wilayah terbesar, memiliki kepadatan yang sangat rendah karena wilayah ini lebih banyak terdiri atas kawasan hutan dan perbukitan, serta memiliki aksesibilitas yang lebih terbatas dibandingkan kecamatan lainnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, distribusi penduduk yang tidak merata ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur, penyediaan perumahan, serta pengelolaan kawasan perkotaan agar tidak terjadi tekanan berlebih pada wilayah-wilayah yang memiliki kepadatan tinggi. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kapasitas daya dukung wilayah dapat lebih dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung berdasarkan hasil sensus penduduk dalam periode 1961-2020, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada periode 1961-1971, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,60% per tahun, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 2,34% pada periode 1971-1980. Selanjutnya, dalam dekade 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk menurun cukup tajam hingga mencapai 1,23%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan pola migrasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah lain yang lebih menarik sebagai tujuan urbanisasi. Namun, dalam periode 1990-2000, laju pertumbuhan kembali meningkat menjadi 2,33%, yang mencerminkan adanya perkembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta

sektor pariwisata yang mulai berkembang pesat di Kabupaten Badung.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2000-2010, di mana laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,62%. Lonjakan ini diakibatkan oleh pesatnya pembangunan sektor pariwisata dan properti di Kabupaten Badung, yang menarik banyak migran dari daerah lain untuk bekerja dan menetap. Selain itu, pertumbuhan fasilitas publik, lapangan pekerjaan, serta daya tarik ekonomi dari kawasan Kuta, Seminyak, hingga Nusa Dua turut mendorong peningkatan jumlah penduduk. Namun, setelah dekade tersebut, terjadi penurunan drastis dalam laju pertumbuhan penduduk, di mana pada periode 2010-2020 hanya tercatat sebesar 0,09%.

Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung dalam enam dekade terakhir adalah sebesar 2,20% per tahun. Namun, pola pertumbuhan yang fluktuatif yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di daerah ini, di mana perkembangan sektor pariwisata, investasi properti, serta kebijakan pembangunan sangat mempengaruhi jumlah dan distribusi penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 21

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus
Tahun 1961-2020

Periode Sensus (Tahun)	1961- 1971	1971- 1980	1980- 1990	1990- 2000	2000- 2010	2010- 2020
Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus (%)	2,60	2,34	1,23	2,33	4,62	0,09
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (%)						2,20

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

C. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Badung selama periode 2022–2024, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk total. Pada tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 552,75 ribu jiwa, meningkat menjadi 558,06 ribu jiwa pada tahun 2023, dan naik lebih tinggi menjadi 568,6 ribu jiwa pada

tahun 2024. Lonjakan ini menandakan dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, terutama pada tahun terakhir periode pengamatan. Secara umum, jumlah penduduk laki-laki tetap lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh kelompok umur.

Dari sisi distribusi umur, kelompok usia produktif (15–64 tahun) terus mendominasi struktur penduduk Kabupaten Badung. Pada tahun 2024, beberapa kelompok umur dalam rentang ini mencatatkan jumlah penduduk tertinggi, yakni kelompok usia 25–29 tahun sebesar 45,7 ribu jiwa, disusul oleh 20–24 tahun sebanyak 45,2 ribu jiwa, dan 45–49 tahun sebanyak 44,6 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk di kelompok usia produktif ini mencerminkan potensi besar Kabupaten Badung dalam hal tenaga kerja dan kontribusi terhadap sektor ekonomi utama seperti pariwisata, perdagangan, serta industri kreatif. Dominasi usia produktif juga menunjukkan adanya peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan ke depan.

Kelompok lansia (60 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penduduk usia 60–64 tahun pada tahun 2024 mencapai 27,4 ribu jiwa, naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan juga terlihat pada kelompok 65–69 tahun yang mencapai 19,2 ribu jiwa. Fenomena ini menunjukkan tren penuaan penduduk yang mulai terasa, sehingga perlu disikapi dengan kebijakan pelayanan sosial dan kesehatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lansia.

Sementara itu, kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) mencatat pertumbuhan yang stabil. Jumlah anak usia 0–4 tahun pada 2024 tercatat sebesar 39,7 ribu jiwa, kelompok usia 5–9 tahun sebanyak 35,5 ribu jiwa, dan 10–14 tahun sebanyak 36,7 ribu jiwa. Stabilitas angka kelahiran ini menunjukkan keseimbangan beban ketergantungan, sekaligus menjadi sinyal baik untuk keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Tabel 2. 22

Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur Tahun 2022-2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Ribuan Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki + Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
0-4	19,64	20,00	20,3	18,68	19,09	19,4	38,32	39,09	39,7
5-9	18,13	18,12	18,3	17,19	17,13	17,2	35,32	35,25	35,5
10-14	20,14	19,44	18,8	18,96	18,41	17,9	39,11	37,85	36,7
15-19	22,16	22,13	22	20,53	20,43	20,3	42,69	42,56	42,2
20-24	23,5	23,57	23,6	21,88	21,78	21,6	45,38	45,35	45,2
25-29	22,07	22,72	23,4	21,66	22,00	22,3	43,73	44,72	45,7
30-34	20,03	20,43	20,8	20,22	20,58	21	40,25	41,01	41,8
35-39	19,06	19,15	19,3	20,57	20,25	20,1	39,63	39,40	39,4
40-44	20,57	19,99	19,5	22,39	21,98	21,6	42,96	41,97	41,1
45-49	22,19	22,07	21,8	23,06	22,94	22,7	45,25	45,00	44,6
50-54	21,33	21,38	21,4	21,06	21,59	22	42,39	42,97	43,4
55-59	17,7	18,59	19,3	16,5	17,48	18,4	34,2	36,06	37,7
60-64	12,45	13,21	14	11,99	12,66	13,4	24,44	25,87	27,4
65-69	8,65	9,05	9,5	8,94	9,30	9,7	17,59	18,35	19,2
70-74	5,87	6,11	6,4	6,56	6,82	7,1	12,43	12,93	13,4
75+	6,19	6,41	6,7	8,21	8,54	8,9	14,39	14,95	15,6
Jumlah	276,96	279,67	258	275,79	278,39	283,5	552,75	558,06	568,6

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

D. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Badung secara keseluruhan tercatat sebesar 99, yang berarti terdapat sekitar 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Namun, rasio ini bervariasi antar kecamatan. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Petang (101,6), diikuti oleh Kuta (100,8) dan Mengwi (99,1), yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Sementara itu, kecamatan dengan rasio jenis kelamin lebih rendah dari rata-rata kabupaten adalah Kuta Utara (97,9), Kuta Selatan (98,7), dan Abiansemal (98,3), yang menandakan dominasi jumlah perempuan di wilayah-wilayah tersebut.

Perbedaan rasio jenis kelamin ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor demografis dan ekonomi. Kecamatan dengan konsentrasi sektor jasa dan pariwisata yang tinggi, seperti Kuta Selatan dan Kuta Utara, cenderung menarik lebih banyak pekerja perempuan, terutama di industri perhotelan, restoran,

dan perdagangan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa jumlah perempuan di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, di kecamatan seperti Petang dan Kuta, yang memiliki karakteristik lebih pedesaan dan agraris, terdapat kecenderungan lebih banyak laki-laki, yang mungkin berkaitan dengan dominasi tenaga kerja laki-laki dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Tabel 2. 23

Laju Pertumbuhan, Persentase dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kabupaten Badung 2023 (data terakhir)

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kuta Selatan	3,31	22,83	98,7
Kuta	1,73	10,78	100,8
Kuta Utara	2,5	16,73	97,9
Mengwi	1,8	24,89	99,1
Abiansemal	1,62	18,6	98,3
Patang	1,66	6,16	101,6
Kabupaten Badung	2,2	100	99,97

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

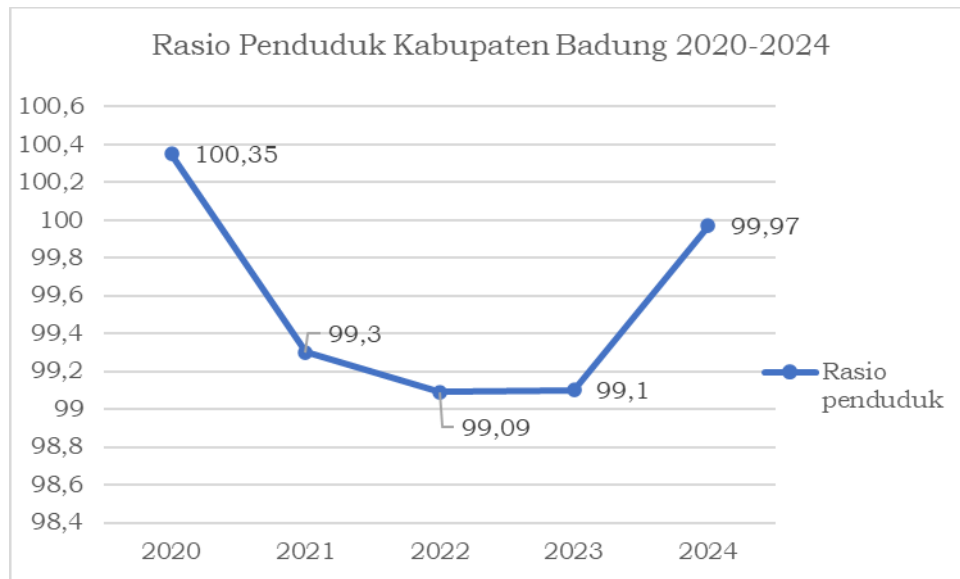
Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung rata-rata mencapai 2,2 jiwa per tahun berdasarkan data versi tahun terakhir yakni tahun 2023, dengan variasi antar kecamatan. Kecamatan Kuta Selatan mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 3,31 jiwa per tahun, diikuti oleh Kuta Utara (2,5% per tahun) dan Mengwi (1,8% per tahun). Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kuta (1,73% per tahun), Abiansemal (1,62% per tahun), dan Patang (1,66% per tahun). Tingginya laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara dapat dikaitkan dengan perkembangan sektor pariwisata, yang mendorong urbanisasi dan migrasi masuk ke daerah tersebut.

Dari sisi distribusi penduduk, Kecamatan Mengwi memiliki persentase penduduk terbesar, yaitu 24,89% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara Kecamatan Patang memiliki persentase penduduk terendah, yakni hanya 6,16%. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Badung tidak merata, dengan kecenderungan terkonsentrasi di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi,

seperti Mengwi, Kuta Selatan, dan Kuta Utara. Sebaliknya, wilayah seperti Petang yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur relatif lebih sedikit dihuni.

Gambar 2. 4

Rasio Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Badung menunjukkan adanya perbedaan distribusi berdasarkan faktor ekonomi dan migrasi. Variasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi.

E. Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2030

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Badung tahun 2025-2030, terlihat bahwa populasi di seluruh kecamatan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,20% per tahun. Pada tahun 2025, total jumlah penduduk diperkirakan mencapai 611.204 jiwa, dan akan terus meningkat hingga mencapai 681.461 jiwa pada tahun 2030. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Mengwi, yang diperkirakan memiliki 148.049 jiwa pada tahun 2025 dan bertambah menjadi 165.067 jiwa pada tahun 2030. Di sisi lain, Kecamatan Petang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 34.578 jiwa pada tahun 2025 dan

diproyeksikan meningkat menjadi 38.553 jiwa pada tahun 2030.

Tabel 2. 24

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2025-2030 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Rata Rata Laju Pertumbuhan	Proyeksi Jumlah Penduduk					
		(%)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kuta selatan	2,20	146.213	149.430	152.717	156.077	159.511	163.020
2	Kuta	2,20	65.960	67.411	68.894	70.410	71.959	73.542
3	Kuta Utara	2,20	106.131	108.466	110.852	113.291	115.783	118.330
4	Mengwi	2,20	148.049	151.307	154.635	158.037	161.514	165.067
5	Abiansemal	2,20	110.273	112.699	115.178	117.712	120.302	122.948
6	Petang	2,20	34.578	35.339	36.116	36.911	37.723	38.553
7		Jumlah	611.204	624.651	638.393	652.438	666.791	681.461

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Peningkatan jumlah penduduk yang merata di setiap kecamatan mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk yang stabil, dipengaruhi oleh faktor alami seperti tingkat kelahiran dan kematian, serta faktor migrasi. Kecamatan dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi, seperti Kuta Selatan dan Mengwi, cenderung mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih pesat karena daya tariknya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Wilayah ini menjadi tujuan utama bagi para migran yang mencari peluang kerja, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk. Sebaliknya, Kecamatan Petang, yang memiliki karakteristik lebih rural dengan dominasi sektor pertanian, menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Dari proyeksi ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Badung akan terus mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam lima tahun mendatang. Peningkatan ini perlu diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, layanan dasar, serta pengelolaan tata ruang agar dapat menampung peningkatan populasi secara optimal. Kebijakan yang mendukung distribusi penduduk yang lebih merata serta peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dalam periode 2019-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Badung tumbuh sebesar 6,81%, tetapi mengalami kontraksi tajam hingga -16,55% pada tahun 2020. Penurunan drastis ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata, sebagai sektor utama perekonomian di Badung. Pembatasan perjalanan, penurunan jumlah wisatawan, serta terganggunya aktivitas ekonomi lainnya menyebabkan penurunan tajam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten ini.

Pada tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan pemulihan dengan laju pertumbuhan -6,74%, yang meskipun masih negatif, tetapi menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang melonjak hingga 9,97% dan meningkat lebih lanjut menjadi 11,29% pada tahun 2023. Pemulihan ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebangkitan sektor pariwisata, serta kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi, termasuk insentif dan stimulus ekonomi bagi sektor usaha yang terdampak.

Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan menjadi 5,65%. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan efek normalisasi pertumbuhan pasca-pandemi, di mana setelah mengalami rebound yang tinggi, laju pertumbuhan kembali ke tren yang lebih stabil.

Gambar 2. 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung 2019-2024



Sumber: Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2025

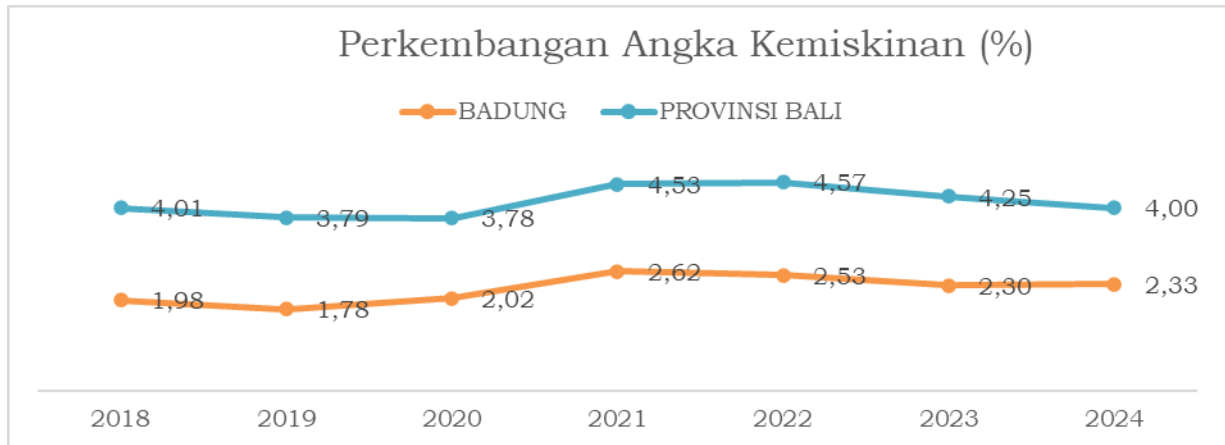
Secara keseluruhan, ekonomi Kabupaten Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata dan rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, strategi diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor utama. Peningkatan daya saing sektor non-pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.

B. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan atau tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk di suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Angka ini merupakan indikator penting untuk memahami sejauh mana kemiskinan masih menjadi permasalahan di suatu daerah, serta menilai keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan.

Gambar 2. 6

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung (dalam %)



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Badung dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, angka kemiskinan di Badung tercatat sebesar 1,98%, yang kemudian menurun menjadi 1,78% pada tahun 2019. Setelah sedikit meningkat menjadi 2,02% pada tahun 2020 dan 2,62% pada tahun 2021, angka kemiskinan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 2,53%, lalu 2,30% pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 2,23% pada tahun 2024. Sementara itu, di Provinsi Bali, angka kemiskinan juga menunjukkan tren yang mirip namun dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Badung yakni di angka 4,01% di tahun 2018 dan mencapai angka 4,00% di tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa meskipun garis kemiskinan di Badung terus meningkat setiap tahunnya, angka kemiskinan justru semakin menurun. Fenomena ini mengindikasikan beberapa hal penting:

- 1) Peningkatan Biaya Hidup: Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan biaya hidup, yang membuat standar kemiskinan menjadi lebih tinggi dari tahun ke tahun.
- 2) Perbaikan Ekonomi dan Pendapatan Penduduk Miskin: Penurunan angka kemiskinan meskipun garis kemiskinan naik menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat miskin di Badung telah mengalami peningkatan. Hal ini memungkinkan banyak penduduk yang sebelumnya berada

di bawah garis kemiskinan untuk keluar dari kategori miskin.

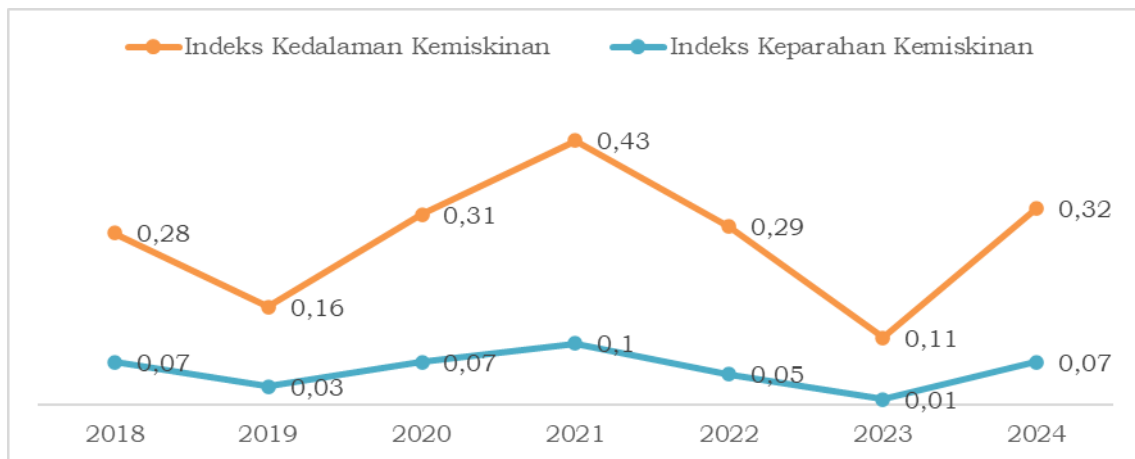
- 3) Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan: Penurunan angka kemiskinan ini juga mencerminkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang telah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah di Badung.
- 4) Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif: Tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung cukup inklusif dan berhasil meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat miskin dapat menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

C. Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin besar kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Badung. Penurunan nilai indeks ini menandakan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga kesenjangan antar penduduk miskin pun menyempit. Indeks ini merupakan indikator penting untuk melihat distribusi kesejahteraan antar wilayah, khususnya antara Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan serta tingkat ketimpangan di antara mereka. Nilai P2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin juga meningkat. Indeks ini juga memberikan gambaran kondisi kemiskinan secara lebih mendalam dan menjadi indikator penting bagi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Gambar 2. 7
Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan
Kabupaten Badung



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Data perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Badung menunjukkan dinamika yang mencerminkan fluktuasi kondisi kesejahteraan penduduk miskin dari tahun 2018 hingga 2024. Pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), terlihat adanya peningkatan signifikan pada tahun 2020 (0,31) dan puncaknya pada 2021 (0,43), yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Namun, P1 mengalami perbaikan pada 2022 dengan penurunan menjadi 0,29, bahkan mencapai titik terendah pada 2023 sebesar 0,11. Namun, pada tahun 2024, indeks kembali meningkat menjadi 0,32 yang menunjukkan adanya tantangan baru yang menghambat pemerataan kesejahteraan penduduk Kabupaten Badung.

Kondisi serupa juga terlihat pada perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), setelah relatif stabil pada tahun 2018 (0,07) dan 2019 (0,03), P2 meningkat tajam pada 2020 (0,07) dan 2021 (0,10), menunjukkan ketimpangan yang lebih besar selama masa pandemi. Perbaikan terjadi pada 2022, dengan indeks turun menjadi 0,05 dan mencapai titik terendah pada 2023 sebesar 0,01, mencerminkan distribusi pengeluaran penduduk miskin yang lebih merata. Namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,07.

Penurunan kedua indeks selama tahun 2021-2023 mencerminkan beberapa perkembangan positif di Kabupaten Badung, antara lain: pengurangan jarak pendapatan dari garis kemiskinan, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan penduduk miskin secara menyeluruh, dan penurunan ketimpangan di kalangan penduduk miskin, yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di antara kelompok miskin menjadi lebih merata tanpa ada kelompok yang tertinggal jauh.

Kemajuan ini juga menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan, termasuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelatihan keterampilan. Selain itu, hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang merata, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah juga merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, tidak hanya dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi.

Namun, pada 2024, indeks P1 dan P2 kembali meningkat menjadi masing-masing 0,32 dan 0,07. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tantangan baru muncul, yang berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi atau tekanan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan strategi lebih terarah untuk mempertahankan momentum perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dan memastikan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

D. PDRB Perkapita

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020–2024, Kabupaten Badung secara konsisten menempati posisi tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Badung tercatat sebesar Rp89.312,31 ribu, jauh melampaui rata-rata Provinsi Bali yang hanya sebesar Rp52.015,45 ribu. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp81.715 ribu akibat dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Badung pemulihan ekonomi terlihat jelas dari tren peningkatan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai Rp132.087 ribu pada tahun 2024.

Kinerja PDRB per kapita Kabupaten Badung yang melampaui semua wilayah lain di Bali mencerminkan struktur ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor tersier, terutama pariwisata, perhotelan, dan jasa penunjang. Pemulihan kunjungan wisatawan pascapandemi, baik domestik maupun mancanegara, turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor ini. Dibandingkan dengan Kota Denpasar yang merupakan pusat pemerintahan dan jasa, atau kabupaten lain seperti Gianyar dan Tabanan yang memiliki basis pertanian lebih dominan, Badung memperoleh keunggulan komparatif berkat infrastruktur pariwisata yang telah terbangun kuat serta lokasi strategis seperti Kuta, Seminyak, Nusa Dua, dan Uluwatu.

Sementara kabupaten-kabupaten lain seperti Jembrana, Karangasem, dan Bangli menunjukkan peningkatan PDRB per kapita yang lebih lambat dan angkanya berada di bawah rata-rata provinsi, hal ini menandakan masih adanya ketimpangan struktur ekonomi antardaerah di Bali. Peran Badung sebagai lokomotif ekonomi provinsi menjadi semakin penting dalam mendukung keseimbangan pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 2. 25

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Jembrana	42.516,29	41.967	45.249	48.269	51.730
2	Kab. Tabanan	48.248,65	47.324	50.978	54.772	59.122
3	Kab. Badung	89.312,31	81.715	99.076	121.416	132.087
4	Kab. Gianyar	50.179,76	49.642	53.645	58.259	62.692
5	Kab. Klungkung	40.970,58	40.617	44.269	48.298	52.627
6	Kab. Bangli	26.035,78	25.999	28.182	30.256	32.274
7	Kab. Karangasem	33.432,29	32.957	35.519	37.953	40.232
8	Kab. Buleleng	42.241,48	41.361	44.603	47.413	50.795
9	Kota Denpasar	68.298,89	68.383	73.732	80.305	86.425
10	Provinsi Bali	52.015,45	50.758,32	56.091,82	62.293,23	67.318,72

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Dari perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan. Meskipun sektor ini memberikan keuntungan ekonomi yang besar, ketergantungan

yang tinggi terhadap pariwisata juga menjadikan Badung rentan terhadap guncangan eksternal, seperti krisis global atau bencana kesehatan. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, perlu adanya strategi diversifikasi ekonomi, seperti pengembangan sektor industri kreatif, ekonomi digital, serta optimalisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis pariwisata. Langkah ini penting untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang dan ketahanan ekonomi Kabupaten Badung terhadap berbagai tantangan di masa depan.

E. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, mencerminkan dinamika ekonomi yang berkembang di wilayah ini. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita Badung tercatat sebesar Rp17,503 juta per orang per tahun, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp17,327 juta. Penurunan ini kemungkinan besar berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, serta berkurangnya aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Badung.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pengeluaran per kapita kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp17,445 juta dan terus naik pada tahun 2023 mencapai Rp17,915 juta. Peningkatan ini sejalan dengan pemulihan sektor pariwisata yang mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat, peningkatan mobilitas ekonomi, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga. Berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi, seperti stimulus pariwisata, investasi di sektor infrastruktur, dan promosi wisata global, turut berkontribusi dalam mendorong kenaikan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Badung diproyeksikan meningkat lebih lanjut menjadi Rp18,556 juta per orang per tahun. Hal ini menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini, didukung oleh semakin stabilnya sektor pariwisata, peningkatan investasi dalam industri kreatif, serta diversifikasi ekonomi yang mulai berkembang. Dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Bali, Kabupaten Badung

selalu mencatat nilai yang lebih tinggi, yang mencerminkan standar hidup yang lebih baik serta dominasi sektor ekonomi dengan nilai tambah yang tinggi, seperti pariwisata premium, properti, dan jasa.

Tabel 2. 26

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Badung (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Badung	17.503	17.327	17.445	17.915	18.556
Provinsi Bali	13.929	13.820	13.942	14.382	14.920

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Secara keseluruhan, tren peningkatan pengeluaran per kapita di Kabupaten Badung menunjukkan daya beli masyarakat yang terus membaik, terutama setelah fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih luas dalam mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, seperti pengembangan sektor ekonomi digital, industri kreatif, dan ekonomi berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Badung dapat menjaga stabilitas ekonominya dalam jangka panjang dan tetap menjadi daerah dengan daya saing ekonomi yang tinggi di Provinsi Bali.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Badung mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 6,92%, mencerminkan dampak awal dari pandemi COVID-19 yang menghantam sektor ekonomi, terutama pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2021 dengan sedikit peningkatan menjadi 6,93%, yang menandakan bahwa proses pemulihan belum berjalan optimal dan masyarakat masih menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan akibat pembatasan aktivitas dan menurunnya kunjungan wisatawan.

Pada tahun 2022, TPT menunjukkan sedikit perbaikan menjadi 6,87%, seiring mulai pulihnya aktivitas pariwisata dan ekonomi secara umum. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat,

mencerminkan adanya tantangan dalam proses pemulihan ketenagakerjaan pasca-pandemi.

Perubahan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 2023, di mana TPT turun drastis menjadi 2,72%. Penurunan tajam ini menandakan titik balik pemulihan ekonomi Kabupaten Badung, yang ditandai dengan peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, serta sektor informal yang kembali aktif. Kebijakan pemulihan ekonomi, pembukaan kembali destinasi wisata, serta peningkatan mobilitas masyarakat menjadi faktor utama dalam menurunkan angka pengangguran.

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan TPT tercatat hanya sebesar 1,83%. Angka ini mendekati kondisi pra-pandemi, mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang telah pulih dan bahkan melampaui kondisi sebelum krisis. Turunnya angka pengangguran juga menjadi indikasi dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Gambar 2. 8

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Secara keseluruhan, tren penurunan TPT dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Badung telah mampu bangkit dari krisis, dengan struktur ekonomi yang semakin adaptif dan ketahanan tenaga kerja yang terus meningkat.

G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Badung menunjukkan tren yang positif dan cenderung meningkat sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 72,69%, dan meskipun pandemi COVID-19 melanda dunia dan menghantam sektor utama perekonomian Badung yakni pariwisata, angka ini tidak menunjukkan penurunan drastis. Bahkan, di tahun 2021, TPAK hanya menurun tipis menjadi 72,52%, mencerminkan ketahanan relatif pasar tenaga kerja di tengah pembatasan sosial dan penutupan pariwisata internasional.

Pemulihan mulai tampak lebih jelas pada tahun 2022, saat TPAK meningkat menjadi 72,80%. Kenaikan ini didorong oleh pelonggaran kebijakan mobilitas dan pembukaan kembali destinasi wisata yang mulai menarik kembali wisatawan domestik dan internasional. Hal ini berdampak langsung pada pemulihan sektor perhotelan, restoran, dan transportasi lokal yang menyerap kembali angkatan kerja yang sempat terdampak PHK dan dirumahkan.

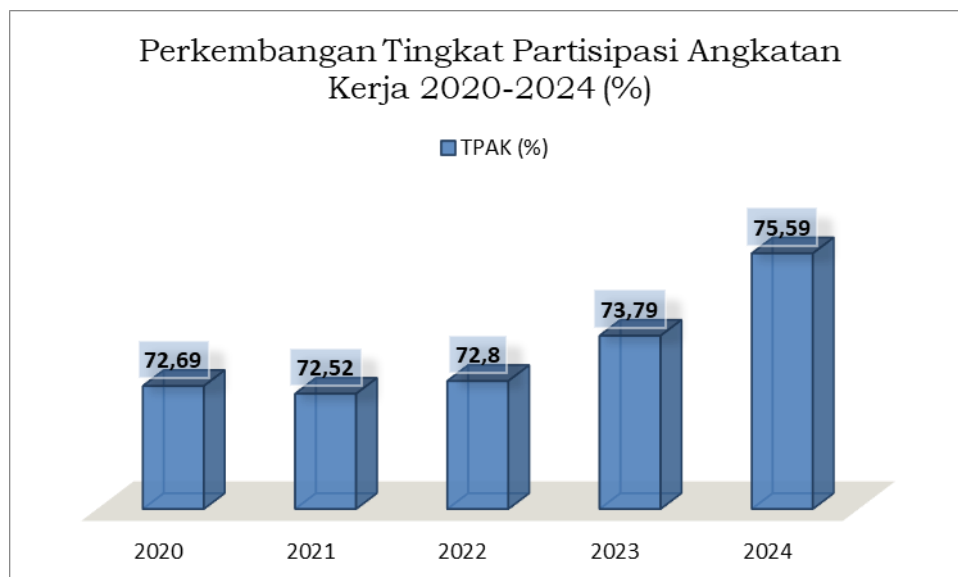
Percepatan pemulihan ekonomi makin kuat pada tahun 2023, di mana TPAK naik signifikan menjadi 73,79%. Angka ini menjadi indikator bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja akibat menggeliatnya kembali industri pariwisata, bertumbuhnya sektor properti dan jasa, serta mulai pulihnya UMKM lokal.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, ketika TPAK mencapai 75,59%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pulihnya perekonomian Badung, tetapi juga kemungkinan adanya ekspansi sektor formal maupun informal, peningkatan investasi, serta efektivitas program-program pemerintah daerah dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pasar kerja.

Secara keseluruhan, tren TPAK Kabupaten Badung yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan kekuatan struktur tenaga kerja yang semakin solid dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini, Pemerintah Kabupaten Badung perlu memperkuat strategi diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata, serta terus mendorong peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja guna menghadapi tantangan pasar kerja yang semakin kompleks.

Gambar 2. 9

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

H. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Badung dalam periode 2019-2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan perubahan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, Gini Rasio Kabupaten Badung pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,3244, yang kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 0,3167 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 0,3320, sebelum kembali menurun pada tahun 2022 menjadi

0,3160. Tren penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana Gini Rasio turun menjadi 0,2800. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali secara keseluruhan, Kabupaten Badung secara konsisten memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Fluktuasi dalam Gini Rasio Kabupaten Badung dapat dikaitkan dengan berbagai faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi struktur pendapatan masyarakat. Kenaikan ketimpangan pada tahun 2021 kemungkinan besar disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin lebar. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Badung mengalami kontraksi signifikan selama pandemi, sehingga kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor ini mengalami penurunan pendapatan yang tajam. Sementara itu, kelompok ekonomi yang lebih stabil, seperti yang bergerak di sektor properti dan perdagangan digital, cenderung mampu bertahan lebih baik, menyebabkan meningkatnya ketimpangan.

Namun, pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mulai terlihat pada tahun 2022 dan semakin menguat pada tahun 2023 berkontribusi terhadap penurunan Indeks Gini. Pemerintah daerah dan pelaku usaha mulai menggiatkan kembali sektor pariwisata, perhotelan, serta industri kreatif yang menyerap banyak tenaga kerja. Sejalan dengan itu, berbagai program pemulihan ekonomi, bantuan sosial, serta insentif bagi UMKM turut berkontribusi dalam menstabilkan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menurunkan ketimpangan. Hal ini terlihat dari penurunan signifikan Indeks Gini pada tahun 2023 menjadi 0,2800 dan tahun 2024 menjadi 0,2808 yang menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan.

Tabel 2. 27

Gini Rasio Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Badung	0,3244	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800	0,2808
Provinsi Bali	0,3662	0,3690	0,3780	0,3630	0,3620	0,348

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025

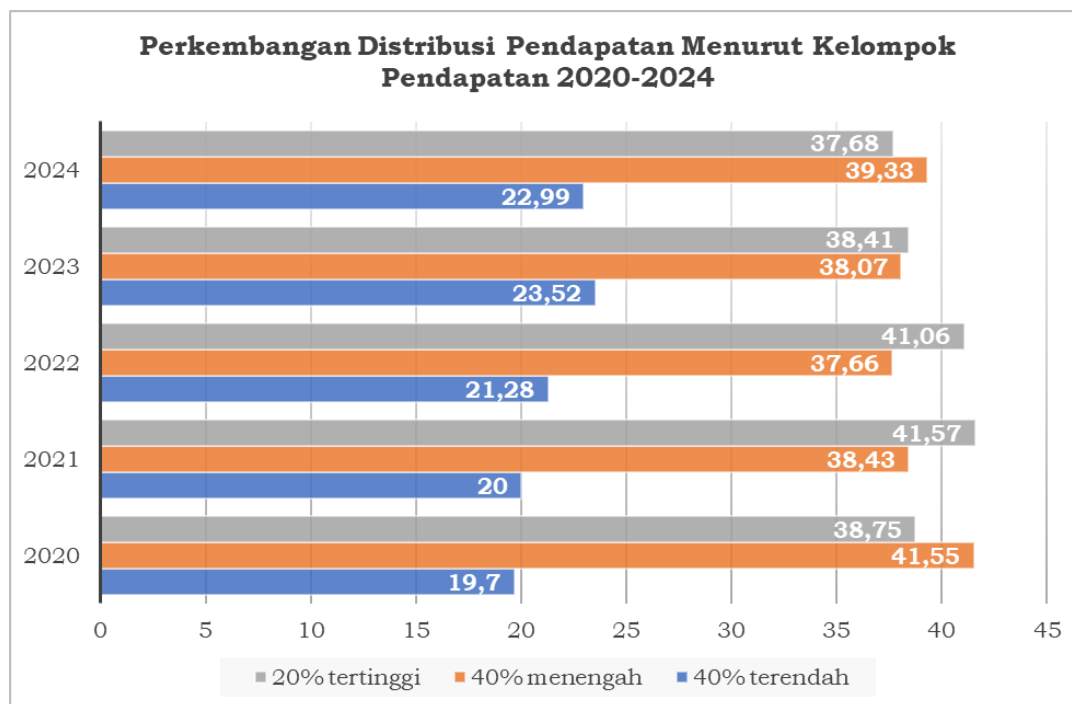
Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa meskipun terdapat periode peningkatan ketimpangan akibat faktor eksternal seperti pandemi, tren jangka panjang mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih merata. Keberhasilan Kabupaten Badung dalam menurunkan ketimpangan ekonomi tidak terlepas dari peran sektor pariwisata dan industri pendukungnya dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk memastikan ketimpangan tetap terjaga pada tingkat rendah, perlu ada kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta penguatan sektor UMKM agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

I. Distribusi Pendapatan

Bank Dunia menggunakan indikator distribusi pendapatan untuk mengelompokkan populasi suatu negara ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu kelompok 40% terbawah (bottom 40%), kelompok 40% menengah (middle 40%), dan kelompok 20% teratas (top 20%). Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi di suatu wilayah. Kelompok 40% terbawah biasanya mencakup rumah tangga dengan pendapatan terendah, yang sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Sementara itu, kelompok 20% teratas mencerminkan bagian masyarakat dengan pendapatan tertinggi yang memiliki akses luas terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana kelompok 20% teratas menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, dapat menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, analisis distribusi pendapatan menjadi salah satu instrumen penting bagi Bank Dunia dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan dan mendukung pembangunan yang inklusif.

Gambar 2. 10

Perkembangan Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Badung (dalam %) 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Berdasarkan grafik perkembangan distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan di Kabupaten Badung selama periode 2020–2024, terlihat adanya pergeseran yang mengarah pada pola distribusi yang lebih merata. Pada kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah, proporsi distribusi pendapatan menunjukkan tren meningkat, dari 19,7% pada tahun 2020 menjadi 22,99% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi di kalangan masyarakat bawah, yang berpotensi disebabkan oleh meningkatnya akses terhadap peluang kerja, bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta penguatan UMKM lokal pasca-pandemi.

Sementara itu, kelompok 40% menengah mengalami sedikit fluktuasi namun cenderung menurun dari 41,55% pada tahun 2020 menjadi 39,33% pada tahun 2024, meskipun masih menjadi kelompok dengan proporsi pendapatan terbesar. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran sebagian dari kelompok menengah ke kelompok bawah dan atas,

tergantung pada laju pertumbuhan ekonomi individu dalam kelompok ini.

Adapun kelompok 20% tertinggi mengalami penurunan distribusi pendapatan dari 38,75% pada tahun 2020 menjadi 37,68% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa dominasi kelompok kaya dalam menguasai porsi pendapatan di Kabupaten Badung mulai berkurang, yang sekaligus menandakan adanya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

Secara keseluruhan, perubahan komposisi distribusi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam keadilan ekonomi di Kabupaten Badung. Arah distribusi yang semakin merata ini merupakan indikator positif dari efektivitas program-program pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan inklusif. Kebijakan seperti peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal, serta investasi di sektor padat karya turut berperan dalam memperluas kesempatan ekonomi lintas kelompok pendapatan. Dengan arah perkembangan seperti ini, Kabupaten Badung menunjukkan potensi besar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

J. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, IPM Kabupaten Badung pada tahun 2020 tercatat sebesar 81,6 dan terus meningkat hingga mencapai 83,87 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai indikator pembangunan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pada aspek kesehatan, indikator Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 75,1 tahun pada 2020 menjadi 76,18 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan, pola hidup masyarakat yang lebih baik, serta keberhasilan program kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Faktor lain yang dapat berkontribusi adalah peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan program kesehatan preventif yang lebih efektif.

Di sektor pendidikan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan. Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,98 tahun pada 2020 menjadi 14,23 tahun pada 2024, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah naik dari 10,39 tahun pada 2020 menjadi 11,14 tahun pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak-anak di Kabupaten Badung yang memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih lama dan berkualitas. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan infrastruktur pendidikan, beasiswa, serta program literasi dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih inklusif.

Dari sisi kesejahteraan ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga mengalami pertumbuhan dari Rp17.503 ribu pada 2020 menjadi Rp18.556 ribu pada 2024. Angka ini mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan. Setelah terdampak pandemi pada tahun 2020, pemulihan sektor ekonomi Kabupaten Badung berjalan dengan baik, didukung oleh kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, program pemulihan usaha kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatnya kembali aktivitas sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Tabel 2. 28

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (tahun)	75,1	75,18	75,51	75,88	76,18
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,98	13,99	14,03	14,22	14,23
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,39	10,62	10,64	10,9	11,14
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	17503	17327	17445	17915	18556
Indeks Pembangunan Manusia	81,6	81,83	82,13	83,08	83,87

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Peningkatan seluruh indikator tersebut berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan IPM Kabupaten Badung yang

menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat secara umum semakin baik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga momentum peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup

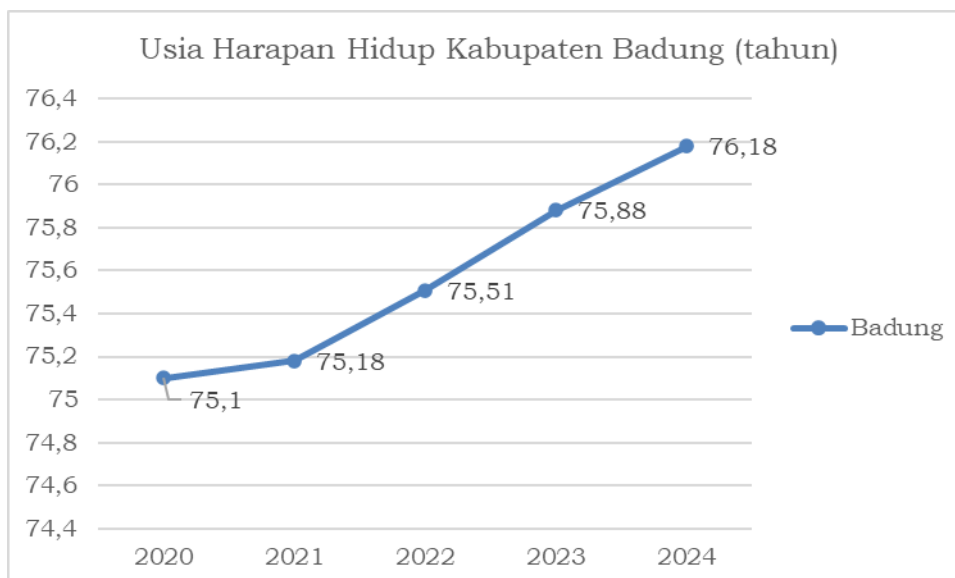
Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2020-2024. Berdasarkan data pada tabel, UHH pada tahun 2020 tercatat sebesar 75,1 tahun dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 76,18 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Peningkatan UHH ini dapat dikaitkan dengan semakin baiknya layanan kesehatan di Kabupaten Badung, baik dari segi aksesibilitas maupun kualitas fasilitas medis. Program-program kesehatan seperti peningkatan layanan kesehatan primer, kampanye hidup sehat, serta intervensi gizi yang lebih baik kemungkinan berkontribusi pada peningkatan harapan hidup masyarakat. Selain itu, semakin luasnya cakupan asuransi kesehatan, baik melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun inisiatif daerah, turut membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang lebih optimal.

Di sisi lain, faktor sosial dan lingkungan juga berperan penting dalam meningkatkan UHH. Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang pesat, terutama di sektor pariwisata, memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kebijakan kesehatan yang efektif. Peningkatan pendapatan masyarakat akibat perbaikan sektor ekonomi dapat mendorong akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta pola hidup yang lebih sehat. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan fasilitas publik yang memadai juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2. 11

Usia Harapan Hidup Kabupaten Badung 2020-2024 (tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Secara keseluruhan, tren positif dalam Usia Harapan Hidup di Kabupaten Badung mencerminkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan memperkuat sinergi antar sektor, diharapkan tren ini dapat terus meningkat, sehingga kualitas hidup masyarakat Badung semakin baik dan berkelanjutan.

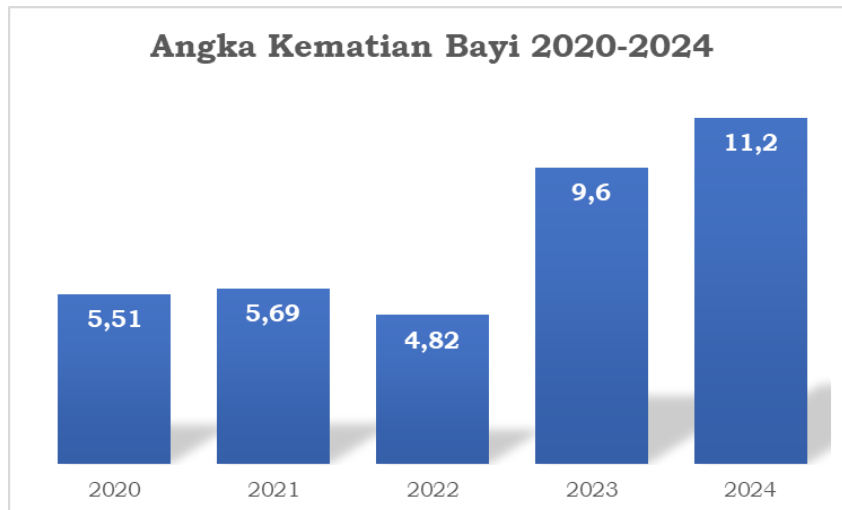
B. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan tren yang cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, AKB pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,51 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 5,69. Pada tahun 2022, angka ini mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 4,82, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, tren positif ini tidak berlanjut karena pada tahun 2023 AKB melonjak tajam menjadi 9,6 dan kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 11,2 per 1.000 kelahiran hidup. Peningkatan yang cukup drastis dalam dua

tahun terakhir ini menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Badung.

Gambar 2. 12

Angka Kematian Bayi Kabupaten Badung 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Badung. Pada periode 2020-2022, penurunan AKB dapat dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk program imunisasi, perbaikan gizi ibu hamil, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang ditangani tenaga kesehatan profesional semakin meningkat. Faktor ini berkontribusi terhadap turunnya angka kematian bayi pada tahun 2022.

Namun, lonjakan AKB pada tahun 2023 dan 2024 menandakan adanya tantangan yang harus diatasi. Salah satu kemungkinan penyebab kenaikan ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang menghambat akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di tahun-tahun sebelumnya. Keterbatasan fasilitas kesehatan selama masa pandemi, penurunan jumlah kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan akibat pembatasan mobilitas, serta dampak ekonomi yang menyebabkan menurunnya kualitas gizi ibu dan bayi bisa menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian bayi di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, faktor lingkungan dan sosial, seperti meningkatnya

angka kelahiran dengan risiko tinggi, akses yang masih terbatas ke layanan kesehatan di beberapa daerah, serta kurangnya tenaga medis dan fasilitas neonatal yang memadai, turut menjadi penyebab utama dari lonjakan AKB di Kabupaten Badung.

Peningkatan AKB dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun telah ada perbaikan layanan kesehatan, masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan layanan yang berkualitas bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi lebih lanjut dalam bentuk penguatan program kesehatan ibu dan anak, peningkatan fasilitas neonatal, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai perawatan kehamilan dan bayi baru lahir. Langkah-langkah ini perlu diprioritaskan guna menekan angka kematian bayi di Kabupaten Badung dan memastikan bahwa setiap bayi yang lahir memiliki peluang hidup yang lebih baik.

C. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya tantangan dalam layanan kesehatan ibu hamil dan persalinan. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 83,84 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, angka ini melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi 189,79, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kematian ibu. Penurunan terjadi pada tahun 2022, dengan AKI turun drastis menjadi 88, menandakan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan angka yang semakin rendah, yaitu 63,89. Namun, pada tahun 2024, AKI kembali meningkat cukup tajam menjadi 109,38, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Badung.

Gambar 2. 13

Angka Kematian Ibu Kabupaten Badung 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Lonjakan AKI yang terjadi pada tahun 2021 dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah dampak pandemi COVID-19. Pembatasan layanan kesehatan selama pandemi menyebabkan banyak ibu hamil mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, baik untuk pemeriksaan kehamilan rutin maupun persalinan yang aman. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas medis, terutama bagi ibu dengan kondisi kehamilan berisiko tinggi, juga menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kematian ibu pada periode tersebut. Pandemi juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus komplikasi kehamilan yang tidak tertangani dengan baik, seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, dan infeksi.

Penurunan AKI yang cukup drastis pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sektor kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan maternal dan neonatal. Faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan kepada ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, serta peningkatan fasilitas kesehatan untuk menangani persalinan risiko tinggi. Selain itu, peran tenaga kesehatan, seperti bidan desa dan tenaga medis di puskesmas, juga sangat penting dalam mengidentifikasi ibu hamil dengan

risiko tinggi dan merujuk mereka ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Namun, peningkatan kembali AKI pada tahun 2024 menjadi indikasi bahwa masih terdapat tantangan yang perlu segera diatasi. Kemungkinan penyebab kenaikan ini mencakup faktor sosial dan ekonomi, seperti kesenjangan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, serta faktor-faktor kesehatan ibu yang berkaitan dengan gizi dan kondisi medis sebelum kehamilan. Selain itu, beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi serta kurangnya tenaga medis spesialis di beberapa fasilitas kesehatan juga dapat menjadi faktor penyebab peningkatan AKI pada tahun tersebut.

Melihat tren fluktuatif ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi dalam menurunkan angka kematian ibu secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu hamil, penempatan tenaga medis di daerah dengan akses terbatas, peningkatan edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak, serta optimalisasi sistem rujukan bagi ibu dengan risiko tinggi. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka kematian ibu di Kabupaten Badung dapat terus menurun dan mencapai target yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

D. Indeks Keluarga Sehat

Berdasarkan data Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Badung tahun 2024 yang diperoleh dari Sistem Informasi Kesehatan—Krama Bali Sehat, terlihat bahwa IKS inti Kabupaten Badung berada pada angka 0,61. Indeks ini menunjukkan tingkat kesehatan keluarga secara umum berdasarkan beberapa indikator utama. Beberapa aspek kesehatan yang diukur dalam tabel ini mencerminkan capaian yang cukup baik dalam berbagai program kesehatan, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh, persentase ibu yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 99,83%, yang mengindikasikan bahwa hampir semua ibu melahirkan dengan akses ke layanan kesehatan yang aman dan profesional. Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi juga sangat tinggi, mencapai 99,73%, yang menunjukkan efektivitas program imunisasi dalam melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah.

Selain aspek persalinan dan imunisasi, indikator kesehatan lainnya juga mencerminkan pencapaian yang cukup baik, seperti cakupan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif yang mencapai 88,90% dan persentase balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan sebesar 97,11%. Capaian ini menandakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pemberian ASI eksklusif serta pemantauan tumbuh kembang anak telah berjalan dengan baik, didukung oleh program edukasi kesehatan ibu dan anak serta peran aktif tenaga kesehatan dalam pemantauan pertumbuhan balita. Namun, meskipun angka ini cukup tinggi, masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan konsistensi ibu dalam memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia enam bulan, karena faktor seperti tuntutan pekerjaan dan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial atau keluarga.

Di sisi lain, capaian dalam penanganan penyakit tidak menular dan penyakit menular menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Persentase penderita tuberkulosis paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar berada pada angka 75,54%, yang mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 24,46% penderita yang belum mendapatkan atau menyelesaikan pengobatan secara optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan dalam menjalani terapi tuberkulosis atau kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, angka kepatuhan penderita hipertensi dalam melakukan pengobatan secara teratur hanya mencapai 48,37%, yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah penderita hipertensi belum melakukan kontrol kesehatan secara rutin. Rendahnya kepatuhan dalam pengobatan hipertensi ini dapat berisiko meningkatkan angka kejadian komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke di masa mendatang. Faktor penyebab rendahnya kepatuhan bisa meliputi minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hipertensi jangka panjang, kurangnya motivasi untuk menjalani terapi secara terus-menerus, atau keterbatasan akses ke obat dan layanan kesehatan.

Tabel 2. 29

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Badung Tahun 2024

Kabupaten	Badung
Indeks Keluarga Sehat Inti	0,61
Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana	70,27
Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	99,83
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	99,73
Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	88,9
Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	97,11
Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	75,54
Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	48,37

Sumber: Sistem Informasi Kesehatan—Krama Bali Sehat, 2025

Secara keseluruhan, Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Badung menunjukkan capaian yang baik dalam aspek kesehatan ibu dan anak, terutama dalam persalinan di fasilitas kesehatan, cakupan imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan balita. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek pengobatan penyakit kronis seperti hipertensi dan tuberkulosis.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 10,39 tahun, yang kemudian meningkat menjadi 10,62 tahun pada 2021 dan terus bertambah menjadi 10,64 tahun di 2022. Tren peningkatan ini berlanjut dengan kenaikan menjadi 10,90 tahun pada 2023, hingga akhirnya mencapai 11,14 tahun pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung secara umum memiliki akses yang semakin baik terhadap pendidikan formal, yang tercermin dari meningkatnya jumlah tahun yang dihabiskan dalam institusi pendidikan.

Tabel 2. 30

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Badung	10,39	10,62	10,64	10,9	11,14
Laki-laki	10,93	11,08	11,09	11,32	11,45
Perempuan	9,7	9,97	10,07	10,52	10,76

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, terdapat kesenjangan antara rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, laki-laki memiliki rata-rata lama sekolah 10,93 tahun, sementara perempuan hanya 9,70 tahun. Pola ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan laki-laki mencapai 11,45 tahun pada 2024 dan perempuan berada di angka 10,76 tahun. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan tertentu yang membuat perempuan cenderung menempuh pendidikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan laki-laki. Faktor sosial, ekonomi, serta peran gender dalam masyarakat kemungkinan menjadi faktor yang memengaruhi kondisi ini.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, pemerintah daerah terus meningkatkan akses terhadap pendidikan melalui program-program wajib belajar dan beasiswa yang mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dominasi sektor pariwisata di Kabupaten Badung dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat pendidikan, karena masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan peluang kerja.

Namun, masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal rata-rata lama sekolah menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi semua kelompok. Faktor budaya dan ekonomi, seperti beban domestik yang lebih besar pada perempuan serta preferensi keluarga dalam mendukung pendidikan anak laki-laki, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, mencerminkan prospek pendidikan yang semakin baik di wilayah ini. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah berada di angka 13,98 tahun dan meningkat secara bertahap menjadi 13,99 tahun pada 2021, lalu 14,03 tahun di 2022. Tren ini terus berlanjut dengan kenaikan menjadi 14,22 tahun pada 2023 dan

mencapai 14,23 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir di Kabupaten Badung diproyeksikan akan mengenyam pendidikan selama lebih dari 14 tahun, yang berarti mereka diperkirakan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi atau diploma.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, harapan lama sekolah laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah laki-laki mencapai 14,26 tahun, sementara perempuan berada di angka 13,98 tahun. Perbedaan ini terus terlihat dalam tahun-tahun berikutnya, dengan laki-laki mencapai 14,51 tahun pada 2023, sedangkan perempuan hanya 14,03 tahun. Kesenjangan ini dapat mengindikasikan adanya faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan, di mana laki-laki cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan perempuan. Faktor budaya, seperti ekspektasi peran gender dalam rumah tangga dan keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi di beberapa wilayah, menjadi penyebab utama yang mungkin dari kesenjangan ini.

Tabel 2. 31

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Badung	13,98	13,99	14,03	14,22	14,23
Laki-laki	14,26	14,27	14,31	14,51	n/a
Perempuan	13,98	13,99	14,02	14,03	n/a

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Badung secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, ketersediaan fasilitas pendidikan yang semakin baik, termasuk sekolah-sekolah dengan kualitas tinggi dan akses yang lebih luas ke pendidikan menengah serta tinggi, turut mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih lama. Kedua, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, seperti program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu,

juga berkontribusi terhadap peningkatan angka ini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung, terutama di sektor pariwisata dan jasa, mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing di pasar kerja.

Namun, meskipun tren secara umum menunjukkan peningkatan yang positif, perbedaan antara harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua kelompok, termasuk perempuan, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi. Strategi seperti pemberian beasiswa khusus bagi perempuan, kampanye kesadaran pendidikan, serta penyediaan lingkungan belajar yang lebih inklusif dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi kesenjangan ini.

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) adalah ukuran untuk mengukur tingkat literasi masyarakat di suatu wilayah. Unsur-unsur indeks pembangunan literasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pemerataan Layanan Perpustakaan
- b) Ketercukupan koleksi perpustakaan
- c) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan
- d) Tingkat kunjungan masyarakat per hari
- e) Perpustakaan yang dibina sesuai SNP
- f) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan
- g) Jumlah anggota perpustakaan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Badung mencatat capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 74,96, menempatkannya sebagai peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Bali, setelah Kota Denpasar (76,11) dan Karangasem (75,43). Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam pembangunan literasi masyarakat melalui penguatan layanan perpustakaan.

Beberapa komponen utama yang berkontribusi terhadap capaian indeks tersebut menunjukkan performa yang sangat baik. Pemerataan layanan perpustakaan di Badung mencapai 0,8406, jauh di atas rata-rata provinsi (0,6813), yang menunjukkan bahwa distribusi fasilitas perpustakaan relatif merata di wilayah ini. Ketersediaan koleksi perpustakaan juga cukup memadai dengan skor 0,4564, menjadi salah satu yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Begitu pula dengan rasio kecukupan tenaga perpustakaan yang mencapai 0,8166, tertinggi kedua setelah Denpasar, menandakan bahwa sumber daya manusia pengelola perpustakaan cukup tersedia untuk melayani masyarakat.

Meski demikian, tingkat kunjungan masyarakat per hari di Badung berada pada angka 0,1338, yang masih di bawah rata-rata provinsi (0,1836). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan SDM sudah relatif memadai, intensitas pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat masih dapat ditingkatkan. Namun, partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi perpustakaan tetap tinggi dengan skor sempurna 1, yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya literasi mulai tumbuh.

Secara umum, pencapaian Kabupaten Badung dalam pembangunan literasi masyarakat menunjukkan performa yang solid, didukung oleh pemerataan fasilitas, kecukupan koleksi, dan tenaga yang mumpuni. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan intensitas kunjungan harian agar manfaat perpustakaan sebagai pusat informasi dan edukasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Komponennya Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karang Asem	Buleleng	Kota Denpasar	Provinsi Bali
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,54	60,14	74,96	55,96	64,57	49,92	75,43	68,46	76,11	66,05
Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,6399	0,4882	0,8406	0,6563	0,6022	0,5956	1	0,7746	0,751	0,6813
Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	0,2206	0,3772	0,4564	0,1895	0,2839	0,3576	0,5018	0,1196	0,4143	0,298
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0,0696	0,1877	0,8166	0,3244	0,5391	0,2104	0,568	0,7078	0,7015	0,4604
Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	0,0977	0,1569	0,1338	0,0455	0,0946	0,1274	1	0,1905	0,4611	0,1836
Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	1	1	1	1	1	0,2031	0,2102	1	1	1
Jumlah Anggota Perpustakaan	1	1	1	0,7018	1	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

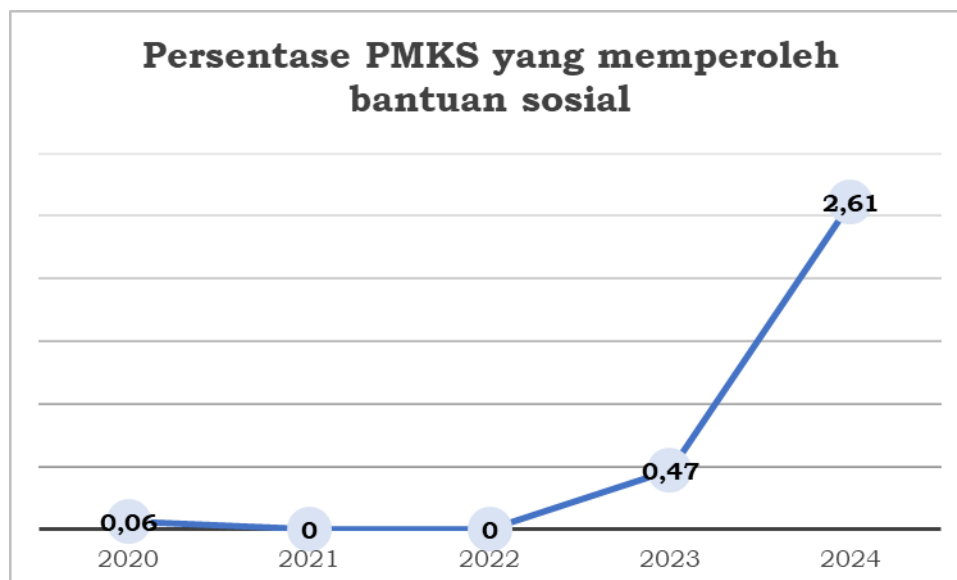
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya 0,06% PMKS yang mendapatkan bantuan sosial, dan angka ini bahkan turun menjadi 0% pada tahun 2021 dan 2022, menunjukkan bahwa tidak ada penerima bantuan sosial yang terdata dalam dua tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023, persentase penerima bantuan kembali meningkat menjadi 0,47% dan melonjak tajam pada tahun 2024 hingga mencapai 2,61%.

Gambar 2. 14

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024



Sumber: Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2025

Fluktuasi ini dapat diinterpretasikan dari beberapa faktor utama. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya angka penerima bantuan sosial pada periode 2020-2022 adalah adanya kendala dalam pendataan dan distribusi bantuan. Kabupaten Badung sebagai daerah dengan tingkat pendapatan per kapita yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Bali sering kali dianggap memiliki tingkat kesejahteraan

yang lebih baik, sehingga alokasi bantuan sosial untuk PMKS mungkin tidak menjadi prioritas utama. Selain itu, perubahan kebijakan terkait bantuan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah, juga dapat memengaruhi pola distribusi bantuan.

Meningkatnya persentase penerima bantuan sosial pada tahun 2023 dan lonjakan signifikan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam kebijakan dan implementasi program kesejahteraan sosial. Peningkatan ini bisa dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan program bantuan sosial, baik melalui alokasi anggaran yang lebih besar maupun perbaikan mekanisme pendataan yang lebih inklusif. Faktor lain yang berkontribusi adalah dampak ekonomi pascapandemi COVID-19, di mana kelompok masyarakat rentan, termasuk PMKS, semakin membutuhkan intervensi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Peningkatan ini juga dapat mencerminkan adanya kesadaran yang lebih tinggi di tingkat masyarakat dan pemerintah terkait pentingnya bantuan sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan. Program-program yang lebih terarah, seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan subsidi bagi kelompok rentan yang telah diimplementasikan secara lebih efektif dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya

Kinerja urusan seni dan budaya di Kabupaten Badung menunjukkan perkembangan yang signifikan sepanjang periode 2022–2024. Berdasarkan indikator Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang tercatat dalam dokumen kinerja perangkat daerah, capaian program ini berhasil direalisasikan secara optimal dengan tingkat pencapaian 100% pada tahun 2023 dan 2024.

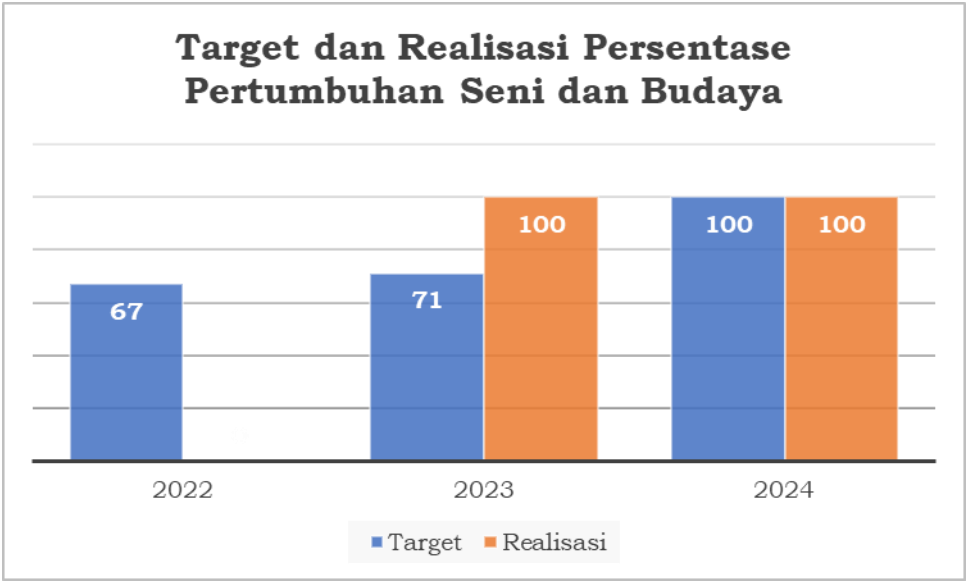
Grafik target dan realisasi persentase pertumbuhan seni dan budaya memperlihatkan tren perbaikan yang jelas. Pada tahun 2022, target pertumbuhan ditetapkan sebesar 67%, namun realisasi belum tercapai (0%) sehingga menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program di tahun tersebut. Kondisi ini membaik secara signifikan pada tahun 2023, di mana target sebesar 71% berhasil dilampaui dengan realisasi

100%. Pencapaian positif ini berhasil dipertahankan hingga tahun 2024, di mana target dan realisasi sama-sama berada pada tingkat 100%.

Konsistensi realisasi penuh selama dua tahun terakhir mencerminkan efektivitas kebijakan dan program daerah dalam mendukung pelestarian serta pengembangan seni dan budaya. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan masyarakat pelaku seni, fasilitasi sarana kesenian tradisional, serta kolaborasi aktif dengan komunitas budaya lokal.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung mampu mengakselerasi pertumbuhan seni dan budaya secara signifikan setelah mengalami keterlambatan pada awal periode. Capaian 100% tidak hanya menandakan kesesuaian program dengan target, tetapi juga memperlihatkan potensi penguatan sektor seni budaya sebagai bagian dari daya tarik pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif di daerah.

Gambar 2. 15
Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya di
Kabupaten Badung Tahun 2022 -2024



Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

Beberapa faktor utama mendukung pencapaian ini. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah yang memberikan perhatian lebih pada sektor seni dan budaya, baik melalui penyediaan fasilitas bagi para pelaku seni maupun penyelenggaraan berbagai festival budaya yang berkontribusi terhadap daya tarik daerah. Sebagai destinasi wisata utama di Bali, Kabupaten Badung memiliki komitmen kuat untuk melestarikan warisan budaya, sehingga berbagai program pendukung terus digalakkan. Selain itu, pemulihan ekonomi pascapandemi turut memainkan peran penting. Kembalinya aktivitas pariwisata memungkinkan berbagai pertunjukan seni dan kegiatan budaya kembali diadakan dalam skala yang lebih luas, sehingga menghidupkan kembali sektor ini. Tak hanya itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya juga menjadi faktor pendorong yang signifikan, di mana banyak komunitas maupun individu semakin aktif dalam menciptakan dan mengembangkan karya seni serta acara budaya.

Keberhasilan dalam mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan menegaskan efektivitas strategi pengembangan seni dan budaya yang diterapkan di Kabupaten Badung. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif, termasuk memperkuat ekosistem seni dan budaya yang mandiri serta mampu berdaya saing di tingkat yang lebih luas. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Badung dapat terus mempertahankan pertumbuhan sektor ini dan menjadikannya sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu:

- 1) Kesehatan reproduksi (diukur dengan angka kematian ibu dan kelahiran remaja).

- 2) Pemberdayaan (diukur dengan proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan serta tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan).
- 3) Partisipasi ekonomi (diukur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan).

Indeks ketimpangan gender memiliki skala 0 hingga 1, di mana:

- a) Nilai 0 menunjukkan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan.
- b) Nilai 1 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat tinggi.

Tabel 2. 33

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung 2020-2024

Tahun	Indeks Ketimpangan Gender	
	Kabupaten Badung	Provinsi Bali
2020	0,142	0,305
2021	0,13	0,265
2022	0,118	0,321
2023	0,126	0,239
2024	0,186	0,183

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan sejauh mana ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi pasar kerja. Nilai indeks berkisar antara 0–1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan ketimpangan gender yang rendah.

Selama periode 2020–2024, IKG Kabupaten Badung cenderung berada pada level yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Bali. Pada tahun 2020, IKG Badung tercatat sebesar 0,142, lebih rendah dibandingkan Bali (0,305). Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Badung relatif kecil pada awal periode. Tren penurunan terjadi hingga tahun 2022, mencapai titik terendah sebesar 0,118, yang mengindikasikan peningkatan kesetaraan gender.

Namun, pada tahun 2024 terjadi kenaikan cukup signifikan menjadi 0,186, meskipun masih setara dengan capaian Provinsi

Bali (0,183). Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam mempertahankan capaian kesetaraan gender, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi, perubahan struktur lapangan kerja, serta dampak pemulihan pascapandemi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Secara keseluruhan, capaian IKG Kabupaten Badung menunjukkan bahwa kesenjangan gender relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Meski demikian, fluktuasi nilai dalam lima tahun terakhir menggarisbawahi perlunya kebijakan yang konsisten untuk mendorong pemberdayaan perempuan, mengurangi hambatan partisipasi di pasar kerja, serta meningkatkan akses setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, nilai IKK menggunakan metadata lama di Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 1,14 poin, dari 82,37 persen (2022) menjadi 81,23 persen (2023) begitu juga pada metadata baru mengalami penurunan sebesar 0,65 poin, dari 82,14 persen (2022) menjadi 81,49 persen (2023). Pada tahun 2023, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru diperoleh nilai IKK Provinsi Bali lebih tinggi jika dibandingkan nilai IKK nasional (Gambar 4.2). Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Bali pada tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga pada kategori **‘Responsif Gender dan Hak Anak’**.

1) Dimensi Penyusunan IKK Provinsi Bali

Dimensi penyusunan IKK terdiri dari 5 (lima) dimensi. Pada tahun 2023, dari lima dimensi penyusun IKK, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru terdapat dua dimensi mengalami peningkatan dan tiga dimensi mengalami penurunan nilai jika dibandingkan tahun 2022. Dua dimensi yang mengalami peningkatan nilai diantaranya dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) dan dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB). Sedangkan nilai dimensi yang mengalami penurunan adalah dimensi Kualitas Legalitas- Struktur (KLS), dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), dan dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP).

Nilai dimensi pada metadata lama yang mengalami peningkatan tertinggi adalah dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) sebesar 0,67 poin (dari 70,50 persen di Tahun 2022 menjadi 71,17 persen di Tahun 2023). Sedangkan pada metadata baru yang mengalami peningkatan tertinggi adalah dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) sebesar 1,92 poin (dari 82,36 persen di Tahun 2022 menjadi 84,28 persen di Tahun 2023).

2) Indikator Penyusunan IKK Provinsi Bali

a) Dimensi Kualitas Legalitas Struktur

Dimensi KLS terdiri dari 2 (dua) indikator untuk metadata lama dan 3 (tiga) indikator untuk metadata baru. Pada tahun 2023 menggunakan metadata lama, dari dua indikator penyusun dimensi KLS, satu indikator mengalami peningkatan nilai dan satu indikator mengalami peningkatan nilai jika dibandingkan tahun 2022. Sedangkan pada metadata baru, dari tiga indikator penyusun dimensi KLS, dua indikator mengalami penurunan nilai dan satu indikator mengalami peningkatan nilai jika dibandingkan tahun 2022 (Tabel 2.39).

Pada tahun 2023 baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru, indikator 2 (persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran) mengalami peningkatan nilai persentase tertinggi (+1,01%) jika dibandingkan tahun 2022, artinya semakin banyak keluarga di Provinsi Bali yang anaknya (0-17 tahun) memiliki akta kelahiran.

b) Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik

Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik terdiri dari 6 (enam) indikator. Pada tahun 2023 menggunakan metadata lama maupun metadata baru, dari enam indikator penyusun dimensi KKF empat indikator mengalami peningkatan nilai persentase jika dibandingkan tahun 2022, sedangkan dua indikator lainnya mengalami penurunan nilai persentase. Empat indikator yang mengalami peningkatan adalah indikator 4, 5, 8 dan 9 pada Tabel 2.39.

Pada metadata lama maupun metadata baru, indikator 5 (persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan) merupakan indikator dengan peningkatan nilai persentase tertinggi (+7,44%) jika dibandingkan tahun 2022, artinya semakin banyak keluarga di Provinsi Bali yang mengalami keluhan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Kesehatan keluarga berkontribusi pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

c) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi

Dimensi KKE terdiri dari 6 (enam) indikator. Pada tahun 2023 menggunakan metadata lama, dari enam indikator penyusun dimensi KKE tiga diantaranya mengalami peningkatan nilai persentase jika dibandingkan tahun 2022 dan tiga indikator lainnya mengalami penurunan nilai (untuk indikator 11, 12 dan 15). Sedangkan pada metadata baru, dari enam indikator penyusun dimensi KKE empat diantaranya mengalami peningkatan nilai persentase jika dibandingkan tahun 2022 dan dua indikator lainnya mengalami penurunan nilai yaitu pada indikator 11 dan 15 (Tabel 2.39).

Tahun 2023 pada dimensi KKE, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan bahwa indikator 16 (persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja) merupakan indikator dengan peningkatan nilai persentase tertinggi (+1,90% menggunakan metadata lama dan +5,51% menggunakan metadata baru) jika dibandingkan tahun 2022 disusul indikator 13 (persentase rumah tangga yang ada art memiliki asuransi kesehatan (BPJS)/lainnya)) sebesar +1,78% menggunakan metadata lama dan +4,28% menggunakan metadata baru jika dibandingkan tahun 2022. Meningkatnya indikator 16 artinya, semakin tinggi kontribusi perempuan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga serta menunjukkan semakin tinggi kesetaraan gender dalam kontribusi ekonomi dalam keluarga.

Sedangkan indikator 12 (persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening

tabungan) menggunakan metadata lama merupakan indikator dengan penurunan nilai persentase tertinggi (-2,59%) jika dibandingkan tahun 2022. Artinya, semakin sedikit keluarga di Provinsi Bali yang memiliki tabungan. Tabungan memiliki 2 (dua) peran utama bagi keluarga yaitu sebagai pendanaan masa depan dan untuk mengatasi ketidakpastian pendapatan. Tanpa memiliki tabungan maka berdampak keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat berdampak pada konflik keluarga dan perceraian.

Berdasarkan hasil Susenas Agustus 2023 bahwa Provinsi Bali menempati peringkat ke-2 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yaitu sebesar 77,08%. Hal ini sejalan dengan nilai EPR (Employment to Population Ratio) Provinsi Bali sebesar 75 yang juga menempati peringkat ke-2 dimana EPR. Berdasarkan Sakernas Agustus 2021-2023: Proporsi jumlah penduduk perempuan bekerja berdasarkan Sakernas Agustus 2021 di Provinsi Bali sebanyak 46,37%, kemudian menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar 45,39% dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 46,17%. Jika dilihat dari proporsi proporsi penduduk bekerja lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan selisih kurang dari 10%. Akan tetapi jika dilihat dari jumlahnya, jumlah laki-laki bekerja mengalami fluktuasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 (Tahun 2021 sebanyak 1.309.572 orang. Tahun 2022 sebanyak 1.423.780 dan Tahun 2023 sebanyak 1.409.049). Berbeda dengan jumlah perempuan bekerja yang mengalami kenaikan setiap tahun (Tahun 2021 sebanyak 1.132.282 orang, Tahun 2022 sebanyak 1.183.290 orang dan Tahun 2023 sebanyak 1.208.767 orang). Peningkatan jumlah perempuan bekerja setiap tahun menunjukkan bahwa eksistensi perempuan dalam dunia kerja semakin terlihat.

Meningkatnya jumlah perempuan bekerja di Provinsi Bali didukung dengan adanya program prioritas jangka pendek pemerintah Provinsi Bali di bidang Ketenagakerjaan yaitu:

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja melalui inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja
- Fasilitasi akses memperoleh kesempatan kerja di luar Bali
- Membuka kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan Pemda luar Bali, Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Asing
- Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai kebutuhan pasar kerja
- Program peningkatan kegiatan bursa tenaga kerja, melalui perluasan dan peningkatan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta peningkatan frekuensi pelaksanaan yang bersinergi dengan para pihak terkait.

Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Bali periode tahun 2023, UPTD BLKIP Provinsi Bali melakukan berbagai jenis pelatihan kerja. Dari sebanyak 368 orang pencari kerja yang dilatih baik melalui alokasi APBD (80 orang) maupun APBN (288 orang), sebanyak 197 orang telah terserap di dunia kerja (53,53%). Selain itu, dilaksanakan Job Fair/Bursa Kerja untuk memfasilitasi pencari kerja. Dari target job fair sebanyak 750 orang, sebanyak 77 orang terserap di DUDI dari total 524 orang.

Selain itu, dilaksanakan Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal yang dikembangkan di Kabupaten/Kota di Bali sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pada tahun 2023 pengembangan kawasan dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten/kota dengan target 4 kawasan tersebut dan terealisasi sesuai target yaitu 4 kawasan. Tahun 2023 Provinsi Bali menargetkan penduduk bekerja sebesar 97,68% dan terealisasi sebesar 97,31%.

Provinsi Bali memiliki program JKN-KBS (Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera). Program ini adalah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Bali. Program ini merupakan integrasi dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tambahan layanan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui program Krama Bali

Sejahtera (KBS). Fitur utama JKN-KBS adalah: 1) Integrasi dengan JKN: Masyarakat Bali yang terdaftar dalam JKN-KBS tetap memiliki akses ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada dalam program JKN, dengan tambahan layanan khusus dari Pemprov Bali. 2) Biaya Layanan Kesehatan Tambahan: Beberapa layanan kesehatan tambahan yang tidak ditanggung oleh JKN akan dicover oleh KBS, seperti layanan kesehatan tradisional Bali. 3) Fokus pada Krama Bali: Program ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Bali, dengan mempertimbangkan aspek budaya dan adat istiadat lokal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. Misi 3 yaitu Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan krama bali berbasis kecamatan. Dengan tujuan/misi: meningkatkan derajat kesehatan bali. Sasaran RPJMD: 1) terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama bali; 2) meningkatkan standart kualitas pelayanan kesehatan krama bali; 3) meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat. Strategi: 1) pendalaman riwayat dan pelayanan kesehatan krama bali; 2) pemberdayaan komunitas formal dan informal krama bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan krama bali sejahtera (KBS).

d) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi

Dimensi KKSP terdiri dari 4 (empat) indikator menggunakan metadata lama dan (3) tiga indikator menggunakan metadata baru. Pada tahun 2023 menggunakan metadata lama, dari empat indikator penyusun KSSP dua diantaranya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022, sedangkan dua indikator lainnya mengalami peningkatan nilai persentase. Sedangkan menggunakan metadata baru dua indikator mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022

dan satu indikator mengalami peningkatan nilai persentase.

Tahun 2023 pada dimensi KKSP baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru, indikator 22-23 (persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua) merupakan indikator dengan penurunan nilai persentase paling tinggi (-0,44%) jika dibandingkan tahun 2022. Indikator 21 (persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir) merupakan indikator dengan peningkatan paling tinggi (+0,27%). Artinya, semakin banyak keluarga di Provinsi Bali yang melakukan rekreasi. Rekreasi bersama keluarga berdampak pada peningkatan interaksi, ikatan, keeratan (bonding), dan komunikasi anggota keluarga serta penyegaran jasmani dan rohani seluruh keluarga. Tanpa rekreasi bersama, maka keluarga cenderung stress, dan rentan dari sosial psikologi.

e) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi KKSB terdiri dari 6 (enam) indikator. Pada tahun 2023 menggunakan metadata lama maupun baru, dari enam indikator penyusun dimensi KKSB empat diantaranya mengalami peningkatan nilai persentase dari tahun 2022 ke tahun 2023, sedangkan dua indikator lainnya mengalami penurunan nilai persentase. Dua indikator yang mengalami penurunan nilai adalah indikator 25 dan 27 (Tabel 2.39).

Tahun 2023 pada dimensi KKSB, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru, indikator 26 (persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial) merupakan indikator dengan peningkatan nilai persentase paling tinggi (+4,18% menggunakan metadata lama dan +4,18% menggunakan metadata baru) jika dibandingkan tahun 2022. Artinya, semakin banyak keluarga di Provinsi Bali yang memiliki kepedulian pada kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial merupakan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat terpuji dari keluarga ini merupakan kekuatan keluarga dan masyarakat karena mengedepankan sifat untuk memberi bukan menerima.

Tanpa berpartisipasi dalam kegiatan sosial maka berdampak pada keluarga menjadi rentan dari sisi sosial budaya.

Tabel 2. 34
Indikator, Dimensi dan indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bali Tahun 2022-2023

NO	IKK/DIMENSI/INDIKATOR	Metadata Lama			Metadata Baru		
		2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	82,37	81,23	-1,14	82,14	81,49	-0,65
I	Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)	90,13	86,79	-3,34	87,32	85,04	-2,28
1	Kepemilikan Buku Nikah	-	-	-	81,8	81,64	-0,15
2	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	93,47	94,48	1,01	93,47	94,48	1,01
3	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	93,39	89,55	-3,84	93,39	89,55	-3,84
II	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	83,8	81,98	-1,82	83,26	81,2	-2,06
4	Persentase rumah tangga yang tidak ada saat di mana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya	93,16	95,69	2,53	93,16	95,69	2,53
5	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan.	40,22	47,66	7,44	40,22	47,66	7,44
6	PoU semua umur	7,72	3,77	-3,95	7,72	3,77	-3,95
7	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	99,85	99,84	-0,01	99,85	99,84	-0,01
8	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	0,4	0,53	0,13	0,79	1,09	0,30
9	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)	22,75	28,88	6,13	22,75	28,88	6,13
III	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	83,38	83,7	0,32	82,36	84,28	1,92
10	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	87,25	87,69	0,44	87,25	87,69	0,44
11	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi	96,32	96,09	-0,23	96,32	96,09	-0,23
12	Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	69,6	67,01	-2,59	77,33	77,55	0,22
13	Persentase rumah tangga yang ada art memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	88,23	90,01	1,78	75,79	80,07	4,28
15	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	0,27	0,06	-0,21	0,27	0,06	-0,21
16	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja	63,94	65,84	1,90	71,53	77,04	5,51
IV	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)	76,7	76,56	-0,14	80,74	80,56	-0,18
19	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun	34	34,04	0,04	-	-	-

NO	IKK/DIMENSI/INDIKATOR	Metadata Lama			Metadata Baru		
		2022	2023	Perubahan	2022	2023	Perubahan
	yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir						
20	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	1,03	0,72	-0,31	1,03	0,72	-0,31
21	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	45,58	45,85	0,27	45,58	45,85	0,27
22-23	Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua	98,09	97,65	-0,44	98,09	97,65	-0,44
V	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB)	70,5	71,17	0,67	70,5	71,17	0,67
24	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	3,9	4,95	1,05	3,9	4,95	1,05
25	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap	95,76	95,74	-0,02	95,76	95,74	-0,02
26	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	81,31	85,49	4,18	81,31	85,49	4,18
27	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	37,99	36,66	-1,33	37,99	36,66	-1,33
28	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	75,82	76,11	0,29	75,82	76,11	0,29
29	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet	20,58	20,79	0,21	20,58	20,79	0,21

Sumber: Buku Indeks Kualitas Keluarga, 2025

2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Badung pada tahun tertentu menunjukkan angka 39,19, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (160.100 jiwa) dengan penduduk usia produktif (408.500 jiwa). Angka ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 39 penduduk usia non-produktif, baik yang berusia di bawah 15 tahun maupun di atas 64 tahun. Dengan rasio ketergantungan yang relatif rendah, Kabupaten Badung berada dalam kondisi demografis yang cukup menguntungkan, di mana jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi masih jauh lebih besar dibandingkan mereka yang bergantung pada kelompok produktif.

Tabel 2. 35
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2024

Kelompok Usia		Jumlah (ribu jiwa)		Rasio Ketergantungan Penduduk
Non Produktif	0-4	39,7	160,1	39,19
	5-9	35,5		
	10-14	36,7		
	65-69	19,2		
	70-74	13,4		
	75+	15,6		
Produktif	15-19	42,2	408,5	
	20-24	45,2		
	25-29	45,7		
	30-34	41,8		
	35-39	39,4		
	40-44	41,1		
	45-49	44,6		
	50-54	43,4		
	55-59	37,7		
	60-64	27,4		

Sumber: Olahan data BPS Kabupaten Badung, 2025

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, salah satunya adalah struktur demografi yang menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, yang sejalan dengan tren bonus demografi yang sedang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kabupaten Badung sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata utama di Bali memiliki daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja usia produktif, baik dari penduduk lokal maupun pendatang. Sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif yang berkembang pesat di wilayah ini cenderung menarik angkatan kerja yang relatif muda dan berusia produktif, yang pada akhirnya turut menekan angka ketergantungan. Selain itu, tingkat ketergantungan yang moderat juga dapat mencerminkan adanya pergeseran pola keluarga, di mana peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan berdampak pada penurunan angka kelahiran, sehingga jumlah penduduk usia muda yang belum bekerja tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

Dengan demikian, meskipun rasio ketergantungan Kabupaten Badung saat ini masih dalam kondisi yang relatif aman, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas demografi dan ekonomi jangka

panjang. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci untuk memastikan bahwa kelompok usia produktif dapat terus berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian, sementara di sisi lain, sistem perlindungan sosial bagi kelompok non-produktif juga harus diperkuat agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi generasi mendatang.

B. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur proporsi penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Capaian ini menjadi indikator penting dalam menilai aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Selama periode 2020–2024, APS Kabupaten Badung pada jenjang Sekolah Dasar (SD) berada pada tingkat sangat tinggi dan mendekati 100%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia SD telah mendapatkan akses pendidikan dasar. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 99,99%, mengindikasikan keberhasilan kebijakan wajib belajar dan pemerataan akses pendidikan dasar.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), APS juga menunjukkan capaian tinggi di atas 99% pada tahun 2020, 2023, dan 2024. Namun, terjadi penurunan tajam pada 2021 (84,71%) dan 2022 (84,23%), yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan pendidikan dan partisipasi sekolah, terutama pada jenjang menengah pertama.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU), capaian APS berada pada kisaran 81–94%. Meskipun sempat menurun pada 2021 dan 2022, angka ini kembali meningkat signifikan pada 2023 (90,3%) dan 2024 (94,52%), mencerminkan adanya pemulihan pascapandemi dan perbaikan akses pendidikan menengah atas.

Pada jenjang Perguruan Tinggi, partisipasi masih relatif rendah dibandingkan jenjang sebelumnya. APS tahun 2020 tercatat sebesar 31,65%, kemudian data tahun 2021–2022 tidak tersedia. Pada 2023 dan 2024, APS meningkat menjadi 42,88%

dan 43,76%. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan, namun tetap mengindikasikan adanya tantangan dalam mendorong lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, minat, atau kesiapan akademik.

Tabel 2. 36

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Kelompok Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Badung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah Dasar (SD)	99,86	99,41	98,2	99,99	99,99
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	99,19	84,71	84,23	99,49	99,81
Sekolah Menengah Umum (SMU)	91,27	82,02	81,94	90,3	94,52
Perguruan Tinggi	31,65	-	-	42,88	43,76

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Secara umum, APS Kabupaten Badung memperlihatkan capaian yang baik, terutama pada pendidikan dasar dan menengah. Kendati demikian, fluktuasi pada jenjang SMP dan SMU selama masa pandemi, serta rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan partisipasi sekolah, pengurangan hambatan ekonomi, serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan untuk semua jenjang.

C. Angka Partisipasi Kasar

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung tahun 2020–2024, capaian partisipasi pendidikan di seluruh jenjang menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), APK cenderung tinggi dan relatif stabil pada awal periode, tercatat sebesar 106 pada tahun 2020 dan masih berada pada angka 105,84 pada tahun 2022. Namun, mulai tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 104,28 dan berlanjut menjadi 98,72 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat menjadi indikasi menurunnya daya tarik atau aksesibilitas pendidikan dasar, meskipun secara umum APK di jenjang ini masih cukup baik dan mendekati universal.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), APK sempat meningkat dari 89,68 pada tahun 2020 menjadi 94,71 pada 2022. Namun, tren tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan hingga mencapai 88,57. Hal

ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan partisipasi pendidikan pada masa transisi dari SD ke SMP, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.

Sementara itu, jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) juga mengalami pola serupa, dengan peningkatan dari 92,55 (2020) hingga 98,12 (2022), namun kembali menurun tajam menjadi 93,84 (2023) dan 83,40 (2024). Penurunan APK di jenjang ini menjadi sinyal penting yang menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan menengah atas.

Pada jenjang Perguruan Tinggi, data yang tersedia menunjukkan APK sebesar 41,21 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 48,42 pada tahun 2023. Walaupun data tidak lengkap untuk seluruh tahun, peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses pendidikan tinggi, yang perlu terus didorong agar keterampilan dan daya saing generasi muda Kabupaten Badung dapat ditingkatkan.

Tabel 2. 37
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Kelompok Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah Dasar (SD)	106	105,61	105,84	104,28	98,72
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	89,68	90,69	94,71	99	88,57
Sekolah Menengah Umum (SMU)	92,55	95,73	98,12	93,84	83,40
Perguruan Tinggi	41,21	-	-	48,42	-

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Secara keseluruhan, fluktuasi APK di Kabupaten Badung selama periode 2020–2024 menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran program beasiswa, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan, serta memperluas layanan pendidikan nonformal sebagai strategi untuk meningkatkan kembali partisipasi pendidikan di masa mendatang. Upaya ini akan menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan SDM unggul dan berdaya saing dalam RPJMD Kabupaten Badung.

D. Angka Partisipasi Murni

Data Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan di seluruh jenjang pendidikan formal, yang menandakan semakin banyaknya anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan sesuai jenjang usianya. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), APM terus meningkat dari 99,75 pada tahun 2020 menjadi 106,56 pada tahun 2024. Nilai APM yang melebihi 100 persen mengindikasikan adanya siswa usia di atas atau di bawah usia sekolah dasar yang masih terdaftar di jenjang tersebut, yang dalam konteks ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga akses universal pendidikan dasar.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), APM juga mengalami peningkatan signifikan dari 84,48 pada tahun 2020 menjadi 95,01 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam keterjangkauan dan kesinambungan pendidikan pada jenjang menengah pertama, yang sangat penting sebagai fondasi pembentukan kompetensi dasar remaja.

Pada jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU), APM juga memperlihatkan tren yang sangat positif. Dari angka 80,15 pada tahun 2020, APM meningkat konsisten hingga mencapai 95,75 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan menengah atas telah berjalan cukup efektif, terutama dalam memastikan bahwa anak-anak usia sekolah di jenjang ini benar-benar mengenyam pendidikan pada tingkat yang sesuai.

Sementara itu, untuk jenjang Perguruan Tinggi, data APM hanya tersedia pada tahun 2020 (31,27) dan tahun 2023 (41,51), yang memperlihatkan peningkatan akses pendidikan tinggi, meskipun cakupannya masih tergolong rendah. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam RPJMD untuk merancang kebijakan afirmatif dan fasilitasi pendidikan tinggi, agar lulusan jenjang menengah atas memiliki kesempatan lebih luas melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. 38
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Kelompok Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah Dasar (SD)	99,75	99,41	98,2	99,5	106,56
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	84,48	84,71	84,23	91,4	95,01
Sekolah Menengah Umum (SMU)	80,15	82,02	81,94	83,08	95,75
Perguruan Tinggi	31,27	-	-	41,51	-

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

Secara keseluruhan, tren APM Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah positif, mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan pemerataan dan kesinambungan pendidikan. Namun demikian, capaian ini perlu terus ditingkatkan dan dijaga melalui kebijakan yang menjamin keberlangsungan sekolah, kualitas layanan pendidikan, serta dukungan sosial ekonomi bagi keluarga kurang mampu.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung pada periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa sektor Industri Pengolahan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberikan kontribusi yang berbeda terhadap struktur perekonomian daerah. Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan menunjukkan peningkatan dari Rp2.157,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.609,05 miliar pada tahun 2024. Namun, jika dilihat dari rasio terhadap total PDRB, sektor ini mengalami tren penurunan dari 4,40% pada tahun 2020 menjadi hanya 3,47% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun nilai nominal sektor Industri Pengolahan terus bertambah, pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor lain di Kabupaten Badung. Salah satu penyebabnya adalah struktur ekonomi daerah yang tidak bertumpu pada basis industri manufaktur, melainkan pada sektor pariwisata dan jasa.

Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memperlihatkan dinamika pertumbuhan yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar

Rp11.993,93 miliar terhadap PDRB dan sempat menurun pada tahun 2021 menjadi Rp10.415,39 miliar akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata. Namun sejak tahun 2022, sektor ini menunjukkan pemulihan yang kuat dengan peningkatan PDRB menjadi Rp13.034,22 miliar, kemudian naik menjadi Rp16.870,40 miliar pada tahun 2023, dan mencapai Rp19.318,41 miliar pada tahun 2024. Rasio sektor ini terhadap total PDRB juga meningkat dari 23,21% pada tahun 2021 menjadi 25,72% pada tahun 2024, mencerminkan pulihnya mobilitas wisatawan domestik dan mancanegara yang berdampak langsung pada meningkatnya permintaan layanan perhotelan, restoran, dan jasa pendukung pariwisata lainnya.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Badung masih sangat bergantung pada sektor pariwisata, khususnya pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB daerah. Sementara itu, kontribusi sektor Industri Pengolahan cenderung stagnan dan proporsinya terhadap total PDRB terus menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi ekonomi yang mendorong pengembangan sektor industri berbasis nilai tambah, investasi, dan inovasi agar perekonomian daerah tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal pada sektor pariwisata.

Tabel 2. 39

Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)

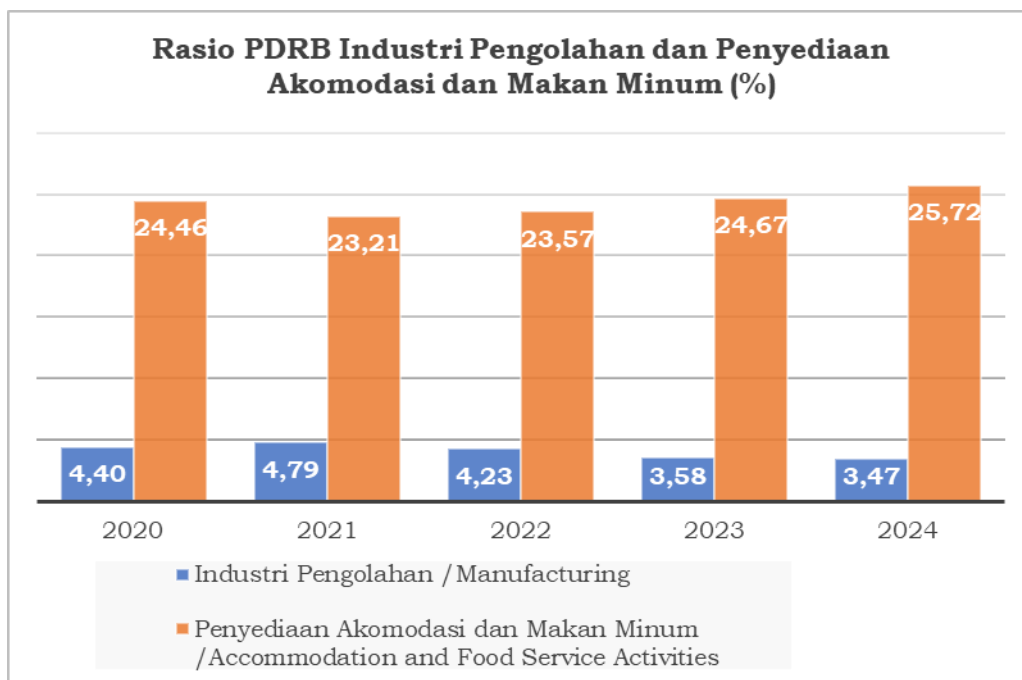
Lapangan Usaha		Industri Pengolahan /Manufacturing	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum /Accommodation and Food Service Activities
PDRB (miliar rupiah)	2020	2.157,15	11.993,93
	2021	2.149,64	10.415,39
	2022	2.340,27	13.034,22
	2023	2.447,36	16.870,40
	2024	2.609,05	19.318,41
Rasio terhadap total PDRB (%)	2020	4,4	24,46
	2021	4,79	23,21

Lapangan Usaha		Industri Pengolahan /Manufacturing	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum /Accommodation and Food Service Activities
	2022	4,23	23,57
	2023	3,58	24,67
	2024	3,47	25,72

Sumber: Olahan Data BPS Kabupaten Badung, 2025

Gambar 2. 16

Grafik Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)



Sumber: Olahan Data BPS Kabupaten Badung, 2025

B. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor yang bersumber dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang memanfaatkan kekayaan intelektual untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Walaupun kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung belum dipisahkan secara khusus menurut 17 subsektor ekonomi kreatif (seperti aplikasi

dan game, desain, kriya, kuliner, seni pertunjukan, musik, hingga televisi dan radio), beberapa kategori lapangan usaha dalam PDRB memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekonomi kreatif.

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Badung periode 2020–2024, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tetap menjadi kontributor terbesar yang erat kaitannya dengan subsektor kuliner dan jasa pendukung pariwisata. Proporsi sektor ini berada pada kisaran 23%–26% selama lima tahun terakhir, dengan kenaikan dari 23,57% pada 2022 menjadi 24,67% pada 2023 dan mencapai 25,72% pada 2024. Kestabilan dan tren kenaikan ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata pascapandemi COVID-19, yang meningkatkan permintaan pada hotel, restoran, dan layanan kuliner.

Sektor Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan perkembangan signifikan yang mendukung aktivitas ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor pariwisata, distribusi produk kreatif, dan event. Proporsinya meningkat tajam dari 12,78% pada 2021 menjadi 20,76% pada 2022, lalu mencapai 27,97% pada 2023 dan 28,44% pada 2024. Lonjakan ini erat kaitannya dengan meningkatnya mobilitas wisatawan dan perbaikan konektivitas pascapembatasan perjalanan internasional.

Sementara itu, sektor Informasi dan Komunikasi, yang mendukung subsektor ekonomi kreatif digital seperti aplikasi, game, film, dan media, cenderung menurun dalam kontribusinya terhadap PDRB. Setelah mencapai puncak sebesar 9,08% pada 2021, proporsinya turun menjadi 7,48% pada 2022, lalu merosot ke 6,16% pada 2023 dan 5,96% pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas daring setelah pembatasan mobilitas berakhir, sehingga sebagian besar kegiatan ekonomi kembali ke pola luring (offline).

Sektor lain yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi kreatif, seperti Perdagangan Besar dan Eceran serta Jasa Perusahaan, relatif stabil di kisaran 6%–8% dan di bawah 1%. Namun, sektor Industri Pengolahan, yang menjadi basis bagi subsektor desain produk, kriya, dan fesyen, justru mengalami penurunan

proporsi dari 4,79% pada 2021 menjadi 3,47% pada 2024, walaupun secara nilai nominal masih tumbuh.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Badung masih sangat bergantung pada pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi kreatif, dengan subsektor kuliner, transportasi, dan akomodasi sebagai motor penggerak utama. Namun, subsektor ekonomi kreatif berbasis digital dan manufaktur kreatif memerlukan dukungan lebih lanjut melalui kebijakan inovasi, investasi, dan pengembangan SDM untuk mendorong diversifikasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kreatif di masa depan.

Tabel 2. 40

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung

Sektor	Proporsi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,60	8,51	7,16	6,08	5,88
Pertambangan dan Penggalian	0,34	0,36	0,31	0,26	0,23
Industri Pengolahan	4,40	4,79	4,23	3,58	3,47
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,16	0,14	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,27	0,23	0,20	0,19
Konstruksi	11,22	11,64	10,28	8,53	7,91
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,79	8,55	7,82	6,93	6,69
Transportasi dan Pergudangan	17,10	12,78	20,76	27,97	28,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,46	23,21	23,57	24,67	25,72
Informasi dan Komunikasi	7,97	9,08	7,48	6,16	5,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	3,32	3,17	2,99	3,25
Real Estat	4,10	4,60	3,99	3,33	3,16
Jasa Perusahaan	0,84	0,90	0,83	0,74	0,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	4,46	3,77	3,19	3,27
Jasa Pendidikan	3,91	4,34	3,55	2,90	2,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,76	2,02	1,70	1,44	1,36
Jasa Lainnya	0,96	1,03	0,99	0,89	0,90
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

C. Indeks Inovasi Daerah

Kabupaten Badung memperoleh skor 62,9 dalam Indeks Inovasi Daerah 2024 dan masuk dalam kategori Sangat Inovatif. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Bali, Badung

berada di posisi keempat setelah Kota Denpasar (71,17), Klungkung (67,75), dan Bangli (63,33), yang juga masuk dalam kategori Sangat Inovatif. Sementara itu, kabupaten seperti Buleleng (60,98) juga masuk kategori yang sama, namun dengan skor lebih rendah dari Badung. Kabupaten lainnya seperti Jembrana (59,93), Gianyar (50,96), Tabanan (57,45), dan Karangasem (58,3) dikategorikan sebagai Inovatif, dengan skor yang lebih rendah dibanding Badung.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Badung memiliki tingkat inovasi yang tinggi, masih ada daerah lain di Bali yang mencatat skor lebih baik, terutama Kota Denpasar yang menempati peringkat pertama. Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi memiliki keunggulan dalam infrastruktur perkotaan, pusat pemerintahan, serta ekosistem digital yang lebih berkembang dibandingkan kabupaten lain. Sementara Klungkung dan Bangli, yang memiliki skor lebih tinggi dari Badung, kemungkinan menunjukkan peningkatan inovasi di sektor pelayanan publik, pendidikan, atau pengembangan ekonomi berbasis lokal.

Jika dibandingkan dengan kabupaten yang berada dalam kategori Inovatif seperti Gianyar, Tabanan, dan Karangasem, Badung masih lebih unggul dalam hal pengembangan inovasi. Keunggulan ini kemungkinan besar didorong oleh sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Badung, serta dukungan infrastruktur dan investasi yang lebih besar dibandingkan kabupaten lain. Namun, inovasi di Badung masih memiliki tantangan, terutama dalam memastikan bahwa sektor lain seperti pertanian dan industri lokal juga mendapatkan manfaat dari inovasi yang berkembang.

Dengan mempertahankan dan meningkatkan inovasi, Kabupaten Badung berpotensi untuk mengejar skor yang lebih tinggi dan bahkan menyaingi Kota Denpasar dalam beberapa aspek, terutama dalam digitalisasi layanan publik, pengelolaan destinasi wisata berbasis teknologi, serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM. Jika inovasi dapat diterapkan secara merata di berbagai sektor, Badung dapat semakin memperkuat daya saingnya di tingkat regional dan nasional.

Tabel 2. 41

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Skor Indeks	Predikat
Klungkung	67,75	Sangat Inovatif
Bangli	63,33	Sangat Inovatif
Badung	62,9	Sangat Inovatif
Buleleng	60,98	Sangat Inovatif
Jembrana	59,93	Inovatif
Gianyar	50,96	Inovatif
Tabanan	57,45	Inovatif
Karangasem	58,3	Inovatif
Kota Denpasar	71,17	Sangat Inovatif

Sumber: Kepmendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2025

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai pusat pariwisata di Provinsi Bali, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Sebagai destinasi wisata utama, sektor pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap sektor ini membuat perekonomian Badung rentan terhadap guncangan eksternal, seperti yang terlihat saat pandemi COVID-19 melanda. Menyadari risiko ini, pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil langkah strategis untuk melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata semata. Salah satu pendekatan utama yang diadopsi adalah perwujudan ekonomi hijau, yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat sektor-sektor alternatif.

Sebagai bagian dari upaya konkret dalam membangun ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2023 telah menyerahkan bantuan sebanyak 4.900 bibit buah kepada petani Subak Abian. Program ini bertujuan untuk mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya di wilayah pedesaan,

sehingga dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian masyarakat. Sektor pertanian tidak hanya berkontribusi dalam diversifikasi ekonomi tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah serta menciptakan rantai pasok yang lebih stabil dan berdaya saing. Selain itu, sektor ini juga memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata berkelanjutan melalui konsep agrowisata, yang menggabungkan aspek pertanian dengan pengalaman wisata bagi pengunjung.

Selain penguatan sektor pertanian, Kabupaten Badung juga tengah berupaya melakukan transisi energi dari sumber konvensional berbasis fosil menuju energi terbarukan. Salah satu langkah konkret dalam proses ini adalah pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Dengan meningkatnya adopsi kendaraan listrik, emisi karbon dari sektor transportasi dapat dikurangi secara signifikan, sejalan dengan upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Tak hanya itu, Kabupaten Badung juga mulai mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Wilayah Kabupaten Badung yang memiliki potensi sinar matahari yang melimpah menjadikannya lokasi yang strategis untuk pengembangan energi surya sebagai sumber daya listrik yang ramah lingkungan.

Langkah-langkah ini selaras dengan target nasional dalam mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060, di mana transisi menuju energi bersih dan praktik ekonomi hijau menjadi fokus utama. Kabupaten Badung, dengan berbagai inisiatifnya, menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Implementasi ekonomi hijau ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan ini, Kabupaten Badung tidak hanya memperkuat fondasi ekonominya tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih stabil.

B. Indeks Ekonomi Biru

Saat ini, Indeks Ekonomi Biru yang spesifik untuk Kabupaten Badung belum tersedia. Namun, Kabupaten Badung telah menginisiasi berbagai program dan inisiatif dalam kerangka ekonomi biru, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Inisiatif Ekonomi Biru di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Pariwisata Bahari Berkelanjutan: Kabupaten Badung, dengan garis pantai yang luas, telah mengembangkan destinasi wisata bahari seperti Pantai Pandawa. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menilai bahwa program ekonomi biru di Pantai Pandawa berhasil memadukan kelestarian alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b) Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut: Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, termasuk penanaman kembali mangrove dan terumbu karang. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus mendukung sektor perikanan dan pariwisata.
- c) Peningkatan Kesejahteraan Nelayan: Melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas yang memadai, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan.

Meskipun belum ada indeks khusus untuk Kabupaten Badung, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia. Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja ekonomi biru di berbagai daerah, termasuk yang tidak memiliki laut, dengan mempertimbangkan sektor perikanan darat dan aspek lainnya.

Implementasi indeks ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor ekonomi biru terhadap perekonomian daerah, termasuk

Kabupaten Badung, serta menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan dan pengembangan alat ukur yang komprehensif, Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan laut.

2.1.3.4. Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di suatu wilayah.

A. Aspek IP-TIK

IP-TIK biasanya dihitung berdasarkan tiga aspek utama:

- 1) Akses dan Infrastruktur – Meliputi jumlah pengguna internet, kepemilikan perangkat digital (ponsel, komputer), dan ketersediaan jaringan (4G/5G, broadband).
- 2) Penggunaan TIK – Diukur melalui persentase individu, rumah tangga, atau bisnis yang menggunakan TIK dalam aktivitas sehari-hari, seperti akses internet dan e-commerce.
- 3) Keahlian dalam TIK – Ditentukan oleh tingkat pendidikan, keterampilan digital, dan jumlah tenaga kerja di sektor TIK.

B. Skala penilaian IP-TIK

IP-TIK biasanya bernilai antara 0 hingga 10, di mana:

- 1) Nilai mendekati 10 menunjukkan tingkat adopsi teknologi yang tinggi.
- 2) Nilai rendah mengindikasikan keterbatasan dalam akses, infrastruktur, atau pemanfaatan teknologi.

IP-TIK dapat digunakan untuk menilai kesiapan daerah dalam transformasi digital dan ekonomi berbasis teknologi. Berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan inklusi digital, terutama dalam mendorong inovasi dan daya saing daerah.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Bali mengalami sedikit penurunan dari 6,64 pada tahun 2022 menjadi 6,60 pada tahun 2023. Meskipun penurunannya relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan laju perkembangan sektor TIK di Bali. Jika melihat lebih dalam, fluktuasi ini dipengaruhi oleh perubahan dalam subindeks penyusunnya, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK.

Subindeks akses dan infrastruktur TIK di Bali mengalami sedikit penurunan dari 7,06 pada tahun 2022 menjadi 6,95 pada tahun 2023. Hal ini dapat menunjukkan adanya perlambatan dalam pembangunan infrastruktur digital atau kesenjangan dalam distribusi akses internet yang lebih merata di seluruh wilayah Bali. Meskipun demikian, Bali tetap berada dalam kategori yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain, mengingat infrastruktur telekomunikasi di daerah ini sudah cukup berkembang, terutama di kawasan perkotaan dan destinasi wisata utama.

Dari segi penggunaan TIK, subindeks ini tetap stagnan di angka 6,28 pada dua tahun berturut-turut. Konsistensi ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi digital di Bali belum mengalami percepatan yang signifikan, meskipun tren digitalisasi di berbagai sektor terus berkembang. Salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap stagnasi ini adalah masih adanya keterbatasan akses bagi kelompok tertentu, terutama di daerah pedesaan, serta tantangan dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi yang lebih kompleks di kalangan masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, subindeks keahlian TIK di Bali mengalami peningkatan dari 6,52 pada tahun 2022 menjadi 6,55 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia dalam menggunakan serta mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ini kemungkinan besar berasal dari upaya peningkatan keterampilan digital melalui pelatihan, program edukasi, serta integrasi teknologi dalam sektor pendidikan dan ekonomi kreatif.

Dibandingkan dengan provinsi lain, Bali berada di posisi lima besar secara nasional, di bawah DKI Jakarta (7,23) dan DI Yogyakarta (7,25), namun lebih unggul dibandingkan Jawa

Timur (6,66) dan Jawa Barat (6,35). Provinsi Bali juga jauh lebih maju dibandingkan daerah lain di Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Barat (5,58) dan Papua (3,90). Dengan indeks yang cukup tinggi, Bali menunjukkan potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, Bali mengalami peningkatan dalam semua aspek IP-TIK, mencerminkan kemajuan digitalisasi yang signifikan. Namun, untuk terus meningkatkan daya saing, diperlukan penguatan infrastruktur digital dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi, terutama di sektor industri kreatif dan ekonomi digital. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42

Indeks Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali dan Lainnya Tahun 2022-2023

Provinsi	Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK		Subindeks Penggunaan TIK		Subindeks Keahlian TIK		Indeks Pembangunan TIK	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Aceh	5,57	5,84	5,05	5,46	6,77	6,78	5,60	5,88
Sumatera Utara	5,97	5,92	5,61	5,92	6,37	6,49	5,90	6,04
Sumatera Barat	6,11	6,22	5,61	5,78	6,60	6,62	6,01	6,12
Riau	6,07	6,07	5,84	5,96	6,27	6,29	6,02	6,07
Jambi	5,93	6,08	5,64	5,75	5,87	5,95	5,80	5,92
Sumatera Selatan	5,97	6,11	5,60	5,74	5,67	5,73	5,76	5,88
Bengkulu	6,01	6,13	5,66	5,74	6,40	6,45	5,95	6,04
Lampung	5,65	5,84	5,61	5,79	5,62	5,67	5,63	5,78
Kep. Bangka Belitung	6,04	6,16	5,87	5,98	5,30	5,47	5,82	5,95
Kepulauan Riau	6,97	6,72	6,64	6,76	6,25	6,34	6,69	6,66
DKI Jakarta	8,27	8,31	7,54	7,65	6,57	6,72	7,64	7,73
Jawa Barat	6,54	6,50	5,97	6,00	5,76	5,77	6,16	6,15
Jawa Tengah	5,99	5,97	5,75	5,83	5,65	5,70	5,83	5,86
DI Yogyakarta	8,01	7,99	6,23	6,29	7,77	7,73	7,25	7,26
Jawa Timur	6,08	6,11	5,73	5,79	5,93	6,01	5,91	5,96
Banten	6,70	6,93	6,01	6,01	6,02	6,01	6,29	6,38
Bali	7,06	6,95	6,28	6,28	6,52	6,55	6,64	6,60
Nusa Tenggara Barat	5,54	5,78	5,43	5,54	6,01	6,07	5,59	5,74
Nusa Tenggara Timur	5,45	5,61	4,46	4,75	5,86	5,92	5,13	5,33
Kalimantan Barat	5,59	5,72	5,62	5,75	5,51	5,54	5,58	5,70
Kalimantan Tengah	5,75	5,91	5,82	5,99	5,75	5,80	5,78	5,92
Kalimantan Selatan	5,93	5,96	5,94	6,04	5,67	5,72	5,88	5,95
Kalimantan Timur	6,67	6,62	6,49	6,66	6,69	6,74	6,60	6,66
Kalimantan Utara	6,42	6,30	6,49	6,33	6,22	6,25	6,41	6,30
Sulawesi Utara	5,85	6,01	5,70	5,72	6,25	6,30	5,87	5,95
Sulawesi Tengah	5,57	5,77	5,24	5,45	6,36	6,39	5,60	5,76
Sulawesi Selatan	6,05	6,15	5,62	5,73	6,30	6,30	5,92	6,01
Sulawesi Tenggara	5,63	5,77	5,54	5,69	6,54	6,51	5,78	5,88

Provinsi	Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK		Subindeks Penggunaan TIK		Subindeks Keahlian TIK		Indeks Pembangunan TIK	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Gorontalo	5,55	5,80	5,57	5,66	5,87	5,88	5,62	5,76
Sulawesi Barat	5,48	5,80	5,38	5,40	5,73	5,78	5,49	5,63
Maluku	5,72	5,97	5,17	5,36	7,07	7,01	5,77	5,94
Maluku Utara	5,36	5,67	4,48	4,92	6,66	6,62	5,27	5,56
Papua Barat	5,40	5,68	5,17	5,28	6,58	6,51	5,54	5,69
Papua	3,38	3,68	2,18	2,47	4,97	4,89	3,22	3,44
INDONESIA	5,80	5,81	5,82	5,91	6,00	6,04	5,85	5,90

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2023

B. Persentase Penduduk yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (Telepon Seluler, Komputer dan Internet)

Dalam era digital yang semakin berkembang, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan suatu daerah. Kabupaten Badung, sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata di Bali, menunjukkan tren peningkatan dalam pemanfaatan TIK oleh penduduknya. Perkembangan ini mencerminkan semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi, baik untuk keperluan komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hingga transaksi ekonomi digital. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, terdapat pola pertumbuhan dalam akses teknologi di Kabupaten Badung, namun dengan dinamika yang berbeda pada tiap jenis perangkat yang digunakan oleh penduduk.

Tabel 2. 43

Jumlah Penduduk diatas 5 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi
Tahun 2020-2023 (dalam %)

No.	Jenis Aktivitas	Jumlah Penduduk diatas 5 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi (dalam %)			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Menggunakan Telepon Seluler	82,59	84,99	85,83	87,20
2	Menggunakan Komputer	24,48	22,42	27,03	25,22
3	Mengakses Internet	72,91	77,84	79,68	83,18

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2024

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang disajikan, persentase penduduk di atas lima tahun yang menggunakan telepon seluler terus meningkat dari 82,59% pada tahun 2020 menjadi 87,20% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan semakin meluasnya penetrasi perangkat seluler di masyarakat, yang didorong oleh harga perangkat yang semakin terjangkau, peningkatan kualitas jaringan seluler, serta kebutuhan akan komunikasi dan akses informasi yang semakin tinggi, terutama pasca-pandemi COVID-19. Selain itu, peran sektor pariwisata yang dominan di Kabupaten Badung juga berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan telepon seluler, baik untuk keperluan komunikasi sehari-hari maupun transaksi digital dalam industri pariwisata dan perhotelan.

Sementara itu, akses terhadap internet juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, dari 72,91% pada tahun 2020 menjadi 83,18% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memanfaatkan internet dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk keperluan komunikasi, pendidikan, bisnis, maupun hiburan. Peningkatan ini didukung oleh semakin luasnya cakupan jaringan internet, baik dari operator seluler maupun penyedia layanan internet tetap (fixed broadband). Selain itu, berbagai program digitalisasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti layanan administrasi berbasis daring dan pengembangan ekonomi digital melalui e-commerce, juga turut mendorong peningkatan akses internet di Kabupaten Badung.

Namun, berbeda dengan tren penggunaan telepon seluler dan akses internet yang meningkat, penggunaan komputer justru menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang menggunakan komputer mencapai 24,48%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 22,42% pada tahun 2021, sebelum kembali meningkat ke 27,03% pada tahun 2022, dan turun lagi ke 25,22% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya perubahan preferensi dalam penggunaan perangkat teknologi, di mana masyarakat lebih cenderung mengandalkan perangkat seluler dibandingkan komputer untuk mengakses informasi dan melakukan berbagai aktivitas digital. Perangkat seluler yang lebih praktis dan portabel menjadi pilihan utama dibandingkan komputer, terutama untuk keperluan komunikasi, hiburan, dan transaksi digital. Selain itu, faktor biaya juga menjadi pertimbangan, mengingat harga komputer relatif lebih mahal dibandingkan telepon seluler dan tablet yang saat ini sudah memiliki spesifikasi tinggi yang mampu mendukung berbagai aktivitas digital.

Secara keseluruhan, tren yang tergambar dalam tabel menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Badung semakin meningkat, seiring dengan perkembangan infrastruktur digital dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator penting yang mencerminkan aktivitas investasi fisik di suatu wilayah, khususnya dalam bentuk pembelian barang modal seperti bangunan, infrastruktur, dan peralatan produksi. Di Kabupaten Badung, nilai PMTB dalam tiga tahun terakhir yang tersedia mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi, terutama akibat tekanan pandemi COVID-19 dan proses pemulihannya.

Pada tahun 2020, PMTB Badung tercatat sebesar Rp19.929.397,16 juta, yang relatif tinggi meskipun berada di tengah tekanan pandemi. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi Rp18.993.834,47 juta, yang mengindikasikan adanya penurunan aktivitas investasi dan konstruksi. Kondisi ini sejalan dengan turunnya PDRB atas dasar harga konstan Badung dari Rp31.147,82 miliar pada 2020 menjadi Rp29.049,52 miliar pada 2021, menunjukkan pelemahan ekonomi secara keseluruhan.

Namun pada tahun 2022, PMTB menunjukkan tren pemulihan dengan peningkatan signifikan menjadi Rp20.770.499,88 juta. Kenaikan ini dapat dihubungkan dengan meningkatnya kembali kepercayaan pelaku usaha dan pemerintah terhadap prospek ekonomi pascapandemi, serta didorong oleh kembalinya aktivitas pariwisata dan investasi sektor konstruksi di wilayah Badung. Pemulihan ini juga tercermin dalam peningkatan PDRB atas dasar harga konstan menjadi Rp31.946,05 miliar pada tahun 2022.

Meskipun data PMTB tahun 2023 dan 2024 belum tersedia, tren kenaikan nilai PDRB yang cukup konsisten hingga mencapai Rp37.667,34 miliar pada 2024 (harga konstan) dan Rp75.098,20 miliar (harga berlaku), mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk investasi fisik, kemungkinan besar juga mengalami pertumbuhan positif. Hal ini diperkuat oleh perbaikan indikator distribusi pendapatan seperti penurunan Gini Ratio dari 0,332 pada 2021 menjadi 0,2808 pada 2024, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, sehingga turut mendorong permintaan terhadap infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Secara umum, tren PMTB ini dapat dijadikan indikator penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, terutama dalam merancang kebijakan yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor-sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Tabel 2. 44

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun ke (dalam juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19.929.397,16	18.993.834,47	20.770.499,88	n/a	n/a

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

B. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor merupakan kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri untuk diperjualbelikan di pasar internasional. Berdasarkan komoditas yang tercantum dalam tabel, ekspor barang di Provinsi Bali mencakup berbagai sektor, seperti mesin dan perlengkapan listrik, peralatan mekanis, logam mulia dan perhiasan, kendaraan, serta barang dari kulit dan karet. Barang-barang ini diproduksi secara lokal dan dikirim ke negara lain untuk memenuhi permintaan global, baik untuk keperluan industri, manufaktur, maupun konsumsi pribadi.

Selain barang, ekspor juga dapat mencakup jasa, yang dalam konteks Bali sering dikaitkan dengan sektor pariwisata, perhotelan, seni budaya, dan jasa kreatif. Meskipun jasa tidak tercantum dalam tabel, keahlian dalam produksi perhiasan, seni kerajinan, serta industri kreatif lainnya dapat menjadi bagian dari ekspor jasa ketika melibatkan desain, konsultasi, atau pelatihan kepada pelanggan di luar negeri.

Data ekspor barang dari Provinsi Bali menunjukkan dinamika yang signifikan dalam periode Juni 2023 hingga Juni 2024. Total nilai ekspor pada Juni 2024 mencapai 47,31 juta USD, mengalami penurunan 19,59% dibandingkan Mei 2024 dan sedikit lebih rendah 0,54% dibandingkan Juni 2023. Ikan, krustasea, dan moluska (kode HS 03) menjadi komoditas

dengan penurunan terbesar secara bulanan, yaitu -24,46%, turun dari 13,71 juta USD di Mei 2024 menjadi 10,36 juta USD di Juni 2024. Sementara itu, logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71), yang sempat mengalami lonjakan ekspor hingga 11,41 juta USD di Mei 2024, anjlok hingga 45,46% ke angka 6,22 juta USD di Juni 2024. Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (HS 62) juga mencatat penurunan ekspor 17,94%, dari 8,15 juta USD di Mei 2024 menjadi 6,69 juta USD di Juni 2024. Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami peningkatan ekspor, seperti barang anyaman (HS 46) yang naik 19,13% dan barang dari kulit samak (HS 42) yang tumbuh 22,47% dibandingkan bulan sebelumnya. Kertas, karton, dan barang daripadanya (HS 48) juga mengalami peningkatan bulanan yang cukup signifikan sebesar 45,64%, dari 1,96 juta USD di Mei 2024 menjadi 2,85 juta USD di Juni 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam pada beberapa komoditas utama, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan permintaan global, serta kebijakan perdagangan yang berlaku selama periode tersebut.

Penurunan ekspor Bali pada Juni 2024 mencerminkan dinamika sosial ekonomi di provinsi ini, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan industri kreatif. Sebagai daerah dengan perekonomian berbasis jasa, fluktuasi ekspor barang, terutama pada sektor perhiasan, pakaian, dan hasil laut, bisa menjadi indikasi dari menurunnya permintaan global atau perubahan pola konsumsi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Penurunan ekspor ikan, krustasea, dan moluska sebesar -24,46% dapat mencerminkan tantangan bagi sektor perikanan dan industri kuliner yang bergantung pada ekspor hasil laut. Sementara itu, lonjakan ekspor barang dari kulit dan anyaman menunjukkan bahwa sektor kerajinan tangan masih memiliki daya saing, terutama dengan meningkatnya minat terhadap produk berbasis budaya dan keberlanjutan. Penurunan tajam pada logam mulia dan perhiasan (-45,46%) juga bisa mengindikasikan berkurangnya daya beli wisatawan mancanegara, yang selama ini menjadi pasar utama bagi produk perhiasan khas Bali. Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan perdagangan, kurs mata uang, dan ketidakpastian ekonomi global dapat turut memengaruhi ekspor Bali. Dengan perekonomian yang sangat bergantung pada pariwisata, ketidakstabilan ekspor ini juga dapat berdampak pada tenaga

kerja di sektor-sektor terkait, memperkuat pentingnya diversifikasi ekonomi di Bali untuk mengurangi ketergantungan pada industri tertentu.

Tabel 2. 45

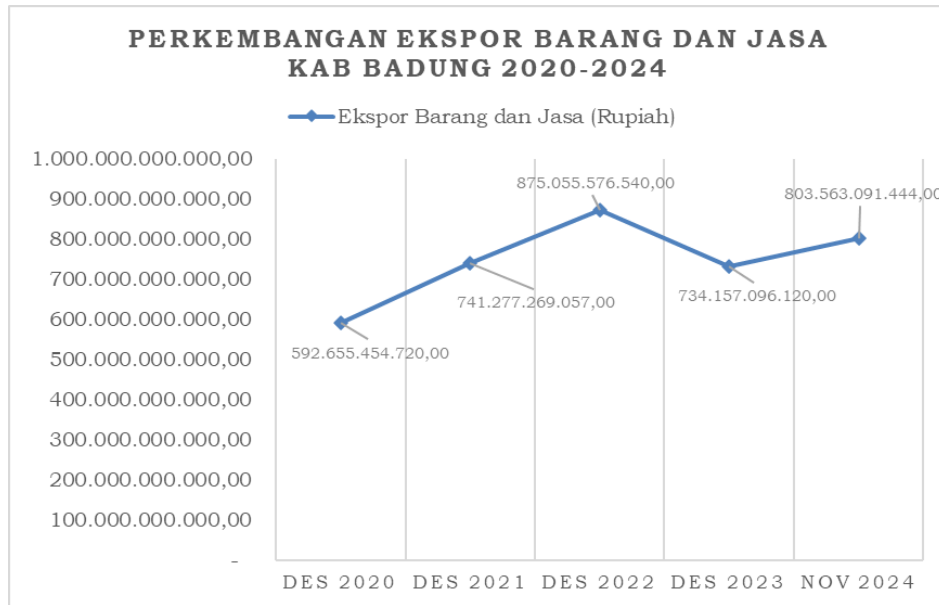
Ekspor Barang Provinsi Bali Menurut 10 Komoditas Utama Keadaan Bulan Juni 2023, Mei 2024 dan Juni 2024

No.	Komoditas	Juni 2023 (US\$)	Mei 2024 (US\$)	Juni 2024		Perubahan (%)	
				Nilai US\$	Nilai %	Juni 2023 ke Juni 2024	Mei 2024 ke Juni 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	12.398.335	13.712.630	10.358.534	21,90	-16,45	-24,46
2	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)	5.537.394	8.148.584	6.686.875	14,13	20,76	-17,94
3	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	4.972.667	11.409.112	6.222.819	13,15	25,14	-45,46
4	Perabotan, lampu, dan alat penerangan (94)	3.368.145	3.159.770	3.175.318	6,71	-5,73	0,49
5	Kertas, karton, dan barang daripadanya (48)	2.767.080	1.957.189	2.850.484	6,03	3,01	45,64
6	Kayu dan barang dari kayu (44)	4.572.840	3.385.981	2.787.800	5,89	-39,04	-17,67
7	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	2.210.450	2.863.972	2.759.362	5,83	24,83	-3,65
8	Barang anyaman (46)	1.180.498	965.084	1.149.707	2,43	-2,61	19,13
9	Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)	9.911	1.018.111	997.151	2,11	9.961,02	-2,06
10	Barang dari kulit samak (42)	952.715	715.571	876.347	1,85	-8,02	22,47
11	Lainnya	9.596.623	11.502.965	9.445.094	19,96	-1,58	-17,89
	Total	47.566.656	58.838.969	47.309.491	100,00	-0,54	-19,59

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kabupaten Badung, 2025

Gambar 2. 17

Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Badung Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan Berita Resmi Statistik Kabupaten Badung, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Badung menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai ekspor tercatat sebesar Rp592,66 miliar, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp741,28 miliar, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp875,06 miliar, seiring dengan membaiknya sektor pariwisata dan perdagangan pascapandemi.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai ekspor menjadi Rp734,16 miliar, yang diduga akibat ketidakstabilan pasar global serta penyesuaian produksi dan permintaan. Memasuki akhir tahun 2024 (data hingga November), ekspor kembali menunjukkan pemulihan dengan nilai mencapai Rp803,09 miliar, mencerminkan mulai stabilnya perekonomian dan meningkatnya permintaan atas barang dan jasa unggulan dari Badung, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.1.3.6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas perencanaan wilayah di suatu daerah. Di Kabupaten Badung, kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang menjadi perhatian utama, mengingat peran strategis wilayah ini sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di Bali. Infrastruktur yang terencana dengan baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan, seimbang, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun tata kelola ruang.

Indeks kesesuaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap rencana tata ruang tercatat optimal sebesar 100%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 93%, kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 93,5% pada 2022 dan meningkat kembali ke 95% pada 2023. Pada tahun 2024, tingkat kesesuaian kembali mencapai 100%, menunjukkan adanya pemulihan penuh terhadap target yang ditetapkan.

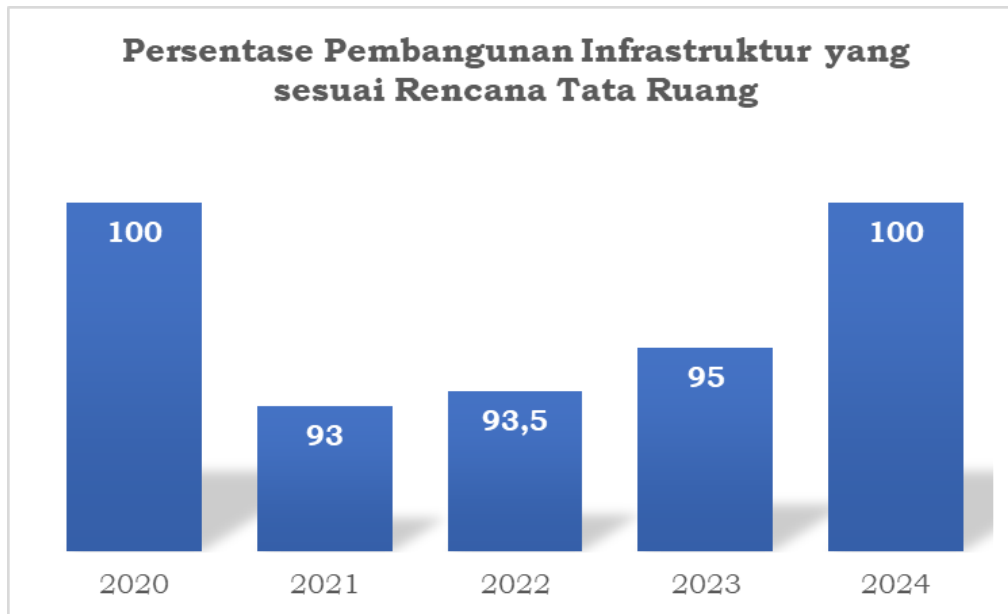
Penurunan pada tahun 2021 dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan keterbatasan anggaran, perlambatan proses perizinan, serta perubahan prioritas kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, dinamika kebutuhan pembangunan, seperti ekspansi sektor pariwisata dan pertumbuhan jumlah penduduk, turut mempengaruhi terjadinya penyimpangan terhadap rencana tata ruang.

Kenaikan bertahap pada tahun 2022 dan 2023 serta kembalinya angka kesesuaian ke tingkat optimal pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam mekanisme perencanaan dan pengawasan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Badung telah meningkatkan kepatuhan pembangunan terhadap rencana tata ruang melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pembangunan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan infrastruktur dengan prinsip keberlanjutan

lingkungan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

Gambar 2. 18

Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai RTR Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024



Sumber: Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2025

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses rumah tangga terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Dalam konteks indikator kinerja daerah, akses terhadap hunian layak dapat dianalisis melalui dua parameter utama, yaitu rasio rumah layak huni dan rasio permukiman layak huni. Rasio rumah layak huni mengacu pada persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi fisik yang memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek struktur bangunan, akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, serta kelistrikan. Sementara itu, rasio permukiman layak huni mencerminkan proporsi wilayah permukiman yang memiliki infrastruktur dan fasilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti jalan lingkungan yang memadai, sistem

drainase yang baik, serta akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, rasio rumah layak huni di Kabupaten Badung menunjukkan tren yang sangat positif dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio rumah layak huni tercatat sebesar 98,60%, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2021 dan tetap bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa seluruh rumah tangga di wilayah tersebut telah memenuhi standar hunian yang layak, baik dari segi struktur bangunan, akses terhadap air bersih, sistem sanitasi yang memadai, serta kelistrikan.

Tabel 2. 46
Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Badung Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	98,60%	100%	100%	100%
2	Rasio permukiman layak huni	n/a	n/a	n/a	99,73%

Sumber: Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2024

Sementara itu, data mengenai rasio permukiman layak huni baru tersedia pada tahun 2023 dengan nilai 99,73%. Meskipun data ini belum tercatat dalam tahun-tahun sebelumnya, angka yang hampir mencapai 100% ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah permukiman di Kabupaten Badung telah memenuhi kriteria kelayakan, yang mencakup aspek infrastruktur dasar seperti sistem drainase, akses jalan, serta ketersediaan fasilitas umum dan sosial. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun kawasan permukiman yang lebih terintegrasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap tata ruang dan peruntukan lahan. Dengan capaian ini, Kabupaten Badung dapat dikatakan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi

berkelanjutan untuk memastikan bahwa standar kelayakan ini dapat dipertahankan di masa mendatang, terutama dalam menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang semakin pesat.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Badung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, mencerminkan pengaruh berbagai faktor ekonomi baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Pada tahun 2020, tingkat inflasi tercatat sebesar 0,55%, yang merupakan tingkat inflasi terendah dalam periode lima tahun ini. Rendahnya inflasi pada tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat, penurunan kunjungan wisatawan, dan terbatasnya pergerakan barang dan jasa. Hal ini selaras dengan kontraksi ekonomi yang dialami banyak daerah, termasuk Badung, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Memasuki tahun 2021, inflasi meningkat menjadi 2,01%, mencerminkan awal pemulihan ekonomi seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan peningkatan aktivitas konsumsi domestik. Meskipun masih relatif moderat, peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan inflasi dari sisi permintaan, khususnya dari sektor rumah tangga dan sektor jasa yang mulai pulih.

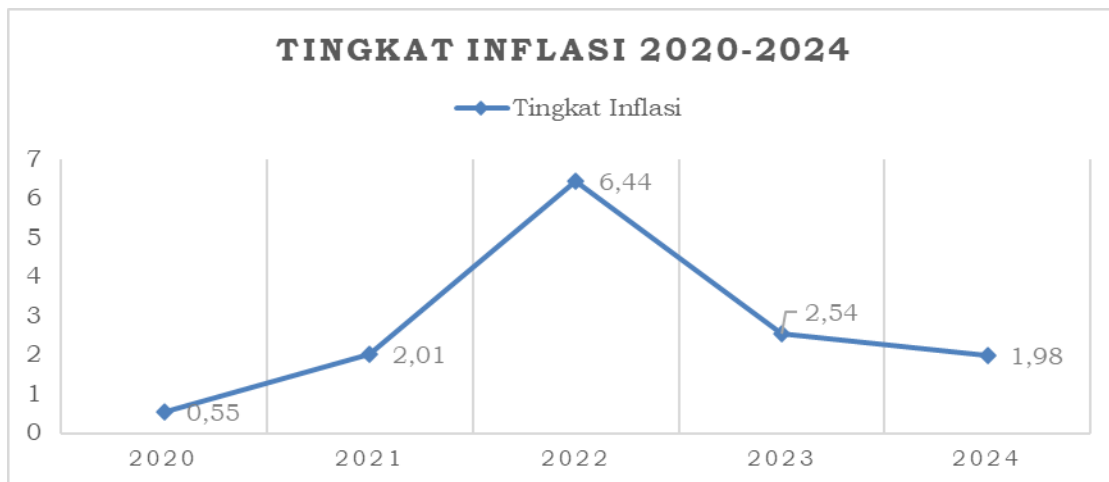
Tahun 2022 mencatat lonjakan inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 6,44%. Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Di tingkat global, kenaikan harga komoditas energi dan pangan akibat ketegangan geopolitik dan terganggunya rantai pasok global memberikan dampak signifikan terhadap harga-harga domestik. Di sisi lokal, lonjakan permintaan pasca-pandemi yang tidak diimbangi dengan suplai yang memadai turut mempercepat laju inflasi. Selain itu, sektor pariwisata yang mulai bangkit pasca pembatasan juga mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa, memberikan tekanan pada harga.

Selanjutnya, pada tahun 2023, inflasi kembali menurun secara signifikan menjadi 2,54%, seiring dengan mulai stabilnya harga-harga komoditas utama dan terkendalinya suplai bahan pokok di daerah. Penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya pengendalian inflasi oleh pemerintah, serta stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok.

Pada tahun 2024, inflasi kembali menurun menjadi 1,98%, menunjukkan tren stabilisasi ekonomi lokal. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif terkendali dengan tekanan inflasi yang minim, sekaligus mencerminkan keberhasilan penguatan sisi produksi dan efisiensi distribusi barang dan jasa. Penurunan ini juga menunjukkan kestabilan harga menjelang akhir periode perencanaan menengah daerah dan memberikan sinyal positif bagi pembangunan ekonomi ke depan.

Gambar 2. 19

Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Periode 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2025

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

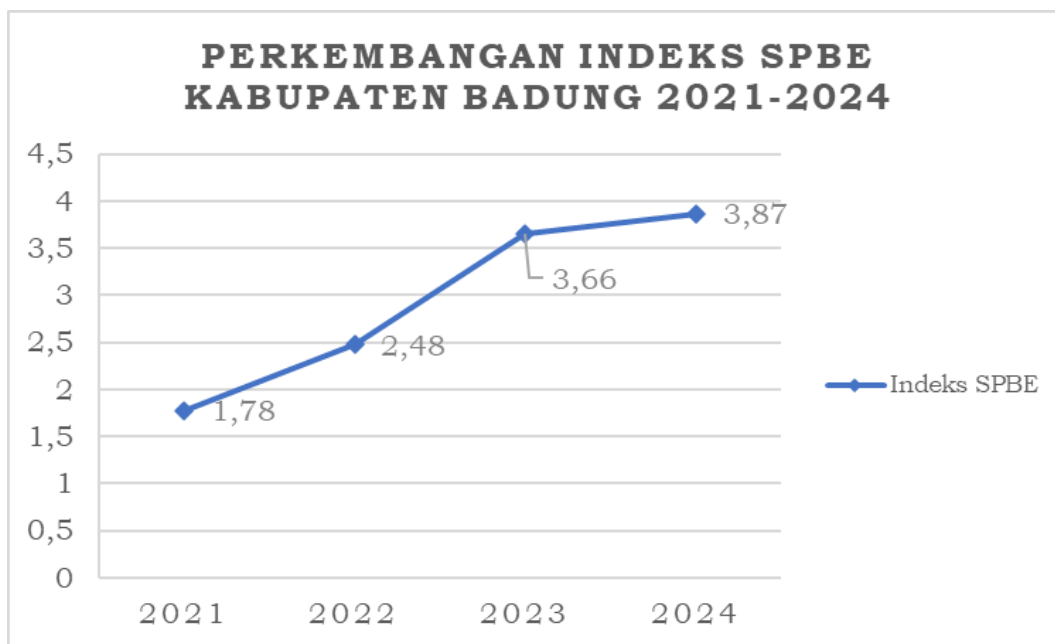
A. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dari 2021 hingga 2024. Berdasarkan data pada grafik, indeks SPBE meningkat dari 1,78 pada tahun 2021, menjadi 2,48 pada tahun

2022, kemudian melonjak signifikan ke 3,66 pada tahun 2023, dan kembali naik meskipun lebih moderat ke 3,87 pada tahun 2024.

Gambar 2. 20

Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2021-2024



Sumber: LKJIP Kabupaten Badung Tahun 2025

Lonjakan tajam pada tahun 2023 menunjukkan adanya akselerasi besar dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor penting, seperti implementasi penuh sistem layanan berbasis elektronik lintas perangkat daerah, integrasi data yang lebih komprehensif melalui platform digital terpadu, serta penambahan infrastruktur teknologi informasi yang lebih modern. Selain itu, dukungan kebijakan nasional yang mewajibkan penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintahan memperkuat komitmen Kabupaten Badung untuk mempercepat adopsi sistem digital.

Secara keseluruhan, tren positif indeks SPBE ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Peningkatan indeks SPBE tidak hanya menandakan efisiensi birokrasi yang

semakin baik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ke depan, kesinambungan penguatan infrastruktur digital, pemeliharaan dan optimalisasi sistem yang telah terpasang, serta peningkatan kompetensi aparatur menjadi kunci agar indeks SPBE Kabupaten Badung dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan daerah.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap layanan yang mereka terima, baik dalam bidang administrasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun sektor lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 47

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung 2021-2024

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat
2021	85,4
2022	82,07
2023	89,52
2024	90,89

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, 2025

Data dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung mencapai angka 90,89. Angka ini tergolong tinggi dan mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di berbagai sektor. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini adalah perbaikan infrastruktur yang signifikan di Kabupaten Badung, terutama dalam pembangunan jalan, sarana transportasi, serta fasilitas publik lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain itu, sektor kesehatan juga mengalami peningkatan dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit daerah, yang dapat

memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap layanan publik.

Selain infrastruktur dan kesehatan, peningkatan indeks kepuasan masyarakat juga dapat dikaitkan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Digitalisasi layanan publik yang semakin berkembang, seperti penerapan sistem administrasi berbasis elektronik dan peningkatan transparansi dalam pelayanan, turut berperan dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. Kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, serta layanan sosial lainnya menjadi faktor yang turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan juga dapat menjadi salah satu alasan mengapa indeks kepuasan mengalami peningkatan, karena masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah.

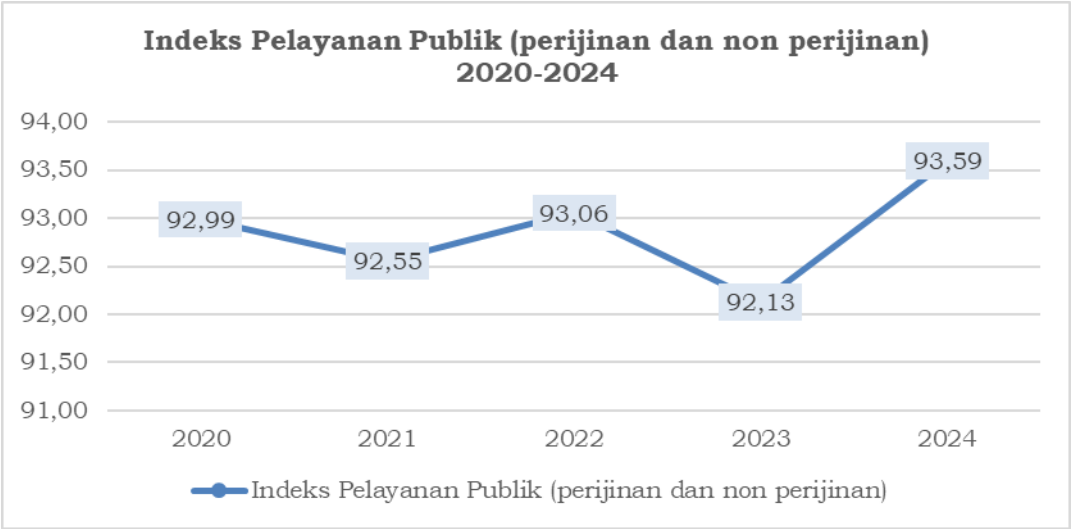
Namun, meskipun angka 90,89 menunjukkan capaian yang baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam aspek-aspek tertentu. Beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain adalah pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah Kabupaten Badung, terutama di daerah yang mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan perlu terus dilakukan agar kepuasan masyarakat dapat tetap terjaga dan bahkan meningkat di tahun-tahun mendatang.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, khususnya dalam sektor perizinan dan non-perizinan, menunjukkan dinamika yang cukup beragam sepanjang periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang tersaji dalam grafik, nilai indeks pada tahun 2020 tercatat sebesar 92,99 sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 92,55 di tahun 2021. Tren ini kembali berubah pada tahun 2022, di mana indeks meningkat ke angka 93,06, namun kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya, yaitu 92,13 pada 2023. Kendati demikian, tahun 2024 mencatatkan peningkatan yang cukup mencolok, dengan indeks

pelayanan publik melonjak ke angka 93,59, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2. 21
 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Badung 2020-2024



Sumber: Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2025

Penurunan indeks yang terjadi pada tahun 2021 dan 2023 disebabkan oleh kendala dalam birokrasi, perubahan kebijakan, serta dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 yang sempat menghambat kelancaran administrasi pemerintahan. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, terutama dalam aspek kecepatan, kemudahan akses, serta transparansi proses perizinan, juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya indeks dalam beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya, perbaikan yang terjadi pada tahun 2022 dan lonjakan tajam di tahun 2024 mencerminkan peningkatan signifikan dalam sistem pelayanan publik. Implementasi kebijakan digitalisasi yang semakin optimal telah mempercepat proses perizinan, memangkas hambatan birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya reformasi, seperti penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas

aparatur, serta penyederhanaan regulasi, yang berdampak positif terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat.

Kenaikan indeks yang cukup tajam pada 2024 juga menunjukkan adanya respons positif dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Keberhasilan dalam membangun sistem yang lebih responsif dan efisien, terutama dalam aspek perizinan yang berperan krusial dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, menjadi salah satu faktor utama di balik peningkatan tersebut. Selain itu, evaluasi berkala serta penyesuaian kebijakan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Untuk mempertahankan capaian ini, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan sistem pelayanan yang lebih adaptif, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan bahwa pelayanan publik tetap berkualitas dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

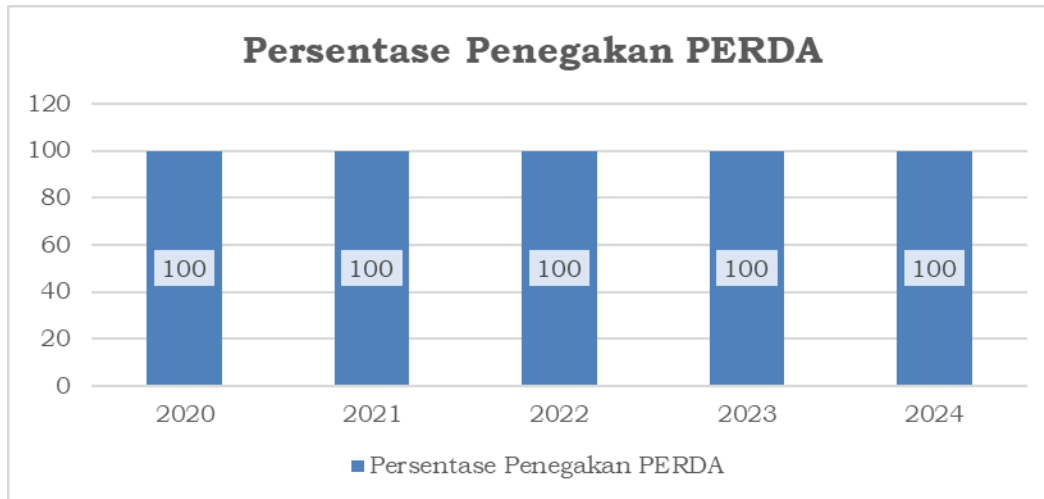
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Badung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang konsisten, yaitu sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh regulasi daerah yang telah ditetapkan berhasil ditegakkan dengan optimal. Konsistensi angka ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh ketentuan hukum daerah dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Gambar 2. 22

Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024



Sumber: *Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Badung, 2025*

Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, adanya sistem pengawasan dan penindakan yang berjalan secara efektif, baik melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun lembaga terkait lainnya, yang memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa setiap regulasi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat serta pelaku usaha, yang menjadikan tingkat kepatuhan terhadap Perda berada dalam kondisi optimal. Faktor ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga aturan yang berlaku dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

Selain itu, konsistensi dalam pencapaian ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan daerah yang mendukung penerapan Perda secara menyeluruh. Hal ini mencakup regulasi yang disusun dengan pendekatan partisipatif, memastikan bahwa aturan yang diterapkan selaras dengan kondisi sosial-ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, minimnya hambatan dalam implementasi Perda juga menjadi indikator bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat aplikatif dan tidak menimbulkan resistensi yang berarti dari masyarakat.

Meskipun persentase penegakan Perda berada pada angka maksimal selama lima tahun terakhir, tetap diperlukan evaluasi dan inovasi dalam proses pengawasan serta pelaksanaan regulasi daerah agar efektivitasnya tetap terjaga di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan mekanisme pemantauan berbasis digital, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat kompetitif dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Bali maupun rata-rata nasional. Kabupaten Badung mencatat Skor Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,14, lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota di Bali (3,78), skor Provinsi Bali (3,91), bahkan melampaui rerata nasional (3,43). Capaian ini menempatkan Badung sebagai salah satu daerah paling unggul dari sisi daya saing di tingkat provinsi maupun nasional.

Dalam aspek Lingkungan Pendukung, Badung mencatat skor yang sangat baik terutama pada indikator Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan nilai 4,90, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi (4,63) dan rata-rata kabupaten/kota (4,58). Skor ini mengindikasikan bahwa tingkat kesiapan digital di Kabupaten Badung sudah sangat tinggi dan mampu mendukung pengembangan ekonomi serta pelayanan publik yang berbasis teknologi. Selain itu, skor kelembagaan dan infrastruktur juga konsisten di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Badung mencatat skor tertinggi pada indikator Kesehatan (4,24) dan Keterampilan (4,27). Skor ini mengindikasikan bahwa investasi daerah dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan telah membuahkan hasil positif. Walau demikian, indikator Stabilitas Ekonomi Makro masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, dengan nilai 3,36, yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan jangka menengah agar fondasi ekonomi daerah semakin kuat dan stabil.

Pada dimensi Pasar, Kabupaten Badung menunjukkan performa yang cukup solid, khususnya dalam Pasar Produk (4,21) dan Sistem Keuangan (3,52), yang keduanya lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Provinsi Bali maupun nasional. Tingginya daya saing pasar ini didukung oleh iklim usaha yang aktif dan dinamika konsumsi masyarakat yang relatif tinggi, terutama sebagai akibat dari kuatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah ini.

Sementara itu, dalam Ekosistem Inovasi, Badung kembali unggul pada indikator Kapabilitas Inovasi (4,30) dan Ukuran Pasar (4,67), yang merupakan skor tertinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota dan Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa Badung tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai inkubator inovasi di berbagai bidang, termasuk teknologi, pariwisata, dan layanan digital. Tingginya skor ini juga didukung oleh Dinamisme Bisnis (3,66) yang mencerminkan iklim usaha yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, capaian Kabupaten Badung dalam Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 menjadi sinyal positif untuk arah pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana akan dirumuskan dalam RPJMD. Dengan keunggulan yang konsisten di hampir semua dimensi, Badung memiliki potensi besar untuk mengakselerasi transformasi struktural menuju daerah yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.

Tabel 2. 48

Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun
2024

Kabupaten		Nasional	Prov. Bali	Rata-Rata Kab/Kota	Kab Badung
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,18	4,74	4,77	4,85
	Infrastruktur	2,97	3,39	3,72	3,73
	Adopsi TIK	3,47	4,63	4,58	4,9
	Stabilitas Ekonomi Makro	3,99	3,48	3,43	3,36
SDM	Kesehatan	3,76	4	4,04	4,24
	Ketrampilan	3,91	4,23	4,24	4,27
Pasar	Pasar Produk	2,57	3,22	3,29	4,21
	Pasar Tenaga Kerja	3,03	3,82	3,25	4,01
	Sistem Keuangan	2,76	3,28	3,18	3,52
	Ukuran Pasar	4,35	4,38	4,27	4,67
Ekosistem Inovasi	Dinamisme Bisnis	3,06	3,68	3,78	3,66
	Kapabilitas Inovasi	3,13	4,06	2,83	4,3
Skor Indeks Daya Saing Daerah		3,43	3,91	3,78	4,14

Sumber: Buku Indeks Daya Saing Daerah 2025

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

A. Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Badung

Berikut adalah Tabel 2.57 yang merincikan capaian indikator kinerja kunci Kabupaten Badung:

Tabel 2. 49

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Badung

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2026	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2021	2022	2023	belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Layanan Urusan Wajib Dasar																	
1.	Pendidikan																
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	100	100	100	100	100	100	100	82,54	96,6	106,12	82,54	96,6	106,12	belum tercapai	belum tercapai	melampaui
1.2.	Angka partisipasi kasar SD/ SMP (%)	100	100	100	100	100	100	100	114,13	113,69	117,7	114,13	113,69	117,7	melampaui	melampaui	melampaui
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/ SMP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.4.	Angka Partisipasi Murni																
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	100	100	100	100	100	100	100	117,55	113,65	114,58	117,55	113,65	114,58	melampaui	melampaui	melampaui
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket B	100	100	100	100	100	100	100	99,29	96,28	95,94	99,29	96,28	95,94	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket C																
1.5	Angka partisipasi sekolah																
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A	100	100	100	100	100	100	100	117,55	113,65	114,58	117,55	113,65	114,58	melampaui	melampaui	melampaui
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B	100	100	100	100	100	100	100	99,29	96,28	95,94	99,29	96,28	95,94	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/ SMK/ MA/ Paket C																
1.6	Angka Putus Sekolah																
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI (%)	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs (%)	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.6.3	Angka Putus Sekolah SMA / SMK / MA (%)																
1.7	Angka Kelulusan :																
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA (%)																
1.8	Angka Melanjutkan (AM) :																

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.8.1	Angka Melanjutkan Ke SMP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.8.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA																
1.9	Fasilitas Pendidikan :																
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95	95	95	95	100	100	100	96	96	96	101,05	101,05	101,05	melampaui	melampaui	melampaui
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95	95	95	95	100	100	100	96	96	96	101,05	101,05	101,05	melampaui	melampaui	melampaui
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	5,066	5,016	4,966	4,917	4,868	4,82	4,82	4,88	4,93	5,01	4,88	4,93	5,01	belum tercapai	belum tercapai	melampaui
1.11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah																
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	01:15	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:28	01:28	01:28	01:28	01:28	01:28	melampaui	melampaui	melampaui
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	01:15	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	sesuai	sesuai	sesuai
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	01:15	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:28	01:28	01:28	01:28	01:28	01:28	melampaui	melampaui	melampaui
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	01:15	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	sesuai	sesuai	sesuai
1.15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	-	-	-	-	-	-	-									
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	-	-	-	-	-	-	-									
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	100	100	100	100	100										

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.16	APK TK (%)	100	-	-	-	-	-	-									
1.21	Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan :		-	-	-	-	-	-									
1.17	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100	-	-	-	-	-	-									
1.18	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100	-	-	-	-	-	-									
1.19	Angka Kelulusan Paket A (%)	100	-	-	-	-	-	-									
1.20	Angka Kelulusan Paket B (%)	100	-	-	-	-	-	-									
1.21	Angka Kelulusan Paket C (%)	100	-	-	-	-	-	-									
2.	Kesehatan :																
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	2,29 per 1000 KH	2,29 per 1000 KH	2,27 per 1000 KH	2,25 per 1000 KH	2,23 per 1000 KH	2,21 per 1000 KH	2,19 per 1000 KH	3,1 per 1000 KH	7 per 1000 KH	5,2 per 1000 KH	64%	-108%	-31%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	1- 2,29/1000 KH	1- 2,29/1000 KH	1- 2,24/1000 KH	1- 2,19/1000 KH	1- 2,14/1000 KH	1- 2,09/1000 KH	1- 2,04/1000 KH	1 - 3,1 per 1000 KH	1 - 7 per 1000 KH	1 - 5,2 per 1000 KH	64%	-113%	-37%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2,77 per 1000 KH	2,77 per 1000 KH	2,76 per 1000 KH	2,75 per 1000 KH	2,74 per 1000 KH	2,73 per 1000 KH	2,72 per 1000 KH	3,5 per 1000 KH	7,3 per 1000 KH	8,7 per 1000 KH	73%	-65%	-116%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1,91 per 1000 KH	1,91 per 1000 KH	1,9 per 1000 KH	1,89 per 1000 KH	1,88 per 1000 KH	1,87 per 1000 KH	1,86 per 1000 KH	2,2 per 1000 KH	5,5 per 1000 KH	5,2 per 1000 KH	85%	-90%	-75%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.5	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	114,45 per 100.000 KH	114,45 per 100.000 KH	113,45 per 100.000 KH	112,45 per 100.000 KH	111,45 per 100.000 KH	110,45 per 100.000 KH	109,45 per 100.000 KH	205,4 per 100.000 KH	36,58 per 100.000 KH	84,64 per 100.000 KH	21%	168%	125%	Belum Tercapai	Melampaui	Melampaui
2.6	Rasio Posyandu per 1.000 balita	25	25	25	25	25	25	25	1340,00%	2500%	1040%	53,60%	100%	42%	Belum Tercapai	Sesuai	Belum Tercapai
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-									
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	1,4 per 100.000 pddk	1,5 per 100.000 pddk	2 per 100.000 pddk	0,80%	1,80%	2,40%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	-	-	-	-	-	-	-	139%	171%	172%	Melampai	Melampai	Melampai			
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	184,87 /100,000	185 /100,000	186 /100,000	187 /100,000	188 /100,000	189 /100,000	190/100,000	257,3 / 100.000	318,5 / 100.000	320,9 / 100.000	139%	171%	172%	Melampaui	Melampaui	Melampaui
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	70,4%%	71%	110%	100,60 %	89%	138%	Sesuai	Belum Tercapai	Melampaui

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94.70%	95%	97%	99%	100%	100%	100%	80,6%%	69,58%	79%	85%	72%	80%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106%	100%	100%	Melampaui	Sesuai	Sesuai
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	98,95%	97,37%	99,36%	104%	102%	104%	Melampaui	Melampaui	Melampaui
	2.100 Kkal/kapita/hari)																
2.13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	99,55%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	104%	102%	104%	Melamp au	Melam pau	Melampa ui			
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai			
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	-	-	-	-	-	-									
2.16	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.17	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93	90	90	90	90	90	90	78,6	70,1	73,1	87,30%	78%	81%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.18	Cakupan penemuan dan	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	penanganan penderita penyakit DBD																
2.19	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.20	Angka kejadian Malaria	0,08/mi l	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	0.005 / mil	0.012 / mil	0.02 / mil	200%	198%	198%	Melampaui	Melampaui	Melampaui
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu	-	-	-	-	-	-	-	0,21	0,19	0,18	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	berinsektisida																
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	-	-	-	-	-	-	-									
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	< 0,5	0,21	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	0,19	0,18	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks	-	-	-	-	-	-	-									
	berisiko tinggi terakhir																
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-									
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	-	-	-	-									
2.23	Cakupan kunjungan bayi	116,76 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,10%	89,60%	96,90%	94,10%	89,60%	96,90%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.35	Cakupan puskesmas	-	-	-	-	-	-	-									
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	-	-	-	-	-	-	-									
2.24	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92.10%	92.10%	96%	97%	98%	99%	100%	80,50%	73,20%	77,90%	87,40%	76,25%	80,30%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.25	Cakupan pelayanan nifas	93.80%	93.80%	95%	96%	97%	98%	100%	80,10%	63,60%	77,70%	85,40%	67%	81%	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.26	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	74.20%	74.20%	80%	80%	80%	80%	80%	74,70%	84,90%	78,70%	100,70 %	106%	98,40%	Melampaui	Melampaui	Belum Tercapai
2.27	Cakupan pelayanan anak balita	51.60%	67%	72%	77%	82%	85%	85%	71,90%	90,20%	79,48%	107%	125,30 %	103%	Melampaui	Melampaui	Melampaui
2.28	Cakupan pemberian makanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin																
2.29	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	99,9	99,9	100	100	100	100	100	99,90%	98,90%	99,70%	100%	98,90%	99,70%	Sesuai	Belum Tercapai	Belum Tercapai
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	-	-	-	-	-	-	-									
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	-	-	-	-	-	-	-									
2.30	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.31	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	93,8	-	-	-	-	-	-									
2.32	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	74,2	-	-	-	-	-	-									
2.48	Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-									
2.33	Prevalensi Balita Stunting (%)	6.1	-	-	-	-	-	-									
2.34	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	-	-	-	-	-	-									
2.35	Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)	74.6	-	-	-	-	-	-									
2.36	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin (%)	100	-	-	-	-	-	-									
2.37	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat (%)	99,9	-	-	-	-	-	-									
2.54	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Pembantu Dan Jaringanya :																
2.38	Persentase Puskesmas kondisi baik (%)	100%	-	-	-	-	-	-									
2.39	Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk)	0,1	-	-	-	-	-	-									
2.40	Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	261	-	-	-	-	-	-									
2.41	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	245	-	-	-	-	-	-									
2.42	Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)	560	-	-	-	-	-	-									
2.60	Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%)	-	-	-	-	-	-	-									
2.43	Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS	47,69	-	-	-	-	-	-									
2.44	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)	20%	-	-	-	-	-	-									
2.45	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	82,2	-	-	-	-	-	-									
2.46	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	-	-	-	-	-	-									
2.47	Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%)	100	-	-	-	-	-	-									
2.48	AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun	0	-	-	-	-	-	-									
2.49	Cakupan penanganan pneumonia balita sesuai standar (100%)	100	-	-	-	-	-	-									
2.50	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	-	-	-	-	-	-									
2.51	Penderita DBD yang ditangani (%)	100	-	-	-	-	-	-									
2.52	Pelaksanaan tata laksana Diare	100	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Sesuai Standar (%)																
2.53	Penemuan dan penanganan HIV/AIDS (%)	< 0,5	-	-	-	-	-	-									
2.54	Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)	99,45	-	-	-	-	-	-									
2.55	Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%)	94,5	-	-	-	-	-	-									
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)																
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
3.1	Pekerjaan Umum :																
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran	-	-	-	-	-	-	-									
	pembuangan air (minimal 1,5 m)																
3.1.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	aliran air tidak tersumbat																
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-									
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-									
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum																
3.2	Penataan Ruang :	-	-	-	-	-	-	-									
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas	-	-	-	-	-	-	-									
	Wilayah ber HPL/HGB																
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-									
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	-	-	-	-	-	-									
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	-	-	-	-	-	-	-									
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW																
3.1	Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)	-	-	-	-	-	-	-									
3.2	Terlaksananya perjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang.	-	-	-	-	-	-	-									
3.3	Rasio Jaringan Irigasi	66,35	-	-	-	-	-	-									
3.4	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		-	-	-	-	-	-									
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi		-	-	-	-	-	-									
3.6	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		-	-	-	-	-	-									
3.7	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		-	-	-	-	-	-									
3.8	Rasio rumah layak huni		-	-	-	-	-	-									
3.9	Rasio permukiman layak huni		-	-	-	-	-	-									
3.10	Panjang jalan dilalui Roda 4		-	-	-	-	-	-									
3.11	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk		-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	(minimal dilalui roda 4)																
3.12	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		-	-	-	-	-	-									
3.13	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		-	-	-	-	-	-									
3.14	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		-	-	-	-	-	-									
3.15	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		-	-	-	-	-	-									
3.4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	11.158, 00	-	-	-	-	-	-									
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																
3.1	Rasio rumah layak huni	98,60%	98,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai	sesuai	sesuai
3.2	Rasio permukiman layak huni	Data tidak tersedia	98,60%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	99,73%	0,00%	0,00%	99,73%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,60%	-	-	-	-	-	-									
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	-	-	-	-	-	-	-									
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	-	-	-	-	-	-	-									
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	-	-	-	-	-	-	-									
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-									
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	-	-	-	-	-									
3.4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	98,43%	98,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai	sesuai	sesuai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
4.5	Jumlah Rumah layak huni yang diselesaikan tiap tahun dan target penyelesaian (unit)	-	-	-	-	-	-	-									
4.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
4.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	40,02	40,12	39,8	101,04 %	101,29 %	100%	melampaui	melampaui	sesuai
4.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	90%	90%	100%	100%	100%	sesuai	sesuai	sesuai
4.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	-	-	-	-	-	-				#DIV/0 !					
4.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	99,44%	-	-	-	-	-	-				#DIV/0 !					
4.3	Persentase Penegakan	90%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	90%	90%	100%	100%	100%	sesuai	sesuai	sesuai
	PERDA																
5.6	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	58	-	-	-	-	-	-									
5.7	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)	140	-	-	-	-	-	-									
5.8	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	-	-	-	-	-	-	-									
5.9	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	39,61	-	-	-	-	-	-									
5.10	Jumlah kasus Penegakan PERDA	700	-	-	-	-	-	-									
5.11	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	80%	-	-	-	-	-	-									
5.12	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100,00 %	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
5.13	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	99,44%	-	-	-	-	-	-									
5.14	Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan	-	-	-	-	-	-	-									
5.15	Masyarakat (unit)		-	-	-	-	-	-									
5.16	Persentase SKPD memiliki dan menerapkan SOP/SPP (%)		-	-	-	-	-	-									
5.17	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten		-	-	-	-	-	-									
5.14	Status audit Keuangan BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	-	-	-	-	-	-									
5.19	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)		-	-	-	-	-	-									
5.20	Tersusunnya LKPI Bupati		-	-	-	-	-	-									
5.15	Tersusunnya LPPD Bupati	57 buku	-	-	-	-	-	-									
5.16	Persentase Desa tertib administrasi ADD (%)	100	-	-	-	-	-	-									
5.17	Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)	92	-	-	-	-	-	-									
5.18	Angka kriminalitas	1096	-	-	-	-	-	-									
5.19	Jumlah demo	-	-	-	-	-	-	-									
5.20	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	-	-	-	-	-	-									
5.21	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	-	-	-	-	-	-									
5.22	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,71	-	-	-	-	-	-									
5.23	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	39,61	-	-	-	-	-	-									
5.24	Rasio Pos Siskamling per	378	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	jumlah desa /kelurahan																
5.31	Pertumbuhan ekonomi		-	-	-	-	-	-									
5.25	Penegakan PERDA	90	-	-	-	-	-	-									
5.26	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	-	-	-	-	-	-									
5.27	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	80%	-	-	-	-	-	-									
5.28	Petugas Perindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922	-	-	-	-	-	-									
5.29	Indeks Kepuasan Layanan Masvarakat	-	-	-	-	-	-	-									
	Indeks Harmoni Indonesia																
5.	Sosial																
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-									
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-									
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	-	-	-	-	-									
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program	-	-	-	-	-	-	-									
	pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya																
6.5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberda yaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-	-	-	-	-	-									
6.6	Persentase wahana	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	kesejahteraan sosial berbasis masyarakat																
	(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial																
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	-	-	-	-	-	-									
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi	-	-	-	-	-	-	-									
	dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap																
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental,	-	-	-	-	-	-	-									
	serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial																
5.1	Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Data tidak tersedia	-	1 KUBE	2 KUBE	3 KUBE	4 KUBE	15 KUBE	-	0	0	0	0	0	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
5.2	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	246	150	150	150	150	150	750 orang	204	3771	3821	136	2514	2547	melampaui	melampaui	melampaui
5.3	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Data tidak tersedia	-	6	7	8	9	40 orang	300	300	477	0	5000	6814		melampaui	melampaui
5.4	Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan	Data tidak tersedia	4.391 orang	4.770 orang	5.149 orang	5.528 orang	5.907 orang	6.286 orang	0	0	17	0	0	0,33	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	rehabilitasi sosial dasar																
5.5	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	51 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	1.500 orang	204	266	322	68	89	107	belum tercapai	belum tercapai	melampaui
	Indeks Kesejahteraan Sosial																
Layanan Urusan Wajib Non Dasar																	
1.	Tenaga Kerja																
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	-	-	-	-	-	-									
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	-	-	-	-	-	-									
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	-	-	-	-	-									
1.4	Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-	-	-									
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	-	-	-	-	-	-									
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-									
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-									
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-									
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	-	-	-	-	-									
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	-	-	-	-	-									
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	-	-	-	-	-	-									
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,80%	30,80%	31,00%	32,00%	33,00%	34,00%	35,00%	51,00%	48,00%	52,00%	165,58 %	154,84 %	162,50%	melampaui	melampaui	melampaui
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	25%	25%	22,50%	22,50%	22,50%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
1.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	51,57	53,77	54,8	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0!			
1.4	Rasio KDRT	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0!	sesuai	sesuai	sesuai
2.6	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0!	sesuai	sesuai	sesuai
1.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
1.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
1.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	54,05%	54,50%	55%	55,10%	55,50%	55,70%	56%	54,50%	55%	55,10%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
1.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	penyidikan sampai																
	dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak																
1.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	54,05%	54,50%	55%	55,10%	55,50%	55,70%	56%	54,50%	55%	55,10%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
1.10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
1.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
1.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	99,75%	99,76%	99,77%	99,78%	99,80%	99,85%	99,90%									
1.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	84,48%	84,50%	84,75%	85,00%	85,25%	85,50%	85,75%									
1.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	80,15%	80,17%	80,19%	80,21%	80,23%	80,25%	80,27%									
1.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Data tidak tersedia	33,05%	33,35%	33,65%	33,95%	34,25%	34,55%									
1.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
1.17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	-	-	-	-	-	-	-									
1.17	Jumlah organisasi perempuan aktif (%)	100%	-	-	-	-	-	-									
1.18	Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit)	60	-	-	-	-	-	-									
1.19	Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD)	60	-	-	-	-	-	-									
1.20	Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)	7	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.21	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%)	63%	-	-	-	-	-	-									
1.22	Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah)	55	-	-	-	-	-	-									
1.23	Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah)	-	-	-	-	-	-	-									
1.24	Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit)	6	-	-	-	-	-	-									
1.25	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%	-	-	-	-	-	-									
1.26	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	1,04	-	-	-	-	-	-									
1.27	Rasio akseptor KB (%)	79,27%	-	-	-	-	-	-									
1.28	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	0,13%	-	-	-	-	-	-									
1.29	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	79,27%	-	-	-	-	-	-									
1.30	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	3,47%	-	-	-	-	-	-									
1.31	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan	1:(1-2)	-	-	-	-	-	-									
1.32	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan	01:01	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.33	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	100%	-	-	-	-	-	-									
1.34	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun	100%	-	-	-	-	-	-									
1.35	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	91,83%	-	-	-	-	-	-									
1.36	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	82,84%	-	-	-	-	-	-									
1.37	Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit)	31	-	-	-	-	-	-									
1.38	Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)	8	-	-	-	-	-	-									
1.39	Penyelesaian Penerimaan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	100%	-	-	-	-	-	-									
1.40	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan (%)	80%	-	-	-	-	-	-									
2.	Pangan																
2.1	Ketersediaan pangan utama	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-									
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Data tidak tersedia	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	99,30/110,80	96,30/107,50	103,90/121,00	92	89	98	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
2.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	226 sample	0	450 sample	450 sample	550 sample	600 sample	600 sample	0	0	0	0	0	0	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
2.4	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	66,71	-	-	-	-	-	-									
2.5	Penguatan Cadangan Pangan (%)		-	-	-	-	-	-									
2.6	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)		-	-	-	-	-	-									
2.7	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)		-	-	-	-	-	-									
2.5	Stor Pola Pangan Harapan (SPPH)	95,95	-	-	-	-	-	-									
2.6	Ketersediaan pangan utama		-	-	-	-	-	-									
2.7	Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2.174,00	-	-	-	-	-	-									
2.8	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	62,75	-	-	-	-	-	-									
2.9	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	0,9	-	-	-	-	-	-									
2.10	Rasio akseptor KB	79,27%	-	-	-	-	-	-									
2.11	Cakupan peserta KB aktif	79,27%	-	-	-	-	-	-									
3.	Pertanahan																
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat																
3.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	5 kasus	-	-	-	-	-	-									
3.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Data tidak tersedia	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	23 obyek	15 obyek	100	460	300	sesuai	melampaui	melampaui
3.2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Data tidak tersedia	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	16 obyek	6 Obyek	100	320	120	sesuai	melampaui	melampaui
3.3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Data tidak tersedia	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
3.4	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Data tidak tersedia	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	-	25 bidang	25 bidang	-	100	100	belum tercapai	sesuai	sesuai
3.6	Penyelesaian izin lokasi	5 obyek	-	-	-	-	-	-									
4.	Lingkungan Hidup																
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH Provins	-	-	-	-	-	-	-									
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
																belum tercapai (<) sesuai (=)		
																melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-									
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-									
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-									
4.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	14.90	15.00	18.88	18.91	18.95	18.99	19.025		23,81	20,05	19,87	158,73	106,2	105,08	melampaui	melampaui	melampaui
4.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	29.80	29.80	36.77	36.82	36.86	36.91	36.952		38.10	37,13	36,97	127,85	100,98	100,41	melampaui	melampaui	melampaui
4.3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24.60	24.60	5.90	5.91	5.91	5.91	5.917		6,45	9,93	12,22	26,22	168,31	206,77	belum tercapai	melampaui	melampaui
4.4	Laporan Inventarisasi GRK	-	-	-	-	-	-	-	-								>	>
4.5	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-								>	>
4.4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	80.451, 25 kg	85.334 kg	87.685 kg	89.842 kg	92.122 kg	96.146 kg	98.137 kg		108.750,8 3 kg	180.016,9 05 kg	123.851, 155 kg	12744, 14	20529 9,54	137854, 41	melampaui	melampaui	melampaui
4.5	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	1	1	0	0	0	0	1		1	0	0	100	0	0	sesuai		
5.13	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-									
5.14	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi																	
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	di Daerah (PPLHD) di Provinsi																
4.6	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Data tidak tersedia	0	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	0	10 desa	10 desa	0	100	100		sesuai	sesuai
5.17	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	-	-	-	-	-									
5.18	Penetapan hak MHA	-	-	-	-	-	-	-									
5.19	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	-	-	-	-	-									
5.20	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	-	-	-	-	-									
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masvarakat	-	-	-	-	-	-	-									
4.7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-									
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	-	-	-	-	-	-	-									
4.10	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	-	-	-	-	-	-	-									
5.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-									
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-									
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
4.11	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	14.80	-	-	-	-	-	-									
4.12	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	31.43	-	-	-	-	-	-									
4.13	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	24.61	-	-	-	-	-	-									
4.8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang	105 lokasi	200 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	0	89 lokasi	178 lokasi	0	178	356		melampaui	melampaui
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota																
4.9	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana	Data tidak tersedia	-	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	0	0	0	0	0	0			
	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota																
4.10	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di	-	-	-	-	-	-	-									
	Kabupaten/Kota																
4.11	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	-	-	-	-	-									
4.12	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	-	-	-	-	-	-									
4.13	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	-	-	-	-	-									
4.14	Penetapan hak MHA	-	-	-	-	-	-	-									
4.15	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
4.16	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	-	-	-	-	-									
4.17	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-									
4.18	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-									
4.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	6 kasus	55 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	11 kasus	0	71 kasus	77 kasus	0	710	770		melampaui	melampaui
4.11	Timbulan sampah yang ditangani	57.143,52 ton	75.947,54 ton	75.219,01 ton	74.525,07 ton	73.865,09 ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton	116.731,24 ton	119.474,58 ton	195.222,49 ton	153,7	158,84	261,96	melampaui	melampaui	melampaui
4.12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,1118	0,26	0,27	0,28	0,3	0,32	0,32	11,62	20,46	23,06	4469,23	7577,78	8235,71	melampaui	melampaui	melampaui
4.13	Persentase cakupan area pelayanan	0,5	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	0,55	0,6	0,65	105,77	113,21	120,37	melampaui	melampaui	melampaui
4.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	66.85	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,72	92.60	93,33	63,53	13617,65	13526,09	9075,71	melampaui	melampaui	melampaui
5.48	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-							>	>	>
5.49	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-							>	>	>
4.15	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	100	-	-	-	-	-	-							>	>	>
4.15	Penurunan nilai indeks pencemaran (IP) air		4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4	23,81	20,05	19,87	529,11	455,68	462,09	melampaui	melampaui	melampaui
4.17	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	100	-	-	-	-	-	-									
4.18	Pencemaran status mutu air (%)	75	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
4.19	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	-	-	-	-	-	-									
4.20	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	-	-	-	-	-	-									
4.21	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%)	18	-	-	-	-	-	-									
4.22	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)	0,13	-	-	-	-	-	-									
4.23	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100	-	-	-	-	-	-									
4.24	Persentase penanganan sampah	66,85	-	-	-	-	-	-									
5.2	Persentase Penduduk berakses air minum																
5.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata																
5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98%	98%	98%	98,40%	98,60%	98,80%	99%	99,86%	98,02%	98,40%	101,90 %	100,02 %	100,00%	melampaui	melampaui	sesuai
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	0,99	0,9699	0,9852	0,9883	103,18 %	103,71 %	102,95%	melampaui	melampaui	melampaui
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,65	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,7255	0,7718	0,7946	161,22 %	154,36 %	144,47%	melampaui	melampaui	melampaui
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	99,34%	99,50%	99,52%	99,55%	99,60%	99,65%	99,75%	99,50%	99,52%	99,55%	100,00 %	100,00 %	100,00%	melampaui	melampaui	melampaui
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	98%	98%	98%	98,40%	98,60%	98,80%	99%	99,86%	98,02%	98,40%	101,90 %	100,02 %	100,00%	melampaui	melampaui	sesuai
5.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,98	0,98	0,98	0,984	0,986	0,988	0,99	0,9986	0,98	0,984	101,90 %	100,00 %	100,00%	melampaui	sesuai	sesuai
5.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	0,96	0,9	0,968	0,97	0,976	0,978	0,98	0,97	0,98	0,9883	107,77 %	101,24 %	101,89%	melampaui	melampaui	melampaui
5.8	Kepemilikan KTP (%)	98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.9	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	elektronik (e-KTP) (%)																
5.10	Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	99,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan																
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	42 Lembaga	42 Lembaga	42 Lembaga	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 (TP PKK Kec., Kel., Desa)	68 (TP PKK Kec., Kel., Desa)	68 (TP PKK Kec., Kel., Desa)	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
6.4	Persentase LPM Berprestasi	1 kelompok	68 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	PKK aktif	606 kelompok	606 kelompok	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 (TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa)	69 (TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa)	69 (TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa)	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
6.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	85,70%	-	-	-	-	-	-									
6.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	67 kelompok	-	-	-	-	-	-									
6.8	Jumlah LSM	2	-	-	-	-	-	-									
6.9	Posyandu aktif	573 kelompok	-	-	-	-	-	-									
6.10	Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif	46 desa	-	-	-	-	-	-									
6.11	Tersusunnya RPJMDes	46 desa	-	-	-	-	-	-									
6.12	Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik	62 desa/kel	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	pendataan profil desa																
6.13	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	62 desa/kel.	-	-	-	-	-	-									
6.14	Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang resonsif gender	100%	-	-	-	-	-	-									
6.15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	46 desa	-	-	-	-	-	-									
6.16	Meningkatnya LKM berprestasi	46 desa	-	-	-	-	-	-									
6.17	Terbangunnya infrastruktur desa	46 desa	-	-	-	-	-	-									
6.18	Terbangunnya kantor desa yang layak	46 desa	-	-	-	-	-	-									
6.19	Terbentuknya BUMDES	6 Bumdes a	-	-	-	-	-	-									
	Indeks Desa																
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,25	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1									
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,1	34,21%	34,21%	34,21%	34,21%	34,21%	34,21%									
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	34,21%	1	1	1	1	1	1									
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	1									
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1	1	1									
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati	1	0	0	0	0	0	0									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan																
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan	Data tidak tersedia	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04									
	kependudukan																
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,07	79,74%	79,76%	79,80%	79,80%	79,80%	79,80%									
7.9	Ratio Akseptor KB	79,74%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03									
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03									
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,03	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,10%									
7.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,13%	3,26%	3,25%	3,24%	3,24%	3,23%	3,22%	0,20%	0,15%	0,15%	6,13%	4,62%	4,63%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
7.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,47%	3,26%	3,25%	3,24%	3,24%	3,23%	3,22%	3,50%	3,50%	3,50%	107,36 %	107,69 %	108,02%	melampaui	melampaui	melampaui
7.14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,47%	77%	77%	77%	77%	79%	80%	3,50%	3,50%	3,50%	4,55%	4,55%	4,55%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
7.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	76%	85%	87%	88%	90%	93%	95%	87%	88%	88%	102,35 %	101,15 %	100,00%	melampaui	melampaui	sesuai
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	91,83%	97,52%	97,54%	97,55%	97,56%	97,57%	97,58%	100,00%	100,00%	100,00%	102,54 %	102,52 %	102,51%	melampaui	melampaui	melampaui
7.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	97,52%	84,13%	84,15%	84,17%	84,19%	84,21%	84,23%	100,00%	100,00%	100,00%	118,86 %	118,84 %	118,81%	melampaui	melampaui	melampaui
7.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84,13%	84,13%	84,15%	84,17%	84,19%	84,21%	84,23%	85,00%	85,00%	90,00%	101,03 %	101,01 %	106,93%	melampaui	melampaui	melampaui

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
7.19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84,13%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	85,00%	85,00%	90,00%	94,44%	94,44%	100,00%	belum tercapai	belum tercapai	sesuai
7.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100,00%	100,00%	100,00%	sesuai	sesuai	sesuai
7.21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	90%	83,83%	83,85%	83,87%	83,89%	83,91%	83,93%	90%	90%	90%	107,36%	107,33%	107,31%	melampaui	melampaui	melampaui
7.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	83,83%	83,83%	83,85%	83,87%	83,89%	83,91%	83,93%	85,00%	85,00%	85,00%	101,40%	101,37%	101,35%	melampaui	melampaui	melampaui
7.23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	83,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85,00%	85,00%	85,00%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
7.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	47,91%	47,91%	47,92%	47,93%	47,94%	47,95%	100,00%	100,00%	100,00%	208,72%	208,72%	208,68%	melampaui	melampaui	melampaui
7.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	47,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47,90%	47,90%	50%	47,90%	47,90%	50,00%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
7.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	53%	54%	54%	54%	58%	60%									
7.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	51%	53%	54%	54%	54%	58%	60%									
7.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan	51%	21	21	21	21	21	21									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
			melampaui (>)														
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga																
7.29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	69%	61,70%	62%	62,50%	63%	63,50%									
7.30	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan,	66,80%	-	-	-	-	-	-									
	Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes																
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun																
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB																
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan																
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga																
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes																
8.	Perhubungan																
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	18.070	18.070	18.070	18.431	18.799	18.983	93.360	-	6.923	49.887	0%	38%	271%	belum tercapai	belum tercapai	melampaui
8.2	Rasio ijin trayek	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,13%	0,13%	0,13%	17%	17%	17%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4444	4510	4620	4710	4800	4880	28470	2849	2690	2421	63%	58%	51%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	sesuai	sesuai	sesuai
8.5	Persentase layanan angkutan darat	-	-	-	-	-	-	-				#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
8.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	25,91	26,16	26,521	26,7	26,696	27,021	27,29	35,918	33,73	27,521	137%	127%	103%	melampaui	melampaui	melampaui
8.6	Pemasangan Rambu rambu	1600	1600	1630	1700	1800	1900	2000	1600	1640	1710	100%	101%	101%	sesuai	melampaui	melampaui
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,4	0,45	0,45	0,43	0,41	0,41	0,4	0,85	0,82	0,89	189%	182%	207%	melampaui	melampaui	melampaui
8.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.070	18.070	18.070	18.431	18.799	18.983	93.360	-	6.923	49.887	0%	38%	271%	belum tercapai	belum tercapai	melampaui
8.9	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara / terminal per tahun	18.070	18.070	18.070	18.431	18.799	18.983	93.360	-	6.923	49.887	0%	38%	271%	belum tercapai	belum tercapai	melampaui
8.11	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%)	90,92%	-	-	-	-	-	-									
8.12	Peningkatan Pelayanan Angkutan :		-	-	-	-	-	-									
8.13	Jumlah arus penumpang angkutan umum		-	-	-	-	-	-									
8.14	Rasio ijin trayek per jumlah penduduk		-	-	-	-	-	-									
8.15	Persentase Angkutan darat terhadap penumpang (%)		-	-	-	-	-	-									
8.16	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor :	-	-	-	-	-	-	-									
8.12	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	43 menit	-	-	-	-	-	-									
8.13	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	4.444	-	-	-	-	-	-									
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan																
	Rasio Konektivitas Kabupaten																
9.	Komunikasi dan Informatika																
9.1	Cakupan pengembangan dan	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	15 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan																
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-									
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	-	-	-	-	-	-									
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	-	-	-	-	-	-									
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-	-	-	-									
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi																
	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi																
	Indeks Pemerintah Digital																
10.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah																
10.1	Persentase koperasi aktif (%)	60,20%	51,20%	88%	88%	89%	89%	89%	59,57%	89,16%	89,41%	116,35 %	101,32 %	101,60%	melampaui (>)	melampaui (>)	melampaui (>)
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	-	-	-	-	-	-	-									
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	-	-	-	-	-	-	-									
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Keci	97,10%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	96,46%	98,01%	84,74%	98,93%	100,52 %	86,91%	belum tercapai	melampaui (>)	belum tercapai
	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat																
11.	Penanaman Modal																
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4425	4425	-	-	-	-	-	3424	4.796	17.878	77.37			belum tercapai		
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	##### ####	10.905.119 .222.129	##### ###	##### ###	##### ###	##### ###	##### ###	4.829.722. 889.863	6.408.403. 506.783	9.327.12 5.999.99 9	44.289	55.967 ,00	77.578,0 0	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	6.87	6.87	7.87	8.66	9.53	10.49	11.54	3.046	2.031	1.013	44.33	25.8	11.7	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
11.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	##### ####	##### ###	##### ###	6.075.958. 546.455	7.900.085. 868.122	9.724.213. 189.789	11.548.340 .511.457	2.437.406. 200.001	##### ####	2.739.87 8.135.40 9	100	75	45	melampaui	belum tercapai	belum tercapai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah																
12.	Kepemudaan dan Olahraga																
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	50,08	54,86	55,85	68,86	60,46	60,96	61,94	54,86	55,85	68,86	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
12.2	Persentase wirausaha muda	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
12.3	Cakupan pembinaan olahraga	Data tidak tersedia	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0	90	90	100	90	90	sesuai	melampaui	melampaui
12.5	Cakupan pembinaan atlet muda	Data tidak tersedia	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
12.6	Jumlah atlet berprestasi	Data tidak tersedia	0	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	0	73,33	73,33	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
12.7	Jumlah prestasi olahraga	Data tidak tersedia	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
12.8	Jumlah organisasi pemuda	604	-	-	-	-	-	-									
12.9	Jumlah kegiatan kepemudaan	78	-	-	-	-	-	-									
12.10	Jumlah organisasi olahraga	185	-	-	-	-	-	-									
12.11	Jumlah kegiatan olahraga	12	-	-	-	-	-	-									
	Indeks Pembangunan Olahraga																
13.	Statistik																
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
13.2	Buku "kabupaten dalam angka"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
13.3	Buku "PDRB"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
13.4	Buku Kecamatan Dalam Angka	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
13.5	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi	0,55	-	-	-	-	-	-									
13.6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :	-	-	-	-	-	-	-									
24.1.1.	Jumlah Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun		-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
13.7	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)	1.340	-	-	-	-	-	-									
13.8	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi :	-	-	-	-	-	-	-									
13.9	Kerjasama informasi dan media massa :	23 Media Massa	-	-	-	-	-	-									
13.10	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	4 Radio lokal	-	-	-	-	-	-									
13.11	Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)	12 Surat Kabar Nasional /Lokal	-	-	-	-	-	-									
13.12	Jumlah Web site milik pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-									
14.	Persandian																
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
15.	Kebudayaan																
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Data tidak tersedia	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali									
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	-									
15.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2 Karya Budaya	-	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	15 Karya Budaya									
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	60 Cagar Budaya									
	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung																
17.	Perpustakaan																
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	-	-	-	-	-	-									
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-									
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	-	-	-	-	-	-	-									
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-									
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai	-	-	-	-	-	-	-									
	yang memiliki sertifikat																
18.	Kearsipan																
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-	-	-	-	-	-	-									
18.2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-	-	-	-	-	-	-									
Layanan Urusan Pilihan																	
1.	Pariwisata																
1.1	Kunjungan wisata	1071227		1071227	1076583	1081939	1087295	1098008	276	2212789	5386878	206,56%	500,36%		melampaui	melampaui	
1.2	Lama Kunjungan wisata	2 hari		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari		150%	150%		melampaui	melampaui
1.3	PAD sektor pariwisata	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-									
1.4	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	25,64%	-	-	-	-	-	-									
28.3.	Persentase kunjungan wisatawan ke wilayah Kab. Badung		-	-	-	-	-	-									
1.5	Persentase desa wisata yang aktif	55%	-	-	-	-	-	-									
1.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	28,67	-	-	-	-	-	-									
1.7	Persentase DTW yang ditata	72%	-	-	-	-	-	-									
1.8	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	1.071.227	-	-	-	-	-	-									
4.5	Persentase kunjungan		-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	wisatawan ke wilayah Kab. Badung																
1.9	Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian	6	-	-	-	-	-	-									
1.10	Persentase desa wisata yang aktif	55%	-	-	-	-	-	-									
	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung																
	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah																
	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian																
	Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum dalam PDRB																
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan																
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara																
2.	Pertanian																
2.1	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB																
	- Produksi Jagung	57,79	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8	-	58,33	53,64	71,97	134,4	123,31	165,07	melampaui	melampaui	melampaui
	- Produksi Kedelai	15,2	13,4	13,41	13,42	13,43	13,44	-	14,38	11,22	14,63	107,31	83,67	109,02	melampaui	belum tercapai	melampaui
	- Produksi Kacang Tanah	13,98	13	13,01	13,02	13,03	13,05	-	11,01	12,18	14,39	84,69	93,62	110,52	belum tercapai	belum tercapai	melampaui
	- Produksi Kacang Hijau	9,75	9,3	9,31	9,32	9,33	9,34	-	-	-	9,57	-	-	102,68			melampaui
	- Produksi Ubi Kayu	206,02	190,05	190,07	190,08	190,1	190,15	-	199,37	178,61	227,82	104,9	93,97	119,85	melampaui	belum tercapai	melampaui
	- Produksi Ubi Jalar	276,88	185,1	185,12	185,15	185,17	185,2	-	173,28	194,53	187,75	93,61	105,08	101,4	belum tercapai	melampaui	melampaui
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-									
	Produksi kakao	94,05	95,93	97,85	99,81	101,8	103,84	105,92	71,12	44,88	82,33	74,14	45,87	82,49	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
	Produksi kelapa	2.081,01	2.122,63	2.165,08	2.208,38	2.252,55	2.292,60	2343,56	1.837,14	1.973,00	2.008,53	86,55	91,13	90,95	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0! !	#DIV/0! !	#DIV/0! !			
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0! !	#DIV/0! !	#DIV/0! !			
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	61,65	60,5	60,6	60,7	60,80	62,54	-	61,77	65,67	68,19	102,1	108,37	112,34	melampaui	melampaui	melampaui
2.6	Cakupan bina kelompok petani	350	425	450	460	480	490	500	425	450	460	100	100	100			
2.7	Produksi kelapa	2.081,01	-	-	-	-	-	-									
2.8	Produksi tebu		-	-	-	-	-	-									
2.8	Produksi kapas		-	-	-	-	-	-									
2.9	Produksi kopi	689,55	-	-	-	-	-	-									
2.10	Produksi Vanili	0,24	-	-	-	-	-	-									
2.11	Produksi Kapuk	40	-	-	-	-	-	-									
2.12	Produksi Jambu Mette	6,4	-	-	-	-	-	-									
2.13	Produksi kemiri	-	-	-	-	-	-	-									
2.14	Produksi cengkeh	41,6	-	-	-	-	-	-									
2.15	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)		-	-	-	-	-	-									
2.15	Jumlah komoditas unggulan yang dipasarkan keluar daerah (jenis)	2	-	-	-	-	-	-									
2.16	Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok)	-	-	-	-	-	-	-									
2.17	Persentase kepemilikan KTT penyuluhan (%)	-	-	-	-	-	-	-									
2.18	Jumlah populasi sapi	32.183	-	-	-	-	-	-									
2.19	Jumlah populasi kambing	414	-	-	-	-	-	-									
2.20	Jumlah populasi itik	71.571	-	-	-	-	-	-									
2.21	Jumlah populasi ayam	1.257,471	-	-	-	-	-	-									
2.22	Angka Kesakitan Ternak	5,5	-	-	-	-	-	-									
2.23	Jumlah Ternak yang diberikan vaksin	1.513	-	-	-	-	-	-									
2.24	Jumlah kasus penemuan	26.467	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	penyakit pada hewan ternak																
2.25	Nilai tukar petani		-	-	-	-	-	-									
2.26	Jumlah Populasi Ternak	1.327.904	-	-	-	-	-	-									
	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB																
	Persentase Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam																
3.	Kehutanan																
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	-	-	-	-	-	-	-									
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-									
3.3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	-									
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral																
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	-	-	-	-	-	-	-									
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	-	-	-	-	-	-	-									
4.3	Persentase pertambangan tanpa ijin	-	-	-	-	-	-	-									
3.	Perdagangan																
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	62.492.817,35	57.260.445,10	57.760.445,20	58.260.445,35	58.760.445,35	59.260.445,35	59.760.445,10	59.009.687,73	65.940.128,28	65.746.380,98	103,05	114,16	112,85	melampaui	melampaui	melampaui
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	-	-	-	-	-	-	-									
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB																
6.	Perindustrian																
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	-	-	-	-	-	-									
7.	Transmigrasi																

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
7.1	Persentase transmigran swakarsa	-	-	-	-	-	-	-									
4.	Kelautan dan Perikanan																
8.1	Persentase transmigran swakarsa	-	0	0	0	0	0	-									
4.1	Konsumsi ikan	35,15	35,15	35,85	36,57	37,3	38,05	38,81	37,18	38,09	38,64	105,78	106,25	105,66	melampaui	melampaui	melampaui
4.2	Cakupan bina kelompok nelayan	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
4.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.911,77	7.911,77	7.437	7.586	7.737	7.892	8.050	8.563,27	7.409,29	9.156,60	108,23	99,63	120,7	melampaui	belum tercapai	melampaui
8.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	-	-	-	-	-	-	-					#DIV/0!				
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritoria	-	-	-	-	-	-	-					#DIV/0!				
8.7	Nilai tukar nelayan	-	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!				
Penunjang Urusan																	
1.	Perencanaan Pembangunan																
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	-	-	-									
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	-	-	-	-	-									
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	-	-	-	-	-									
1.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	-	-	-	-	-									
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	-	-	-	-	-	-									
1.6	Penjabaran Konsistensi	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
			melampaui (>)														
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Program RKPD kedalam																
	APBD																
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan	-	-	-	-	-	-	-									
	RTRW																
1.1	Hasil Evaluasi RKPD (dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-									
1.2	Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-									
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Keuangan																
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	-									
2.2	Persentase SILPA	-	-	-	-	-	-	-									
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	-	-	-	-	-	-	-									
2.4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-	-	-									
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	-	-	-	-	-	-	-									
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	-	-	-	-	-	-	-									
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan	-	-	-	-	-	-	-									
	belanja tidak langsung																
2.8	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	-	-	-	-	-	-	-									
2.9	Penetapan APBD	-	-	-	-	-	-	-									

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Indeks Akses Keuangan Daerah																
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah																
2.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan																
2.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3,76 JP	8,34 JP	10,67 JP	13,00 JP	15,33 JP	17,66 JP	20 JP	10,78 JP	13,44 JP	20,19 JP	129,26 %	125,96 %	155,31%	melampaui	melampaui	melampaui
2.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3,85%	8,30%	11,64%	14,98%	18,32%	21,66%	25%	5,65%	16,40%	70,53%	68,07%	140,89 %	470,83%	belum tercapai	melampaui	melampaui
2.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	80%	87,85%	90,28%	92,71%	95,14%	97,57%	100%	87,85%	73,39%	84,74%	100,00 %	81,29%	91,40%	sesuai	belum tercapai	belum tercapai
2.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	37	37	37	37	37	37	37	37	36	100,00 %	100,00 %	97,30%	sesuai	sesuai	belum tercapai
2.5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	37	37	37	37	37	37	37	37	36	100,00 %	100,00 %	97,30%	sesuai	sesuai	belum tercapai
2.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2445	3448	3448	3145	3448	3145	2445	3398	3331	3136	98,55%	96,61%	99,71%	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
	Indeks Profesionalitas ASN																
	Indeks Sistem Merit																
3.	Penelitian dan Pengembangan																
3.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Data tidak tersedia	0	50	55	60	65	70	10	85	70	100	100	100	melampaui	melampaui	melampaui
3.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	0	65	70	75	80	85	10	85	70	100	100	100	melampaui	melampaui	melampaui
3.3	Penerapan SIDA:	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
3.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	57,9	63,2	65,8	68,4	71,1	73,7	76,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Capaian / Realisasi Kinerja			Prosentase Capaian / Realisasi Kinerja			Interpretasi		
															belum tercapai (<) sesuai (=)		
															melampaui (>)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
3.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	belum tercapai	belum tercapai	belum tercapai
4.	Pengawasan																
5.1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	-	-	-	-	-	-									
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	-	-	-	-	-	-	-									
4.1	Jumlah temuan BPK	20	20	20	20	19	18	95	18	20	23	110%	100%	85%	melampaui	sesuai	belum tercapai
5.	Sekretariat Dewan																
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai	sesuai	sesuai
	Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota																
5.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD	81,35	81,35	81,5	81,75	82	82,25	82,5	86	82,61	90,67	106%	101%	111%	melampaui	melampaui	melampaui
	untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan																
	Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)																
5.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	81,35	81,35	81,5	81,75	82	82,25	82,5	86	82,61	90,67	106%	101%	111%	melampaui	melampaui	melampaui
	Indeks Reformasi Birokrasi																
	Nilai AKIP																
	Indeks Kepuasan Masyarakat																

2.1.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjamin hak dasar warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas dan merata. SPM menjadi indikator minimum yang wajib dicapai oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pada RPJMD.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung wajib menampilkan dan memfokuskan pencapaian 6 urusan wajib pelayanan dasar yang mencakup:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Setiap urusan tersebut memiliki indikator kinerja pelayanan yang terstandarisasi secara nasional, dan wajib dilaporkan capaian realisasinya per tahun selama periode 2020–2024 sebagai bagian dari evaluasi RPJMD 2021–2026.

Dalam RPJMD Kabupaten Badung, SPM menjadi instrumen utama untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada hasil yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian terhadap masing-masing indikator SPM digunakan tidak hanya sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja, namun juga sebagai dasar penentuan prioritas program dan alokasi anggaran. Berikut merupakan rincian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Badung.

Tabel 2. 50

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Realisasi Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Urusan Pendidikan								
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/M i, SM P/M Ts)	100%	Setiap Tahun	110,46%	113,28%	112,34%	100,00%	
1.2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	100,00%	100%	100,00%	100%	
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	93,48%	77,80%	74,42%	78,49%	
2	Urusan Kesehatan								
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	75,90%	89,29%	81,26%	81,59%	
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	79,40%	90,20%	77,53%	81,82%	
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	81,80%	94,68%	83,37%	81,23%	
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	69,90%	92,75%	100%	85,71%	
2.5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	13,90%	27,34%	95,09%	94,63%	
2.6	Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	65,50%	86,02%	93,19%	95,92%	
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang	100%	Setiap Tahun	57,90%	48,84%	95,56%	100%	

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Realisasi Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
		mendapatkan layanan kesehatan							
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	90,70%	996,33%	99,89%	99,83%	
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	74,90%	96,86%	99,69%	99,25%	
2.10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	91,20%	100,67%	100%	92,09%	
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	45,60%	51,69%	100%	96,56%	
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	51,00%	61,65%	80,42%	91,39%	
3	Urusan Pekerjaan Umum								
3.1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun	89,56%	96,61%	130%	72,91%	
3.2	Penyedia Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun	97,23%	99,08%	63,45%	99,62%	
4	Urusan Perumahan Rakyat								
4.1	Penyediaan dan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	75%	100%	100%	100%	
5	urusan Ketentraman, Ketertiban Umum								

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Realisasi Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Setiap Tahun	56,80%	100%	100%	100%	
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Setiap Tahun	78,90%	100%	100%	100%	
5.4	Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	99,89%	
5.5	Pelayanan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	0,00%	100%	95,53%	99,98%	
6	Urusan Sosial								
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun	0,09%	100%		100%	
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun	0%	100%		100%	
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun	4,89%	100%		100%	
6.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun	100%	100%		100%	

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Realisasi Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
6.5	Perlindungan dan Jaminan Pada Saat Tanggap dan Bencana Bagi Korban Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	Setiap Tahun	0%	100%		82,00%	

2.1.6. ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN BADUNG

A. Sasaran Pembangunan Kabupaten Badung

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran pembangunan kabupaten/kota sebagai upaya mendukung sasaran pembangunan Provinsi Bali yang telah diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran pembangunan ini berupa target Indikator Makro Ekonomi yang disesuaikan terhadap kontribusi masing-masing kabupaten/kota bagi perekonomian Provinsi Bali. Untuk mendukung terwujudnya Sasaran Pembangunan Provinsi Bali tersebut, maka target ekonomi makro Kabupaten Badung dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 mengikuti sasaran pembangunan tersebut. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 51

Sasaran Pembangunan Kabupaten Badung

Tahun	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Gini Rasio	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka
2026	Bali	5,60-6,30	3,00-3,50	0,340-0,345	78,94	1,77-2,30
	Badung	6,5-7,0	2,10-2,45	0,270	84,11	1,62
2030	Bali	8,25-8,75	1,50-2,50	0,330-0,334	79,56	1,50-2,00
	Badung	8,75-9,00	1,05-1,75	0,257	84,43	1,39

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

B. Highlight Intervensi Pembangunan Di Kabupaten Badung

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan wilayah serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, Kabupaten Badung akan menerima sejumlah intervensi pembangunan infrastruktur strategis yang dibiayai melalui skema APBN maupun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lainnya di kawasan metropolitan Denpasar. Berdasarkan dokumen Perpres Nomor 12 Tahun 2025 – Lampiran IV, beberapa proyek yang direncanakan mencakup sektor transportasi, lingkungan, pemukiman, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, mitigasi bencana, hingga penguatan institusi pendidikan tinggi.

Secara umum, berbagai rencana pembangunan infrastruktur tersebut memperlihatkan adanya komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Badung, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi proyek-proyek tersebut ke dalam RPJMD Kabupaten Badung menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta memperkuat daya tahan daerah terhadap dinamika tantangan global dan nasional di masa mendatang. Berikut merupakan rincian rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Tabel 2. 52

Highlight Intervensi Pembangunan di Wilayah Kabupaten Badung

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A1	WM Denpasar • Kota Denpasar • Kab. Badung • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar	a. Peningkatan kualitas dan penataan WM Denpasar, antara lain melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Denpasar ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan b. Penyusunan metropolitan statistical area c. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Denpasar, antara lain pengembangan BRT dan sistem transit d. Pembangunan TPST Regional Sarbagita e. Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Denpasar f. Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan di WM Denpasar g. Bali Beach Conservation Project II h. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Denpasar (PHTC) i. Pembangunan SPAM Regional Sarbagita j. Pengembangan World Class Research University berbasis potensi wilayah pada Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Denpasar, dan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa k. Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH Development Area 2) l. Pengembangan KEK Sanur

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		m. Pengembangan KEK Kura-Kura Bali n. Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi Singapadu-Sanur-Benoa o. Perencanaan dan persiapan Pembangunan jalan tol Mengwi-Canggu
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) • Kota Denpasar • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Gianyar • Kab. Bangli • Kab. Klungkung • Kab. Karangasem	a. Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata Bali, antara lain: ○ Ubud-Tegallalang-Payangan (Ulan) ○ Kintamani-Danau Batur ○ Besakih-Gunung Agung ○ Singaraja-Lovina (termasuk urban renewal kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka) ○ Bedugul-Kuta-Canggu-Sanur-Nusadua ○ TNBB-Menjangan-Pemuteran ○ Amuk-Candidasa ○ Nusapenida b. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi c. Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli- Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja d. Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara e. Pengembangan kawasan pariwisata Ulan, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulan f. Pengembangan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung g. Pengembangan Pelabuhan Gunaksa h. Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan i. Pengurangan risik bencana gunung api di Gunung Agung
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida	a. Rehabilitasi dan Peningkatan D.I. Tukad Ayung, D.I. Tukad Penet, D.I. Tukad Unda, D.I. Tukad Saba, D.I. Tukad Oos, D.I. Tukad Pakerisan, D.I. Tukad Petanu, D.I. Tukad Yeh Hoo

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	• Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Bangli • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar • Kab. Karangasem • Kab. Klungkung	b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah c. Pelestarian kearifan budaya Subak dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) e. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) f. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura g. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian pangan, peternakan, dan hortikultura h. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet- Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba i. Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos- Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, Danau Batur j. Pembangunan infrastruktur PLTP Bedugul k. Pembangunan PLTS Bali Barat dan Bali Timur l. Pembangunan PLTS Nusa Penida dan BESS (Battery Energy Storage System) m. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Java-Bali Interconnection. n. Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan pengembangan broodstock center udang di Kab. Karangasem o. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintanmodern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen p. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gundang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama q. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

C. Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 juga telah menetapkan rencana pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten/Kota guna mendukung terwujudnya pembangunan sesuai visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Adapun daftar rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 53

Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali di Kabupaten Badung

No	Lokasi	Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis	
1.	Kabupaten Badung	1	Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
		2	Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-Singapadu-Sanur-Benoa
		3	Pembangunan Jalan Tol Mengwi-Canggu
		4	Pembangunan Kawasan TOD dan pengembangan Angkutan Massal
		5	Pembangunan dan Penataan Transportasi Kuta: Pembangunan Kuta <i>Circulator</i> , Pembangunan Sarana Prasarana <i>Water Taxi</i>
		6	Pembangunan <i>Subway</i> Bali
		7	Pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Denpasar-Badung
		8	Pembangunan Jalan Baru <i>Underpass</i> Jimbaran
		9	Pembangunan Jembatan Baru, Bongkasa-Payangan (Badung-Gianyar)
		10	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Luhur Uluwatu
		11	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Pucak Mangu
		12	Perlindungan Tukad Ayung
		13	SPAM Ayung

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Di samping rencana pembangunan infrastruktur dimaksud, juga direncanakan Pembangunan infrastruktur umum yang berlokasi di kabupaten/kota se-Bali antara lain:

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan serta Pemenuhan Faskes dan Alat Kelengkapan Jalan.

2. Penanganan Sampah.
3. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas TPS3R, TPST, dan TPA.
4. Peningkatan Layanan Air Minum dan Limbah.
5. Peningkatan Ketangguhan Bencana.
6. Penanganan Terpadu Bencana Banjir.
7. Perlindungan Laut, Sungai dan Mata Air.
8. Penanganan Kualitas Rumah dan Kawasan Kumuh.
9. Penataan Kawasan, Destinasi/Objek Wisata.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 mendukung terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali tersebut dengan menyemarakkannya secara tersirat dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.

2.1.7. BUMD PENDUKUNG PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pembentukan BUMD bertujuan untuk mengembangkan investasi daerah, memanfaatkan potensi daerah dan menangkap peluang usaha serta menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna mendukung pembangunan daerah.

Kabupaten Badung saat ini memiliki 2 (dua) BUMD yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana).
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama).

Keberadaan BUMD-BUMD ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri.

a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana

Perumda Pasar Mangu Giri Sedana didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022

tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Perusahaan ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran dan mengembangkan tugas-tugas lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Peran Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana bagi Kabupaten Badung:

- **Pengelolaan Pasar Tradisional:** Perumda ini mengelola 9 unit pasar yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Badung, sehingga mendukung aktivitas perdagangan lokal dan perekonomian masyarakat.
- **Pembinaan Pedagang:** Melakukan pembinaan kepada pedagang pasar dalam rangka pemanfaatan area pasar secara optimal.
- **Stabilitas Harga dan Distribusi Barang:** Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.
- **Pengembangan Usaha Pangan:** Selain mengelola pasar, Perumda ini diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk bergerak dalam urusan pengadaan barang dan jasa di sektor pangan, sehingga tidak hanya fokus pada perpasaran semata.

b. Perumda Air Minum Tirta Mangutama

Perumda Air Minum Tirta Mangutama memiliki sejarah panjang dalam penyediaan air minum di Kabupaten Badung, dimulai sejak zaman Belanda pada tahun 1932. Perusahaan ini resmi menjadi Perumda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Peran Perumda Air Minum Tirta Mangutama bagi Kabupaten Badung:

- **Penyediaan Air Bersih:** Perumda ini bertanggung jawab menyediakan air minum yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Badung.
- **Pengembangan Infrastruktur Air:** Membangun dan memelihara infrastruktur penyediaan air minum, termasuk jaringan pipa transmisi dan distribusi, serta fasilitas pendukung lainnya.
- **Pelayanan Publik:** Menyediakan layanan pelanggan melalui Sistem Informasi Layanan Konsumen (SILK), yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran, pengaduan, dan registrasi layanan air minum.

- **Inovasi dan Penghargaan:** Perumda ini telah menerima penghargaan sebagai Inovator Pembangunan Infrastruktur dalam detikbali AWARDS 2025, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan dan infrastruktur air minum di Kabupaten Badung.

Selain itu Kabupaten Badung telah melakukan penyertaan modal pada beberapa BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Bali yaitu:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
2. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali
3. PT. Jasa Marga Bali Tol

Permodalan BUMD adalah modal sendiri (ekuitas) yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham. Modal pada BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terbagi atas saham. Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51 persen atau dapat memiliki keseluruhannya atau sebesar 100 persen. BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disebut Perseroan Daerah (Perseroda), sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) modalnya tidak terbagi atas saham. BUMD ini, seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah. Bila pada kondisi pemilik modal Perumda lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah maka Perumda ini berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada BUMD baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal/saham kepada BUMD yang berbentuk Perseroda, atau menyetorkan modalnya kepada Perumda. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap BUMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 54

Penyertaan Modal BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Badung

No	BUMD	Penyertaan Modal (Rp)
1	Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana	Rp62.699.999.998,10
2	Perumda Air Minum Tirta Mangutama	Rp334.125.619.485,00
3	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Rp1.050.617.000.000,00

4	PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Rp5.000.000.000,00
5	PT. Jasa Marga Bali Tol	Rp100.000.000.000,00
	Jumlah	Rp1.552.442.619.483,10

Sumber: Setda Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

Dari jumlah Penyertaan modal sampai tahun 2024 sebesar Rp1,552 triliun, BUMD telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan secara langsung berupa diantaranya adalah berupa penyerapan tenaga kerja secara langsung dan juga penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung, penerimaan pajak/retribusi dan Corporate Social Responsibility. Tenaga kerja secara tidak langsung merupakan tenaga kerja yang terserap sebagai dampak dari kerjasama BUMD dengan pihak ketiga atau dampak pelaksanaan suatu proyek pekerjaan yang ditangani langsung oleh BUMD. Selain itu, dampak kontribusi berupa Peningkatan PAD bagi kabupaten yang berasal dari setoran deviden.

Era otonomi daerah saat ini, menuntut Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk berfikir dalam memenuhi kebutuhan pendanaan baik rutin maupun biaya pembangunannya dari kemampuan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya mempunyai banyak potensi, yakni di bidang pertanian, sektor industri, perumahan, perhotelan (kepariwisataan) dan lain-lain, yang kesemuanya itu mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung. Karena itu sangatlah penting bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk memiliki BUMD untuk berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Badung dari utara ke selatan (dari hulu ke hilir).

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki harapan jika nantinya terbentuk BUMD baru akan mampu melakukan Inovasi berdasarkan potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Badung, sehingga memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang semakin kompetitif di era global, serta terciptanya dinamisme manajerial, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

BUMD yang akan dibentuk di Kabupaten Badung diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang kerap muncul khususnya berkaitan dengan lemahnya kemampuan menghasilkan laba akan tetapi permasalahan yang tidak kalah pentingnya disamping

untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan laba yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kesiapan permodalan dan Sumber Daya Manusia dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam membentuk dan menjalankan BUMD. Berdasarkan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Badung dalam perencanaan ke depan akan membentuk BUMD yang baru baik dalam bentuk Perseroda ataupun Perumda yang usahanya dapat bergerak di bidang infrastruktur, investasi, pariwisata, keuangan, perdagangan, dsb.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1. GAMBARAN KONDISI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN TERAKHIR

Sebagai salah satu kabupaten dengan keuangan daerah terbaik di Bali, Kabupaten Badung memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan, terutama dari sektor pariwisata. Pendapatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, pemahaman yang mendalam mengenai keuangan daerah menjadi krusial. Hal ini karena RPJMD harus mencerminkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai gambaran kondisi keuangan daerah selama lima tahun terakhir yakni Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 55

Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH					
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.116.979.640.281,88	1.750.345.226.107,68	3.705.745.447.378,11	6.308.865.160.074,79	7.507.616.497.511,36
	<i>Pajak Daerah</i>	1.613.756.252.261,10	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	5.676.922.890.002,77	6.771.024.745.896,75
	<i>Retribusi Daerah</i>	65.061.615.365,10	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	157.600.575.234,00	387.097.049.334,60
	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	243.081.327.172,33	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	203.303.789.637,30	259.681.154.910,64
	<i>Lain-lain PAD yang syah</i>	195.080.445.483,35	222.977.865.680,69	238.876.929.298,50	271.037.905.200,72	89.813.547.369,37
B	PENDAPATAN TRANSFER	874.764.610.591,91	866.887.036.895,25	898.419.918.524,02	907.565.437.438,00	1.112.177.267.833,00
	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	567.546.105.116,00	740.422.181.870,00	720.669.605.855,02	698.555.368.017,00	850.634.213.669,00
	<i>Bagi Hasil Pajak</i>	87.464.671.686,00	-			261.353.054.164,00
	<i>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</i>	1.476.864.119,00	-			
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	330.780.978.000,00	-			394.657.252.850,00
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	147.823.591.311,00	-			
	<i>Dana Perimbangan</i>	-	577.767.850.870,00	595.874.678.855,02	591.293.648.817,00	753.601.580.669,00
	<i>Dana Insentif Daerah</i>	-	104.167.785.000,00	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00	-
	<i>Dana Desa</i>	-	58.486.546.000,00	47.501.659.000,00	47.887.856.200,00	48.336.329.000,00
	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	152.072.619.000,00	-		107.261.719.200,00	97.032.633.000,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Dana Penyesuaian</i>	152.072.619.000,00	-			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	155.145.886.475,91	126.464.855.025,25	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	261.543.054.164,00
	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>	155.145.886.475,91	125.464.855.025,25	176.760.312.669,00	208.510.069.421,00	261.353.054.164,00
	<i>Bantuan Keuangan</i>		1.000.000.000,00	990.000.000,00	500.000.000,00	190.000.000,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	914.418.551.000,00	90.892.256.190,03	5.531.730.238,00	821.585.917,81	368.727.326,45
	Pendapatan Hibah	914.418.551.000,00	203.460.924,00	4.904.102.000,00		-
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	90.688.795.266,03	627.628.238,00	821.585.917,81	368.727.326,45
	JUMLAH PENDAPATAN	3.906.162.801.873,79	2.708.124.519.192,96	4.609.697.096.140,13	7.217.252.183.430,60	8.620.162.492.670,81
2	BELANJA DAERAH					
A	Belanja Operasi	3.018.982.835.754,46	2.169.432.919.549,48	2.724.494.988.052,10	4.590.419.053.204,98	5.282.727.057.332,65
	<i>Belanja Pegawai</i>	1.211.799.039.386,40	1.100.336.057.327,00	1.175.295.299.414,65	1.437.909.605.479,00	1.845.239.173.307,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.136.861.422.415,75	892.547.228.915,17	1.198.418.526.381,45	1.565.419.065.596,98	1.588.056.469.476,65
	<i>Belanja Subsidi</i>	1.121.800.000,00	16.000.000,00	1.265.758.000,00	1.131.803.344,00	3.623.755.746,00
	<i>Belanja Hibah</i>	618.895.401.832,31	176.533.633.307,31	348.551.904.256,00	1.585.686.578.785,00	1.845.207.158.803,00
	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	50.305.172.120,00	-	963.500.000,00	272.000.000,00	600.500.000,00
B	Belanja Modal	452.909.484.793,94	133.501.454.492,45	476.196.284.334,00	1.045.909.078.881,93	1.811.353.534.383,00
	<i>Belanja Modal Tanah</i>	32.157.600.000,00	-	26.335.768.000,00	163.387.996.513,00	366.052.702.952,00
	<i>Belanja Peralatan dan Mesin</i>	146.640.489.776,12	90.679.768.772,00	105.556.248.100,00	272.862.673.241,00	172.862.307.202,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	246.151.786.184,34	32.744.850.639,35	297.327.100.168,00	337.676.984.584,00	485.484.189.614,00
	<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	18.852.009.180,48	9.527.441.061,40	35.962.917.353,00	247.280.031.027,93	769.199.606.246,00
	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	9.107.599.653,00	549.394.019,70	9.349.250.713,00	14.855.287.321,00	
	<i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>			1.665.000.000,00	9.846.106.195,00	347.632.818,00
C	Belanja Tak Terduga	114.100.662.502,93	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00
	<i>Belanja Tak Terduga</i>	114.100.662.502,93	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00
D	Belanja Transfer		227.468.982.421,00	443.605.939.474,00	1.627.007.437.208,39	1.880.849.540.179,00
	<i>Belanja Bagi Hasil</i>		129.858.258.300,00	294.333.862.070,00	655.316.549.073,00	827.134.629.289,00
	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>		97.610.724.121,00	149.272.077.404,00	971.690.888.135,39	1.053.714.910.890,00
E	TRANSFER DAERAH	291.410.484.092,00				
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	234.503.321.092,00				
	<i>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</i>	159.108.049.310,00				
	<i>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</i>	75.395.271.782,00				
	Transfer Bantuan Keuangan	56.907.163.000,00				
	<i>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</i>	-				
	<i>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</i>	56.907.163.000,00				
	<i>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</i>	-				

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	JUMLAH BELANJA	3.585.992.983.051,33	2.810.667.656.353,20	3.226.273.712.884,10	7.287.698.714.295,30	8.982.940.749.786,65
	SURPLUS/ DEFISIT	28.759.334.730,46	-102.543.137.160,24	939.817.443.782,03	-70.446.530.864,70	-362.778.257.115,84
3	PEMBIAYAAN					
A	Penerimaan Pembiayaan	279.401.874.053,18	308.167.875.451,64	205.624.738.291,40	1.095.443.127.485,46	993.909.492.620,76
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	50.000.000.000,00	31.087.104.000,00	250.000.000.000,00
C	PEMBIAYAAAN NETTO	279.401.874.053,18	308.167.875.451,64	155.624.738.291,40	1.064.356.023.485,46	743.909.492.620,76
D	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	308.161.208.783,64	205.624.738.291,40	1.095.442.182.073,43	993.909.492.620,76	381.131.235.504,92

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung 2024

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024

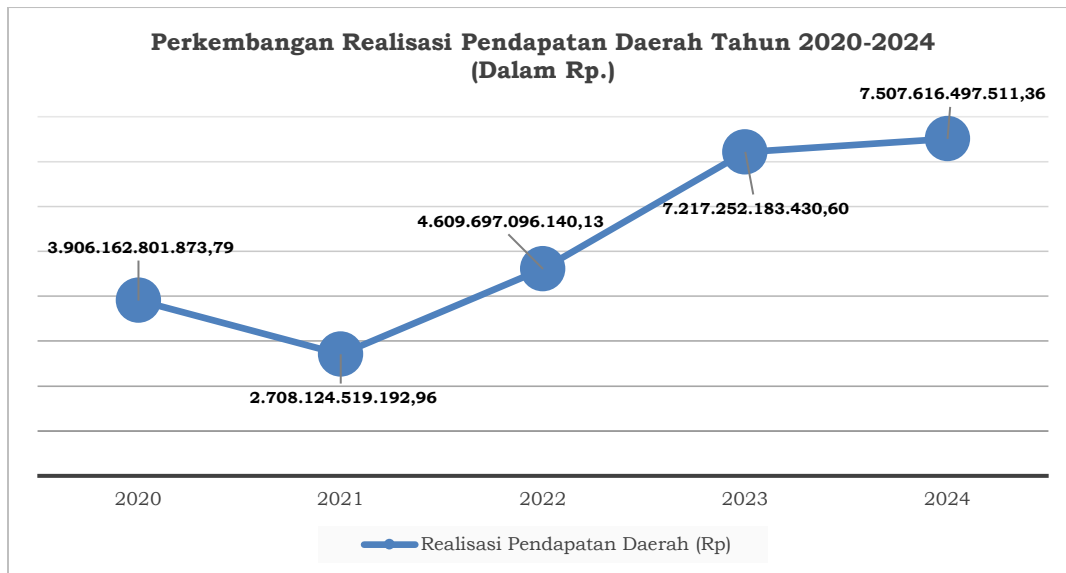
Kinerja pelaksanaan APBD merupakan salah satu aspek krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Analisis ini mencakup perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, serta gambaran realisasi belanja daerah. Dengan memahami proporsi dan pencapaian setiap sumber pendapatan, serta realisasi belanja daerah, dapat diidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan serta langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini juga memastikan bahwa RPJMD yang disusun mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Badung.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024, pendapatan daerah Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020-2024. Pendapatan daerah Kabupaten Badung termasuk tingkat pendapatan yang relatif tinggi, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yang mana penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi sektor-sektor utama seperti pariwisata dan perhotelan. Demikian pula yang terjadi pada tahun 2021, pendapatan daerah kembali mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa efek dari pandemi Covid-19 masih berlanjut dan menghambat pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, pendapatan daerah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan karena peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, dan pada tahun 2023 menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam pendapatan daerah, mencapai Rp7.217.252.183.430,60. Peningkatan besar ini mencerminkan pemulihan penuh dari dampak pandemi, dengan sektor pariwisata dan ekonomi lainnya kembali beroperasi normal.

Gambar 2. 23

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung 2020-2024

Tabel 2. 56

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	PENDAPATAN DAERAH	3.906.162.801.873,79	2.708.124.519.192,96	4.609.697.096.140,13	7.217.252.183.430,60	8.620.162.492.670,81
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.116.979.640.281,88	1.750.345.226.107,68	3.705.745.447.378,11	6.308.865.160.074,79	7.507.616.497.511,36
	<i>Pajak Daerah</i>	1.613.756.252.261,10	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	5.676.922.890.002,77	6.771.024.745.896,75
	<i>Retribusi Daerah</i>	65.061.615.365,10	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	157.600.575.234,00	387.097.049.334,60
	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	243.081.327.172,33	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	203.303.789.637,30	259.681.154.910,64
	<i>Lain-lain PAD yang syah</i>	195.080.445.483,35	222.977.865.680,69	238.876.929.298,50	271.037.905.200,72	89.813.547.369,37
	PENDAPATAN TRANSFER	874.764.610.591,91	866.887.036.895,25	898.419.918.524,02	907.565.437.438,00	1.112.177.267.833,00
	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	567.546.105.116,00	740.422.181.870,00	720.669.605.855,02	698.555.368.017,00	850.634.213.669,00
	<i>Bagi Hasil Pajak</i>	87.464.671.686,00	-	-	-	261.353.054.164,00
	<i>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</i>	1.476.864.119,00	-	-	-	-
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	330.780.978.000,00	-	-	-	394.657.252.850,00
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	147.823.591.311,00	-	-	-	-
	<i>Dana Perimbangan</i>	-	577.767.850.870,00	595.874.678.855,02	591.293.648.817,00	753.601.580.669,00
	<i>Dana Insentif Daerah</i>	-	104.167.785.000,00	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00	-
	<i>Dana Desa</i>	-	58.486.546.000,00	47.501.659.000,00	47.887.856.200,00	48.336.329.000,00
	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	152.072.619.000,00	-	-	107.261.719.200,00	97.032.633.000,00
	<i>Dana Penyesuaian</i>	152.072.619.000,00	-	-	-	-
	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	155.145.886.475,91	126.464.855.025,25	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	261.543.054.164,00
	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>	155.145.886.475,91	125.464.855.025,25	176.760.312.669,00	208.510.069.421,00	261.353.054.164,00
	<i>Bantuan Keuangan</i>	-	1.000.000.000,00	990.000.000,00	500.000.000,00	190.000.000,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	914.418.551.000,00	90.892.256.190,03	5.531.730.238,00	821.585.917,81	368.727.326,45
	<i>Pendapatan Hibah</i>	914.418.551.000,00	203.460.924,00	4.904.102.000,00	-	-
	<i>Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan</i>	-	90.688.795.266,03	627.628.238,00	821.585.917,81	368.727.326,45

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Pendapatan daerah Kabupaten Badung terdiri dari tiga komponen utama: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Komposisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Badung terakhir adalah:

- Pendapatan Asli Daerah berkontribusi 87,09%
- Pendapatan Transfer berkontribusi 12,90%
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah berkontribusi 0,00%

Secara umum komposisi tersebut tidak mengalami perubahan selama 5 tahun terakhir yaitu sumber Pendapatan Daerah utama Kabupaten Badung adalah Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mencerminkan bahwa kekuatan ekonomi lokal dan kemandirian fiskal Kabupaten Badung, terutama pada sektor-sektor utama seperti pariwisata. Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi tambahan yang membantu melengkapi anggaran daerah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Badung.

Tabel 2. 57
Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Pendapatan Daerah	Kontribusi Dalam Pendapatan Daerah (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah	54,20	64,63	80,39	87,41	87,09
2	Pendapatan Transfer	22,39	32,01	19,49	12,57	12,90
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23,41	3,36	0,12	0,01	0,00

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung 2020-2024

Selanjutnya akan dibahas mengenai masing-masing komponen dari 3 jenis pendapatan daerah tersebut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Komposisi struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung selama periode 2020–2024 menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari komponen pajak daerah. Pada tahun 2020, pajak daerah berkontribusi sebesar 76,23% terhadap total PAD. Persentase ini sempat menurun tipis menjadi 73,06% pada 2021, namun mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 hingga

mencapai 86,64%, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya sebesar 90,19% pada tahun 2024. Kenaikan kontribusi pajak daerah ini mencerminkan ketergantungan yang semakin besar pada sektor-sektor yang menjadi sumber pajak daerah, khususnya sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan hiburan, yang memang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Badung.

Sebaliknya, kontribusi retribusi daerah menunjukkan tren fluktuatif dan tetap pada kisaran yang rendah. Dari 3,07% pada tahun 2020, angkanya terus menurun hingga titik terendah 2,06% pada tahun 2022, sebelum naik kembali menjadi 5,16% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari retribusi belum tergarap optimal atau belum mengalami ekspansi yang signifikan dalam cakupan dan penerapannya.

Sementara itu, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan drastis, dari 11,48% pada tahun 2020 menjadi hanya 3,46% pada 2024. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya aset daerah yang menghasilkan atau berkurangnya dividen dari penyertaan modal pada BUMD.

Adapun komponen "lain-lain PAD yang sah" mengalami penurunan sangat tajam dari 9,22% pada tahun 2020 menjadi hanya 1,20% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin kecilnya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan yang tidak tergolong dalam tiga komponen utama, yang bisa jadi disebabkan oleh efisiensi anggaran atau pembenahan dalam pencatatan dan klasifikasi PAD.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Badung cenderung semakin terfokus pada pendapatan dari pajak daerah, sementara kontribusi dari komponen lainnya semakin menurun. Kondisi ini menandakan ketergantungan fiskal yang tinggi pada sektor-sektor tertentu, khususnya sektor pariwisata. Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang, diperlukan strategi diversifikasi sumber PAD, baik melalui optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif, maupun penciptaan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Tabel 2. 58
Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Dalam Pendapatan Asli Daerah (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	76,23	73,06	86,64	89,98	90,19
2	Retribusi Daerah	3,07	2,40	2,06	2,50	5,16
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11,48	11,81	4,85	3,22	3,46
4	Lain-lain PAD yang syah	9,22	12,74	6,45	4,30	1,20

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung 2020-2024

2. Pendapatan Transfer

Perkembangan realisasi pendapatan transfer Kabupaten Badung selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, namun secara umum mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Total realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp874,76 miliar pada tahun 2020, dan sempat sedikit menurun pada 2021 dan 2023. Namun demikian, angka tersebut melonjak drastis menjadi Rp1,11 triliun pada tahun 2024, menandakan adanya peningkatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan daerah.

Komponen terbesar dari pendapatan transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang pada tahun 2024 mencapai Rp850,63 miliar. Peningkatan signifikan terlihat pada sub-komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai Rp753,60 miliar di tahun 2024, jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan prioritas pemerintah pusat terhadap program-program sektoral di Kabupaten Badung, termasuk pembangunan fisik maupun non-fisik.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) baru mulai direalisasikan kembali pada tahun 2024 dengan nilai Rp394,66 miliar, setelah tidak tercatat dalam beberapa tahun sebelumnya. Kembali munculnya DAU ini berkontribusi signifikan terhadap total pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Komponen Dana Insentif Daerah (DID) hanya tercatat pada tahun 2020 hingga 2022, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp104,17 miliar, namun tidak muncul kembali pada tahun 2023 dan 2024, kemungkinan karena perubahan mekanisme atau kriteria penyaluran insentif tersebut.

Dana Desa menunjukkan tren yang relatif stabil, berkisar antara Rp47 hingga Rp58 miliar setiap tahunnya. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan transfer tidak terlalu besar, Dana Desa tetap penting dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.

Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya hanya tercatat pada tahun 2020 dan 2024. Setelah tidak muncul selama tiga tahun, jenis pendapatan ini kembali pada tahun 2024 dengan nilai Rp97,03 miliar, menunjukkan adanya tambahan dukungan program yang tidak termasuk dalam pos utama seperti DAK atau DAU.

Dari sisi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, komponen ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan khususnya melalui Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi. Pada tahun 2024, komponen ini mengalami lonjakan besar, mencapai Rp261,35 miliar—dua kali lipat dari realisasi tahun 2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak provinsi yang dibagikan kembali kepada Kabupaten Badung, sejalan dengan pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi.

Bantuan Keuangan, sebagai salah satu bentuk transfer antar-pemerintah, tampak tidak konsisten. Nilainya menurun dari Rp1 miliar di tahun 2020 menjadi hanya Rp190 juta di tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa alokasi bantuan ini bersifat tidak tetap dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kebijakan tertentu.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan transfer Kabupaten Badung sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya DAK dan DAU. Kenaikan signifikan pada tahun 2024 mencerminkan pemulihan fiskal dan prioritas pembangunan yang lebih besar dari pusat terhadap Kabupaten Badung. Untuk memperkuat kapasitas

fiskal daerah secara berkelanjutan, Kabupaten Badung perlu mengoptimalkan penggunaan transfer tersebut serta mendorong peningkatan PAD agar ketergantungan terhadap transfer dapat berkurang di masa depan.

Tabel 2. 59

Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi (Dalam Rp,)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer	874.764.610.591,91	866.887.036.895,25	898.419.918.524,02	907.565.437.438,00	1.112.177.267.833,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	567.546.105.116,00	740.422.181.870,00	720.669.605.855,02	698.555.368.017,00	850.634.213.669,00
Bagi Hasil Pajak	87.464.671.686,00	-			261.353.054.164,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.476.864.119,00	-			
Dana Alokasi Umum (Dau)	330.780.978.000,00	-			394.657.252.850,00
Dana Alokasi Khusus (Dak)	147.823.591.311,00	-			
Dana Perimbangan	-	577.767.850.870,00	595.874.678.855,02	591.293.648.817,00	753.601.580.669,00
Dana Insentif Daerah	-	104.167.785.000,00	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00	-
Dana Desa	-	58.486.546.000,00	47.501.659.000,00	47.887.856.200,00	48.336.329.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	152.072.619.000,00	-			97.032.633.000,00
Dana Penyesuaian	152.072.619.000,00	-			
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	155.145.886.475,91	126.464.855.025,25	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	261.543.054.164,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	155.145.886.475,91	125.464.855.025,25	176.760.312.669,00	208.510.069.421,00	261.353.054.164,00
Bantuan Keuangan		1.000.000.000,00	990.000.000,00	500.000.000,00	190.000.000,00

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung 2020-2024

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Badung selama tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi komponen ini mencapai angka tertinggi, yaitu sebesar Rp914,42 miliar, yang seluruhnya berasal dari pendapatan hibah. Namun, setelah itu, terjadi penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2021 mencatat realisasi sebesar Rp90,89 miliar, yang terbagi dalam dua sub-komponen, yaitu pendapatan hibah sebesar Rp203,46 juta dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp90,69 miliar. Penurunan signifikan ini kemungkinan besar mencerminkan berkurangnya dana hibah dari pihak ketiga maupun pemerintah pusat.

Pada tahun 2022, realisasi kembali turun drastis menjadi Rp5,53 miliar, yang terdiri dari hibah Rp4,9 miliar dan komponen lainnya sebesar Rp627,63 juta. Meski sempat menurun tajam, tren ini sedikit membaik di tahun 2023 dengan peningkatan realisasi menjadi Rp821,59 juta, yang seluruhnya berasal dari kategori lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan.

Namun, pada tahun 2024, kembali terjadi penurunan ke angka Rp368,73 juta, dan seluruhnya berasal dari komponen lain-lain sesuai ketentuan, tanpa adanya realisasi pendapatan hibah.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan daerah bersifat tidak stabil dan sangat tergantung pada penerimaan hibah, yang nilainya fluktuatif dan tidak selalu tersedia setiap tahun. Setelah puncaknya pada 2020, kontribusi dari komponen ini terus menurun baik secara nominal maupun dalam diversifikasi sumbernya. Oleh karena itu, Pemkab Badung perlu memperkuat sumber pendapatan lain yang lebih stabil dan dapat diprediksi, serta mengoptimalkan pemanfaatan hibah dan regulasi agar pendapatan dari pos ini bisa kembali ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 60

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam Rp)

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi (Dalam Rp,)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	914.418.551.000,00	90.892.256.190,03	5.531.730.238,00	821.585.917,81	36.872.732.645,00
Pendapatan Hibah	914.418.551.000,00	203.460.924,00	4.904.102.000,00		-
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan	-	90.688.795.266,03	627.628.238,00	821.585.917,81	36.872.732.645,00

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung 2020-2024

b. Belanja Daerah

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, realisasi belanja daerah Kabupaten Badung menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,98 triliun, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp2,67 triliun. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah dalam merespons pandemi COVID-19, terutama melalui refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

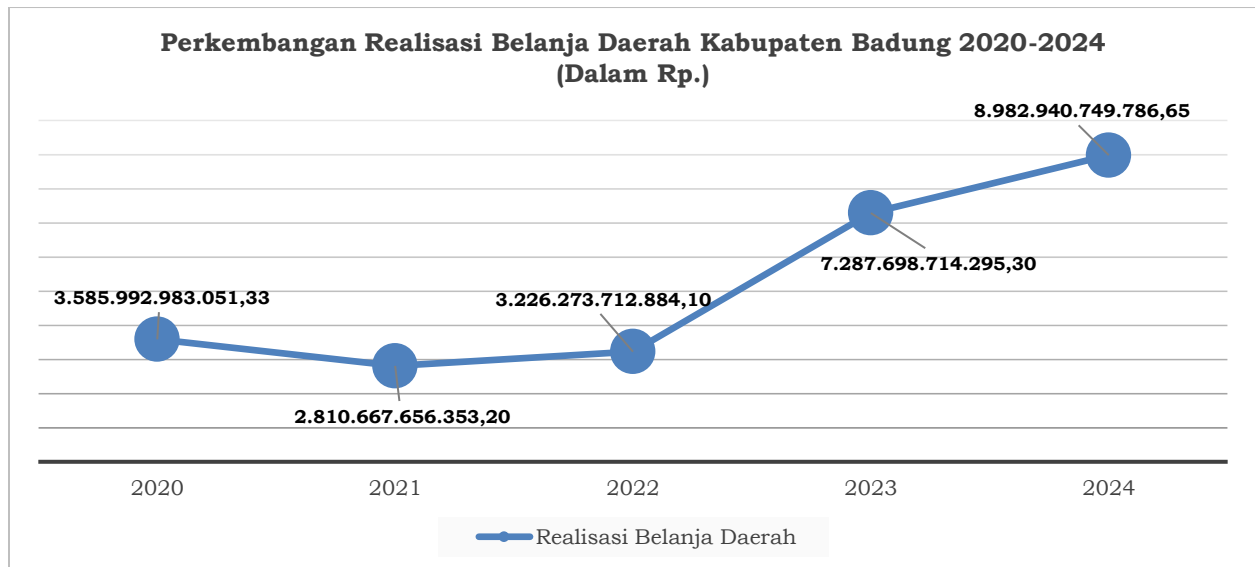
Memasuki tahun 2022, realisasi belanja daerah mulai menunjukkan pemulihan dengan nilai sebesar Rp3,73 triliun, menandakan dimulainya kembali aktivitas pembangunan dan pelayanan publik secara bertahap. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi belanja melonjak menjadi Rp6,87 triliun, hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan kebijakan ekspansif daerah dalam mendorong percepatan pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun penguatan pelayanan dasar masyarakat.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi belanja daerah mencapai Rp7,72 triliun, yang merupakan angka tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Kenaikan belanja ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi program-program pembangunan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, secara keseluruhan, pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Badung selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika penyesuaian fiskal terhadap kondisi eksternal sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan penguatan dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja agar peningkatan alokasi anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Gambar 2. 24

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024
(Dalam Rp)



Sumber: Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Tabel 2. 61

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

No,	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	
	BELANJA DAERAH	3.585.992.983.051,33	2.810.667.656.353,20	3.226.273.712.884,10	7.287.698.714.295,30	8.982.940.749.786,65
	Belanja Operasi	3.018.982.835.754,46	2.169.432.919.549,48	2.724.494.988.052,10	4.590.419.053.204,98	5.282.727.057.332,65
	Belanja Pegawai	1.211.799.039.386,40	1.100.336.057.327,00	1.175.295.299.414,65	1.437.909.605.479,00	1.845.239.173.307,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.136.861.422.415,75	892.547.228.915,17	1.198.418.526.381,45	1.565.419.065.596,98	1.588.056.469.476,65
	Belanja Subsidi	1.121.800.000,00	16.000.000,00	1.265.758.000,00	1.131.803.344,00	3.623.755.746,00
	Belanja Hibah	618.895.401.832,31	176.533.633.307,31	348.551.904.256,00	1.585.686.578.785,00	1.845.207.158.803,00
	Belanja Bantuan Sosial	50.305.172.120,00	-	963.500.000,00	272.000.000,00	600.500.000,00
	Belanja Modal	452.909.484.793,94	133.501.454.492,45	476.196.284.334,00	1.045.909.078.881,93	1.811.353.534.383,00
	Belanja Modal Tanah	32.157.600.000,00	-	26.335.768.000,00	163.387.996.513,00	366.052.702.952,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	146.640.489.776,12	90.679.768.772,00	105.556.248.100,00	272.862.673.241,00	172.862.307.202,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.151.786.184,34	32.744.850.639,35	297.327.100.168,00	337.676.984.584,00	485.484.189.614,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.852.009.180,48	9.527.441.061,40	35.962.917.353,00	247.280.031.027,93	769.199.606.246,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.107.599.653,00	549.394.019,70	9.349.250.713,00	14.855.287.321,00	
	Belanja Modal Aset Lainnya			1.665.000.000,00	9.846.106.195,00	347.632.818,00
	Belanja Tak Terduga	114.100.662.502,93	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00
	Belanja Tak Terduga	114.100.662.502,93	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	8.010.617.892,00
	Belanja Transfer		227.468.982.421,00	443.605.939.474,00	1.627.007.437.208,39	1.880.849.540.179,00
	Belanja Bagi Hasil		129.858.258.300,00	294.333.862.070,00	655.316.549.073,00	827.134.629.289,00
	Belanja Bantuan Keuangan		97.610.724.121,00	149.272.077.404,00	971.690.888.135,39	1.053.714.910.890,00
	TRANSFER DAERAH	291.410.484.092,00				
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	234.503.321.092,00				
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	159.108.049.310,00				
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	75.395.271.782,00				

No,	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	
	Transfer Bantuan Keuangan	56.907.163.000,00				
	<i>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</i>	-				
	<i>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</i>	56.907.163.000,00				
	<i>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</i>	-				
	SURPLUS/DEFISIT	28.759.334.730,46	-102.543.137.160,24	939.817.443.782,03	-70.446.530.864,70	-362.778.257.115,84

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Belanja Daerah Kabupaten Badung terdiri dari empat komponen utama yakni: (1) Belanja Operasi; (2) Belanja Modal; (3) Belanja Tidak Terduga; dan (4) Belanja Transfer, Komposisi realisasi belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Belanja operasi teralokasi sebesar 58,80%
- Belanja modal teralokasi sebesar 20,16%
- Belanja tidak terduga teralokasi sebesar 0,09%
- Belanja transfer teralokasi sebesar 20,94%

Komposisi belanja daerah Kabupaten Badung mengalami pergeseran signifikan selama periode 2020–2024. Belanja operasi yang semula mendominasi dengan alokasi 84,19% pada tahun 2020, menurun menjadi 58,80% pada tahun 2024, menunjukkan upaya efisiensi belanja rutin.

Sebaliknya, belanja modal meningkat dari 4,75% pada 2021 menjadi 20,16% pada 2024, mencerminkan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan aset produktif. Belanja tidak terduga melonjak pada 2021 (9,97%) akibat penanganan pandemi, namun kembali turun menjadi 0,09% di 2024.

Belanja transfer terus meningkat dari 0% pada 2020 menjadi 20,94% pada 2024, mengindikasikan penguatan desentralisasi fiskal dan distribusi anggaran ke desa atau pihak ketiga.

Perubahan struktur ini mencerminkan orientasi fiskal daerah yang semakin produktif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, alokasi masing-masing komponen belanja daerah Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut.

Tabel 2. 62

Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Belanja Daerah	Alokasi Dalam Belanja Daerah (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	84,19	77,19	84,45	62,99	58,80
2	Belanja Modal	12,63	4,75	14,76	14,35	20,16
3	Belanja Tidak Terduga	3,18	9,97	0,79	0,33	0,09
4	Belanja Transfer	0,00	8,09	13,75	22,33	20,94

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing komponen dari keempat jenis Belanja Daerah tersebut:

1. Belanja Operasi

Komposisi belanja operasi Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang mencerminkan penyesuaian terhadap prioritas dan kebutuhan daerah. Belanja pegawai tetap menjadi komponen terbesar, meskipun mengalami fluktuasi, yakni dari 40,14% pada tahun 2020, naik ke puncaknya 50,72% pada 2021, dan turun ke 34,92% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan belanja pegawai.

Belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan signifikan dari 43,99% pada 2022 menjadi 30,06% pada 2024, yang mencerminkan pengendalian terhadap belanja rutin non-personalia. Di sisi lain, belanja hibah mengalami peningkatan tajam dari 8,14% pada 2021 menjadi 34,54% pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 34,92% pada 2024, mengindikasikan penguatan peran kemitraan dan dukungan pemerintah kepada pihak eksternal.

Komponen belanja subsidi dan bantuan sosial tetap sangat kecil dan stabil, masing-masing tidak pernah melebihi 0,1%, menunjukkan fokus belanja operasi tetap diarahkan pada aspek pegawai, operasional layanan publik, dan bantuan berbasis hibah.

Perubahan ini menandakan adanya pergeseran pola belanja operasi menuju efisiensi dan peningkatan dukungan terhadap pembangunan partisipatif dan kolaboratif.

Tabel 2. 63
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Badung Tahun
2020-2024 (Dalam %)

No,	Komponen Belanja Operasi	Alokasi Dalam Belanja Operasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai	40,14	50,72	43,14	31,32	34,92
2	Belanja Barang dan Jasa	37,66	41,14	43,99	34,10	30,06
3	Belanja Subsidi	0,04	0,00	0,05	0,02	0,06
4	Belanja Hibah	20,50	8,14	12,79	34,54	34,92
5	Belanja Bantuan Sosial	1,67	0,00	0,04	0,01	0,01

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

2. Belanja Modal

Belanja modal dalam hal ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembelian, pembangunan, atau perbaikan aset tetap seperti gedung, jalan, jembatan, peralatan, dan investasi lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran daerah yang mencerminkan investasi jangka panjang dan kesiapan menghadapi situasi darurat.

Komposisi belanja modal Kabupaten Badung selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika pergeseran prioritas pembangunan fisik. Belanja modal paling dominan tercatat pada komponen gedung dan bangunan, khususnya pada tahun 2022 yang mencapai 62,44%, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 26,80% pada 2024, mencerminkan selesainya beberapa proyek infrastruktur besar yang sempat menjadi prioritas pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebaliknya, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan menunjukkan tren meningkat signifikan dari 4,16% pada 2020 menjadi 42,47% pada 2024, menandakan pergeseran fokus pembangunan ke arah penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah.

Belanja modal tanah juga mengalami peningkatan signifikan dari 0% pada 2021 menjadi 20,21% pada 2024, mengindikasikan pengadaan lahan sebagai bagian dari perencanaan strategis jangka menengah. Di sisi lain, belanja peralatan dan mesin mengalami penurunan tajam dari 67,92% pada 2021 ke hanya 9,54% pada 2024, mencerminkan berkurangnya kebutuhan akan pengadaan aset peralatan baru.

Komponen belanja lainnya, seperti aset tetap lainnya dan aset lainnya, tetap berada pada porsi yang kecil atau menurun, menunjukkan fokus belanja modal yang lebih diarahkan pada pembangunan fisik utama seperti jaringan infrastruktur, gedung, dan pengadaan lahan.

Tabel 2. 64
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Modal Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Belanja Modal	Alokasi Dalam Belanja Modal (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Modal Tanah	7,10	0,00	55,30	15,62	20,21
2	Belanja Peralatan dan Mesin	32,38	67,92	22,17	26,09	9,54
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54,35	24,53	62,44	32,29	26,80
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,16	7,14	7,55	23,64	42,47
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,01	0,41	1,96	1,42	-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,35	0,94	0,02

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pos anggaran yang dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, krisis kesehatan, dan keadaan darurat lainnya. Oleh karena itu, fluktuasi pada pos belanja ini sangat dipengaruhi oleh dinamika situasi dan kondisi daerah, serta urgensi kebutuhan penanganan mendesak.

Berdasarkan data Tabel 2.68, terlihat bahwa alokasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Badung mengalami fluktuasi yang

cukup tajam sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, anggaran Belanja Tidak Terduga berada pada angka 3,18% dari total belanja daerah. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021, yaitu mencapai 9,97%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan penanganan pandemi COVID-19, terutama untuk mendukung kebijakan darurat seperti penanganan kesehatan, bantuan sosial tak terduga, dan pemulihan ekonomi lokal.

Namun, setelah kondisi pandemi mulai terkendali, alokasi Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2022, pos ini hanya menyumbang 0,79% dari total belanja daerah, menandai pergeseran prioritas anggaran kembali pada program-program reguler yang lebih terencana. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 sebesar 0,33%, dan bahkan turun drastis menjadi 0,09% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung tidak lagi menghadapi kondisi darurat yang memerlukan intervensi anggaran berskala besar dan tidak terencana.

Penurunan alokasi ini dapat diartikan sebagai indikator membaiknya stabilitas situasi sosial, ekonomi, dan kesehatan di wilayah Kabupaten Badung. Selain itu, kecenderungan penurunan ini juga menggambarkan semakin matangnya proses perencanaan anggaran, di mana berbagai risiko dapat diantisipasi dan dimitigasi melalui program reguler tanpa perlu terlalu banyak mengandalkan pos belanja tidak terduga.

Tabel 2. 65
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Belanja Tidak Terduga	Alokasi Dalam Belanja Daerah (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Tidak Terduga	3,18	9,97	0,79	0,33	0,09

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan bagian dari belanja daerah yang dialokasikan untuk mendukung pendanaan pemerintah desa, termasuk dalam bentuk bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan. Komponen ini mencerminkan peran pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan di tingkat desa atau lembaga lain di luar perangkat daerah. Komponen belanja transfer di Kabupaten Badung terdiri atas dua kategori utama, yakni Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Berdasarkan data Tabel 2.69, pada tahun 2020 terlihat bahwa tidak terdapat realisasi alokasi untuk kedua komponen belanja transfer tersebut (masing-masing 0%). Hal ini bisa saja terjadi karena keterlambatan kebijakan penganggaran atau fokus belanja yang terserap penuh pada respons awal pandemi COVID-19. Namun, sejak tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dalam alokasi belanja transfer.

Pada tahun 2021, Belanja Bagi Hasil mencakup 57,09% dari total belanja transfer, sementara Belanja Bantuan Keuangan mencakup 42,91%. Peningkatan ini menandakan mulai diaktifkannya kembali mekanisme pembagian pendapatan dan dukungan keuangan kepada pihak lain, seperti desa, yang mungkin sempat tertunda di tahun sebelumnya. Porsi Belanja Bagi Hasil meningkat lebih jauh menjadi 66,35% di tahun 2022, menunjukkan adanya peningkatan pendapatan daerah yang dapat dibagihasilkan atau kebijakan afirmatif terhadap penguatan keuangan desa melalui skema pembagian hasil pendapatan.

Namun, pada tahun 2023, terdapat perubahan tren dengan menurunnya proporsi Belanja Bagi Hasil menjadi 40,28%, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan naik signifikan menjadi 59,72%. Pergeseran ini kemungkinan mencerminkan kebutuhan fleksibilitas yang lebih besar dalam bentuk bantuan keuangan, yang tidak terikat pada rasio pendapatan tertentu, serta bisa diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan atau kebutuhan khusus desa penerima.

Pada tahun 2024, struktur komposisi kembali mengalami sedikit perubahan. Belanja Bagi Hasil naik ke 43,97%,

sementara Belanja Bantuan Keuangan sedikit menurun ke 56,02%. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara mekanisme distribusi pendapatan yang bersifat normatif (bagi hasil) dan skema dukungan fiskal yang lebih fleksibel dan berbasis program (bantuan keuangan).

Secara keseluruhan, dinamika komposisi belanja transfer dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah terhadap kebutuhan pembangunan di tingkat desa maupun entitas penerima lainnya. Perubahan komposisi ini juga mencerminkan respon terhadap kondisi eksternal seperti pandemi, serta upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan desa melalui berbagai pendekatan kebijakan transfer yang adaptif.

Tabel 2. 66

Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Transfer Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Belanja Transfer	Alokasi Dalam Belanja Transfer (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Bagi Hasil	0	57,09	66,35	40,28	43,97
2	Belanja Bantuan Keuangan	0	42,91	33,65	59,72	56,02

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam pendapatan atau belanja daerah, Komponen ini penting dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah, membantu menutupi defisit anggaran, atau memanfaatkan surplus, Pembiayaan daerah mencakup dua komponen utama yakni:

- Penerimaan pembiayaan: Sumber dana yang diperoleh untuk membiayai pengeluaran daerah, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan,

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah.

- Pengeluaran pembiayaan: Penggunaan dana untuk berbagai keperluan pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 mencerminkan bahwa fluktuasi dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berdampak langsung pada kapisitas fiskal Kabupaten Badung. Pembiayaan daerah yang masih bergantung dengan SiLPA menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran perlu lebih efisien untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada surplus tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terlihat bahwa Kabupaten Badung perlu memperkuat manajemen keuangan daerah, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan perencanaan pembiayaan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan efisien. Untuk lebih jelasnya berikut adalah penjabaran rinci dari realisasi masing-masing komponen Pembiayaan Daerah tersebut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah untuk menutup defisit anggaran atau membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat ditutupi dari pendapatan asli daerah dan transfer. Penerimaan pembiayaan umumnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, atau hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan data Tabel 2.70, dapat diamati bahwa dinamika penerimaan pembiayaan Kabupaten Badung selama kurun waktu lima tahun (2020–2024) mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, baik dari sisi nominal alokasi dana maupun tingkat pertumbuhannya.

Pada tahun 2020, total penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp279,40 miliar, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 26,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini kemungkinan besar merupakan refleksi dari kebutuhan

pembiayaan tambahan yang muncul akibat tekanan fiskal selama masa awal pandemi COVID-19, di mana penerimaan daerah menurun drastis sementara kebutuhan belanja, terutama untuk sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial, meningkat tajam.

Selanjutnya pada tahun 2021, alokasi meningkat menjadi Rp308,17 miliar, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat, yakni 10,30%. Peningkatan ini masih menggambarkan keberlanjutan tekanan keuangan daerah dalam konteks pemulihan pandemi, meskipun skala kebutuhan sudah mulai berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis dalam penerimaan pembiayaan, yakni hanya mencapai Rp205,62 miliar, atau turun sebesar -33,28%. Penurunan ini bisa diartikan sebagai indikasi perbaikan kondisi fiskal daerah dan efisiensi belanja, yang mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan non-reguler. Kemungkinan lain adalah terbatasnya sumber pembiayaan yang tersedia, seperti menurunnya SiLPA yang dapat dimanfaatkan.

Kondisi berbalik secara mencolok pada tahun 2023, ketika penerimaan pembiayaan melonjak tajam menjadi Rp1,09 triliun, meningkat sebesar 432,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini kemungkinan besar merupakan akibat dari pengalokasian kembali SiLPA yang cukup besar atau keputusan strategis pemerintah daerah untuk menggunakan pembiayaan sebagai instrumen utama dalam mendorong pemulihan dan akselerasi pembangunan, termasuk untuk proyek-proyek strategis daerah yang membutuhkan dana besar.

Namun, tren tersebut tidak berlanjut pada tahun 2024, di mana penerimaan pembiayaan kembali menurun menjadi Rp993,91 miliar, atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,27%. Meskipun nilai nominalnya masih relatif tinggi, penurunan ini dapat mencerminkan langkah konsolidasi fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan sebagai sumber dana, sekaligus sebagai antisipasi terhadap risiko pembiayaan jangka panjang.

Secara keseluruhan, fluktuasi besar dalam struktur penerimaan pembiayaan Kabupaten Badung menunjukkan adanya

dinamika yang kompleks antara kebutuhan fiskal, ketersediaan sumber pembiayaan, dan strategi pengelolaan keuangan daerah yang adaptif terhadap situasi dan tantangan yang dihadapi, khususnya selama dan pasca-pandemi.

Tabel 2. 67

Perkembangan Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan	
		Alokasi Dana (Rp,)	Pertumbuhan (Dalam %)
1	2020	279.401.874.053,18	26,09
2	2021	308.167.875.451,64	10,30
3	2022	205.624.738.291,40	-33,28
4	2023	1.095.443.127.485,46	432,74
5	2024	993.909.492.620,76	-9,27

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan komponen belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, tetapi berfungsi untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih strategis, seperti penyertaan modal (investasi) kepada BUMD atau pengeluaran untuk pembayaran kewajiban jangka panjang. Komponen ini mencerminkan arah kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan jangka panjang melalui penguatan aset dan kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan data Tabel 2.71, terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Badung tidak melakukan pengeluaran pembiayaan (tidak terdapat alokasi dana). Hal ini dapat ditafsirkan sebagai upaya daerah dalam menjaga likuiditas fiskal selama masa pandemi COVID-19, di mana fokus utama diarahkan pada penguatan belanja wajib dan pelayanan dasar, serta pembiayaan belanja darurat, sementara pengeluaran strategis seperti penyertaan modal atau pembayaran utang ditunda.

Memasuki tahun 2022, terjadi realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50 miliar, yang menandai dimulainya kembali aktivitas fiskal strategis, kemungkinan besar dalam bentuk penyertaan modal daerah. Kegiatan ini bisa jadi merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi, dengan mendorong peran BUMD dalam pemulihan sektor riil, peningkatan pelayanan publik, atau optimalisasi pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2023, alokasi pengeluaran pembiayaan menurun menjadi sekitar Rp31,09 miliar, yang menunjukkan adanya penyesuaian atau rasionalisasi terhadap kebutuhan pembiayaan strategis. Penurunan ini mungkin mencerminkan berkurangnya kebutuhan modal tambahan atau strategi reorientasi kebijakan fiskal terhadap sektor lain yang lebih mendesak. Meski demikian, tetap adanya alokasi pada tahun ini menunjukkan konsistensi komitmen daerah terhadap penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan aset jangka panjang.

Tren berubah drastis pada tahun 2024, di mana terjadi lonjakan signifikan pengeluaran pembiayaan menjadi Rp250 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya keputusan strategis yang besar, kemungkinan berupa penyertaan modal dalam jumlah besar kepada BUMD, pembentukan dana cadangan strategis, atau pelunasan kewajiban keuangan daerah. Realisasi ini patut dicermati dalam konteks efektivitas dan efisiensi alokasi tersebut, mengingat nominal yang sangat besar dan pengaruhnya terhadap postur belanja daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, struktur pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung menunjukkan pergeseran arah kebijakan fiskal dari kondisi konservatif pada awal pandemi menuju strategi ekspansif pasca-pandemi. Kecenderungan ini menggambarkan kesiapan daerah dalam mengelola risiko fiskal sekaligus memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk memperkuat pondasi pembangunan jangka panjang melalui optimalisasi aset dan investasi daerah. Namun, untuk menjamin efektivitasnya, diperlukan pengawasan ketat terhadap kinerja BUMD atau entitas lain yang menerima pengeluaran

pembiayaan tersebut, agar dana yang dialokasikan memberikan nilai tambah yang nyata bagi daerah.

Tabel 2. 68

Perkembangan Struktur Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pengeluaran Pembiayaan
		Alokasi Dana (Rp,)
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	50.000.000.000,00
4	2023	31.087.104.000,00
5	2024	250.000.000.000,00

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen ini menggambarkan surplus atau defisit pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi fiskal dalam menutup kekurangan atau mengelola kelebihan pembiayaan dari sisi anggaran. Posisi pembiayaan netto mencerminkan fleksibilitas fiskal dan kapasitas daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan serta stabilitas keuangan.

Berdasarkan data Tabel 2.75, terlihat bahwa pembiayaan netto Kabupaten Badung mengalami fluktuasi cukup tajam sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tercatat pembiayaan netto sebesar Rp279,40 miliar dengan pertumbuhan positif 27,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan daerah untuk menutupi kekurangan pendapatan akibat tekanan ekonomi global dan nasional, khususnya karena pandemi COVID-19 yang memengaruhi sumber PAD utama Kabupaten Badung yaitu sektor pariwisata. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan belanja prioritas di tengah tekanan fiskal yang berat.

Tahun 2021, pembiayaan netto meningkat menjadi Rp308,17 miliar, namun laju pertumbuhannya melambat menjadi 10,30%. Perlambatan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap strategi pembiayaan pasca tahun pertama pandemi, dengan mengurangi tekanan utang atau pinjaman dan mulai mengandalkan pemulihan sebagian dari pendapatan daerah, meskipun secara umum kondisi fiskal masih belum pulih sepenuhnya.

Tren berubah drastis pada tahun 2022, ketika pembiayaan netto menurun tajam menjadi hanya Rp155,62 miliar, atau mengalami kontraksi sebesar -49,50%. Penurunan signifikan ini mengindikasikan dua kemungkinan besar: pertama, meningkatnya pengeluaran pembiayaan (seperti penyertaan modal atau pembayaran kewajiban daerah), dan kedua, berkurangnya penerimaan pembiayaan karena keterbatasan ruang fiskal. Kondisi ini merefleksikan restrukturisasi kebijakan fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dan mulai beralih kembali pada penguatan belanja produktif berbasis pendapatan riil.

Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan pembiayaan netto yang sangat signifikan menjadi Rp1,06 triliun, dengan tingkat pertumbuhan ekstrem sebesar 583,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Lompatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan strategi ekspansif besar-besaran dalam pembiayaan. Peningkatan ini bisa jadi berkaitan erat dengan lonjakan penerimaan pembiayaan serta minimnya pengeluaran pembiayaan, sehingga menghasilkan pembiayaan netto yang besar.

Pada tahun 2024, pembiayaan netto kembali mengalami penurunan menjadi Rp743,91 miliar, dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar -30,11%. Meskipun secara nominal masih tinggi, penurunan ini menunjukkan adanya upaya konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah. Penurunan pembiayaan netto juga bisa menunjukkan peningkatan kapasitas pendapatan daerah atau menurunnya kebutuhan akan pembiayaan eksternal, yang merupakan indikator positif bagi ketahanan fiskal jangka panjang.

Secara keseluruhan, dinamika pembiayaan netto Kabupaten Badung mencerminkan fleksibilitas fiskal yang cukup adaptif dalam merespons situasi krisis dan pemulihan. Meskipun terjadi fluktuasi tajam, kebijakan pembiayaan yang diambil menunjukkan pola responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan tekanan fiskal. Untuk ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan kemampuan bayar, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh digunakan secara efektif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Tabel 2. 69
Perkembangan Struktur Pembiayaan Netto Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pembiayaan Netto	
		Jumlah (Rp,)	Pertumbuhan (Dalam %)
1	2020	279.401.874.053,18	27,24
2	2021	308.167.875.451,64	10,30
3	2022	155.624.738.291,40	-49,50
4	2023	1.064.356.023.485,46	583,92
5	2024	743.909.492.620,76	-30,11

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

SiLPA adalah sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran atau mendanai kegiatan di tahun berikutnya. Secara keseluruhan, fluktuasi SiLPA mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran secara efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan kebutuhan Pembangunan.

Perubahan signifikan dalam struktur SiLPA Kabupaten Badung selama periode 2020–2024 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembiayaan netto dan kinerja belanja daerah. SiLPA yang besar pada dasarnya mencerminkan adanya dana yang tidak terserap dalam satu tahun anggaran, yang pada akhirnya dapat

memengaruhi keseimbangan fiskal dan efektivitas pelaksanaan program.

Jika dikaitkan dengan Tabel 2.72 mengenai Pembiayaan Netto, tampak bahwa fluktuasi SiLPA sejalan dengan naik-turunnya pembiayaan netto. Pada tahun 2022, misalnya, ketika pembiayaan netto mencapai titik terendahnya sebesar Rp155,62 miliar dengan pertumbuhan negatif -49,50%, SiLPA justru melonjak menjadi Rp1,09 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan netto yang dianggarkan menurun, realisasi belanja pun tidak maksimal, sehingga menghasilkan sisa lebih yang cukup besar.

Sebaliknya, pada tahun 2023, terjadi lonjakan pembiayaan netto sebesar 583,92%, disertai dengan penurunan SiLPA sebesar -9,27%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan netto yang signifikan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendanai belanja daerah, sehingga mengurangi jumlah dana yang tidak terserap pada akhir tahun.

Pada tahun 2024, pembiayaan netto menurun menjadi Rp743,90 miliar (turun -30,11%), yang diikuti oleh penurunan drastis SiLPA sebesar -61,65%. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan pembiayaan dan realisasi belanja, di mana dana yang tersedia digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga menurunkan sisa anggaran yang tidak terpakai.

Secara umum, SiLPA yang besar dapat menandakan rendahnya serapan anggaran dan lemahnya eksekusi belanja daerah, terutama pada belanja modal yang menyangkut program pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan netto yang tinggi namun tidak disertai dengan peningkatan serapan belanja akan berdampak pada tingginya SiLPA. Sebaliknya, keseimbangan yang baik antara pembiayaan netto dan realisasi belanja akan menghasilkan SiLPA yang proporsional, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, pengendalian SiLPA memerlukan penguatan dalam sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Badung perlu terus meningkatkan kapasitas manajerial dalam mengelola siklus anggaran agar pembiayaan netto dapat diarahkan secara

optimal, dan SiLPA yang terbentuk tetap dalam kisaran yang sehat untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah.

Tabel 2. 70

Perkembangan Struktur Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
		Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan (Dalam %)
1	2020	308.161.208.783,64	10,54
2	2021	205.624.738.291,40	-33,27
3	2022	1.095.442.182.073,43	432,74
4	2023	993.909.492.620,76	-9,27
5	2024	381.131.235.504,92	-61,65

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

2.2.1.2. Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Neraca Keuangan Daerah merupakan laporan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang menggambarkan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir tahun anggaran. Informasi ini penting sebagai indikator kesehatan keuangan daerah dan kapasitas fiskal jangka panjang dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan data neraca daerah tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki struktur aset yang terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Total aset Pemerintah Kabupaten Badung secara umum menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada pada level yang tinggi. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp17,54 triliun, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp17,05 triliun. Aset kembali meningkat menjadi Rp17,79 triliun pada tahun 2022, sebelum menurun tajam menjadi Rp15,57 triliun pada tahun 2023, dan kembali naik ke Rp17,06 triliun pada tahun 2024. Komponen aset tetap menjadi penyumbang terbesar dari total aset setiap tahunnya, dengan nilai mencapai Rp14,15 triliun di tahun 2020 dan tetap berada di atas Rp11 triliun pada tahun 2023, mencerminkan besarnya

investasi Pemerintah Kabupaten Badung dalam infrastruktur dan sarana publik.

Aset lancar menunjukkan volatilitas cukup besar dari Rp1,11 triliun pada tahun 2020 meningkat signifikan ke Rp1,75 triliun pada 2022, namun kemudian turun menjadi Rp1,16 triliun di tahun 2024. Tren ini mengindikasikan fluktuasi kemampuan likuiditas jangka pendek, yang mungkin dipengaruhi oleh pergeseran prioritas anggaran atau tekanan fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, investasi jangka panjang menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp1,80 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,59 triliun pada tahun 2024, mencerminkan orientasi strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat ketahanan fiskal melalui instrumen investasi.

Pada sisi kewajiban, total kewajiban mengalami kenaikan signifikan dari Rp64,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp249,59 miliar pada 2023, sebelum turun menjadi Rp186,74 miliar pada tahun 2024. Seluruh kewajiban yang dicatat adalah kewajiban jangka pendek, dan tidak terdapat kewajiban jangka panjang sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan strategi pengelolaan utang daerah yang konservatif dan minim risiko jangka panjang.

Ekuitas daerah yang merepresentasikan kekayaan bersih mengalami dinamika yang mencerminkan perubahan nilai aset dan kewajiban. Dari Rp17,47 triliun pada tahun 2020, nilai ekuitas sempat menurun menjadi Rp16,91 triliun di tahun 2021, namun mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai Rp17,10 triliun pada 2024. Kenaikan ini menandakan bahwa posisi keuangan daerah tetap terjaga dan mampu mempertahankan stabilitas fiskal meskipun terdapat tekanan dari sisi kewajiban atau realisasi belanja.

Secara umum, neraca keuangan daerah Kabupaten Badung pada periode 2020–2024 menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat dan pengelolaan aset yang relatif baik. Konsistensi dalam menjaga porsi aset tetap dan peningkatan investasi jangka panjang menjadi pondasi penting dalam mendukung agenda pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung ke depan. Keberlanjutan pengelolaan neraca yang sehat ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2. 71

Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	17.539.053.614.110,20	17.045.252.996.046,70	17.786.869.429.728,10	15.568.793.603.490,50	17.058.433.319.618,50
Aset lancar	1.110.302.716.433,25	1.020.129.808.000,73	1.749.780.757.630,47	1.576.495.125.902,43	1.164.854.445.401,13
Investasi jangka panjang	1.809.217.432.836,78	1.783.008.590.971,32	1.660.494.656.037,47	2.217.970.662.781,18	2.593.896.396.173,28
Aset tetap	14.151.604.125.304,50	13.805.845.833.988,60	13.945.555.848.833,80	11.341.640.722.774,80	12.749.210.596.380,50
Aset lainnya	467.929.339.535,70	436.268.763.086,07	431.038.167.226,32	432.687.092.032,08	550.471.881.663,59
JUMLAH ASET	17.539.053.614.110,20	17.045.252.996.046,70	17.786.869.429.728,10	15.568.793.603.490,50	17.058.433.319.618,50
KEWAJIBAN	64.320.338.290,79	132.529.539.038,41	168.857.653.876,69	249.589.900.443,93	186.737.697.816,35
Kewajiban jangka pendek	64.320.338.290,79	132.529.539.038,41	168.857.653.876,69	249.589.900.443,93	186.737.697.816,35
Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	64.320.338.290,79	132.529.539.038,41	168.857.653.876,69	249.589.900.443,93	186.737.697.816,35
EKUITAS	17.474.733.275.819,40	16.912.723.457.008,30	17.618.011.775.851,40	15.510.061.488.747,30	17.095.023.734.660,70
Ekuitas	17.474.733.275.819,40	16.912.723.457.008,30	17.618.011.775.851,40	15.510.061.488.747,30	17.095.023.734.660,70
JUMLAH EKUITAS	17.474.733.275.819,40	16.912.723.457.008,30	17.618.011.775.851,40	15.510.061.488.747,30	17.095.023.734.660,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	-	0,01	0,01	0,02	0,01

Sumber: Laporan Neraca Daerah Kabupaten Badung, 2024

2.2.2. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH

Proyeksi keuangan daerah merupakan komponen krusial dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, karena mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah untuk mendanai program dan kebijakan yang direncanakan. Dalam konteks ini, analisis proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting sebagai dasar untuk memprediksi kemampuan finansial daerah dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan.

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

Pendapatan Asli Daerah yang mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan, dan pendapatan lainnya memberikan gambaran mengenai potensi penerimaan yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah. Dengan memahami tren dan potensi peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat merencanakan alokasi anggaran secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa prioritas pembangunan dapat tercapai.

Dari hasil analisis proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung periode taun 2025-2029 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2025, total PAD diproyeksikan mencapai Rp 9,26 Trilyun, meningkat dari Rp. 8,58 Trilyun pada tahun 2024. Kenaikan ini terus berlanjut hingga mencapai Rp. 12,68 Trilyun pada tahun 2029.

Peningkatan ini terutama didorong oleh komponen Pajak Daerah, yang pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 8,46 Trilyun dan terus meningkat hingga Rp. 11,58 Trilyun pada tahun 2029. Retribusi Daerah juga menunjukkan peningkatan dari Rp. 343,52 Miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 469,96 Miliar pada tahun 2029. Komponen Hasil Pengelolaan dan Lain-lain yang Sah juga memperlihatkan tren kenaikan. Hasil Pengelolaan diperkirakan meningkat dari Rp. 226,17 Miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 309,41 Miliar pada tahun 2029. Sementara itu, pendapatan dari Lain-lain yang Sah diperkirakan naik dari Rp. 232,46 Miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 318,03 Miliar pada tahun 2029.

Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun untuk periode 2025-2029 berkisar antara 8,0% hingga 8,3%, dengan peningkatan tertinggi sebesar 8,3% pada tahun 2029. Pertumbuhan yang stabil ini

mencerminkan potensi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Badung, serta adanya upaya peningkatan kontribusi dari sektor-sektor utama PAD.

Terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung yang tertera pada Tabel 2.74 dianalisis dengan memperhatikan berbagai faktor makro ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang diatur dalam kebijakan fiskal dan sasaran inflasi nasional. Berdasarkan PMK Nomor 31 Tahun 2024, sasaran inflasi untuk tahun 2025 hingga 2027 ditetapkan sebesar 2,5% dengan deviasi sebesar 1%. Untuk proyeksi tahun 2028 hingga 2030, diasumsikan tingkat inflasi tetap sama dengan kondisi tahun 2026-2027, yaitu sebesar 2,5% dengan deviasi 1%.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional ditetapkan sebesar 5,5% hingga 6,0% untuk tahun 2026, 5,6% hingga 6,1% untuk tahun 2027, 5,7% hingga 6,2% untuk tahun 2028, dan 5,8% hingga 6,3% untuk tahun 2029. Untuk tahun 2030, diasumsikan pertumbuhan ekonomi mengikuti tren dari tahun-tahun sebelumnya dengan proyeksi sebesar 5,9% hingga 6,4%.

Tabel 2. 72

Proyeksi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

Tahun		Komponen Pendapatan Daerah				
		Pendapatan Daerah				
		Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang syah
Realisasi	2023	6.308.865.160.074,79	5.676.922.890.002,77	157.600.575.234,00	203.303.789.637,30	271.037.905.200,72
	2024	7.507.616.497.511,36	6.771.024.745.896,75	387.097.049.334,60	259.681.154.910,64	89.813.547.369,37
Proyeksi	2025	10.181.633.208.283,00	9.308.736.528.615,00	371.931.930.205,00	293.368.505.527,00	207.596.243.936,00
	2026	11.568.968.280.600,00	10.660.196.132.625,00	403.237.086.081,00	297.228.135.220,00	208.306.926.674,00
	2027	11.858.192.487.615,00	10.909.537.088.605,80	474.327.699.504,60	355.745.774.628,45	118.581.924.876,15
	2028	12.154.647.299.805,00	11.182.275.515.821,00	486.185.891.992,00	364.639.418.994,00	121.546.472.998,00
	2029	12.458.513.482.301,00	11.461.832.403.717,00	498.340.539.292,00	373.755.404.469,00	124.585.134.823,00
	2030	12.769.976.319.358,00	11.748.378.213.809,00	510.799.052.774,00	383.099.289.581,00	127.699.763.194,00

Sumber: Hasil Analisis Bapenda Badung Tahun 2025

2.2.2.2. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2025-2030 menggunakan asumsi pertumbuhan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Ini menyesuaikan terhadap keseimbangan struktur APBD Kabupaten Badung untuk menghindari defisit yang berlebih. Masing-masing rincian uraian diasumsikan meningkat secara konsisten 10%. Adapun proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 73
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

URAIAN	TAHUN PROYEKSI					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH	12.791.829.885.713,00	13.292.359.468.709,00	12.711.315.247.489,00	13.050.426.197.674,40	13.399.081.325.061,50	13.757.572.554.257,00
<i>Belanja Operasi</i>	6.517.279.037.968,00	6.744.047.232.195,00	6.482.770.776.219,39	6.655.717.360.813,93	6.833.531.475.781,37	7.016.362.002.671,08
<i>Belanja Modal</i>	4.428.582.229.248,00	4.161.323.463.818,00	3.940.507.726.721,59	4.045.632.121.279,06	4.153.715.210.769,07	4.264.847.491.819,68
<i>Belanja Tak Terduga</i>	158.834.245.595,00	211.423.990.648,00	254.226.304.949,78	261.008.523.953,49	267.981.626.501,23	275.151.451.085,14
<i>Belanja Transfer</i>	1.687.134.372.902,00	2.175.564.782.048,00	2.033.810.439.598,24	2.088.068.191.627,90	2.143.853.012.009,84	2.201.211.608.681,12

Sumber: Hasil Analisis 2025

2.2.2.3. Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung menggunakan dasar asumsi sebagai berikut:

- Kabupaten Badung akan melakukan pinjaman daerah yang akan dimanfaatkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2028 dengan masa pengembalian pinjaman daerah hingga tahun 2030.
- Pemerintah Kabupaten Badung juga akan melakukan penyertaan modal untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penyertaan modal daerah ini diasumsikan bersumber dari Penerimaan PAD dan SILPA tahun sebelumnya.
- Pinjaman Daerah akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar dan utilitas publik, sedangkan penyertaan modal disamping untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang dipisahkan, juga diharapkan mampu sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan asumsi tersebut, serta berkaca dari peningkatan Pendapatan Daerah, maka proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 74
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	Proyeksi Jumlah (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Pembiayaan Daerah						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.831.146.712.883,00	1.539.988.559.658,00	3.226.188.559.658,00	659.932.309.658,00	159.488.559.658,00	159.488.559.658,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	381.146.712.883,00	159.488.559.658,00	159.488.559.658,00	159.488.559.658,00	159.488.559.658,00	159.488.559.658,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.450.000.000.000,00	1.380.500.000.000,00	3.066.700.000.000,00	500.443.750.000,00		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	1.208.190.476.192,00	1.958.698.412.698,00	2.361.476.190.476,00	2.054.404.761.906,00	1.576.100.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	550.000.000.000,00	300.000.000.000,00	2.361.476.190.476,00	2.054.404.761.906,00	1.576.100.000.000,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	658.190.476.192,00	1.658.698.412.698,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	1.631.146.712.883,00	331.798.083.466,00	1.267.490.146.960	(1.701.543.880.818)	(1.894.916.202.248)	(1.416.611.440.342)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan daerah Kabupaten Badung yang akan menjadi dasar dalam perumusan isu strategis daerah. Permasalahan ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada sub bab 2.1 serta berbagai sumber yang kredibel, termasuk Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029 dan hasil penjarangan aspirasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Identifikasi ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi pembangunan daerah dalam periode perencanaan.

Selanjutnya, dari hasil identifikasi permasalahan tersebut, akan disusun rumusan isu strategis daerah yang mencerminkan tantangan serta peluang yang dihadapi dalam lingkungan dinamis. Isu strategis ini akan dikategorikan berdasarkan tingkat pengaruhnya, baik yang bersifat global, nasional, maupun regional. Lingkup isu strategis ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta aspek pembangunan lainnya yang memiliki dampak terhadap kinerja daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Sumber-sumber yang digunakan dalam analisis perumusan isu strategis ini berasal dari berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang relevan, Laporan KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, serta berbagai hasil konsultasi publik dan penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 75

Perumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Badung

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Kabupaten Badung mencatat skor IKP sebesar 92,9, menempatkannya di peringkat ke-5 secara nasional dan menunjukkan ketahanan pangan yang sangat baik. Kombinasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dan bervariasi.		Kemandirian, kecukupan dan kualitas konsumsi pangan belum optimal	Ketidakstabilan politik dan perubahan iklim mempengaruhi produksi dan distribusi pangan dunia	Ketimpangan ketahanan pangan antar wilayah	Optimalisasi kemandirian produksi pangan Kabupaten Badung	Penguatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Untuk Memenuhi Konsumsi Pangan.
2	Kabupaten Badung mencatat penurunan signifikan dalam prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, dari 4,88% (2021) menjadi 1,23% (2023), menjadikannya salah satu yang terendah di Bali.			Kelaparan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang	Ketidakcukupan konsumsi pangan masih menjadi tantangan nasional	Optimalisasi Upaya berkesinambungan untuk menekan prevalensi konsumsi pangan tidak cukup	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
3	IPM meningkat dari 81,6 (2020) menjadi 83,87 (2024), menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.		Kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan belum optimal	Kesenjangan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas	Pemerataan pembangunan manusia menjadi tantangan utama di Indonesia, khususnya di wilayah timur	IPM regional Kabupaten Badung yang tinggi namun terdapat ketimpangan antar wilayah kecamatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial
4	Ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik serta aksesibilitas yang meningkat, termasuk melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan inisiatif daerah.	Masih ada tantangan dalam mengubah kebiasaan masyarakat terkait gaya hidup tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik.		Transisi epidemiologi dan pola hidup modern menyebabkan peningkatan penyakit tidak menular, memengaruhi usia harapan hidup	Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan usia harapan hidup akibat disparitas akses layanan kesehatan	Tantangan gaya hidup tidak sehat lebih tinggi di wilayah urban dengan pendapatan menengah ke atas	
5		Kenaikan dari 4,82 (2022) menjadi 11,2 (2024) menunjukkan tantangan besar dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Hal ini diakibatkan fasilitas neonatal yang masih terbatas,		Banyak negara berkembang masih kesulitan menurunkan AKB karena keterbatasan layanan neonatal dan gizi	Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menurunkan AKB, terutama di wilayah dengan akses kesehatan terbatas	Lonjakan AKB di Badung menunjukkan keterbatasan fasilitas neonatal dan tenaga medis	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		terutama untuk bayi dengan risiko tinggi serta kekurangan tenaga medis di beberapa wilayah menghambat pelayanan kesehatan optimal bagi ibu dan bayi.					
6		Kenaikan AKI dari 63,89 (2023) menjadi 109,38 (2024) menunjukkan masih adanya kerentanan dalam sistem kesehatan maternal. Penurunan pada 2022-2023 tidak bertahan, menandakan bahwa perbaikan layanan belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan.		AKI tinggi masih menjadi tantangan global, khususnya di negara berkembang, sebagai cerminan ketimpangan gender dan akses layanan maternal	Indonesia menargetkan penurunan AKI sebagai prioritas pembangunan kesehatan nasional	Peningkatan AKI di Badung menunjukkan lemahnya kesinambungan intervensi dan persebaran tenaga medis yang belum merata	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
7	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Badung tahun 2024 mencapai 0,61, menunjukkan capaian yang baik dalam kesehatan ibu dan anak. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (99,83%) dan cakupan imunisasi dasar lengkap (99,73%) sangat tinggi, mencerminkan efektivitas layanan kesehatan. Selain itu, cakupan ASI eksklusif (88,90%) dan pemantauan pertumbuhan balita (97,11%) juga cukup baik, meskipun masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan konsistensi pemberian ASI eksklusif.	Pengobatan penyakit menular dan tidak menular. Hanya 75,54% penderita tuberkulosis yang menjalani pengobatan sesuai standar, sementara kepatuhan penderita hipertensi terhadap pengobatan rutin hanya 48,37%. Rendahnya kepatuhan ini berisiko meningkatkan komplikasi kesehatan di masyarakat.		Penyakit menular dan tidak menular masih menjadi tantangan utama dalam kesehatan masyarakat dunia	Indonesia menghadapi tantangan dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara simultan	Fokus penanganan penyakit belum cukup kuat pada aspek pengobatan lanjutan dan perubahan perilaku pasien	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
8	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Provinsi Bali mengalami penurunan pada 2023, baik berdasarkan metadata lama (-1,14 poin) maupun metadata baru (-0,65 poin), namun tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Penurunan pada indikator kepemilikan rekening tabungan menunjukkan potensi kerentanan ekonomi keluarga. Di sisi kesehatan, peningkatan keluhan kesehatan rumah tangga (+7,44%) menjadi perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia.		Ketahanan keluarga menjadi isu utama dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan	Pemerintah Indonesia mendorong penguatan ketahanan keluarga melalui integrasi program kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi keluarga	Tantangan risiko kerentanan sosial yang perlu ditangani lewat program pemberdayaan dan penguatan ketahanan keluarga	
9		Terdapat kesenjangan gender, di mana laki-laki memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada 2023, laki-laki mencapai 11,32 tahun, sementara perempuan hanya 10,52 tahun. Kesenjangan ini menunjukkan masih adanya	Pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal	Kesenjangan akses dan pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan	Rata-rata lama sekolah perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki di sebagian besar daerah	Masih adanya kendala partisipasi perempuan dalam pendidikan lanjutan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Untuk Mendukung Pembangunan SDM

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		hambatan sosial dan ekonomi yang membatasi perempuan dalam menempuh pendidikan lebih lama.					
10	Harapan lama sekolah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 13,98 tahun pada 2020 menjadi 14,23 tahun pada 2024. Tren ini mencerminkan prospek pendidikan yang semakin baik, dengan anak-anak yang lahir di wilayah ini diproyeksikan menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi atau diploma.			Banyak negara menargetkan peningkatan harapan lama sekolah hingga 12 tahun yang menandakan kemajuan Pembangunan manusia	Pemerintah Indonesia mendorong wajib belajar 12 tahun dan akses pendidikan tinggi lebih merata	Tingkat ekonomi dan akses infrastruktur pendidikan mendukung tren positif harapan lama sekolah	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
11	Kabupaten Badung memiliki indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2023, dengan nilai 72,7. Capaian ini didukung oleh pemerataan layanan perpustakaan yang cukup tinggi serta rasio ketercukupan tenaga perpustakaan yang baik.			Literasi menjadi kunci pembangunan SDM unggul di era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan	Literasi masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama di daerah dengan akses perpustakaan rendah	Capaian indeks literasi Kabupaten Badung menunjukkan keberhasilan intervensi lokal dalam pengembangan budaya baca	
12		Kabupaten Badung masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan angka partisipasi sekolah di jenjang SMP dan SMA, yang sempat menurun akibat pandemi dan faktor ekonomi. Selain itu, kesenjangan akses pendidikan menengah di beberapa wilayah menjadi		Ketimpangan akses pendidikan menengah menjadi isu di banyak negara, terutama pasca-pandemi COVID-19	APS jenjang SMP dan SMA masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah dan antarstatus sosial ekonomi	Hambatan geografis dan ekonomi di beberapa wilayah Kabupaten Badung menyebabkan ketimpangan akses pendidikan	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		hambatan bagi peningkatan APS secara merata.					
13	Kabupaten Badung memiliki APM pada jenjang sekolah dasar yang tinggi dan peningkatan APM pada sekolah menengah, hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan wajib belajar dan akses pendidikan dasar yang merata di Kabupaten Badung.			Masih tingginya angka putus sekolah dan ketidaktepatan usia sekolah	Disparitas antar daerah masih tinggi terutama di jenjang menengah	Kemajuan akses Pendidikan perlu diimbangi dengan pemertaan mutu dan hasil belajar	
14	Penurunan drastis laju pertumbuhan pada periode 2010-2020 (0,09%) dapat menjadi indikator bahwa jumlah penduduk sudah mendekati titik keseimbangan, mengurangi risiko overpopulation di beberapa wilayah.		Perlindungan sosial belum optimal	Ledakan penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk masih menjadi tantangan di negara berkembang	Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kuantitas dan kualitas penduduk	Upaya transisi demografi Kabupaten Badung sebagai potensi peningkatan kualitas SDM	Pemerataan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Dengan pertumbuhan yang lebih terkendali, pemerintah dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat daripada menghadapi ledakan populasi yang sulit dikelola.						
15	Dominasi perempuan di kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan menunjukkan bahwa sektor jasa, perhotelan, dan perdagangan memiliki tenaga kerja yang cukup. Kecamatan Petang dan Kuta, dengan lebih banyak laki-laki, berpotensi dikembangkan sebagai pusat pertanian dan perkebunan berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor agraris.	Dominasi pekerja perempuan di sektor pariwisata dan jasa dapat berisiko jika terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada industri ini, sehingga perlu diversifikasi lapangan kerja. Kesenjangan ekonomi berdasarkan gender juga perlu diperhatikan agar perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap pelatihan keterampilan dan peluang usaha.		Kesenjangan gender dalam akses terhadap pekerjaan dan perlindungan sosial	Penanganan ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan dan perlindungan kerja secara afirmatif	Perlunya diversifikasi lapangan kerja dan pelatihan lintas sektor	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
16		Meskipun kemiskinan menurun, masih ada risiko kesenjangan ekonomi antara sektor pariwisata dan sektor lain seperti pertanian dan industri kreatif. Selain itu, meskipun pendapatan meningkat, kenaikan harga barang dan kebutuhan dasar bisa meningkatkan risiko kelompok rentan kembali jatuh miskin.		Kesenjangan antar sektor dan kelompok sosial menjadi tantangan besar dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan	Pemerintah mendorong perlindungan sosial adaptif untuk kelompok rentan terhadap guncangan ekonomi	Badung masih menghadapi tantangan dalam pemerataan hasil pembangunan, terutama antara sektor pariwisata dan sektor lainnya	
17		Meningkatnya P1 (0,32) dan P2 (0,07) pada 2024 mengindikasikan adanya tantangan baru yang berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi atau tekanan ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kelompok		Pemulihan ekonomi pasca krisis belum merata, menyebabkan kelompok miskin semakin tertinggal	Pemerintah menyoroti pentingnya kualitas pengentasan kemiskinan, bukan hanya kuantitas	Ketimpangan dan tekanan biaya hidup pasca-pandemi berisiko mendorong kelompok rentan kembali jatuh miskin	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		masyarakat miskin kembali mengalami kesulitan ekonomi dan ketimpangan mulai meningkat lagi.					
18		62% penduduk masih bergantung pada BPJS PBI, yang mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah dan memerlukan subsidi pemerintah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ketergantungan tinggi ini dapat membebani anggaran negara dan daerah, terutama jika jumlah peserta PBI terus meningkat tanpa		Negara-negara didorong menuju cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) untuk menjamin hak dasar setiap warga	Proporsi peserta PBI yang masih tinggi menunjukkan ketimpangan ekonomi nasional dan perlunya peningkatan jaminan sosial	Kerentanan ekonomi masyarakat bawah ditandai dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada BPJS PBI	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		diimbangi dengan peningkatan jumlah peserta mandiri (Non-PBI).					
19		Meskipun mayoritas anak di Kabupaten Badung memiliki status gizi normal, masih terdapat 5,0% anak yang mengalami stunting dan 2,0% mengalami stunting berat (severely stunting). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah stunting mencakup kurangnya asupan gizi yang memadai selama 1.000 Hari		Stunting merupakan isu global yang memengaruhi perkembangan kognitif dan ekonomi generasi masa depan	Stunting menjadi isu strategis nasional yang masuk dalam RAN-PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting). Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi <14% pada 2024	Stunting masih terjadi di Badung meskipun IPM tinggi, mengindikasikan kesenjangan intervensi gizi dan pola asuh	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		Pertama Kehidupan (HPK), pola asuh yang kurang optimal, serta infeksi berulang yang dapat disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih.					
20		Rendahnya penerima bantuan pada tahun 2020-2023 kemungkinan disebabkan oleh kendala pendataan dan distribusi.		Ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi isu global dalam konteks pengentasan kemiskinan	Akurasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi isu utama dalam distribusi bansos	Kendala dalam pendataan dan distribusi bantuan menyebabkan rendahnya penerima bantuan sosial	
21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Badung menunjukkan tren yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bali pada periode 2020-2023. Meskipun			Ketimpangan gender masih menjadi tantangan global dalam pencapaian SDG 5 (Kesetaraan Gender)	Isu kesetaraan peran perempuan dalam ekonomi, politik, dan sosial masih menjadi agenda nasional	Kabupaten Badung mengalami kemajuan dalam kesetaraan gender	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	fluktuatif, IKG Badung cenderung menurun dari 0,142 pada 2020 menjadi 0,118 pada 2022, sebelum meningkat sedikit menjadi 0,126 pada 2023.						
22		Masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak sipil anak serta penyediaan fasilitas pendidikan dan rekreasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.		Perlindungan anak merupakan tantangan global terkait pemenuhan hak-hak dasar dan tumbuh kembang yang sehat	Pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur dan perlindungan hukum	Optimalisasi penyediaan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang optimal anak dan pemenuhan hak-hak sipil masih menjadi tantangan	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung yang cukup tinggi (85,56) menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public. Dalam meningkatkan kepuasan masyarakat ini masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki yakni pemerataan akses dan kualitas layanan di seluruh wilayah Kabupaten Badung serta mengoptimalkan keberlanjutan efektivitas kebijakan dan optimalisasi inovasi pelayanan publik.			Pemerataan kualitas layanan menjadi tantangan dalam pembangunan inklusif	Kepuasan masyarakat menjadi dasar evaluasi kinerja unit pelayanan publik	Perlu penguatan inovasi layanan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
24		Kabupaten Badung rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir pesisir, tanah longsor di daerah perbukitan, gempa bumi, dan tsunami. Urbanisasi yang pesat tanpa mitigasi yang memadai dapat meningkatkan risiko bencana, terutama di wilayah padat seperti Kuta, Nusa Dua, dan Jimbaran.	Pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal.	Risiko bencana meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi	Indonesia merupakan negara rawan bencana dengan kompleksitas tinggi	Badung menghadapi risiko bencana tinggi akibat geografi dan tekanan pembangunan	Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan
25	Dengan IKD sebesar 0,57, Kabupaten Badung memiliki ketahanan daerah yang lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten di Bali, meskipun masih di bawah Kota Denpasar (0,64) dan Buleleng (0,61).			Ketahanan terhadap bencana menjadi fokus pembangunan berkelanjutan	Kesenjangan ketahanan daerah di berbagai daerah masih menjadi tantangan nasional	Optimalisasi ketahanan daerah Kabupaten Badung	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
26	Pemulihan sektor pariwisata menjadi salah satu potensi utama dalam perekonomian Kabupaten Badung pasca-pandemi. Sektor transportasi dan perdagangan menunjukkan peningkatan signifikan dari 17,10% pada 2020 menjadi 27,97% pada 2023. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi hingga 24,46% pada 2020 kembali naik menjadi 24,67% pada 2023.	Fluktuasi kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang turun menjadi 24,46% pada 2020 lalu naik kembali menjadi 24,67% pada 2023, menunjukkan bahwa sektor ini rentan terhadap faktor eksternal seperti pandemi dan kebijakan perjalanan internasional.	Ketidakseimbangan fundamental struktur perekonomian.	Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu sangat rentan terhadap krisis global	Ketimpangan struktur perekonomian antar sektor	Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pariwisata	Ketidakseimbangan Fundamental Struktur Perekonomian Akibat Ketergantungan Tinggi Pada Sektor Pariwisata dan Lemahnya Diversifikasi Ekonomi

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
27	Pemulihan pesat pasca pandemi merupakan dampak dari adanya Bandara Internasional Ngurah Rai. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penerbangan dan penumpang, dengan 73.545 pesawat tiba dan 73.536 pesawat berangkat. Kedatangan wisatawan domestik mencapai 5,33 juta orang, sementara wisatawan asing mencapai 6,13 juta orang, menunjukkan tingginya minat wisata ke Bali.			Ketimpangan konektivitas antar wilayah di berbagai negara	Belum meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah	Ketergantungan aksesibilitas daerah terhadap infrastruktur tertentu, dalam hal ini operasional Bandara Ngurah Rai sebagai akses utama.	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
28	Dengan mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia 15-64 tahun, Kabupaten Badung memiliki tenaga kerja yang besar yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kelompok usia 20-34 tahun yang mendominasi menunjukkan tingginya potensi tenaga kerja muda, yang sangat dibutuhkan dalam sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif.	Pertumbuhan penduduk yang stabil, terutama di kelompok usia produktif, dapat menyebabkan peningkatan urbanisasi di wilayah Badung bagian selatan seperti Kuta, Nusa Dua, dan Jimbaran. Jika tidak diimbangi dengan perencanaan tata kota yang baik, bisa memicu kemacetan, permukiman kumuh, tekanan terhadap layanan publik.		Negara berkembang menghadapi tantangan dalam memanfaatkan tenaga kerja usia muda secara produktif	Tantangan dalam perencanaan Pendidikan dan ketenagakerjaan sebagai dampak bonus demografi	Badung memiliki tenaga kerja muda potensial, terutama di sektor pariwisata dan industri kreatif	
29	Kecamatan Petang dan Abiansemal, yang memiliki pertumbuhan lebih lambat, bisa dikembangkan sebagai sentra agrowisata, pertanian organik, dan pariwisata berbasis ekowisata, guna mengurangi ketimpangan	Wilayah seperti Kuta Selatan dan Kuta Utara kemungkinan besar akan mengalami gelombang urbanisasi tinggi, berisiko menimbulkan permukiman kumuh, persaingan kerja yang ketat, dan		Pertumbuhan penduduk tidak merata memunculkan tantangan dalam pemerataan pembangunan wilayah	Wilayah dengan pertumbuhan tinggi masih berisiko mengalami kekurangan lahan, air bersih, dan perumahan	Pemerataan pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah Kabupaten Badung sebagai dampak urbanisasi tinggi di Badung selatan	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	pertumbuhan antar wilayah.	meningkatnya harga lahan.					
30	Setelah mengalami kontraksi besar pada 2020 (-16,55%), sektor pariwisata menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 9,97% (2022) dan 11,29% (2023). Destinasi wisata seperti Kuta, Nusa Dua, dan Seminyak kembali menarik wisatawan domestik dan internasional, mendorong perhotelan, restoran, dan hiburan.	Krisis akibat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ekonomi Badung sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Krisis akibat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ekonomi Badung sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Diversifikasi ekonomi menjadi tantangan utama agar tidak hanya bergantung pada wisatawan asing.		Ketergantungan pada sektor tunggal, terutama pariwisata, meningkatkan kerentanan terhadap krisis global	Pemerintah mendorong transformasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada sektor tertentu seperti pariwisata	Perekonomian Badung sangat dipengaruhi oleh pariwisata, rentan terhadap guncangan eksternal	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
31	Peningkatan PDRB per kapita dari Rp81,72 juta pada 2021 menjadi Rp121,42 juta pada 2023 menunjukkan pemulihan ekonomi yang signifikan. Pulihnya sektor pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta berbagai event internasional menjadi pendorong utama pertumbuhan.	Guncangan eksternal seperti pandemi, krisis ekonomi global, atau bencana alam dapat dengan mudah mengguncang perekonomian Kabupaten Badung. Sektor lain, seperti industri dan pertanian, masih belum berkembang optimal untuk menopang ekonomi jika sektor pariwisata mengalami penurunan.		Ketimpangan kontribusi antar sektor terhadap pendapatan daerah melemahkan ketahanan ekonomi lokal	Pemerintah mendorong pertumbuhan inklusif berbasis keunggulan lokal dan industri kreatif	Ketergantungan pada sektor wisata menjadikan PDRB sensitif terhadap krisis dan belum inklusif terhadap sektor lain	
32	Pengeluaran per kapita menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari Rp17,327 juta pada 2021 menjadi Rp18,556 juta pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang membaik dan pemulihan	Meskipun pengeluaran per kapita meningkat, tidak semua kelompok masyarakat merasakan manfaat yang sama, sehingga perlu strategi untuk memastikan pemerataan kesejahteraan. Diversifikasi ekonomi masih		Kesenjangan ekonomi masyarakat dalam pemulihan pasca krisis pandemi	Pemerintah menargetkan peningkatan daya beli masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan UMKM	Pengeluaran per kapita di Badung meningkat, namun pemerataan manfaat ekonomi masih jadi tantangan	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	ekonomi pasca-pandemi.	dalam tahap awal, sehingga dampaknya terhadap stabilitas ekonomi belum optimal.					
33	Kelompok 20% tertinggi mengalami penurunan proporsi pendapatan dari 41,08% (2018) menjadi 38,41% (2023), menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Indikasi bahwa kelompok menengah dan bawah semakin berperan dalam perekonomian daerah.			Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu pemicu ketidaksetaraan sosial global	Pemerintah mendorong inklusi keuangan dan perlindungan sosial untuk memperbaiki distribusi pendapatan	Peningkatan daya saing ekonomi menengah dan bawah dampak dari proporsi pendapatan kelompok atas yang menurun	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
34	Pertumbuhan sektor seni dan budaya mencapai 84,14% pada 2022 dan 100% pada 2023. Hal memunculkan potensi pengembangan kolaborasi dengan sektor lainnya.			Pelestarian seni dan budaya menghadapi tantangan global akibat modernisasi dan homogenisasi budaya	Pemerintah mendukung sinergi antara sektor budaya dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah	Sektor seni budaya yang memiliki potensi berkolaborasi dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pendidikan	
35	Kabupaten Badung menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan peningkatan signifikan dalam kontribusi terhadap PDRB, yang didorong oleh bangkitnya sektor pariwisata pasca pandemi. Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami kenaikan nilai PDRB namun pertumbuhannya lebih lambat dari sektor pariwisata.			Ketergantungan pada sektor pariwisata menjadi tantangan bagi banyak destinasi global pasca-pandemi	Pemulihan sektor pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun ketimpangan kontribusi antar sektor masih menjadi tantangan	Perlunya keseimbangan antar sektor unggulan untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih resilien	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
36		Belum dipisahkannya kontribusi sektor ekonomi kreatif dalam PDRB Kabupaten Badung menyebabkan kurangnya gambaran yang jelas mengenai peran sektor ini dalam perekonomian daerah. Padahal, subsektor terkait seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (24,67% PDRB), Transportasi dan Pergudangan (27,97% PDRB), serta Informasi dan Komunikasi (6,16% PDRB) memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi kreatif. Tanpa pemetaan yang lebih spesifik, pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu potensi unggulan Badung		Ekonomi kreatif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan inovatif, terutama di era digital	Ekonomi kreatif menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia, namun masih banyak daerah belum memilah kontribusinya secara eksplisit dalam PDRB	Kabupaten Badung memiliki kontribusi sektor yang berkaitan erat dengan ekonomi kreatif yang tinggi	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		dapat terhambat, terutama dalam mendorong diversifikasi ekonomi di luar pariwisata konvensional serta memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan industri kreatif lokal.					

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
37	Meskipun terjadi penurunan ekspor pada beberapa sektor utama, peningkatan ekspor barang anyaman, kulit, dan kertas menunjukkan peluang dalam diversifikasi ekonomi. Produk berbasis budaya dan keberlanjutan masih memiliki daya saing tinggi di pasar global. Untuk itu diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan penguatan industri kreatif agar Kabupaten Badung dapat mengembangkan sektor ini sebagai alternatif dalam menghadapi fluktuasi ekonomi berbasis pariwisata.	Fluktuasi ekspor barang dari Bali, termasuk Kabupaten Badung, mencerminkan ketidakstabilan sektor perdagangan luar negeri yang dapat berdampak pada perekonomian daerah. Penurunan signifikan pada komoditas utama seperti ikan, perhiasan, dan pakaian menunjukkan risiko besar bagi sektor-sektor yang bergantung pada permintaan global dan pariwisata. Apabila tren ini berlanjut, industri terkait dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usaha, yang berpotensi berimbas pada lapangan kerja		Perdagangan global menghadapi volatilitas tinggi akibat geopolitik, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok	Indonesia mendorong diversifikasi ekspor untuk memperkuat daya tahan ekonomi terhadap fluktuasi global	Penguatan sektor industri kreatif sebagai alternatif penopang ekonomi daerah	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		dan kesejahteraan masyarakat.					
38		Fluktuasi dalam kesesuaian Pembangunan infrastruktur terhadap Rencana Tata Ruang menunjukkan adanya tantangan dalam pengendalian tata ruang di Kabupaten Badung. Faktor yang paling berpengaruh adalah tekanan dari sektor pariwisata dan		Pembangunan infrastruktur dengan prinsip keberlanjutan dan tata ruang untuk menghindari degradasi lingkungan	Pengendalian ruang menjadi isu strategis nasional, terutama di daerah yang berkembang pesat	Tantangan kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap RTRW akibat tekanan pariwisata	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		pertumbuhan penduduk yang mendorong penyimpangan Pembangunan dari rencana tata ruang. Untuk itu perlunya penguatan regulasi serta partisipasi masyarakat untuk mencegah permasalahan tata Kelola ruang di masa depan.					
39	Kabupaten Badung memiliki potensi daya saing daerah yang cukup kuat, terbukti dengan skor daya saing sebesar 3,78 yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota di Bali (3,5) serta keunggulan dalam adopsi teknologi informasi (4,83) dan kapabilitas inovasi (4,01). Selain itu, kualitas SDM yang baik dalam aspek kesehatan (4,26) dan keterampilan tenaga kerja (4,23)	Kabupaten Badung mencatat skor 1,9 dalam aspek system keuangan yang jauh dibawah rata—rata Provinsi Bali (3,14). Sehingga untuk meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh, Kabupaten Badung perlu memperkuat sektor keuangan dengan mendorong kemudahan akses		Ketimpangan antar wilayah di berbagai negara menjadi tantangan besar dalam pembangunan global	Pemerintah menekankan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan SDM, inovasi, dan sistem keuangan inklusif	Penguatan sektor keuangan lokal melalui akses permodalan dan inklusi keuangan untuk mendukung pertumbuhan teknologi dan inovasi yang merata	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Bali.	permodalan bagi pelaku usaha, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperluas distribusi layanan keuangan.					
40		Kecamatan Kuta memiliki kepadatan sangat tinggi (3.385 jiwa/km ²) dalam luas wilayah kecil (17,52 km ²), berpotensi menimbulkan tekanan pada infrastruktur dan kualitas hidup. Sebaliknya, Kecamatan Petang hanya memiliki kepadatan 270 jiwa/km ² , menunjukkan	Kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja masih rendah	Urbanisasi tanpa perencanaan meningkatkan tekanan pada infrastruktur	Ketimpangan kepadatan antar wilayah masih terjadi	Ketimpangan distribusi penduduk antar kecamatan di Badung mempengaruhi pemerataan Pembangunan dan efisiensi infrastruktur	Rendahnya Daya Saing SDM Dalam Menghadapi Transformasi Ekonomi Digital dan Diversifikasi Lapangan Kerja

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		ketimpangan dalam distribusi penduduk dan pembangunan.					
41	Sektor ekonomi kreatif, digital, dan industri berbasis teknologi mulai menjadi alternatif baru dalam penyediaan lapangan kerja.	Banyak tenaga kerja masih bergantung pada sektor pariwisata dan jasa, sehingga keterampilan mereka kurang fleksibel untuk beralih ke sektor lain.		Disrupsi digital dan transformasi ekonomi global menyebabkan perubahan kebutuhan tenaga kerja	Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas dan pelatihan vokasi untuk menghadapi perubahan pasar kerja	Ketergantungan tenaga kerja Kabupaten Badung yang dominan pada satu sektor yaitu pariwisata sehingga rentan saat krisis terjadi	
42	Tingkat partisipasi angkatan kerja terus meningkat dari 71,15% (2018) menjadi 73,79% (2023), menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tren ini mencerminkan daya tarik			Urbanisasi dan digitalisasi mendorong keterlibatan lebih tinggi dalam sektor informal dan fleksibel	Fokus nasional pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Optimalisasi produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan efisiensi kerja	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kabupaten Badung sebagai daerah dengan peluang kerja yang tinggi, terutama di sektor pariwisata dan jasa.						
43	Indeks Gini Kabupaten Badung menurun dari 0,3244 (2019) menjadi 0,2800 (2023), menunjukkan peningkatan kesetaraan dalam distribusi pendapatan. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bali, Badung secara konsisten memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah.	Kurangnya diversifikasi lapangan kerja membuat masyarakat berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap ketimpangan ekonomi.		Ketimpangan pendapatan menurunkan ketahanan sosial dan menciptakan eksklusi ekonomi	Ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antar kelompok sosial masih tinggi di Indonesia	Ketergantungan ekonomi terhadap satu sektor membuat sebagian besar masyarakat belum menikmati hasil pembangunan secara setara	
44	Rasio ketergantungan penduduk yang relative rendah (39,15), dominasi penduduk produktif			Bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan global dalam pengelolaan SDM	Indonesia tengah memasuki era bonus demografi hingga 2030-an, menuntut peningkatan kualitas SDM	Kualitas dan daya saing tenaga kerja yang masih minim	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	memberikan manfaat bonus demografi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.						
45	Kabupaten Badung memiliki akses pendidikan dasar yang sangat baik dengan APK SD stabil di atas 100%. Peningkatan APK SMP, SMA dan perguruan tinggi menunjukkan efektivitas kebijakan pemerataan Pendidikan dan meningkatnya minat dan akses masyarakat terhadap Pendidikan. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.			Pemerataan pendidikan dasar dan menengah menjadi fokus global untuk meningkatkan literasi dan keterampilan dasar	Peningkatan dan pembukaan akses Pendidikan yang tinggi sebagai strategi peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi pemerataan akses Pendidikan yang diikuti peningkatan mutu dan daya saing lulusan	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
46	Kabupaten Badung menunjukkan peningkatan akses pendidikan dengan menurunnya penduduk tanpa pendidikan formal dan meningkatnya lulusan SMP hingga pendidikan tinggi. Hal ini juga didukung oleh tren peningkatan lulusan diploma dan S1 ke atas yang menunjukkan peningkatan minat terhadap pendidikan vokasi dan akademik sehingga berpotensi meningkatkan daya saing tenaga kerja, terutama di sektor industri pariwisata dan jasa.			Pendidikan tinggi menjadi kunci peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan	Perluasan akses dan peningkatan relevansi kurikulum menjadi perhatian	Tren peningkatan lulusan Pendidikan tinggi perlu diimbangi dengan kualitas lulusan dan kesiapan kerja	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
47	Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Badung, terutama dalam penggunaan telepon seluler dan internet, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital, layanan publik berbasis digital, dan inovasi di sektor pariwisata serta UMKM.	Meskipun akses internet dan penggunaan telepon seluler terus meningkat. Tren penggunaan computer yang fluktuatif di Kabupaten Badung menjadi tantangan dalam pengembangan keterampilan digital. Perlunya mengimbangi dengan peningkatan literasi digital dan akses terhadap perangkat teknologi yang lebih mumpuni agar tidak terjadi kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi Tingkat lanjut yang menghambat potensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital.		Digital divide (kesenjangan digital) masih menjadi tantangan global	Pemerintah Indonesia menargetkan literasi digital untuk semua kalangan sebagai fondasi menuju masyarakat digital	Kesenjangan keterampilan digital dapat menjadi penghambat dalam peningkatan produktivitas dan daya saing SDM lokal	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
48	Kabupaten Badung memiliki ketersediaan lahan permukiman seluas 28.135,16 ha, yang mampu menampung hingga 2.813.516 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2043 hanya mencapai 839.482 jiwa, sehingga daya dukung lahan masih mencukupi. Dengan surplus lahan, Kabupaten Badung memiliki peluang untuk mengembangkan permukiman yang lebih terencana dan layak, mendukung pembangunan yang sesuai dengan tata ruang wilayah.		Sarana dan prasarana air bersih, sanitasi dan persampahan belum memadai.	Urbanisasi cepat menimbulkan tekanan terhadap penggunaan lahan	Ketersediaan lahan permukiman di wilayah perkotaan semakin terbatas	Perlunya pengembangan permukiman yang terencana, meskipun Badung telah memiliki surplus lahan	Ketimpangan Infrastruktur Dasar Dalam Mendukung Daya Dukung Lingkungan dan Pertumbuhan Wilayah

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
49	Ketersediaan air di Kabupaten Badung sebesar 13.147.319 m ³ /tahun, sementara kebutuhan air pada tahun 2023 adalah 22.057.330 m ³ /tahun dan tahun 2043 sebesar 36.769.317 m ³ /tahun. Meskipun kebutuhan air meningkat seiring pertumbuhan penduduk, daya dukung air masih mencukupi hingga tahun 2043. Tidak ada kecamatan yang mengalami defisit daya dukung air hingga tahun 2043, menunjukkan distribusi air yang cukup merata di wilayah Kabupaten Badung.			Krisis air bersih menjadi ancaman global akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim	Ketimpangan distribusi dan kualitas air bersih	Antisipasi pencemaran dan inefisiensi distribusi air di Badung meskipun daya dukung air sudah mencukupi	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
50		Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM, sehingga perlu pengembangan infrastruktur yang lebih luas dan inklusif.		Akses air bersih belum merata secara global	Ketimpangan layanan air bersih antara perkotaan dan pedesaan masih tinggi	Jaringan pasokan air bersih (PDAM) belum mencakup seluruh wilayah	
51		Pertumbuhan populasi dan sektor pariwisata meningkatkan konsumsi air, berisiko menekan kapasitas sumber daya air baku. Potensi eksploitasi berlebihan dan pencemaran air dari aktivitas domestik dan industri dapat menurunkan kualitas serta ketersediaan air minum.		Air minum yang aman menjadi komoditas terbatas di banyak negara berkembang	Pengelolaan sumber daya air untuk air minum belum sepenuhnya terintegrasi	Peninngkatan konsumsi air yang tidak terkendali akibat pariwisata dan urbanisasi	
52	Dalam periode 2020-2023, akses sanitasi layak di Kabupaten Badung selalu berada di atas rata-rata Provinsi Bali. Peningkatan signifikan kembali	Meskipun akses sanitasi cukup tinggi, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki sistem sanitasi yang optimal. Desa atau kawasan		Akses sanitasi layak masih menjadi tantangan di negara berkembang	Akses sanitasi meningkat, namun belum merata terutama di daerah pedesaan	Belum optimalnya akses sanitasi aman di Badung	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	terjadi pada tahun 2023 (98,98%).	terpencil mungkin belum mendapatkan akses fasilitas sanitasi yang layak secara merata.					
53	Jumlah sampah yang berhasil ditangani meningkat drastis dari 57.143,52 ton pada 2020 menjadi 195.222,49 ton pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.	Meskipun kapasitas pengelolaan sampah meningkat, sebagian besar sampah masih berakhir di TPA. Tidak semua sampah yang dikumpulkan dapat diolah atau didaur ulang dengan optimal.		Masalah sampah dan limbah padat terus meningkat secara global	Belum optimalnya pengelolaan sampah dan teknologi pengolahan sampah lanjutan	Belum optimalnya pengelolaan sampah terpilah	
54	Cakupan pelayanan sampah meningkat dari 50% pada tahun 2020 menjadi 65% pada tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut.			Akses terhadap layanan pengelolaan sampah menjadi tantangan di negara berkembang	Layanan pengelolaan sampah yang masih belum merata	Belum optimalnya cakupan area pelayanan sampah Badung secara menyeluruh	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
55		Persentase sampah yang tertangani turun drastis menjadi 63,53%. Mengindikasikan adanya kendala dalam kapasitas pengelolaan sampah. Pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi meningkatkan produksi sampah dari hotel, restoran, dan objek wisata. Infrastruktur pengelolaan sampah tidak berkembang secepat peningkatan volume sampah.		Permasalahan laju timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas system penanganan sampah	Kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan yang tertangani masih besar	Masifnya produksi sampah Badung akibat aktivitas pariwisata yang tidak diiringi dengan pola penangananan yang memadai	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
56		Fluktuasi dalam kesesuaian Pembangunan infrastruktur terhadap Rencana Tata Ruang menunjukkan adanya tantangan dalam pengendalian tata ruang di Kabupaten Badung. Faktor yang paling berpengaruh adalah tekanan dari sektor pariwisata dan pertumbuhan penduduk yang mendorong penyimpangan Pembangunan dari rencana tata ruang. Untuk itu perlunya penguatan regulasi serta partisipasi masyarakat untuk mencegah permasalahan tata Kelola ruang di masa depan.		Pembangunan infrastruktur dengan prinsip keberlanjutan dan tata ruang untuk menghindari degradasi lingkungan	Pengendalian ruang menjadi isu strategis nasional, terutama di daerah yang berkembang pesat	Tantangan kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap RTRW akibat tekanan pariwisata	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
57	Budidaya ikan di kolam meningkat dari 43 hektare (2020) menjadi 45 hektare (2023), sementara luas pemeliharaan ikan di sawah tetap stabil di 14 hektare. Produksi ikan di kolam meningkat dari 619 ton (2020) menjadi 698 ton (2022), meskipun turun sedikit menjadi 668 ton (2023). Produksi ikan di sawah melonjak dari 5-8 ton (2020-2022) menjadi 15 ton (2023). Nilai produksi ikan di kolam naik dari Rp9,9 miliar (2020) menjadi Rp16,96 miliar (2023), didorong oleh peningkatan harga jual dan permintaan sektor pariwisata.		Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau.	Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya laut	Pemanfaatan potensi bahari belum maksimal	Terbatasnya diversifikasi komoditas dan akses ke pasar ekspor atau hilirisasi masih lemah.	Optimalisasi Ekonomi Hijau untuk Mengatasi Ketidakseimbangan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
58		Kehilangan listrik yang signifikan dari 10.248,16 MWh (2020) menjadi 95.479,30 MWh (2023) berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kerugian energi dalam sistem distribusi. Jika tidak diimbangi dengan pengembangan energi terbarukan, peningkatan konsumsi listrik dapat meningkatkan ketergantungan pada sumber energi fosil.		Tantangan dalam Upaya transisi energi bersih untuk menekan emisi karbon	Pemanfaatan energi terbarukan yang belum optimal	Peningkatan efisiensi distribusi listrik dan pengembangan energi baru terbarukan	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
59	Kabupaten Badung memiliki Tingkat inovasi yang baik dengan skor 62,9 dan masuk dalam kategori Sangat Inovatif. Kabupaten Badung berpeluang untuk mengoptimalkan inovasi di sektor non pariwisata seperti pertanian dan industri local, terutama dalam digitalisasi layanan publik, pengelolaan pariwisata berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.			Inisiatif smart city dan digital governance menjadi tren dunia sehingga inovasi menjadi kunci daya saing daerah dalam menghadapi perubahan global dan disrupsi teknologi	Pemerintah Indonesia mendorong inovasi daerah melalui sistem penilaian Indeks Inovasi Daerah untuk mendorong kinerja pemerintah dan pembangunan inklusif	Badung berada pada kategori sangat inovatif, berpeluang besar untuk mengembangkan inovasi di luar sektor pariwisata	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
60	Kabupaten Badung telah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, hal ini berpeluang besar dalam mengembangkan ekonomi hijau melalui strategi diversifikasi ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap guncangan eksternal.			Transisi menuju ekonomi hijau menjadi mandat global untuk mengatasi krisis iklim dan ketimpangan pembangunan	Indonesia berkomitmen dalam pengembangan ekonomi hijau melalui RPJMN dan kebijakan transisi energi	Badung berpeluang mendorong diversifikasi ekonomi melalui pendekatan hijau dan berkelanjutan	
61	Kabupaten Badung sebagai bagian dari Provinsi Bali memiliki indeks Pembangunan TIK yang tinggi (6,60), hal ini berpeluang besar dalam mengembangkan ekonomi digital khususnya di sektor pariwisata dan UMKM berbasis teknologi.			Penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi tulang punggung transformasi digital global	Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan digital sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional	Potensi besar Kabupaten Badung dalam pengembangan sektor digital, terutama pariwisata digital dan UMKM berbasis teknologi	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
62	Peningkatan signifikan Indeks SPBE dari 1,78 (2021) menjadi 3,66 (2023) menunjukkan keberhasilan Kabupaten Badung dalam Pembangunan infrastruktur teknologi informasi, integrasi data antar perangkat daerah serta peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi. Ke depan, Kabupaten Badung perlu mempertahankan capaian ini dengan optimalisasi system digital yang telah diterapkan.			Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui E-Government menjadi indikator kemajuan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang responsif	Optimalisasi penerapan SPBE terintegrasi lintas sektor dan daerah sebagai bagian dari transformasi digital nasional	Pengembangan infrastruktur TIK, optimalisasi layanan digital dan keamanan siber	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
63	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Badung, khususnya dalam sektor perizinan dan non-perizinan, menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024, mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir (93,59). Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat inovasi pelayanan public. Namun, pemerintah daerah perlu mengantisipasi adanya guncangan eksternal (seperti pandemi) dan memastikan keberlanjutan akses pelayanan public sehingga pelayanan public tetap optimal dan memenuhi harapan masyarakat.			Pelayanan publik yang berkualitas mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan sosial	Pemerintah pusat mendorong pelayanan publik berbasis inovasi, integritas, dan kemudahan akses	Antisipasi guncangan eksternal agar pelayanan public tetap optimal	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
64	Keindahan alam Kabupaten Badung, seperti pantai eksotis dan kawasan perbukitan, tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara		Kualitas lingkungan hidup masih rendah	Tekanan lingkungan akibat aktivitas pariwisata	Ketimpangan pengembangan pariwisata antar wilayah di Indonesia	Beban lingkungan akibat masifnya pembangunan akomodasi wisata di Badung	Optimalisasi Konservasi Lingkungan di tengah Tekanan Pariwisata dan Pembangunan
65	Rasio luas kawasan lindung meningkat kembali dari 70,46% (2022) menjadi 73,71% (2024), menunjukkan adanya upaya konservasi dan rehabilitasi hutan yang lebih intensif. Program reboisasi, penguatan regulasi kawasan lindung, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas perambahan lahan berkontribusi pada peningkatan luas kawasan lindung. Keberadaan kawasan lindung yang terjaga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan			Deforestasi dan degradasi hutan tropis yang masih menjadi tantangan global	Efektivitas pengelolaan Kawasan lindung yang masih rendah	Perlunya penguatan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	ekowisata yang berbasis konservasi, mendukung sektor pariwisata tanpa merusak lingkungan.						
66		IKLH terus menurun dari 70,85 (2020) menjadi 67,12 (2022), menunjukkan degradasi lingkungan yang cukup signifikan.		Kualitas lingkungan global menurun akibat degradasi ekosistem dan emisi	Tren penurunan indeks kualitas lingkungan masih terjadi di banyak daerah	Turunnya IKLH di Badung mencerminkan degradasi lingkungan yang serius	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
67	Efektivitas program perumahan dan permukiman Kabupaten Badung yang tercermin dari keberhasilannya dalam memastikan hunian yang memenuhi standar kelayakan (rasio rumah layak huni mencapai 100% sejak tahun 2021-2023 dan rasio permukiman layak huni 99,73% di tahun 2023). Dengan pencapaian ini, Kabupaten Badung berpotensi besar dalam mempertahankan standar hunian yang tinggi, namun adanya tantangan yang perlu diantisipasi yakni peningkatan kebutuhan hunian akibat migrasi atau ekspansi ekonomi yang dapat menimbulkan tekanan terhadap			Akses terhadap perumahan layak merupakan hak dasar dan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan backlog dan peningkatan kualitas permukiman melalui program rumah layak huni	Badung telah mencapai standar tinggi untuk rumah dan permukiman layak, namun berpotensi mengalami tekanan karena migrasi dan ekspansi ekonomi	

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	infrastruktur dan lahan permukiman.						

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
68	Konsistensi tingkat penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Badung yang mencapai 100% selama periode 2020-2024 mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun tingkat penegakan Perda telah mencapai angka maksimal, tetap diperlukan inovasi dalam mekanisme pengawasan agar efektivitasnya tetap terjaga. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kepatuhan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta menyesuaikan		Meningkatnya kriminalitas.	Partisipasi publik dalam pengawasan hukum menjadi tren global tata kelola inklusif sehingga perlu penegakan hukum yang konsisten dan adaptif	Penegakan perda menjadi indikator efektivitas dan legitimasi pemerintah daerah	Pemanfaatan teknologi dan penyesuaian regulasi menjadi kunci efektivitas penegakan PERDA yang berkelanjutan	Optimalisasi Penegakan Ketertiban dan Keamanan dalam menghadapi dinamika Sosial Ekonomi

No .	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	regulasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.						

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil identifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kabupaten Badung menunjukkan adanya sebelas isu strategis yang saling berkaitan dan perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan jangka menengah. Isu-isu tersebut mencakup dimensi ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, diversifikasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola dan keamanan daerah.

Pada aspek ketahanan pangan, Kabupaten Badung saat ini berada pada kondisi relatif baik dengan peringkat kelima Indeks Ketahanan Pangan secara nasional dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang rendah. Namun, keberlanjutan capaian tersebut masih menghadapi risiko jika tidak diimbangi dengan strategi diversifikasi produksi, efisiensi distribusi, serta penguatan produksi berbasis lokal. Tantangan ini penting mengingat tekanan terhadap lahan pertanian dari sektor non-pertanian terus meningkat, sementara ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat.

Di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, capaian IPM dan Indeks Keluarga Sehat menunjukkan tren positif, seiring peningkatan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan. Kendati demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas neonatal, kekurangan tenaga medis di wilayah tertentu, rendahnya kesadaran hidup sehat, serta kenaikan angka kematian ibu. Penurunan kepemilikan rekening tabungan juga mengindikasikan kerentanan ekonomi rumah tangga, yang berpotensi berdampak pada ketahanan sosial.

Pada sektor pendidikan, kinerja Kabupaten Badung terus membaik ditandai peningkatan harapan lama sekolah, angka partisipasi murni, dan pemerataan layanan literasi. Namun, kesenjangan gender dalam rata-rata lama sekolah masih terjadi, serta masih terdapat tantangan mempertahankan partisipasi di jenjang menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan mutu dan inklusivitas pendidikan, khususnya bagi kelompok perempuan dan rentan, menjadi isu strategis penting untuk mendukung pembangunan SDM berdaya saing.

Dari sisi pemerataan ekonomi, ketimpangan antarwilayah dan ketergantungan pada sektor pariwisata masih menjadi tantangan besar. Dominasi pekerja perempuan di sektor jasa dan pariwisata meningkatkan kerentanan terhadap krisis global, sementara sektor pertanian dan industri kreatif belum sepenuhnya berkembang. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat tinggi dan Indeks Ketimpangan Gender relatif baik, kenaikan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan adanya tekanan yang perlu diantisipasi melalui diversifikasi ekonomi dan perlindungan sosial adaptif.

Dalam konteks ketahanan terhadap bencana, Badung menghadapi risiko tinggi terhadap banjir pesisir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Urbanisasi pesat di kawasan selatan meningkatkan eksposur penduduk terhadap ancaman bencana. Meskipun Indeks Ketahanan Daerah lebih baik dibanding sebagian besar kabupaten di Bali, peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan tetap diperlukan.

Ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata juga menjadi sumber ketidakseimbangan struktur perekonomian. Pemulihan pascapandemi menunjukkan resiliensi sektor ini, tetapi juga memperlihatkan kerentanannya terhadap guncangan eksternal seperti pandemi dan krisis global. Sektor industri, pertanian, dan ekonomi kreatif masih belum berkembang optimal sebagai penopang alternatif, sementara urbanisasi cepat di wilayah selatan memunculkan tantangan tata ruang dan pelayanan publik.

Isu daya saing SDM menjadi semakin relevan seiring transformasi ekonomi digital. Bonus demografi dan akses pendidikan yang membaik membuka peluang, namun keterampilan tenaga kerja masih didominasi sektor pariwisata, keterampilan digital belum merata, dan diversifikasi lapangan kerja terbatas.

Terkait infrastruktur dasar, capaian akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah mengalami kemajuan, tetapi distribusi layanan belum merata. Peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata tidak diimbangi dengan pengolahan yang optimal, sementara tekanan tata ruang akibat perkembangan sektor pariwisata memerlukan pengendalian yang lebih ketat.

Peluang ekonomi hijau mulai terlihat melalui inovasi daerah, pengembangan perikanan, dan potensi energi terbarukan. Namun, inefisiensi pemanfaatan energi dan ketergantungan pada pariwisata masih membatasi percepatan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan tangguh.

Dari sisi konservasi lingkungan, meningkatnya luas kawasan lindung belum mampu mengimbangi penurunan kualitas lingkungan yang ditunjukkan oleh turunnya IKLH. Tekanan pariwisata dan pembangunan masih menjadi faktor utama degradasi ekosistem, sehingga diperlukan pendekatan konservasi yang lebih sistematis dan berbasis daya dukung lingkungan.

Akhirnya, dalam hal ketertiban dan keamanan, efektivitas penegakan Perda tetap terjaga, namun dinamika sosial ekonomi yang cepat di kawasan urban dan

wisata meningkatkan potensi kriminalitas. Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sistem pengawasan inovatif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

Secara keseluruhan, sebelas isu strategis tersebut saling terkait dan memerlukan pendekatan integratif. Penguatan kapasitas SDM, diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pengelolaan lingkungan berbasis daya dukung, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif menjadi pilar penting dalam menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Badung lima tahun ke depan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Badung dalam periode Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, berlandaskan kearifan lokal, serta mampu menjawab tantangan global dan nasional. Sebagai kabupaten dengan potensi ekonomi yang kuat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Badung memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah.

Bab ini menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung selama lima tahun ke depan. Visi dan misi yang dirumuskan tidak hanya merefleksikan aspirasi masyarakat, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan pembangunan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan.

Penyusunan visi dan misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting daerah, potensi unggulan, tantangan pembangunan, serta kebijakan strategis nasional dan Provinsi Bali. Selain itu, visi dan misi ini diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung. Disamping itu penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Badung juga disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali serta Haluan Pembangunan 100 Tahun Provinsi Bali (Bali Masa Depan).

Selanjutnya, tujuan dan sasaran pembangunan disusun sebagai bagian dari strategi implementasi visi dan misi. Tujuan pembangunan dirancang untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi daerah, sedangkan sasaran pembangunan ditetapkan secara terukur guna memastikan bahwa pencapaian pembangunan dapat dievaluasi secara efektif dalam kurun waktu lima tahun.

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 tetap dipelihara dan

dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana*, *Sad Kerthi*, dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, *gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja*, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu:

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2020-2024;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan strategi yang terarah, kebijakan yang konsisten, serta program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan secara langsung. Bab ini menguraikan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, serta program prioritas daerah yang akan menjadi fokus utama dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029.

3.1. VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BADUNG 2025-2029

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung merupakan pernyataan yang menggambarkan arah dan tujuan utama pembangunan Kabupaten Badung dalam periode Tahun 2025-2029. Visi ini menjadi panduan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung tidak hanya mencerminkan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai Bupati dan Wakil Bupati Badung sebagaimana yang telah disampaikan selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah kepada konstituennya, melainkan juga berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat Badung, keberlanjutan pembangunan, dan peningkatan daya saing Kabupaten Badung. Visi ini juga terukur, dan selaras dengan visi Presiden RI sebagaimana Tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Visi Gubernur Bali sebagaimana tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, serta Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung memiliki nilai strategis sebagai berikut:

a. Pedoman Pembangunan Daerah

- Visi menjadi arah dan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dimana seluruh perangkat daerah wajib menyelaraskan program dan kegiatannya dengan visi yang telah ditetapkan.

b. Instrumen Perencanaan dan Pengendalian

- Visi menjadi dasar dalam menyusun misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta indikator kinerja pembangunan daerah. Pencapaian visi menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati Badung dalam menjalankan pemerintahan selama periode Tahun 2025-2030 ini.

c. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

- Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung telah mempertimbangkan kestinambungan pembangunan secara hirarkis baik antara pusat dengan daerah maupun jangka panjang dengan jangka menengah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung telah selaras dengan visi presiden yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta visi Gubernur Bali yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Dalam konteks kestinambungan pembangunan antar periodisasi waktu, Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung telah selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang yang tercantum dalam RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045. Disamping itu Visi Pembangunan Jangka Menengah juga diselaraskan dengan arah pembangunan Provinsi Bali di masa depan sebagaimana tercantum dalam dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan (100 tahun Provinsi Bali).

d. Menjawab Tantangan dan Dinamika Global

- Visi Pembangunan Jangka Menengah merupakan instrument yang mampu mengakomodasi tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh Kabupaten Badung seperti pemerataan pembangunan sosial-ekonomi

yang adil dan inklusif, arus digitalisasi, ketahanan lingkungan, dan daya saing global.

e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

- Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung telah disusun secara jelas dan inklusif, dengan tujuan mendorong masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pariwisata Badung Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”

Rumusan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung di atas memiliki makna bahwa Pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas, dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta antara lain melalui peningkatan kerukunan hidup beragama, pelestarian adat dan budaya, mewujudkan kebersihan dan kelestarian alam lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sehingga terwujud keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung ini menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Badung harus berorientasi pada kualitas, tidak hanya dalam aspek layanan dan daya tarik wisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, mempertahankan identitas budaya Bali, serta mendukung kelestarian alam sebagai warisan yang harus dijaga bagi generasi mendatang.

Sebagai pusat pariwisata di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga pada dampak positif yang dihasilkan bagi ekonomi lokal, keberlanjutan budaya, dan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata harus selaras dengan filosofi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, yang menitikberatkan pada pemuliaan manusia (*Jana Kerthi*) dan pemuliaan alam semesta (*Jagat Kerthi*).

Penerapan nilai-nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* dalam pembangunan pariwisata yang berkualitas diwujudkan melalui beberapa aspek utama:

1. Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

- Pariwisata di Badung harus mencerminkan identitas budaya Bali yang autentik, bukan hanya sebagai daya tarik wisata tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai adat, seni, dan tradisi lokal.
- Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal dalam industri pariwisata, seperti penggunaan arsitektur tradisional Bali, pertunjukan seni berkualitas, serta festival budaya yang berakar pada tradisi masyarakat setempat.
- Peningkatan kapasitas masyarakat adat dan seniman lokal agar dapat berkontribusi secara langsung dalam industri pariwisata tanpa kehilangan jati diri mereka.

2. Pariwisata yang Menjaga Harmoni Sosial dan Kerukunan

- Pariwisata tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada dinamika sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata di Badung tidak menyebabkan kesenjangan sosial, konflik kepentingan, atau ketimpangan akses ekonomi.
- Peningkatan kerukunan hidup beragama dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang beragam, sehingga pariwisata menjadi penghubung yang mempererat hubungan antarumat dan komunitas lokal.
- Mendorong model pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*) yang memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai penonton dalam perkembangan industri pariwisata.

3. Pariwisata Berbasis Keberlanjutan dan Kelestarian Alam

- Pembangunan sektor pariwisata di Badung harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir, laut, hutan, dan sumber daya alam lainnya.
- Pembangunan pariwisata Badung juga disinergikan dengan sektor-sektor unggulan lainnya seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor transportasi sebagai upaya diversifikasi ekonomi Badung. Upaya diversifikasi ekonomi tidak dapat dikesampingkan agar pariwisata yang ada saat ini dan yang akan dibangun di masa depan dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan.
- Mendorong pariwisata hijau dan berkelanjutan yang menekankan pada pengurangan jejak karbon, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik di destinasi wisata.
- Penguatan regulasi dan implementasi prinsip daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), terutama di kawasan wisata dengan kunjungan tinggi, untuk memastikan keseimbangan antara jumlah wisatawan dan kapasitas ekosistem.

4. Pariwisata yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Berorientasi pada Kenyamanan Wisatawan

- Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas wisata yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga tetap menghormati nilai-nilai budaya dan tata ruang Bali.
- Pengembangan kawasan wisata dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis tata ruang yang harmonis, agar tidak terjadi eksploitasi lahan dan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah.
- Pembangunan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan mendukung aksesibilitas wisatawan, baik dalam skala lokal maupun internasional.

5. Pariwisata yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal

- Pariwisata berkualitas harus memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi pelaku usaha besar tetapi juga bagi UMKM, pekerja sektor informal, dan komunitas desa adat.
- Mendorong investasi dalam sektor pariwisata yang berbasis ekonomi kerakyatan, seperti pengembangan desa wisata, koperasi pariwisata, dan industri kreatif berbasis budaya lokal.
- Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam industri pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan kepariwisataan berbasis budaya dan keberlanjutan.

Visi “Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali” memiliki makna yang mendalam dan strategis dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan tetap berakar pada budaya serta lingkungan hidup Bali.

Dengan mengedepankan nilai-nilai pemuliaan manusia dan alam semesta, pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung tidak hanya akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan menjadi model pariwisata berkualitas yang menghormati identitas budaya Bali, keberlanjutan ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung merupakan bagian dari konstelasi dokumen perencanaan pembangunan nasional yang di dalamnya keselarasan dan kesinambungan merupakan salah satu asas yang harus dimiliki antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Sesuai dengan arahan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 ini harus mempedomani RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Tujuan dari penyelarasan dokumen RPJMD Kabupaten dengan dokumen RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJMN adalah untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Keselarasan ini dimulai dari keselarasan antar visi pembangunan. Visi pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 harus mempedomani visi pembangunan RPJPD Semesta Berencana Badung Tahun 2025-2045, mempedomani visi pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Visi pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Adapun keselarasan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1

Keselarasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Perencanaan	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
Visi Pembangunan	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	<i>Nangun Sat Kerthi Loka</i> Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru	Badung Unggul: Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>	Mewujudkan Pariwisata Badung Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai <i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</i>
Makna Visi Pembangunan	Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.	Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan <i>Krama</i> Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, <i>Niskala - Sakala</i> Menuju Kehidupan <i>Krama</i> dan <i>Gumi</i> Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Kabupaten Badung menjadi yang terbaik dalam segala aspek pembangunan, menjadi tolok ukur kesuksesan, dan barometer pembangunan. Dengan komitmen besar, Kabupaten Badung bertekad untuk unggul dalam pemajuan ekonomi, kesejahteraan yang merata, serta melindungi dan mengelola warisan alam berlandaskan	Pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas, dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai <i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</i> yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta antara lain melalui peningkatan kerukunan hidup beragama, pelestarian adat dan budaya, mewujudkan

Dokumen Perencanaan	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
		Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Membangun Kehidupan <i>Krama</i> Bali yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban Berlandaskan Nilai – Nilai Luhur Kearifan Bali	filosofi <i>Sad Kerthi</i> dan <i>Tri Hita Karana</i> .	kebersihan dan kelestarian alam lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sehingga terwujud keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungan

Sumber: Hasil Penyelarasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 terhadap Visi RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029 yaitu “Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali” merupakan penjabaran operasional dari visi jangka panjang Kabupaten Badung dalam RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2045, yaitu “Badung Unggul: Maju, Sejahtera melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana yang Berkelanjutan dan Berlandaskan *Tri Hita Karana*.”

Secara substansi, kedua visi ini memiliki kesinambungan dan keselarasan yang kuat, yang tercermin dalam beberapa aspek berikut:

a. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Visi RPJPD menekankan pembangunan semesta berencana yang berkelanjutan, yang sejalan dengan komitmen RPJMD untuk

mengembangkan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berwawasan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya melalui prinsip pelestarian alam dan budaya dalam pembangunan pariwisata.

b. Kesenambungan Nilai-Nilai Lokal dan Filosofis

Visi jangka menengah (RPJMD) berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang secara filosofis dan nilai-nilai sangat erat dengan Tri Hita Karana dalam visi RPJPD. Keduanya menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam sebagai dasar etika pembangunan daerah.

c. Fokus pada Sektor Unggulan Daerah

Visi RPJMD yang menempatkan pariwisata berkualitas sebagai poros utama, selaras dengan arah RPJPD yang menargetkan keunggulan daerah di berbagai sektor strategis. Pariwisata berkualitas akan menjadi lokomotif untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan Badung secara berkelanjutan.

d. Penjabaran dalam Kerangka Waktu yang Koheren

Visi RPJMD lima tahunan adalah bagian dari tahapan pencapaian visi dua puluh tahunan RPJPD. Dengan menitikberatkan pada pembenahan dan peningkatan kualitas pariwisata yang berakar pada budaya dan lingkungan, RPJMD berfungsi sebagai pilar awal untuk mewujudkan Badung Unggul secara bertahap dan terukur.

Dengan demikian, visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025–2029 tidak hanya selaras secara substansi dengan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2045, tetapi juga memperkuat fondasi pencapaian jangka panjang Kabupaten Badung, melalui pendekatan pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai lokal yang luhur.

2. Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029 terhadap Visi RPJMN Tahun 2025–2029

Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029 yaitu “Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” memiliki keselarasan yang substansial dengan visi nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi nasional tersebut mengandung makna bahwa pembangunan memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa dengan semangat persatuan, kesinambungan, dan komitmen untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan negara maju pada tahun 2045. Dalam konteks ini, visi pembangunan Kabupaten Badung mendukung sepenuhnya arah pembangunan nasional melalui hal-hal berikut:

a. Penguatan Sektor Unggulan Daerah sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Fokus RPJMD Badung pada pengembangan pariwisata yang berkualitas mendukung agenda besar pembangunan nasional dalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Pariwisata berkualitas yang terintegrasi dengan budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal merupakan bagian dari transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

b. Kolaborasi dan Partisipasi Multi-Pihak

Semangat “Bersama Indonesia Maju” diwujudkan dalam visi RPJMD Badung melalui pendekatan pembangunan pariwisata berbasis nilai lokal, keterlibatan masyarakat, kemitraan antar sektor, serta pelibatan pelaku UMKM, adat, dan komunitas kreatif. Hal ini memperkuat semangat kolektif pembangunan dari bawah (bottom-up) yang menjadi fondasi penting Indonesia Emas 2045.

c. Konsistensi dan Keberlanjutan Pembangunan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025–2029 dirancang sebagai kelanjutan dari pembangunan periode sebelumnya dan tetap mengacu pada prinsip berkelanjutan dan berkeadilan, selaras dengan arah kebijakan RPJMN yang menekankan kesinambungan sebagai dasar pencapaian jangka panjang nasional.

d. Pembangunan Berbasis Nilai dan Identitas Kebangsaan

Visi RPJMD yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali selaras dengan visi nasional yang mengusung pembangunan berbasis nilai luhur bangsa, kearifan lokal, dan kebudayaan. Penguatan jati diri dan pelestarian budaya dalam pembangunan pariwisata Badung juga memperkuat kebinekaan sebagai kekuatan Indonesia di masa depan.

e. Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Nasional

Melalui pembangunan pariwisata berkualitas, Badung berkontribusi pada pencapaian indikator nasional seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi hijau dan biru, serta peningkatan daya saing daerah dalam konteks global.

Dengan demikian, visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025–2029 tidak hanya sejalan secara vertikal dengan visi pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah dalam mencapai tujuan besar Indonesia Emas 2045, melalui pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

3. Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 terhadap Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029, yaitu: “Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” memiliki keselarasan yang kuat dengan visi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025–2029, yaitu: “*Nangun Sat*

Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.”

Kedua visi tersebut didasarkan pada filosofi dan nilai yang sama, yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, secara sekala-niskala. Keselarasan ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

a. Kesamaan Landasan Filosofis dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Visi RPJMD Badung mengadopsi secara langsung nilai *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali, yang juga menjadi dasar dalam visi pembangunan Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Badung merupakan bagian integral dari komitmen bersama menjaga kelestarian alam, budaya, dan spiritualitas Bali dalam Era Baru.

b. Konsistensi Pola Pembangunan Semesta Berencana

Kabupaten Badung menerjemahkan pola pembangunan semesta berencana dalam visi provinsi ke dalam pendekatan pembangunan pariwisata yang terpadu, holistik, dan lintas sektor, dengan tetap menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

c. Penguatan Daya Saing Sektor Strategis Daerah

Fokus RPJMD Badung pada pembangunan pariwisata berkualitas merupakan bentuk kontribusi terhadap penguatan sektor unggulan Provinsi Bali yang berlandaskan kualitas, kearifan lokal, dan kemandirian ekonomi daerah. Ini selaras dengan arah pembangunan Bali Era Baru yang menekankan transformasi sektor pariwisata menuju lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

d. Harmonisasi Program dan Prioritas Pembangunan

Pembangunan Badung diarahkan untuk sejalan dengan prioritas Provinsi Bali, seperti penguatan budaya dan tradisi, pelestarian lingkungan hidup, pemajuan desa adat, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan adil.

e. Kontribusi Terhadap Transformasi Bali Era Baru

Dengan menjadikan pariwisata berkualitas sebagai titik tumpu, RPJMD Badung menjadi pendorong penting dalam mewujudkan Bali Era Baru yang ditandai oleh kemajuan teknologi, keberlanjutan ekologi, dan kekuatan identitas budaya, sebagaimana digariskan dalam RPJMD Provinsi Bali.

Dengan demikian, visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025–2029 sepenuhnya selaras dan menjadi bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Provinsi Bali. Keduanya membentuk sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan provinsi untuk mewujudkan Bali yang adil, makmur, dan lestari, berdasarkan filosofi kearifan lokal yang menyatu dengan dinamika zaman.

3.2. MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran operasional dari visi pembangunan daerah yang menjadi arah strategis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Jika visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah, maka misi menjadi langkah konkret yang harus ditempuh untuk mencapai visi tersebut.

Misi memiliki fungsi penting sebagai kerangka kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Setiap misi yang ditetapkan harus mencerminkan isu strategis yang dihadapi daerah, potensi unggulan yang dapat dikembangkan, serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung dijabarkan ke dalam 7 Misi atau ***Sapta Kriya Adi Cipta***. Adapun 7 misi tersebut adalah sebagai berikut:

- Misi 1.** Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali.
- Misi 2.** Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Misi 3.** Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Diseluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah.
- Misi 4.** Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian Dengan Pariwisata.
- Misi 5.** Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
- Misi 6.** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi.
- Misi 7.** Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas.

Sebagai bagian dari sebuah kesatuan sistem perencanaan dalam menciptakan kesinambungan pembangunan daerah Provinsi Bali dengan Kabupaten Badung, maka sudah seharusnya misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Keselarasan antara misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota harus mengacu dan menyelaraskan diri dengan dokumen perencanaan pembangunan provinsi.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah menetapkan visi besar pembangunan Bali, yaitu: “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”, yang diterjemahkan ke dalam misi pembangunan provinsi dalam berbagai bidang strategis seperti penguatan adat dan budaya Bali, pembangunan manusia unggul, transformasi ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan wilayah.

Misi pembangunan Kabupaten Badung sebagai bagian integral dari Provinsi Bali harus disusun secara harmonis dengan misi provinsi, agar arah pembangunan kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan Bali yang satu sistem. Dengan keselarasan ini, Kabupaten Badung dapat memastikan bahwa program dan kebijakan daerahnya turut memperkuat pencapaian target pembangunan provinsi, termasuk dalam hal pemajuan pariwisata berkualitas, penguatan ekonomi kreatif, perlindungan krama Bali, dan pelestarian nilai-nilai lokal berbasis *Sad Kerthi*.

Selain itu, keselarasan misi juga mempermudah koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, mendukung sinergi pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat, serta memastikan efektivitas pencapaian indikator pembangunan strategis di tingkat regional. Dalam konteks otonomi daerah yang tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselarasan ini mencerminkan prinsip pembangunan daerah yang “berdaulat secara lokal, tetapi terintegrasi secara nasional dan regional.”

Keselarasan misi ini terlihat dari keselarasan narasi antar misi (misi per misi). Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung harus dapat mendukung misi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali sehingga masing-masing misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung harus dapat selaras setidaknya dengan 1 misi dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali. Keselarasan misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dengan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 2

Keselarasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 terhadap Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
Misi 1. Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara <i>Niskala-Sakala</i> berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> , yaitu: <i>Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana</i>	▪ Misi 1 Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali. ▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
<i>Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.</i>	▪ Misi 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Diseluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah. ▪ Misi 4 Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian Dengan Pariwisata. ▪ Misi 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru. ▪ Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi. ▪ Misi 7 Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas.
Misi 2. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.</i>	▪ Misi 1 Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali.
Misi 3. Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.	▪ Misi 1 Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali.
Misi 4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 5. Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang

Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
(SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.	Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 6. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 7. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 8. Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk <i>Widyalyaya</i> dan <i>Pasraman</i> di Desa Adat.	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 9. Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 10. Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 11. Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan	▪ Misi 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang

Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
ketenagakerjaan Krama Bali	Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Misi 12. Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.	▪ Misi 4 Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian Dengan Pariwisata
Misi 13. Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.	▪ Misi 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Diseluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah.
Misi 14. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.	▪ Misi 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Diseluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah.
Misi 15. Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	▪ Misi 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Diseluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah.
Misi 16. Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.	▪ Misi 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Diseluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah. ▪ Misi 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan

Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
	Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
Misi 17. Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.	▪ Misi 7 Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas
Misi 18. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan	▪ Misi 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
Misi 19. Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	▪ Misi 7 Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas.
Misi 20. Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih	▪ Misi 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
Misi 21. Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.	▪ Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi.
Misi 22. Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.	▪ Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi.

Sumber: Hasil Penyelarasan Misi dalam Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 terhadap dokumen RPJMD SB Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Ketujuh misi tersebut di atas atau Sapta Kriya Adi Cipta ini sekaligus menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Badung selama 5 tahun ke depan. Sapta Kriya Adi Cipta ini tentu saja akan diwujudkan ke dalam program-program

prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung ini tentu harus selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali serta prioritas pembangunan nasional. Hal ini karena alasan strategis berikut:

1. Menjamin Keterpaduan dan Konsistensi Perencanaan Antar-Tingkat Pemerintahan
Penyelarasan ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dari pusat hingga daerah. Hal ini penting untuk:
 - Menghindari tumpang tindih program dan kebijakan,
 - Menjaga efisiensi penggunaan sumber daya,
 - Menjamin arah pembangunan yang konsisten dan saling mendukung.
2. Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Program Lintas Wilayah dan Sektor
Banyak isu pembangunan seperti kemiskinan, ketahanan pangan, perubahan iklim, konektivitas, dan pariwisata bersifat lintas batas administratif. Dengan selarasnya prioritas, program-program strategis dapat dilaksanakan secara kolaboratif antar kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
3. Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Nasional dan Daerah
Kabupaten Badung sebagai bagian dari Provinsi Bali dan Indonesia secara keseluruhan memiliki kontribusi terhadap pencapaian:
 - Indikator makro pembangunan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, ketahanan lingkungan, dan transformasi digital,
 - Tujuan RPJPD Provinsi Bali, yang mengarah pada Bali Era Baru yang harmonis, maju, dan lestari,
 - Cita-cita Indonesia Emas 2045, yang menempatkan daerah sebagai penggerak utama pembangunan nasional.
4. Menjadi Dasar Sinkronisasi Anggaran dan Akses Dukungan Pusat/Provinsi
Keselarasan menjadi prasyarat penting bagi:
 - Kemudahan membangun kerja sama atau dukungan lintas sektor dan kementerian,
 - Peningkatan peluang pembiayaan alternatif seperti KPBU dan program strategis nasional (PSN).
5. Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Pembangunan
Dengan menjadikan prioritas provinsi dan nasional sebagai acuan, Pemerintah Kabupaten Badung dapat menunjukkan bahwa pembangunan daerah:
 - Dilaksanakan dalam kerangka kebijakan yang utuh dan bertanggung jawab,
 - Mendukung komitmen nasional seperti SDGs, transisi energi, dan transformasi digital,
 - Berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Badung dengan Provinsi Bali dan pemerintah pusat bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan strategi pembangunan yang cerdas, sinergis, dan berdampak luas, agar daerah dapat tumbuh selaras, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Bali dan Indonesia.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 3

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
▪ Prioritas 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	▪ Prioritas 1 Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali.
▪ Prioritas 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	▪ Prioritas 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Di Seluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah. ▪ Prioritas 4 Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian Dengan Pariwisata. ▪ Prioritas 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
▪ Prioritas 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	▪ Prioritas 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
▪ Prioritas 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	▪ Prioritas 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.	
▪ Prioritas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	▪ Prioritas 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Di Seluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah.
▪ Prioritas 6. Membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	▪ Prioritas 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Di Seluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah. ▪ Prioritas 4 Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian Dengan Pariwisata.
▪ Prioritas 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	▪ Prioritas 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi.
▪ Prioritas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	▪ Prioritas 1 Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali. ▪ Prioritas 7 Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas.

Sumber: *Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung terhadap Prioritas Pembangunan Nasional*

Tabel 3. 4

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
▪ Bidang Prioritas 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.	▪ Prioritas 1 Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali.

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2029
▪ Bidang Prioritas 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	▪ Prioritas 2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
▪ Bidang Prioritas 3 Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	▪ Prioritas 3 Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Di Seluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah. ▪ Prioritas 4 Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian Dengan Pariwisata.
▪ Bidang Prioritas 4 Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi	▪ Prioritas 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
▪ Bidang Prioritas 5 Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.	▪ Prioritas 7 Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas.
▪ Bidang Prioritas 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.	▪ Prioritas 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi.

Sumber: *Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali*

3.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2029

Tujuan pembangunan adalah rumusan umum mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan ini berfungsi sebagai jembatan antara misi dengan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah menjadi lebih konkret dan terarah. Tujuan pembangunan jangka menengah memiliki beberapa karakteristik utama:

- Menjabarkan misi pembangunan dalam bentuk capaian strategis yang lebih operasional dalam berbagai sektor pembangunan.
- Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah.
- Menunjukkan hasil antara yang ingin dicapai dalam lima tahun, sebelum visi pembangunan sepenuhnya diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, tujuan pembangunan memberikan arah yang lebih spesifik dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat lebih fokus dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Sasaran pembangunan jangka menengah adalah rumusan mengenai hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang mencerminkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap tujuan pembangunan memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi secara objektif.

Sasaran pembangunan memiliki beberapa fungsi penting:

- Menentukan capaian konkret dari setiap tujuan pembangunan, sehingga kemajuan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang jelas.
- Menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, agar seluruh instansi pemerintah daerah dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai target pembangunan.
- Memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, dengan mengalokasikan sumber daya pada sasaran yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
- Memfasilitasi pengukuran kinerja pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana program pembangunan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian, sasaran pembangunan memberikan kepastian bahwa tujuan pembangunan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Sasaran yang dirumuskan dengan baik akan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam **Tabel 3.5** berikut.

Tabel 3. 5

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.										
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya.		Indeks Harmoni Indonesia	6,95	6,96	6,98	7,00	7,02	7,03	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
		Sasaran 1 : Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80	96,85	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
		Sasaran 2 : Menguatnya Pelestarian Terhadap Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung	n/a	68,00	71,00	74,00	77,00	81,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Badung		Indeks Pembangunan Manusia	84,03	84,11	84,19	84,27	84,35	84,43	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Secara Inklusif dan Berdaya Saing	Indeks Pendidikan	0,6701	0,6706	0,6711	0,6716	0,6721	0,6830	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
		Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,92	75,93	75,95	75,97	75,99	76,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.										
			Rasio Gini	0,2733	0,2700	0,2668	0,2636	0,2604	0,2570	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
		Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Badung berbasis Ekonomi Kerakyatan	Rasio Kewirausahaan	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Koperasi Aktif	89,51	90,46	90,53	90,60	90,70	90,78	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perindustrian
		Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
Misi 4 : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata	Tujuan 4 : Meningkatnya Daya Saing Pertanian Badung		Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	6,12	6,14	6,17	6,19	6,21	6,23	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pertanian
		Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan, Produktivitas dan Integrasi Sektor Pertanian dengan Sektor Pariwisata Secara Berkesinambungan	Indeks Ketahanan Pangan	90,89	91,34	91,79	92,24	92,64	93,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
			Nilai Tukar Petani	109,80	112,30	114,80	117,30	119,80	120,30	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
			Nilai Tukar Nelayan	106	107	108	109	110	111	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase Penyerapan Produk Pertanian pada sektor Pariwisata	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.										
			Persentase Penyerapan Produk Perikanan pada sektor Pariwisata	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	27,50	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan
Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru	Tujuan 5 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Publik		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
		Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Terpadu	Persentase Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik	96,24	96,71	97,23	97,72	98,31	98,72	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	91,681	93,601	95,063	96,715	98,365	100	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rasio Konektivitas Kabupaten	0,13	0,30	0,42	0,50	0,56	0,61	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perhubungan
Misi 6 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional berbasis kompetensi dan digitalisasi.	Tujuan 6 : Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Unsur Sekretariat Daerah)
			Indeks Akses Keuangan Daerah	4,81	4,83	4,86	4,89	4,91	4,93	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Unsur Sekretariat Daerah)
		Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	Indeks Profesionalitas ASN	82,10	82,60	83,00	83,50	84,10	84,80	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Unsur Kepegawaian)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.										
		Efektif, Efisien, dan Berintegritas	Indeks Sistem Merit	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Unsur Kepegawaian)
			Nilai AKIP	77,50	77,80	78,10	78,40	78,70	80,10	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Unsur Sekretariat Daerah)
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	- Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah) - Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.										
			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	81	82	83	85	85	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
			Indeks Inovasi Daerah	62,90	66,55	70,30	74,15	78,10	82,10	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)
			Derajat Desentralisasi Fiskal	78,39	80,36	82,35	84,34	86,35	88,35	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)
		Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas	Persentase Desa Mandiri	82,50	84,50	87,00	89,25	91,25	93,50	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Misi 7 : Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.	Tujuan 7 : Meningkatnya Kualitas Pariwisata		Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum dalam PDRB	26,02	26,42	26,92	27,52	28,22	29,02	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
		Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
			Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	20,83	23,61	26,38	29,16	31,94	34,72	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,70	70,87	71,04	71,22	71,39	71,56	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.										
		serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Sasaran 3 : Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Keterangan: *Target menggunakan target tahun sebelumnya

Sumber: Pemetaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

3.4. STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKAN MENENGAH

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah terencana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029. Strategi ini disusun untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan potensi serta tantangan yang dihadapi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi pembangunan daerah harus berorientasi pada hasil yang terukur, berbasis data dan permasalahan aktual, serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata utama di Bali memiliki tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah difokuskan pada pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip pariwisata hijau, berbasis budaya, serta inklusif terhadap masyarakat lokal.

Strategi pembangunan Kabupaten Badung 2025-2029 diformulasikan dengan mempertimbangkan beberapa pendekatan utama:

1. Penguatan Pariwisata Berkelanjutan

- Mengembangkan konsep pariwisata hijau (green tourism) dengan penerapan standar keberlanjutan pada destinasi wisata.
- Memperkuat branding Badung sebagai destinasi wisata berkualitas yang berbasis budaya dan keindahan alam.
- Mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi kreatif dan digitalisasi layanan pariwisata untuk meningkatkan daya saing global.

2. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pariwisata

- Mengembangkan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas wisatawan, termasuk jalan, transportasi publik, dan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan.
- Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana di kawasan wisata untuk memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Ekonomi Pariwisata

- Mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif dalam ekosistem pariwisata.
- Meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang hospitality, digital marketing, dan manajemen pariwisata.

4. Peningkatan Tata Kelola Pariwisata yang Berdaya Saing

- Mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung investasi di sektor pariwisata tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan.
- Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat dalam mengelola destinasi wisata.

Strategi pembangunan ini sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJMD Provinsi Bali, serta mengacu pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan penerapan strategi pembangunan yang tepat, diharapkan Kabupaten Badung dapat terus mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan dunia, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian budaya dan lingkungan.

Adapun Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dalam mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Tabel 3.6** berikut.

Tabel 3. 6

Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

TUJUAN	SASARAN	PENAHAPAN PEMBANGUNAN				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP (2030)
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya.	Sasaran 1: Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama.	- Melakukan pemetaan menyeluruh lembaga keagamaan di seluruh kecamatan, termasuk yang nonformal. - Mendorong pembentukan dan legalisasi forum kerukunan umat beragama (FKUB) hingga tingkat desa/kelurahan. - Menyusun data base program keagamaan, kebutuhan pembinaan, dan potensi konflik sosial berbasis kewilayahan. - Memberikan bantuan operasional dasar kepada lembaga keagamaan untuk mendorong peran mereka dalam pembinaan umat. - Penyusunan regulasi dan kebijakan afirmatif untuk kesejahteraan umat beragama. - Pemetaan kesejahteraan umat berbasis desa/kelurahan melalui pemutakhiran data sosial-ekonomi umat lintas agama. - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas forum kerukunan umat beragama (FKUB), tokoh agama, dan organisasi keagamaan sebagai mitra pembangunan sosial. - Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk umat yang tergolong kurang mampu sebagai langkah awal dukungan ekonomi religius.	- Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi tokoh dan pengurus lembaga keagamaan tentang moderasi beragama, digitalisasi layanan keagamaan, dan mediasi sosial. - Mendorong lembaga keagamaan aktif dalam kegiatan sosial lintas agama seperti donor darah, kebersihan lingkungan, dan tanggap bencana. - Menyusun program edukasi multikulturalisme di tempat ibadah dan sekolah berbasis kolaborasi antar agama. - Penguatan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas keagamaan. - Penyelenggaraan pasar murah hari raya berbasis komunitas lintas agama, untuk meringankan beban inklusif. - Dukungan sarana ibadah yang representatif dan inklusif. - Penyelenggaraan kegiatan sosial lintas iman	- Membangun kemitraan sistematis antara lembaga keagamaan dengan pemerintah, lembaga adat, dan sektor swasta untuk program pembinaan moral dan etika publik. - Memfasilitasi kegiatan bersama antar umat beragama: festival budaya rohani, dialog lintas agama, kampung kerukunan, dan beasiswa lintas iman. - Mendorong lembaga keagamaan menjadi penggerak utama dalam pencegahan intoleransi dan radikalisme berbasis komunitas. - Pendampingan lembaga keagamaan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, dan bantuan umat secara transparan dan produktif. - Integrasi program-program keagamaan ke dalam agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat. - Perluasan cakupan bantuan THR disertai sistem digitalisasi berbasis NIK dan bank daerah.	- Mendukung digitalisasi layanan lembaga keagamaan: administrasi, edukasi daring, dan sistem informasi manajemen kegiatan keagamaan. - Mengembangkan platform kolaboratif digital antar lembaga keagamaan (e-Forum Keagamaan). - Memberikan insentif bagi lembaga yang aktif dalam penguatan kehidupan beragama berbasis digital dan inovatif. - Pendirian Pusat Layanan Umat Terpadu di tiap kecamatan (layanan administrasi, konsultasi keluarga, bantuan sosial keagamaan). - Sinergi antara program pemerintah, CSR swasta, dan dana sosial keagamaan dalam mendukung keberlanjutan kesejahteraan umat.	- Mewujudkan model kelembagaan keagamaan yang berdaya, akuntabel, dan adaptif dalam membina kehidupan beragama secara inklusif. - Menjadikan Kabupaten Badung sebagai pusat praktik baik (best practice) kerukunan umat beragama melalui kerja sama nasional dan internasional. - Menyusun kebijakan afirmatif bagi keberlanjutan dukungan fiskal, kelembagaan, dan kolaboratif terhadap peran strategis lembaga keagamaan. - Penguatan kebijakan fiskal daerah untuk keberlanjutan program kesejahteraan umat (alokasi rutin dan indikator kinerja dalam RKPD). - Replikasi inovasi kesejahteraan umat dari desa/kelurahan terbaik ke seluruh wilayah Badung. - Evaluasi menyeluruh atas dampak sosial-ekonomi dan spiritual dari intervensi pemerintah dalam kehidupan beragama.

	Sasaran 2: Menguatnya Pelestarian Terhadap Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	- Melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap warisan budaya tradisional Badung (seni, adat, tarian, upacara, kuliner, arsitektur, lontar, dll). - Pengembangan portal data budaya Badung berbasis teknologi informasi sebagai bank data pelestarian budaya. - Digitalisasi naskah kuno/lontar dan dokumentasi budaya dalam bentuk video, foto, dan audio. - Menyusun regulasi daerah tentang perlindungan budaya lokal berbasis teknologi	- Penyusunan standar pelestarian budaya digital (metadata, format digital, aksesibilitas, hak cipta budaya). - Pengembangan aplikasi edukatif budaya lokal bagi pelajar dan masyarakat (Bahasa Bali, tradisi, tarian, dll). - Pelatihan SDM budaya dan komunitas lokal terkait penggunaan teknologi informasi dalam pelestarian budaya. - Penerapan sistem informasi manajemen warisan budaya pada Dinas Kebudayaan dan desa adat.	- Kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan pengembang teknologi untuk pengembangan konten budaya digital. - Peluncuran platform promosi budaya digital Badung (website interaktif, media sosial resmi, museum virtual). - Pemanfaatan teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) untuk menampilkan situs budaya dan atraksi tradisional. - Festival budaya digital Badung untuk memperkuat daya tarik budaya kepada wisatawan dan generasi muda.	- Pemberdayaan pelaku seni dan budaya lokal dalam menghasilkan produk digital kreatif (NFT budaya, e-book lontar, merchandise digital). - Integrasi promosi budaya digital dalam strategi pariwisata Badung (QR Code di lokasi budaya, paket wisata edukatif berbasis TIK). - Kemitraan dengan pelaku industri kreatif untuk monetisasi konten budaya secara berkelanjutan (platform streaming lokal, konten edukasi daring). - Perlindungan HAKI atas produk budaya dan konten digital untuk mencegah eksploitasi tanpa izin.	- Pembentukan Pusat Data dan Inovasi Budaya Digital Badung sebagai simpul koordinasi perlindungan warisan budaya dan teknologi. - Replikasi program digitalisasi budaya ke seluruh desa adat se-Kabupaten Badung. - Penilaian dan pemutakhiran kebijakan daerah sesuai dinamika teknologi dan tren budaya. - Evaluasi berkala serta publikasi Indeks Perlindungan Budaya Digital Badung.
Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Badung	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Secara Inklusif dan Berdaya Saing	- Mengakomodasi kelompok masyarakat rentan akses pendidikan berdasarkan data dan verifikasi instansi terkait. - Mengidentifikasi dan menutup celah pembiayaan pendidikan usia dini dan dasar melalui beasiswa. - Memberikan insentif pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu khususnya bagi siswa sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan. - Meningkatkan akses pendidikan ke jenjang tinggi dengan beasiswa khusus bagi warga Badung melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi (mendukung program 1 keluarga 1 sarjana Pemerintah Provinsi Bali)	- Membangun dan merevitalisasi sekolah di wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan memadai. - Menyediakan fasilitas transportasi pendidikan gratis atau bersubsidi bagi siswa. - Menyediakan subsidi pendidikan berbasis Hindu. - Pembangunan ruang kelas baru di wilayah dengan kepadatan murid tinggi. - Penguatan kurikulum berbasis budaya lokal (Hindu Bali) dan literasi karakter. - Pelatihan pedagogi modern untuk guru, termasuk metode pembelajaran berbasis proyek, digital, dan integratif. - Memberikan insentif pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu khususnya bagi siswa sekolah menengah pertama	- Mengembangkan platform digital pembelajaran berbasis lokal untuk mendukung pendidikan daring dan hybrid. - Mendorong kolaborasi antara sekolah formal dengan swasta. - Meningkatkan literasi digital siswa dan guru melalui pelatihan. - Implementasi sekolah unggul berbasis teknologi (smart school) di setiap kecamatan. - Penguatan program inklusif untuk penyandang disabilitas dan anak dari kelompok rentan. - Memberikan insentif pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu khususnya bagi siswa sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah	- Menyelaraskan data pendidikan dengan sistem kependudukan dan sosial untuk memastikan semua anak Badung terdaftar dan aktif di pendidikan. - Mendorong sekolah ramah anak dan ramah adat, termasuk ruang inklusi bagi siswa dengan kebutuhan khusus. - Memberikan insentif pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu khususnya bagi siswa sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikan ke	- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak intervensi akses pendidikan, dengan pelibatan semua pihak. - Menetapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan program bantuan pendidikan daerah. - Menginstitusikan kolaborasi antara pemerintah, dan swasta dalam pengelolaan pendidikan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal. - Memberikan insentif pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu khususnya bagi siswa sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikan

	▪ Pemetaan kualitas pendidikan tiap jenjang dan wilayah, meliputi mutu pengajaran, sarana, dan tenaga pendidik. ▪ Mendukung pengembangan sekolah rakyat ▪ Rekrutmen dan redistribusi guru berdasarkan kebutuhan riil, termasuk guru keagamaan Hindu dan guru inklusif. ▪ Insentif peningkatan kualifikasi guru. ▪ Pemanfaatan Banjar sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas. ▪ Pemetaan potensi dan kebutuhan pemuda dan cabang olahraga di setiap kecamatan. ▪ Penguatan forum kepemudaan dan organisasi olahraga berbasis desa dan sekolah. ▪ Penguatan sistem informasi kepemudaan dan data base atlet daerah.	▪ Meningkatkan akses pendidikan ke jenjang tinggi dengan beasiswa khusus bagi warga Badung melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi (mendukung program 1 keluarga 1 sarjana Pemerintah Provinsi Bali). ▪ Mendukung pengembangan sekolah rakyat ▪ Penguatan Tim fasilitator Daerah untuk akreditasi satuan pendidikan. ▪ Pemanfaatan Banjar sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas. ▪ Program pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi untuk pemuda. ▪ Fasilitasi kegiatan olahraga komunitas secara reguler di desa/banjar. ▪ Peningkatan kompetensi pelatih dan pembina olahraga di tingkat lokal.	▪ Meningkatkan akses pendidikan ke jenjang tinggi dengan beasiswa khusus bagi warga Badung melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi (mendukung program 1 keluarga 1 sarjana Pemerintah Provinsi Bali). ▪ Mendukung pengembangan sekolah rakyat ▪ Pengembangan sistem data mutu pendidikan terpadu berbasis dashboard digital. ▪ Pemanfaatan Banjar sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas. ▪ Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas olahraga terbuka dan tertutup di kecamatan. ▪ Penyelenggaraan Badung Youth Festival dan Pekan Olahraga Antar Sekolah/Kecamatan. ▪ Program beasiswa atlet berprestasi dan kader pemuda kreatif.	▪ Meningkatkan akses pendidikan ke jenjang tinggi dengan beasiswa khusus bagi warga Badung melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi (mendukung program 1 keluarga 1 sarjana Pemerintah Provinsi Bali). ▪ Mendukung pengembangan sekolah rakyat ▪ Fokus pengembangan pendidikan unggulan sesuai potensi wilayah. ▪ Pelibatan aktif tokoh masyarakat dan swasta dalam pembinaan mutu satuan pendidikan. ▪ Standardisasi sarana pendidikan berwawasan lingkungan dan budaya Bali. ▪ Pemanfaatan Banjar sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas. ▪ Integrasi nilai-nilai lokal (adat, budaya) dalam pembinaan karakter pemuda. ▪ Inovasi pelatihan olahraga dan kepemudaan berbasis platform digital. ▪ Kolaborasi dengan dunia usaha dalam sponsorship kegiatan pemuda dan olahraga.	▪ Meningkatkan akses pendidikan ke jenjang tinggi dengan beasiswa khusus bagi warga Badung melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi (mendukung program 1 keluarga 1 sarjana Pemerintah Provinsi Bali). ▪ Mendukung pengembangan sekolah rakyat ▪ Evaluasi komprehensif hasil peningkatan mutu pendidikan, dengan indikator ketercapaian pemerataan kualitas. ▪ Replikasi model sekolah unggul dan sekolah komunitas adat ke seluruh kecamatan. ▪ Pelembagaan kemitraan multipihak (pemerintah-swasta-sekolah-masyarakat) dalam pengelolaan pendidikan daerah. ▪ Penetapan target NEM (Nilai Evaluasi Mutu) dan APK/APS jenjang pendidikan yang berstandar nasional. ▪ Pemanfaatan Banjar sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas. ▪ Penguatan sistem pembinaan atlet daerah menuju PON dan event nasional. ▪ Dukungan terhadap pemuda dalam peran sosial, advokasi, dan kewirausahaan sosial. ▪ Penguatan regulasi daerah tentang perlindungan, pemberdayaan, dan partisipasi pemuda serta olahraga inklusif.
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	▪ Melakukan verifikasi dan validasi data penduduk belum terjamin kesehatannya secara digital melalui integrasi data Dinas Kesehatan dan Disdukcapil. ▪ Menjamin keikutsertaan seluruh masyarakat miskin dan	▪ Mendorong warga pekerja sektor informal, pelaku UMKM dan wiraswasta untuk mendaftar mandiri dalam skema JKN melalui subsidi parsial. ▪ Pengembangan sistem auto-enrollment bagi bayi baru	▪ Integrasi layanan primer dan rujukan dengan sistem jaminan kesehatan, memastikan semua peserta mendapatkan layanan bermutu tanpa hambatan administrasi.	▪ Perluasan manfaat jaminan kesehatan untuk kelompok khusus: lansia, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis dan kesehatan jiwa.	▪ Capaian 100% kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif, terdaftar dan mendapat manfaat. ▪ Pelembagaan mekanisme pengaduan dan transparansi layanan

		rentan melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) daerah. - Revitalisasi kemitraan dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan manfaat dan percepatan kepesertaan. - Penyusunan Peraturan Daerah tentang Universal Health Coverage (UHC) sebagai landasan hukum perluasan jaminan kesehatan. - Melakukan pemetaan wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan primer dan rujukan. - Meningkatkan cakupan pelayanan dasar melalui revitalisasi Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, khususnya di wilayah padat. - Menambah tenaga kesehatan berbasis wilayah, dengan prioritas bidan, perawat, dokter umum, dan penyuluh gizi. - Penguatan layanan kesehatan berbasis desa adat dan integrasi dengan program kesehatan tradisional Hindu Bali. - Pemetaan status gizi masyarakat secara menyeluruh melalui survei dan integrasi data elektronik Puskesmas (e-PPGBM, e-SDGs Desa). - Pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi seimbang berbasis pangan lokal untuk balita dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik). - Peningkatan edukasi gizi keluarga melalui kader Posyandu, PKK, dan perangkat desa berbasis budaya lokal dan bahasa daerah. - Mendorong konsumsi pangan lokal bergizi (umbi, sayur, lauk nabati/hewani) melalui program "Gemar Makan Sehat Badung". - Revitalisasi Posyandu menjadi pusat edukasi gizi keluarga dengan fasilitas dan SDM yang ditingkatkan. - Mendukung program nasional makan bergizi gratis yang menyasar siswa sekolah	lahir dan penduduk migrasi baru. - Peningkatan alokasi pembiayaan APBD secara bertahap untuk mendukung JKN daerah dan menjaga keberlanjutan PBI Daerah. - Monitoring bulanan cakupan kepesertaan per desa dan kecamatan sebagai bagian dari sistem kinerja. - Pembangunan klinik pratama/Puskesmas 24 jam di kecamatan dengan beban layanan tinggi. - Digitalisasi sistem pendaftaran dan antrian layanan kesehatan untuk memudahkan akses masyarakat. - Pengembangan layanan jemput bola (mobile clinic) untuk lansia, disabilitas, dan masyarakat rentan. - Integrasi sistem rekam medis elektronik berbasis NIK di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah. - Pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi seimbang berbasis pangan lokal untuk balita dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik). - Penguatan layanan gizi berbasis Puskesmas untuk deteksi dini dan tatalaksana gizi buruk dan kurang gizi. - Pengembangan kawasan bebas stunting dan rawan gizi sebagai model pilot. - Pelibatan desa adat dan banjar dalam kampanye "desa gizi seimbang". - Mendukung program nasional makan bergizi gratis yang menyasar siswa sekolah	- Meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan mitra BPJS khususnya di kawasan wisata, pinggir dan daerah pertumbuhan baru. - Penyesuaian skema manfaat lokal untuk layanan promotif dan preventif yang belum dilayani oleh JKN. - Penguatan advokasi dan literasi jaminan kesehatan masyarakat hingga level banjar adat dan desa adat. - Peningkatan kapasitas SDM kesehatan spesialis dan subspesialis, termasuk pemberian beasiswa kedokteran bagi putra daerah. - Pengembangan dan standarisasi layanan rujukan kabupaten (RSUD Badung sebagai pusat rujukan modern). - Penyediaan fasilitas layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi adiksi terpadu. - Implementasi indikator mutu layanan berbasis kinerja dan kepuasan pasien. - Pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi seimbang berbasis pangan lokal untuk balita dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik). - Penguatan kemandirian pangan keluarga melalui pekarangan pangan lestari (P2L), urban farming, dan edukasi konsumsi gizi seimbang. - Integrasi program gizi dengan intervensi lintas sektor (pendidikan, sosial, pertanian). - Mendorong konsumsi pangan fungsional khas Bali (jamu, usadha, olahan herbal) sebagai bagian dari pola makan sehat. - Penguatan logistik dan rantai distribusi makanan bergizi ke wilayah pinggir, wisata, dan urban padat. - Mendukung program nasional makan bergizi gratis yang menyasar siswa sekolah	- Pengembangan skema jaminan lokal untuk layanan tradisional Bali (Usadha), rehabilitasi adiksi dan layanan berbasis komunitas. - Penguatan layanan telemedicine dan skrining digital yang terintegrasi dengan skema jaminan kesehatan. - Evaluasi dan revisi regulasi daerah untuk memastikan jaminan kesehatan yang inklusif, adil dan responsif. - Pengembangan layanan kesehatan berbasis aplikasi dan telemedicine untuk memudahkan masyarakat menjangkau dokter spesialis. - Pembangunan pusat layanan kesehatan ibu dan anak dengan pendekatan holistik di setiap kecamatan. - Implementasi program "Satu Keluarga, Satu Kartu Kesehatan Digital" untuk mengintegrasikan data dan layanan. - Penguatan layanan kesehatan bagi kelompok disabilitas, lansia, dan korban kekerasan melalui jejaring layanan terpadu. - Pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi seimbang berbasis pangan lokal untuk balita dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik). - Pengembangan dashboard digital gizi masyarakat untuk memantau status gizi lintas usia dan wilayah.	dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. - Penguatan kemitraan dengan swasta, klinik, dan organisasi sosial untuk mendukung jaminan kesehatan lintas sektor. - Pelaporan dan pengawasan berbasis digital - Evaluasi total pencapaian akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk capaian UHC (Universal Health Coverage). - Pelemagaan standar minimum pelayanan kesehatan prima di setiap jejaring layanan, termasuk klinik swasta bermitra. - Penguatan kolaborasi desa adat-masyarakat-fasilitas kesehatan dalam program promotif dan preventif. - Finalisasi regulasi dan sistem pembiayaan daerah untuk menjamin keberlanjutan akses kesehatan gratis/terjangkau bagi seluruh masyarakat. - Pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi seimbang berbasis pangan lokal untuk balita dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik). - Implementasi penuh Desa Gizi Mandiri dan Inklusif sebagai model pemberdayaan gizi komunitas. - Evaluasi dan replikasi praktik terbaik peningkatan gizi dalam kebijakan pembangunan daerah. - Pelibatan BUMDes, UMKM dan pelaku industri lokal dalam produksi dan distribusi makanan sehat yang terjangkau dan berkelanjutan. - Mendukung program nasional makan bergizi gratis yang menyasar siswa sekolah

					▪ Peningkatan gizi remaja dan lansia melalui kolaborasi sekolah, desa, dan lembaga sosial. ▪ Mendorong keterlibatan komunitas keagamaan dan organisasi perempuan/pemuda dalam kampanye hidup sehat dan sadar gizi. ▪ Penyesuaian menu sekolah dan bantuan sosial agar berbasis gizi seimbang. ▪ Mendukung program nasional makan bergizi gratis yang menyasar siswa sekolah	
	Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja	▪ Memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. ▪ Menyusun profil kebutuhan dasar rumah tangga rentan: pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi.	▪ Penambahan jumlah dan cakupan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan daerah. ▪ Pengembangan dapur sehat komunitas untuk pemberian makanan bergizi bagi balita dan lansia miskin. ▪ Pemberian bantuan sewa atau rehabilitasi rumah tidak layak huni. ▪ Implementasi pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha sesuai dengan potensi lokal (pariwisata, UMKM, pertanian, digital). ▪ Akses permodalan mikro dan koperasi diperluas untuk sektor informal dan keluarga rentan. ▪ Peningkatan sinergi antara BUMDes dan UMKM lokal, terutama pada sektor produksi dan jasa. ▪ Dukungan subsidi bahan baku produksi rumah tangga untuk mendorong efisiensi dan daya saing usaha kecil.	▪ Subsidi biaya transportasi sekolah atau kerja untuk keluarga miskin di wilayah pinggiran. ▪ Penyediaan air bersih dan sanitasi layak bagi rumah tangga miskin melalui skema kolaboratif desa-adat-pemda. ▪ Peningkatan layanan Posyandu dan kesehatan keliling di daerah terpencil. ▪ Penguatan program perlindungan perempuan dan anak dengan bantuan spesifik untuk ibu hamil dan menyusui. ▪ Pengembangan pasar desa dan pusat distribusi komunitas berbasis digital yang dikelola koperasi lokal. ▪ Penguatan ekonomi digital berbasis desa adat dan kelompok perempuan/pemuda (e-commerce lokal, marketplace adat). ▪ Penyaluran bantuan usaha berkelanjutan (hibah produktif) kepada usaha kecil yang telah menunjukkan kinerja usaha. ▪ Integrasi program penanggulangan kemiskinan dan inklusivitas masyarakat disabilitas, lansia dan kelompok minoritas	▪ Penerapan skema bantuan biaya energi (listrik dan LPG) untuk rumah tangga miskin dan lansia tunggal. ▪ Penguatan program beasiswa penuh hingga jenjang pendidikan tinggi vokasional untuk siswa miskin berprestasi. ▪ Peningkatan cakupan bantuan penyandang disabilitas dan lansia terlantar melalui jaminan layanan dasar yang lebih kuat. ▪ Penyediaan layanan bantuan hukum dan konsultasi gratis bagi masyarakat miskin dalam masalah hukum dan sosial. ▪ Diversifikasi sumber pendapatan masyarakat melalui pengembangan agrowisata, homestay, kriya, jasa online, dan pertanian sehat. ▪ Penyusunan dan implementasi	▪ Evaluasi sistem bantuan sosial dan intervensi pengeluaran rumah tangga: ketepatan, efektivitas, dan keberlanjutan. ▪ Integrasi program pengurangan beban pengeluaran dengan strategi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. ▪ Pembentukan Forum Kesejahteraan Terpadu di tingkat desa dan kecamatan untuk menjamin kesinambungan bantuan berbasis komunitas. ▪ Penyesuaian skema jaminan perlindungan sosial adaptif terhadap risiko bencana, ekonomi, dan perubahan iklim. ▪ Evaluasi capaian indikator rasio gini daerah, pendapatan rumah tangga, dan ketimpangan antar wilayah. ▪ Replikasi model pemberdayaan ekonomi masyarakat sukses ke seluruh kecamatan di Badung. ▪ Implementasi sistem jaminan penghasilan dasar minimum melalui skema sosial produktif

					insentif fiskal daerah untuk pelaku usaha mikro dan informal (misalnya insentif pajak dan retribusi ringan). ▪ Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan CSR dalam peningkatan ekonomi rumah tangga. ▪ Penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis banjar yang terintegrasi dengan lembaga adat.	untuk kelompok sangat rentan. ▪ Penguatan sistem monitoring keadilan ekonomi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan ekonomi daerah.
		▪ Melakukan pendataan sektor informal dan potensi lapangan kerja lokal, termasuk potensi berbasis desa adat. ▪ Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja sektoral dan wilayah (<i>job mapping</i>). ▪ Penguatan lembaga pelatihan kerja milik daerah (BLK) berbasis kompetensi lokal. ▪ Peningkatan literasi kerja digital dan pengenalan kewirausahaan mandiri untuk generasi muda. ▪ Menyediakan dan meningkatkan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ▪ Penyusunan dan pemutakhiran data tenaga kerja rentan dan informal di Kabupaten Badung. ▪ Penguatan kelembagaan dan sinergi antara lembaga pengawas ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan organisasi pekerja. ▪ Sosialisasi intensif tentang hak-hak normatif pekerja, norma K3, dan jaminan sosial tenaga kerja, termasuk kepada sektor informal dan UMKM.	▪ Implementasi program pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi dan kebutuhan dunia usaha. ▪ Fasilitasi sertifikasi profesi dan pelatihan berbasis industri bagi pencari kerja. ▪ Mendorong kerja sama dengan sektor swasta, BUMN, dan industri pariwisata untuk penyerapan tenaga kerja. ▪ Penguatan pendampingan kerja dan magang sebagai jembatan transisi pendidikan-ke-kerja. ▪ Menyediakan dan meningkatkan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ▪ Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal dan pekerja rentan (buruh harian, pekerja seni, petani, nelayan). ▪ Pembentukan pusat layanan pengaduan ketenagakerjaan berbasis digital dan desa. ▪ Fasilitasi sosialisasi regulasi perlindungan pekerja perempuan dan anak	▪ Pengembangan inkubator wirausaha pemula untuk mendorong penciptaan lapangan kerja mandiri. ▪ Penyediaan akses pembiayaan dan pendampingan bisnis bagi pelaku usaha baru dan kelompok rentan. ▪ Penataan kawasan ekonomi lokal dan padat karya untuk menyerap tenaga kerja setempat. ▪ Menyediakan dan meningkatkan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ▪ Pelaksanaan audit kepatuhan norma kerja dan K3 secara rutin di sektor industri, pariwisata, dan UMKM. ▪ Penegakan hukum bagi pelanggaran ketenagakerjaan melalui pembinaan, mediasi, atau sanksi administratif. ▪ Fasilitasi sertifikasi perusahaan layak kerja dan ramah pekerja (<i>decent work company program</i>).	▪ Optimalisasi sistem informasi pasar kerja terpadu berbasis digital. ▪ Meningkatkan kapasitas layanan penempatan kerja daerah dan penguatan Balai Latihan Kerja. ▪ Promosi program padat karya di sektor strategis (pertanian, pariwisata, infrastruktur desa). ▪ Meningkatkan peluang kerja sektor hijau dan ekonomi sirkular berbasis potensi desa adat. ▪ Menyediakan dan meningkatkan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ▪ Penguatan mekanisme hubungan industrial melalui pembinaan LKS Bipartit dan Tripartit. ▪ Penyediaan fasilitas layanan kesehatan kerja, ruang laktasi, dan keselamatan kerja standar di tempat kerja.	▪ Penguatan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan berbasis hak dan kesetaraan. ▪ Pembangunan pusat layanan ketenagakerjaan terpadu di tingkat kabupaten. ▪ Integrasi antara pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan dunia industri untuk menjaga keberlanjutan. ▪ Mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan daerah yang tangguh, adaptif, dan produktif di semua sektor. ▪ Menyediakan dan meningkatkan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ▪ Optimalisasi <i>dashboard</i> digital pengawasan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja di tingkat kabupaten. ▪ Integrasi layanan ketenagakerjaan dan jaminan sosial dalam pelayanan publik terpadu. ▪ Evaluasi menyeluruh dan penyusunan <i>roadmap</i> perlindungan tenaga kerja 2031-2035 berdasarkan pembelajaran lima tahun sebelumnya.

					Penguatan peran serikat pekerja dan lembaga advokasi tenaga kerja dalam mendorong dialog sosial.	
	Sasaran 4: Terbangunnya Keluarga yang Berkualitas	- Penyusunan <i>roadmap</i> Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Badung dengan integrasi ke dalam dokumen perencanaan. - Penguatan kelembagaan PUG dan <i>focal point</i> di seluruh OPD, serta penetapan struktur dan peran gugus tugas gender. - Pelatihan dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perencanaan dan pengambil kebijakan.	- Pelaksanaan kampanye kesetaraan gender dan hak anak di sekolah, banjar, dan komunitas berbasis adat. - Mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga desa adat, lembaga kemasyarakatan dan pengambilan keputusan publik. - Penguatan layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak, termasuk penyediaan rumah aman sementara.	- Implementasi <i>gender analysis pathway</i> (GAP) dan integrasi isu perempuan-anak dalam minimal 70% program prioritas OPD. - Pelaksanaan audit gender sektoral pada layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. - Penguatan program kewirausahaan perempuan berbasis keluarga dan komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.	- Penerapan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebagai basis data perencanaan dan evaluasi berbasis bukti. - Pengembangan desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) di setiap kecamatan. - Peningkatan kualitas layanan aduan dan pemulihan korban kekerasan berbasis teknologi dan berbasis budaya lokal.	- Evaluasi menyeluruh dan penguatan indikator capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan IGA Kabupaten Badung. - Replikasi praktik baik pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ke seluruh desa adat dan desa dinas. - Integrasi perencanaan pembangunan yang adil gender dan berpihak pada anak ke dalam RPJMD dan RENSTRA OPD periode selanjutnya.
		- Pendataan keluarga secara menyeluruh berbasis <i>by name by address</i> melalui sistem digital terpadu. - Sosialisasi fungsi-fungsi keluarga (agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan). - Penguatan kapasitas kader keluarga melalui pelatihan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Keluarga.	- Peningkatan akses keluarga terhadap jaminan sosial dan layanan kesehatan dasar. - Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan UMKM berbasis rumah tangga dan koperasi keluarga. - Subsidi atau insentif untuk keluarga rentan (<i>single parent</i>, disabilitas, lansia dalam keluarga).	- Edukasi pengasuhan positif dan penguatan peran ayah dan ibu dalam tumbuh kembang anak. - Integrasi program PAUD, BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Remaja), BKL (Lansia). - Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan berbasis keluarga.	- Sinergi dengan desa adat, banjar, dan tokoh masyarakat dalam membangun keluarga harmonis. - Pengembangan sistem pembinaan keluarga berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Hindu Bali. - Kampanye keluarga tangguh dan penghargaan bagi keluarga inspiratif.	- Pengembangan aplikasi layanan keluarga terintegrasi dengan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. - Monitoring dan evaluasi indikator ketahanan dan kualitas keluarga. - Replikasi praktik baik ke seluruh desa/kelurahan di Badung.
		- Pendataan anak rentan dan anak memerlukan perlindungan khusus (<i>by name by address</i>). - Evaluasi dan penguatan regulasi daerah tentang perlindungan anak. - Penguatan fungsi kelembagaan PUSPAGA, PATBM, dan Satgas Perlindungan Anak.	- Edukasi pola asuh positif dan pengasuhan berbasis hak anak. - Pelatihan bagi kader desa/banjar, guru, tokoh agama/adat tentang perlindungan anak. - Sosialisasi dan promosi pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan, keluarga, dan komunitas.	- Penguatan layanan rehabilitasi sosial dan layanan hukum bagi anak korban kekerasan. - Pengembangan layanan pengaduan <i>online</i> dan <i>call center</i> perlindungan anak. - Integrasi layanan pendidikan, kesehatan, dan kependudukan berbasis anak.	- Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) di seluruh kecamatan. - Penataan ruang publik, sekolah, dan fasilitas umum yang ramah anak. - Pelibatan anak dalam forum anak desa, musrenbang anak, dan pengambilan kebijakan.	- Replikasi praktik baik ke seluruh desa adat dan banjar. - Kampanye budaya <i>semeton nyaga anak</i> (komunitas menjaga anak). - Pemberian penghargaan kepada komunitas atau tokoh pelindung anak di masyarakat.

Tujuan 3: Terwujudnya Ekonomi Badung yang Tangguh, Adil, dan Merata	Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Badung Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan	- Menyusun <i>database</i> UMKM dan koperasi berbasis sektor, wilayah, dan legalitas usaha. - Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang memiliki izin usaha, NIB, dan sertifikat halal. - Menyediakan pelatihan dasar manajemen usaha, literasi keuangan, dan digitalisasi usaha. - Memberikan pelatihan dan pendampingan dengan prioritas koperasi yang baru dibentuk. - Melakukan pemetaan potensi wirausaha lokal per kecamatan, terutama sektor berbasis budaya lokal, pertanian, ekonomi digital, dan pariwisata. - Menyusun Masterplan Ekosistem Kewirausahaan Badung. - Membentuk forum kolaborasi multi-pihak (pemerintah-swasta-komunitas-pendidikan) untuk mendorong tumbuhnya jejaring kewirausahaan. - Mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Menyediakan skema pembiayaan mikro dan ultra mikro dengan bunga rendah atau tanpa bunga melalui kemitraan BUMD. - Memperluas inkubasi digital untuk UMKM dan fasilitasi masuk ke platform <i>e-commerce</i>. - Peningkatan peran koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor riil sebagai motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan. - Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola koperasi dan UMKM. - Melaksanakan pelatihan kewirausahaan tematik: digitalpreneur, agrowirausaha, ekowisata, dan industri kreatif. - Mendirikan/meningkatkan kapasitas Pusat Inkubasi Bisnis Daerah (PIBD) dan <i>co-working space</i> kewirausahaan di wilayah strategis. - Menjalin kemitraan dengan universitas, startup nasional, dan investor lokal untuk pengembangan modal sosial kewirausahaan. - Mendorong Badung menjadi tuan rumah ajang kewirausahaan daerah seperti "Badung <i>Start-Up Fest</i>" atau "<i>Youthpreneur Summit</i>". - Mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Mendorong diversifikasi produk lokal berbasis budaya dan potensi wilayah. - Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif dan produk ramah lingkungan. - Fasilitasi promosi dan pemasaran bersama melalui <i>event</i> ekonomi kreatif dan pasar UMKM rutin. - Penguatan kemitraan koperasi dan UMKM dengan koperasi lain, pelaku usaha besar, hotel, dan desa wisata. - Penguatan akses pembiayaan wirausaha melalui kolaborasi dengan BUMD, koperasi, dan platform pembiayaan digital. - Peluncuran program "Wirausaha Digital Desa" berbasis <i>marketplace</i>, <i>e-payment</i>, dan promosi digital. - Penumbuhan wirausaha berbasis teknologi ramah lingkungan (<i>green business</i>) dan berbasis inovasi sosial. - Pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan perkembangan UMKM-wirausaha secara digital dan terintegrasi - Pengembangan program inkubasi dasar wirausaha pemula. - Mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Mendorong transformasi UMKM dari skala rumah tangga ke skala industri kecil. - Mendorong lebih banyak koperasi bertransformasi menuju Digitalisasi Koperasi - Fasilitasi pengurusan sertifikasi standar mutu produk (SNI, PIRT, HACCP, dll). - Pembentukan rumah kemas dan pusat logistik koperasi untuk memperkuat rantai pasok. - Fasilitasi kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan sektor swasta (hotel, restoran, distributor, ekspor). - Penguatan ekosistem logistik dan rantai pasok untuk produk wirausaha lokal. - Inovasi dalam skema insentif bagi pelaku usaha yang berhasil membuka lapangan kerja lokal dan melakukan ekspansi usaha lintas desa/kecamatan. - Penataan kawasan <i>entrepreneur hub</i> untuk kolaborasi pelaku wirausaha lintas sektor di wilayah perkotaan dan desa wisata. - Mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Menyasar pasar ekspor melalui fasilitasi pelatihan ekspor dan misi dagang luar negeri. - Rebranding koperasi sebagai entitas bisnis profesional yang modern, inklusif, dan transparan. - Membangun pusat inovasi UMKM dan koperasi (<i>co-working space</i>, lab desain, teknologi tepat guna). - Mewujudkan UMKM tangguh yang berdaya saing global dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. - Penguatan kelembagaan pengelola ekosistem kewirausahaan agar mandiri dan berkelanjutan. - Penyusunan kebijakan daerah yang mendukung keberlanjutan kewirausahaan lokal berbasis riset dan evaluasi capaian. - Replikasi dan perluasan model sukses pengembangan wirausaha ke wilayah baru dan sektor non-tradisional. - Integrasi sistem kewirausahaan daerah ke dalam ekosistem ekonomi digital nasional. - Mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Mendukung pengendalian inflasi daerah
		Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem

		- Pemetaan komoditas unggulan pertanian dan perikanan lokal yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku industri pengolahan. - Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani, nelayan, serta pelaku UMKM sektor agro-maritim. - Penyusunan rencana induk pengembangan industri olahan berbasis kawasan, terintegrasi dengan wilayah desa adat dan desa wisata. - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha tani dan nelayan tentang <i>food processing</i>, pengemasan, dan standar mutu. - Pembangunan dan revitalisasi sentra produksi olahan berbasis pertanian dan perikanan, termasuk <i>cold storage</i>, <i>packing house</i>, dan rumah produksi bersama. - Fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, dan SNI untuk produk olahan lokal. - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Insentif dan dukungan inovasi teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil tani dan perikanan. - Kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk riset terapan produk olahan lokal. - Fasilitasi pembentukan <i>branding</i> dan <i>storytelling</i> produk berbasis budaya dan kearifan lokal. - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Pengembangan platform pemasaran digital dan etalase daring bagi produk olahan hasil pertanian dan perikanan. - Kerjasama pemasaran dengan hotel, restoran, dan pasar modern di wilayah Badung dan Bali pada umumnya (skema <i>local content</i>). - Promosi dan partisipasi aktif dalam pameran industri pangan lokal tingkat regional dan nasional. - Mendukung pengendalian inflasi daerah	- Penguatan jejaring kemitraan bisnis antara kelompok tani/nelayan, koperasi, dan industri besar. - Evaluasi dan replikasi model pengembangan industri pengolahan di kecamatan atau desa dengan potensi unggulan. - Integrasi produk olahan lokal ke dalam rantai pasok pariwisata, ekspor, dan industri ekonomi kreatif berbasis kuliner. - Mendukung pengendalian inflasi daerah
	Sasaran 2: Meningkatnya Investasi Daerah Berbasis Potensi Lokal	- Review dan harmonisasi regulasi investasi daerah agar lebih ramah investor. - Pemetaan komprehensif potensi lokal unggulan per kecamatan (wisata, pertanian, UMKM, industri kreatif). - Penyusunan <i>investment project ready to offer (IPRO)</i>. - Meningkatkan kemudahan perizinan daerah	- Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berbasis OSS-RBA. - Penguatan layanan informasi investasi daerah berbasis digital. - Penyusunan insentif dan kemudahan berusaha khusus untuk sektor strategis lokal. - Meningkatkan kemudahan perizinan daerah	- Promosi potensi investasi melalui forum regional, nasional, dan internasional. - Penyelenggaraan <i>Badung Investment Forum</i> dan <i>Local Product Expo</i>. - Pengembangan media promosi digital dan platform data investasi daerah. - Meningkatkan kemudahan perizinan daerah	- Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan strategis investasi (akses jalan, TIK, air, energi). - Kemitraan dengan swasta dalam model investasi KPBU. - Pengembangan kawasan tematik (Agro-eco-tourism, sentra IKM, kawasan digital). - Meningkatkan kemudahan perizinan daerah	- Evaluasi dan peningkatan tata kelola investasi daerah berbasis ESG (Environmental, Social, Governance). - Pemberdayaan UMKM sebagai mitra rantai pasok investor besar. - Peningkatan kapasitas SDM daerah dalam manajemen dan fasilitasi investasi. - Meningkatkan kemudahan perizinan daerah
Tujuan 4: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Badung	Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Pangan, Produktivitas dan Integrasi Sektor Pertanian dengan Sektor Pariwisata Secara Berkesinambungan	- Pemetaan lahan pertanian dan zona perikanan tangkap/budidaya - Pemutakhiran data petani, peternak, dan nelayan (terintegrasi dengan e-RDKK & Simultan) - Revitalisasi kelompok tani, nelayan, dan penyuluh (BPP & BPPP) - Bantuan sarana dan prasarana produksi (benih, unggul, pupuk, organik, pakan, alat tangkap ramah lingkungan, jalan usaha tani, dll) - Pelatihan biosekuriti perikanan (budidaya & tangkap) - Meningkatkan pemanfaatan hasil riset varietas unggul dan transfer teknologi	- Demonstrasi unit teknologi budidaya intensif dan budidaya perairan darat - Peningkatan akses terhadap kredit usaha tani dan nelayan (KUR, asuransi pertanian) - Meningkatkan pemanfaatan hasil riset varietas unggul dan transfer teknologi	- Pembangunan dan penguatan unit pengolahan hasil (UPH) petani-nelayan - Sertifikasi mutu produk (PIRT, halal, organik, HACCP untuk perikanan) - Pengembangan diversifikasi produk olahan: hasil laut, olahan hortikultura, jamu/herbal lokal - Kemitraan agribisnis dan perikanan dengan sector pariwisata dan BUMDes - Penguatan branding dan pemasaran digital produk lokal (e-commerce agrimart)	- Pengembangan kawasab agribisnis terpadu dan zona industri kecil pertanian-perikanan - Pembangunan cold storage dan rantai dingin hasil perikanan tangkap dan budidaya - Korporatisasi petani-nelayan melalui koperasi dan BUMDes pangan - Insentif untuk inovator muda dan startup agritech/perikanan digital - Peningkatan ekspor komoditas unggulan	- Evaluasi kinerja sector pertanian-perikanan berbasis indikator produktivitas dan kualitas - Pendirian Pusat Inovasi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Badung - Replikasi model pertanian-perikanan terpadu ke seluruh kecamatan - Penyusunan Rencana Induk Kemandirian Pertanian dan Perikanan Badung 2031-2045

					Badung (manggis, hasil tangkap laut,dll)	
		Memetakan dan pemutakhiran data ketahanan pangan wilayah (IKP, NTP, luas tanam, produktivitas).				
		- Identifikasi potensi kawasan perikanan berbasis data spasial. - Penataan zona perikanan, konservasi, dan pariwisata laut.	- Pelatihan nelayan dan pembudidaya ikan tentang praktik ramah lingkungan dan penanganan pascapanen. - Pembangunan dan rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang higienis dan ramah wisata. - Penyediaan <i>cold chain system</i>, alat pengolahan, dan desain kemasan.	- Pengembangan desa bahari dengan integrasi wisata kuliner hasil laut lokal. - Promosi atraksi wisata edukatif berbasis perikanan (<i>fish farm tour</i>). - Pemberdayaan UMKM olahan hasil perikanan.	- Fasilitasi sertifikasi mutu - Penerapan standar kelestarian lingkungan pada usaha perikanan. - Insentif untuk pelaku usaha perikanan yang menerapkan prinsip berkelanjutan.	- Duplikasi praktik baik kawasan perikanan-wisata ke desa lainnya. - Integrasi sistem informasi digital perikanan dengan pariwisata. - Penguatan kerja sama multipihak (desa, swasta, akademisi, pemerintah).
		- Melakukan audit kebutuhan infrastruktur keamanan dan kenyamanan di kawasan pariwisata utama. - Menyusun rencana induk penguatan infrastruktur pendukung seperti PJU, CCTV, pos keamanan terpadu, dan jalur evakuasi. - Memulai <i>pilot project</i> pembangunan infrastruktur dasar keamanan di kawasan pariwisata prioritas. - Mendukung Meningkatkan kelembagaan Wilayah Metropolitan Denpasar (yang di dalamnya mencakup wilayah Kabupaten Badung) - Mendukung Mengembangkan masterplan kawasan di dalam Wilayah Metropolitan Denpasar di Kabupaten Badung - Menyusun metropolitan statistical area - Mengelola air limbah domestik - Mengoptimalkan Pelayanan air minum regional - Mendukung pengembangan jaringan transmisi regional	- Membangun dan meningkatkan jaringan penerangan jalan umum (PJU) ramah lingkungan di kawasan pariwisata. - Memasang sistem pemantauan keamanan seperti CCTV dan <i>early warning system</i> di titik-titik strategis kawasan wisata. - Meningkatkan sarana kebersihan dan sanitasi lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. - Mendukung Meningkatkan kelembagaan Wilayah Metropolitan Denpasar (yang di dalamnya mencakup wilayah Kabupaten Badung) - Mendukung Mengembangkan masterplan kawasan di dalam Wilayah Metropolitan Denpasar di Kabupaten Badung - Menyusun metropolitan statistical area - Mengelola air limbah domestik - Mengoptimalkan Pelayanan air minum regional - Mendukung pengembangan jaringan transmisi regional	- Mengintegrasikan sistem keamanan digital kawasan pariwisata dengan pusat komando (<i>command center</i>) tingkat kabupaten. - Mengembangkan taman tematik, jalur pedestrian, dan ruang publik yang nyaman dan inklusif dalam kawasan pariwisata. - Melakukan pelatihan mitigasi bencana dan simulasi tanggap darurat bagi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar kawasan. - Mendukung Meningkatkan kelembagaan Wilayah Metropolitan Denpasar (yang di dalamnya mencakup wilayah Kabupaten Badung) - Mendukung Mengembangkan masterplan kawasan di dalam Wilayah Metropolitan Denpasar di Kabupaten Badung - Menyusun metropolitan statistical area - Mengelola air limbah domestik - Mengoptimalkan Pelayanan air minum regional - Mendukung pengembangan jaringan transmisi regional	- Menyempurnakan sistem pengaduan dan respons cepat berbasis digital untuk mendukung kenyamanan wisatawan. - Menyusun regulasi kawasan ramah wisatawan dan pelibatan satgas keamanan berbasis desa adat dan komunitas lokal. - Mengembangkan infrastruktur berbasis <i>green design</i> dan ramah difabel di seluruh kawasan pariwisata. - Mendukung Meningkatkan kelembagaan Wilayah Metropolitan Denpasar (yang di dalamnya mencakup wilayah Kabupaten Badung) - Menyusun metropolitan statistical area - Mengelola air limbah domestik - Mengoptimalkan Pelayanan air minum regional	- Mewujudkan kawasan pariwisata unggulan di Badung yang memiliki infrastruktur keamanan dan kenyamanan berstandar internasional. - Membangun sistem pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur berbasis teknologi <i>smart tourism</i>. - Menetapkan indikator keamanan dan kenyamanan sebagai bagian dari sertifikasi kawasan wisata berkelanjutan. - Mendukung Meningkatkan kelembagaan Wilayah Metropolitan Denpasar (yang di dalamnya mencakup wilayah Kabupaten Badung) - Mendukung Mengembangkan masterplan kawasan di dalam Wilayah Metropolitan Denpasar di Kabupaten Badung - Menyusun metropolitan statistical area - Mengelola air limbah domestik - Mengoptimalkan Pelayanan air minum regional - Mendukung pengembangan jaringan transmisi regional

					▪ Mendukung pengembangan jaringan transmisi regional	
Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Publik	Sasaran: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Terpadu	▪ Melakukan pemetaan kebutuhan konektivitas antar kawasan pariwisata, permukiman, pertanian, dan sentra ekonomi lokal. ▪ Menyusun rencana induk pengembangan jaringan jalan, transportasi umum, dan jalur alternatif berbasis mobilitas berkelanjutan. ▪ Menyusun skema kemitraan pemerintah-swasta untuk pembiayaan infrastruktur konektivitas. ▪ Mendukung pengembangan transportasi publik massal ▪ Mendukung pengembangan transportasi laut dan logistik ▪ Mendukung pembangunan jalan tol antar wilayah strategis yang melintasi Kabupaten Badung ▪ Mendukung penguatan akses wisata dan pengembangan wilayah	▪ Memulai peningkatan dan pelebaran jalan strategis penghubung antar kawasan wisata dan kawasan pendukung ekonomi (agropolitan, UMKM, pelabuhan). ▪ Mengembangkan rute dan koridor transportasi publik terintegrasi antar kawasan wisata. ▪ Meningkatkan sarana konektivitas pejalan kaki dan pesepeda melalui pembangunan jalur pedestrian dan jalur sepeda. ▪ Mendukung pengembangan transportasi publik massal ▪ Mendukung pengembangan transportasi laut dan logistik ▪ Mendukung pembangunan jalan tol antar wilayah strategis yang melintasi Kabupaten Badung ▪ Mendukung penguatan akses wisata dan pengembangan wilayah	▪ Membangun fasilitas integrasi antarmoda transportasi (antar kendaraan, <i>shuttle</i>, dan <i>park & ride</i>) di simpul kawasan strategis. ▪ Memperluas jangkauan transportasi publik ramah lingkungan untuk mendukung pergerakan wisatawan dan masyarakat lokal. ▪ Memperkuat konektivitas digital kawasan untuk mendukung integrasi sistem transportasi dan navigasi kawasan. ▪ Mendukung pengembangan transportasi publik massal ▪ Mendukung pengembangan transportasi laut dan logistik ▪ Mendukung pembangunan jalan tol antar wilayah strategis yang melintasi Kabupaten Badung ▪ Mendukung penguatan akses wisata dan pengembangan wilayah	▪ Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan kolektor dan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan penyangga dengan pusat aktivitas pariwisata. ▪ Membangun fasilitas penunjang konektivitas seperti terminal kecil, halte tematik, dan tempat parkir wisata berbasis digital. ▪ Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam perawatan konektivitas kawasan berbasis CSR ▪ Mendukung pengembangan transportasi publik massal ▪ Mendukung pengembangan transportasi laut dan logistik ▪ Mendukung pembangunan jalan tol antar wilayah strategis yang melintasi Kabupaten Badung ▪ Mendukung penguatan akses wisata dan pengembangan wilayah	▪ Menyempurnakan integrasi konektivitas fisik dan digital di seluruh kawasan prioritas pariwisata dan ekonomi lokal. ▪ Menetapkan kawasan yang memiliki konektivitas tinggi sebagai model kawasan wisata inklusif dan berkelanjutan. ▪ Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi konektivitas kawasan berbasis data spasial dan real-time. ▪ Mendukung pengembangan transportasi publik massal ▪ Mendukung pengembangan transportasi laut dan logistik ▪ Mendukung pembangunan jalan tol antar wilayah strategis yang melintasi Kabupaten Badung ▪ Mendukung penguatan akses wisata dan pengembangan wilayah
		▪ Melakukan pendataan kebutuhan rumah layak huni berbasis desa dan kelurahan, termasuk identifikasi kantong-kantong rumah tidak layak huni. ▪ Menyusun peta jalan penyediaan rumah layak terjangkau untuk Krama Badung berbasis inklusif dan berwawasan lingkungan. ▪ Menyusun skema insentif bagi pengembang untuk penyediaan	▪ Meluncurkan program percontohan pembangunan rumah layak huni dengan pola kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. ▪ Menyediakan subsidi atau stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) secara bertahap. ▪ Membangun infrastruktur dasar pendukung kawasan permukiman (jalan lingkungan, sanitasi, air bersih).	▪ Meningkatkan kapasitas akses pembiayaan perumahan bagi MBR melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan KPR mikro. ▪ Mengembangkan hunian vertikal atau rusun kecil ramah lingkungan untuk kawasan padat penduduk. ▪ Mengintegrasikan pendekatan rumah layak dengan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.	▪ Mendorong revitalisasi kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan sehat dan layak huni. ▪ Menjalin kolaborasi dengan desa adat dalam penguatan model hunian berbasis budaya dan lokalitas Krama Badung.	▪ Mewujudkan platform terpadu layanan informasi perumahan untuk publik, berbasis spasial dan real-time. ▪ Menetapkan wilayah dengan 100% akses rumah layak sebagai model kawasan permukiman ideal di Kabupaten Badung. ▪ Mendorong keberlanjutan program melalui pembentukan unit

		rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mendukung pembangunan rumah untuk masyarakat miskin/berpenghasilan rendah (Program Pembangunan 3 juta rumah) - Menata kawasan permukiman padat - Mengembangkan perumahan sosial	- Mendukung pembangunan rumah untuk masyarakat miskin/berpenghasilan rendah (Program Pembangunan 3 juta rumah) - Menata kawasan permukiman padat - Mengembangkan perumahan sosial	- Mendukung pembangunan rumah untuk masyarakat miskin/berpenghasilan rendah (Program Pembangunan 3 juta rumah) - Menata kawasan permukiman padat - Mengembangkan perumahan sosial	- Menyusun regulasi daerah tentang standar minimum kelayakan hunian dan pengendalian harga rumah. - Mendukung pembangunan rumah untuk masyarakat miskin/berpenghasilan rendah (Program Pembangunan 3 juta rumah) - Menata kawasan permukiman padat - Mengembangkan perumahan sosial	layanan perumahan berkelanjutan dan forum pemangku kepentingan. - Mendukung pembangunan rumah untuk masyarakat miskin/berpenghasilan rendah (Program Pembangunan 3 juta rumah) - Menata kawasan permukiman padat - Mengembangkan perumahan sosial
		- Melakukan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan PSU permukiman di seluruh wilayah kabupaten berdasarkan wilayah desa/kelurahan. - Menyusun rencana induk dan peta jalan pembangunan PSU permukiman yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. - Menyusun regulasi daerah tentang standar pelayanan minimal PSU permukiman dan kewajiban pengembang. - Mengembangkan infrastruktur dasar lingkungan	- Memulai pembangunan PSU dasar (air bersih, drainase, sanitasi, jalan lingkungan) di kawasan permukiman dengan tingkat keterlayanan rendah. - Mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital (<i>dashboard</i> PSU) untuk mendukung perencanaan dan pengawasan pembangunan PSU. - Menjalin kerja sama dengan pengembang dan desa adat untuk integrasi pembangunan PSU di kawasan permukiman baru dan eksisting. - Mengembangkan infrastruktur dasar lingkungan	- Mendorong peningkatan kualitas PSU permukiman melalui pendekatan partisipatif berbasis masyarakat. - Mengembangkan model kawasan permukiman berkelanjutan (<i>green infrastructure</i>) dengan PSU ramah lingkungan dan hemat energi. - Melakukan integrasi pembangunan PSU dengan program perumahan dan penataan kawasan kumuh. - Mengembangkan infrastruktur dasar lingkungan	- Melakukan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas PSU yang sudah ada namun tidak berfungsi optimal, terutama di kawasan padat penduduk. - Meningkatkan insentif bagi desa/kelurahan yang berhasil menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan PSU secara mandiri. - Menyusun kebijakan pengarusutamaan penyediaan PSU permukiman dalam setiap perencanaan pembangunan kawasan. - Mengembangkan infrastruktur dasar lingkungan	- Menetapkan wilayah dengan cakupan 100% akses PSU dasar sebagai percontohan kawasan permukiman layak dan inklusif di Badung. - Melaksanakan evaluasi menyeluruh dan audit layanan PSU untuk penyempurnaan sistem pembangunan PSU di masa mendatang. - Membentuk unit terpadu pengelolaan PSU permukiman daerah berbasis digital, kolaboratif, dan berkelanjutan. - Mengembangkan infrastruktur dasar lingkungan
		- Melakukan pemetaan kompetensi dan latar belakang pendidikan ASN sebagai dasar pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme. - Menyusun standar kompetensi teknis dan manajerial ASN sesuai kebutuhan jabatan dan perkembangan dinamika pelayanan publik. - Merancang sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja dan disiplin untuk menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan akuntabel.	- Memulai peningkatan kualifikasi pendidikan ASN melalui kerja sama dengan perguruan tinggi serta pemberian beasiswa pendidikan lanjutan (S1/S2). - Mengimplementasikan program pelatihan berbasis e-learning dan <i>blended learning</i> dengan kurikulum sesuai kebutuhan perangkat daerah. - Menerapkan sistem evaluasi kinerja terintegrasi (e-kinerja) berbasis teknologi informasi untuk semua jenjang ASN.	- Menyelenggarakan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> berkelanjutan untuk penguatan kompetensi kepemimpinan dan profesionalisme ASN muda. - Mendorong sertifikasi profesi ASN di bidang-bidang strategis (pengadaan, perencanaan, keuangan, pengawasan, kehumasan, dsb). - Menegakkan penilaian disiplin ASN secara objektif dan konsisten berbasis Peraturan Pemerintah dan	- Melakukan <i>talent mapping</i> dan penerapan sistem manajemen talenta untuk mendorong pengisian jabatan berbasis merit. - Meningkatkan kerja sama antar lembaga (LAN, BPSDM, BKN, perguruan tinggi) untuk pengembangan kompetensi dan inovasi ASN.	- Mewujudkan ASN Kabupaten Badung sebagai <i>role model</i> ASN profesional dan berintegritas di tingkat provinsi dan nasional. - Menetapkan standar layanan publik berbasis kinerja dan etika profesi ASN, dengan <i>reward</i> bagi ASN berprestasi dan disiplin. - Melakukan evaluasi menyeluruh atas reformasi manajemen

				Standar Operasional Prosedur (SOP).	Mengembangkan platform digital manajemen ASN untuk mendukung perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, dan monitoring kinerja.	ASN, dan menyusun <i>road map</i> lanjutan untuk penguatan profesionalisme ASN di Badung.
Tujuan 6: Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Berintegritas	- Melakukan pemetaan layanan publik eksisting yang potensial untuk didigitalisasi di seluruh perangkat daerah. - Menyusun arsitektur sistem layanan publik digital terpadu berbasis kebutuhan masyarakat dan karakteristik kewilayahan. - Mengembangkan strategi literasi digital masyarakat dan ASN agar adaptif terhadap penggunaan layanan berbasis TIK.	- Menerapkan layanan publik digital terintegrasi tingkat kabupaten melalui portal atau aplikasi pelayanan satu pintu. - Meningkatkan konektivitas internet dan infrastruktur TIK di seluruh OPD, desa, dan kelurahan. - Mengembangkan layanan aduan digital dan <i>chatbot</i> publik untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara cepat.	- Mendorong penggunaan <i>big data</i> dan <i>dashboard</i> analitik pelayanan untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. - Meningkatkan interoperabilitas antar sistem layanan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, kependudukan, perizinan). - Melaksanakan monitoring dan evaluasi digitalisasi layanan publik berbasis <i>feedback</i> masyarakat secara <i>real time</i>.	- Mendorong inovasi pelayanan publik digital berbasis AI dan otomatisasi proses untuk layanan yang bersifat reguler. - Melakukan peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam layanan digital pemerintah. - Meningkatkan pelibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan teknologi layanan publik.	- Menjadikan Kabupaten Badung sebagai percontohan daerah dengan ekosistem layanan publik digital yang inklusif dan adaptif. - Mewujudkan layanan publik yang cepat, tepat, murah, dan transparan berbasis data dan kecerdasan digital. - Menyusun peta jalan transformasi digital lanjutan untuk penguatan sistem pemerintahan digital ke depan.
		- Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem kinerja pemerintah daerah untuk memetakan kelemahan akuntabilitas. - Menyusun peta jalan penguatan akuntabilitas kinerja berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). - Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah terkait perencanaan kinerja dan pelaporan berbasis hasil.	- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang terintegrasi antar perangkat daerah. - Menyusun indikator kinerja kunci (IKK) yang terukur dan relevan di seluruh perangkat daerah. - Mengimplementasikan mekanisme <i>reward and punishment</i> berbasis capaian kinerja.	- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan program pemerintah melalui kanal transparansi publik. - Mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan sistem penganggaran berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>). - Optimalisasi penerapan e-SAKIP secara menyeluruh di seluruh OPD.	- Melakukan evaluasi dan revisi sistem kinerja pemerintahan berdasarkan capaian dan masukan dari lembaga pengawasan eksternal. - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja perangkat daerah melalui publikasi berkala dan <i>dashboard</i> kinerja publik.	- Memperkuat budaya kinerja berbasis hasil di seluruh jenjang pemerintahan daerah. - Menjadi daerah rujukan praktik baik penerapan sistem akuntabilitas kinerja di tingkat provinsi dan nasional. - Menyempurnakan sistem informasi kinerja berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.
		- Evaluasi dan penyempurnaan perangkat regulasi perencanaan pembangunan. - Integrasi sistem informasi perencanaan (e-planning) dengan Satu Data Badung. - Peningkatan kualitas basis data sektoral dan spasial.	- Pelatihan teknis perencanaan berbasis evidence, big data, dan foresight planning. - Sertifikasi jabatan fungsional perencanaan dan penguatan forum perencanaan. - Penyusunan pedoman perencanaan partisipatif lintas sektor dan wilayah.	- Optimalisasi Musrenbang tematik (gender, disabilitas, pemuda, adat). - Pengembangan dashboard perencanaan berbasis data spasial dan indikator. - Penguatan peran Bappeda sebagai knowledge center pembangunan daerah.	- Penerapan sistem Integrated Planning and Budgeting (IPB) di seluruh OPD. - Sinkronisasi dokumen RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPd berbasis kinerja. - Pemanfaatan teknologi prediktif dalam penyusunan proyeksi kebijakan.	- Pengembangan model perencanaan transformatif (green growth, smart region). - Replikasi praktik baik perencanaan responsif daerah ke desa dan kelurahan. - Penguatan kolaborasi antar daerah untuk perencanaan kawasan strategis.

		- Penyusunan roadmap riset dan inovasi daerah yang selaras RPJMD. - Penguatan kelembagaan litbang di perangkat daerah dan jejaringnya. - Pembentukan forum inovasi daerah yang melibatkan perguruan tinggi, industri, dan komunitas.	- Pelatihan dan sertifikasi bagi ASN dan masyarakat dalam metodologi riset dan inovasi. - Pengembangan pusat data riset dan ruang kreatif (innovation hub). - Peningkatan dukungan laboratorium dan fasilitas riset terapan.	- Program matching fund riset kolaboratif dengan kampus dan UMKM. - Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi daerah. - Kemitraan inovasi dengan BUMDes dan koperasi lokal.	- Fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil inovasi daerah. - Pengembangan produk unggulan daerah hasil inovasi (agrikultur, kerajinan, digital, dll). - Replikasi inovasi pelayanan publik ke desa dan kelurahan.	- Integrasi hasil riset ke dalam kebijakan pembangunan daerah. - Digitalisasi sistem pengelolaan riset dan pemantauan inovasi daerah. - Peningkatan posisi Badung dalam Indeks Inovasi Daerah Nasional.
		- Mendorong pendirian BUMD yang baru sesuai potensi lokal. - Revisi regulasi pajak dan retribusi daerah agar sesuai UU HKPD. - Audit potensi pajak dan retribusi secara menyeluruh. - Penguatan kelembagaan Bapenda, BPKAD, dan sistem pelaporan keuangan. - Melakukan pinjaman daerah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan	- Mendorong pendirian BUMD yang baru sesuai potensi lokal. - Implementasi sistem digital terpadu untuk pemungutan pajak dan retribusi. - Pengembangan potensi PAD baru dari sektor pariwisata, ekonomi digital, dan jasa. - Pendataan objek pajak dan intensifikasi kerja sama pemungutan. - Melakukan pinjaman daerah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan	- Mendorong pendirian BUMD yang baru sesuai potensi lokal. - Penerapan skema kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha). - Melakukan pinjaman daerah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan	- Penerapan belanja berbasis kinerja (performance-based budgeting). - Rasionalisasi belanja rutin untuk mendorong belanja pembangunan. - Review efektivitas program daerah berbasis cost-benefit. - Melakukan pinjaman daerah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan	- Evaluasi capaian PAD dan fiskal daerah secara menyeluruh. - Diversifikasi sumber pembiayaan daerah berbasis aset dan investasi daerah. - Penguatan peran desa adat dan BUMDes dalam menciptakan basis fiskal lokal. - Melakukan pinjaman daerah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan
		- Pemetaan tingkat kemandirian desa dan potensi lokal berbasis data SDGs Desa. - Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. - Pendampingan penyusunan RPJMDesa dan RKPDes yang responsif terhadap potensi desa.	- Pelatihan manajemen keuangan dan perencanaan pembangunan desa. - Penguatan peran BPD, LPM, dan Karang Taruna dalam pembangunan desa. - Digitalisasi layanan desa dan pelaporan.	- Penguatan BUMDes untuk pengembangan ekonomi desa. - Dukungan inkubasi usaha dan akses pasar untuk produk desa.	- Penguatan kerja sama antardesa (inter-village cooperation) dalam pengelolaan kawasan. - Kemitraan antara desa, dunia usaha, dan perguruan tinggi. - Replikasi praktik baik dari desa mandiri ke desa berkembang dan tertinggal.	- Peningkatan klasifikasi desa mandiri sesuai Indeks Desa. - Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja desa secara digital. - Integrasi sistem data desa dalam satu data pembangunan daerah.
	Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas	- Melakukan pemetaan potensi desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya, alam, dan spiritual. - Menyusun regulasi/peraturan daerah atau peraturan bupati tentang penguatan peran desa adat dalam pembangunan kepariwisataan. - Melakukan audit keberlanjutan terhadap seluruh daya tarik wisata yang ada, mencakup aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. - Menyusun pedoman pengembangan destinasi wisata	- Menyelenggarakan pelatihan dan penguatan kapasitas <i>prajuru</i> desa adat terkait manajemen pariwisata, pelestarian budaya, dan pelayanan wisatawan. - Mendorong pembentukan kelembagaan pariwisata desa adat seperti BUPDA sektor pariwisata atau pengelola destinasi berbasis adat. - Revitalisasi daya tarik wisata berbasis budaya dan alam agar sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.	- Memfasilitasi integrasi desa adat ke dalam jejaring promosi pariwisata daerah melalui platform digital, <i>event</i>, dan kolaborasi antar desa wisata. - Memberikan insentif bagi desa adat yang berhasil mengembangkan destinasi wisata unggulan berbasis nilai-nilai lokal Bali. - Mendorong pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas dengan melibatkan aktif desa adat dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).	- Mendorong kolaborasi desa adat dengan pelaku industri pariwisata untuk pengembangan paket wisata berbasis adat dan tradisi. - Menyelenggarakan festival budaya antar desa adat sebagai media promosi wisata dan pelestarian kearifan lokal.	- Menetapkan desa adat yang berhasil sebagai model <i>Best Practice</i> pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal. - Menyusun dan melaksanakan mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap kontribusi desa adat dalam pembangunan pariwisata daerah. - Penetapan dan promosi kawasan wisata unggulan Badung yang telah memenuhi indikator

		berkelanjutan yang berpihak pada pelestarian alam dan budaya lokal. ▪ Pemetaan potensi daya tarik wisata unggulan berbasis budaya, alam, dan digital untuk mendukung materi promosi tematik. ▪ Penyusunan strategi promosi terintegrasi berbasis digital dan kolaboratif dengan pelaku industri pariwisata. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif	▪ Peningkatan infrastruktur dasar di destinasi wisata (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah) yang mendukung kenyamanan dan kelestarian lingkungan. ▪ Optimalisasi penggunaan media digital dan platform pariwisata global untuk kampanye destinasi Badung secara luas. ▪ Penguatan peran Duta Pariwisata Badung, <i>influencer</i> lokal, dan diaspora Bali dalam memperkenalkan potensi wisata Badung. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif	▪ Implementasi sistem sertifikasi atau penilaian “Wisata Berkelanjutan” di tingkat daerah untuk mendorong persaingan sehat antar destinasi. ▪ Perluasan jaringan promosi melalui partisipasi aktif dalam pameran dan forum pariwisata internasional. ▪ Pengembangan narasi “<i>One Badung, Many Destinations</i>” yang menampilkan diversitas wilayah (utara-selatan) secara seimbang. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif	▪ Integrasi teknologi informasi (aplikasi digital) untuk manajemen pengunjung, promosi destinasi ramah lingkungan, dan pelaporan dampak wisata. ▪ Pelaksanaan insentif untuk pelaku wisata yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan konservasi dalam operasional usahanya. ▪ Integrasi promosi pariwisata dengan sektor pendukung seperti pertanian, UMKM, kuliner lokal, dan desa adat dalam bentuk paket wisata tematik. ▪ Mendorong kolaborasi promosi bersama antar-kabupaten/kota se-Bali untuk memperkuat citra Bali sebagai destinasi berkelas dunia yang terpadu. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif	pariwisata berkelanjutan sebagai model nasional. ▪ Penguatan kerja sama internasional dan nasional untuk transfer pengetahuan, promosi bersama, dan dukungan pembiayaan dalam mengembangkan destinasi ramah lingkungan. ▪ Peluncuran <i>Bali Smart Tourism Hub – Badung Chapter</i> sebagai platform promosi terpadu berbasis kecerdasan buatan untuk analisis tren wisatawan dan pengembangan strategi promosi berbasis data. ▪ Evaluasi efektivitas promosi dan reorientasi strategi berbasis <i>feedback</i> wisatawan, pelaku usaha, dan mitra internasional. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif
Tujuan 7: Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	▪ Melakukan pemetaan potensi desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya, alam, dan spiritual. ▪ Menyusun regulasi/peraturan daerah atau peraturan bupati tentang penguatan peran desa adat dalam pembangunan kepariwisataan. ▪ Melakukan audit keberlanjutan terhadap seluruh daya tarik wisata yang ada, mencakup aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. ▪ Menyusun pedoman pengembangan destinasi wisata berkelanjutan yang berpihak pada pelestarian alam dan budaya lokal. ▪ Pemetaan potensi daya tarik wisata unggulan berbasis budaya, alam, dan digital untuk mendukung materi promosi tematik.	▪ Menyelenggarakan pelatihan dan penguatan kapasitas <i>prajuru</i> desa adat terkait manajemen pariwisata, pelestarian budaya, dan pelayanan wisatawan. ▪ Mendorong pembentukan kelembagaan pariwisata desa adat seperti BUPDA sektor pariwisata atau pengelola destinasi berbasis adat. ▪ Revitalisasi daya tarik wisata berbasis budaya dan alam agar sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. ▪ Peningkatan infrastruktur dasar di destinasi wisata (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah) yang mendukung kenyamanan dan kelestarian lingkungan. ▪ Optimalisasi penggunaan media digital dan platform pariwisata global untuk	▪ Memfasilitasi integrasi desa adat ke dalam jejaring promosi pariwisata daerah melalui platform digital, <i>event</i>, dan kolaborasi antar desa wisata. ▪ Memberikan insentif bagi desa adat yang berhasil mengembangkan destinasi wisata unggulan berbasis nilai-nilai lokal Bali. ▪ Mendorong pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas dengan pelibatan aktif desa adat dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). ▪ Implementasi sistem sertifikasi atau penilaian “Wisata Berkelanjutan” di tingkat daerah untuk mendorong persaingan sehat antar destinasi. ▪ Perluasan jaringan promosi melalui partisipasi aktif	▪ Mendorong kolaborasi desa adat dengan pelaku industri pariwisata untuk pengembangan paket wisata berbasis adat dan tradisi. ▪ Menyelenggarakan festival budaya antar desa adat sebagai media promosi wisata dan pelestarian kearifan lokal. ▪ Integrasi teknologi informasi (aplikasi digital) untuk manajemen pengunjung, promosi destinasi ramah lingkungan, dan pelaporan dampak wisata.	▪ Penguatan kolaborasi antara komunitas kreatif, pemerintah daerah, dan pelaku industri dalam bentuk <i>creative cluster</i> per kecamatan. ▪ Replikasi model sukses ekosistem kreatif ke desa/kecamatan lainnya di Badung. ▪ Integrasi produk dan layanan ekonomi kreatif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan rantai pasok pariwisata serta ekonomi lokal. ▪ Replikasi model digital wisata berbasis AI ke destinasi lain di luar kawasan utama.

		▪ Penyusunan strategi promosi terintegrasi berbasis digital dan kolaboratif dengan pelaku industri pariwisata. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif ▪ Pemetaan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Badung berdasarkan subsektor (kuliner, fesyen, kriya, musik, seni pertunjukan, aplikasi, dan lainnya). ▪ Penyusunan masterplan pengembangan ekonomi kreatif dan industri digital yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, budaya, dan pendidikan. ▪ Penguatan regulasi daerah dan kelembagaan pendukung (forum ekraf, kolaborasi dengan desa adat, dan komunitas digital). ▪ Pemetaan potensi destinasi wisata di Badung yang siap dikembangkan secara digital. ▪ Penyusunan roadmap “<i>Digital Smart Tourism Badung</i>” yang mengintegrasikan elemen AI, Internet of Things (IoT), dan big data. ▪ Mulai penyediaan infrastruktur digital dasar di destinasi prioritas (akses internet, Wi-Fi publik, sistem sensor pengunjung).	▪ kampanye destinasi Badung secara luas. ▪ Penguatan peran Duta Pariwisata Badung, <i>influencer</i> lokal, dan diaspora Bali dalam memperkenalkan potensi wisata Badung. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif ▪ Pelatihan intensif dan inkubasi wirausaha kreatif serta talenta digital muda melalui kolaborasi dengan kampus, komunitas, dan mitra swasta. ▪ Fasilitasi akses permodalan untuk pelaku industri kreatif pemula melalui KUR, pembiayaan syariah, atau platform digital lending. ▪ Pembangunan ruang kreatif publik (<i>creative space</i>), studio komunitas, dan <i>co-working space</i> di pusat pertumbuhan ekonomi desa/kecamatan. ▪ Pelatihan SDM pelaku wisata (pemandu, pengelola desa wisata, pelaku UMKM pariwisata) dalam literasi digital dan pemanfaatan AI. ▪ Implementasi sistem reservasi dan informasi digital berbasis AI (chatbot, rekomendasi destinasi otomatis, ticketing digital). ▪ Pembangunan dashboard analitik untuk memantau perilaku wisatawan dan efektivitas promosi.	▪ dalam pameran dan forum pariwisata internasional. ▪ Pengembangan narasi “<i>One Badung, Many Destinations</i>” yang menampilkan diversitas wilayah (utara-selatan) secara seimbang. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif ▪ Fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk-produk ekonomi kreatif lokal. ▪ Pengembangan ekosistem inovasi digital berbasis budaya lokal (aplikasi pariwisata adat, <i>marketplace</i> produk lokal, seni digital). ▪ Penumbuhan <i>startup</i> digital dan kolaborasi antara pelaku ekraf dengan sektor lain seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata. ▪ Pengembangan aplikasi “Wisata Cerdas Badung” dengan teknologi AI untuk personalisasi pengalaman wisata (rute, rekomendasi, bahasa). ▪ Integrasi layanan ekonomi lokal (UMKM, kuliner, atraksi seni) ke dalam sistem digital wisata berbasis lokasi dan preferensi pengunjung. ▪ Kemitraan dengan startup AI dan perguruan tinggi untuk pilot project pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di desa wisata unggulan.	▪ Pelaksanaan insentif untuk pelaku wisata yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan konservasi dalam operasional usahanya. ▪ Integrasi promosi pariwisata dengan sektor pendukung seperti pertanian, UMKM, kuliner lokal, dan desa adat dalam bentuk paket wisata tematik. ▪ Mendorong kolaborasi promosi bersama antar-kabupaten/kota se-Bali untuk memperkuat citra Bali sebagai destinasi berkelas dunia yang terpadu. ▪ Memperkuat destinasi regeneratif ▪ Pemasaran digital produk ekonomi kreatif dan jasa digital Badung ke pasar nasional dan internasional melalui platform daring dan pameran kreatif. ▪ Penguatan ekosistem ekspor produk kreatif melalui pelatihan, kurasi, dan kemitraan ekspor. ▪ Promosi Badung sebagai destinasi ekosistem ekonomi kreatif dan industri digital Bali melalui festival tahunan dan <i>branding</i> internasional. ▪ Pengembangan kawasan <i>smart tourism zone</i> di destinasi unggulan seperti Uluwatu, Jimbaran, dan Mengwi. ▪ Penguatan branding Badung sebagai “AI-powered Cultural & Eco Tourism Destination” di pasar	▪ Integrasi sistem AI wisata Badung dengan platform nasional (Kemenparekraf, Gernas BBI, BISA) dan internasional (OTA global). Evaluasi berkala terhadap efisiensi dan daya saing ekosistem wisata digital untuk perbaikan berkelanjutan dan adaptasi teknologi terbaru.

					nasional dan internasional. ▪ Membangun <i>AI-driven tourism hub</i> yang menjadi pusat inovasi dan showcase wisata digital.	
		▪ Penyusunan peta status dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah. ▪ Penguatan regulasi dan kelembagaan perlindungan lingkungan hidup. ▪ Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait konservasi dan pengelolaan sampah. ▪ Meningkatkan pengolahan sampah terpadu	▪ Pengembangan sistem pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara digital. ▪ Peningkatan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat (<i>reduce, reuse, recycle/3R</i>). ▪ Revitalisasi kawasan dengan beban pencemaran tinggi melalui rehabilitasi dan penghijauan. ▪ Meningkatkan pengolahan sampah terpadu	▪ Penerapan insentif dan disinsentif lingkungan bagi pelaku usaha dan masyarakat. ▪ Penguatan penerapan AMDAL dan perizinan berbasis lingkungan hidup. ▪ Peningkatan fasilitas TPS3R dan pengelolaan limbah B3 secara terintegrasi. ▪ Meningkatkan pengolahan sampah terpadu	▪ Kolaborasi multipihak dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. ▪ Peningkatan kapasitas SDM dan perangkat daerah dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan. ▪ Implementasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim di sektor-sektor utama. ▪ Meningkatkan pengolahan sampah terpadu	▪ Integrasi sistem informasi lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah. ▪ Evaluasi dan pemutakhiran kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup. ▪ Penguatan peran masyarakat adat dan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Meningkatkan pengolahan sampah terpadu
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	▪ Melaksanakan pemetaan potensi dan persoalan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. ▪ Menyusun panduan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di tingkat desa/banjar. ▪ Memulai program peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal (<i>awig-awig</i> tentang lingkungan).	▪ Mendorong pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli lingkungan (KMPA, komunitas pemuda hijau, dll). ▪ Menyelenggarakan pelatihan teknis pengelolaan lingkungan (pengomposan, konservasi air, penghijauan). ▪ Integrasi program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam musrenbang desa dan kelurahan.	▪ Pengembangan insentif bagi masyarakat dan komunitas yang aktif menjaga dan memulihkan lingkungan (penghargaan lingkungan, dana stimulan). ▪ Pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. ▪ Penerapan program "Sekolah Ramah Lingkungan" dan pelibatan siswa dalam konservasi lingkungan sekitar.	▪ Pengembangan program "Desa Adat Hijau" dan "Desa Wisata Berbasis Lingkungan" untuk memperkuat keterlibatan masyarakat adat. ▪ Replikasi praktik-praktik baik pengelolaan lingkungan oleh masyarakat antar kecamatan. ▪ Pelibatan sektor informal (pemulung, pelaku daur ulang) dalam sistem pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.	▪ Institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan lingkungan melalui forum-forum lingkungan desa/kelurahan. ▪ Optimalisasi sistem digital pelaporan dan pelibatan publik dalam pemantauan kualitas lingkungan. ▪ Pencapaian status Kabupaten Badung sebagai kabupaten dengan indeks partisipasi masyarakat tinggi dalam pengelolaan lingkungan.
		▪ Pemetaan risiko bencana di seluruh kawasan termasuk pantai, daerah perbukitan, dan wilayah padat penduduk wisatawan. ▪ Penyusunan rencana kontinjensi dan SOP evakuasi bencana berbasis wilayah. ▪ Meningkatkan mitigasi bencana dan pengelolaan drainase berkelanjutan untuk	▪ Pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana seperti jalur evakuasi, rambu-rambu bencana, dan tempat evakuasi sementara. ▪ Pelatihan kapasitas tanggap darurat bagi pelaku pariwisata, masyarakat lokal, dan pengelola destinasi.	▪ Integrasi sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) bencana berbasis teknologi dengan jaringan komunikasi pariwisata dan pusat informasi wisata. ▪ Simulasi bencana terpadu secara berkala di destinasi prioritas. ▪ Meningkatkan mitigasi bencana dan pengelolaan	▪ Penerapan <i>Disaster-Resilient Tourism Guidelines</i> di setiap destinasi wisata utama. ▪ Pelibatan desa adat dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam penyusunan dan pengelolaan rencana adaptasi	▪ Evaluasi menyeluruh dan penyempurnaan sistem mitigasi dan adaptasi berbasis data dan teknologi terkini (AI dan big data). ▪ Penguatan branding "<i>Safe and Resilient Region</i>" untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan terhadap Badung.

		menanggulangi banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan	Meningkatkan mitigasi bencana dan pengelolaan drainase berkelanjutan untuk menanggulangi banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan	drainase berkelanjutan untuk menanggulangi banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan	- berbasis kearifan lokal. - Meningkatkan mitigasi bencana dan pengelolaan drainase berkelanjutan untuk menanggulangi banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan	Meningkatkan mitigasi bencana dan pengelolaan drainase berkelanjutan untuk menanggulangi banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan
		- Penyusunan dan harmonisasi Perda/Perkada tentang ketertiban umum. - Penguatan kapasitas Satpol PP dan Linmas melalui pelatihan terpadu. - Penataan kawasan rawan konflik sosial dan pelanggaran hukum.	- Pembentukan forum koordinasi ketertiban dan keamanan daerah. - Peningkatan sinergi antara aparat keamanan, desa adat, pecalang, dan masyarakat. - Implementasi sistem tanggap darurat berbasis komunitas.	- Pengembangan sistem pengawasan berbasis CCTV, command center, dan early warning system di area publik strategis. - Pemanfaatan aplikasi pelaporan cepat masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan. - Digitalisasi basis data ketertiban umum.	- Program edukasi ketertiban di sekolah dan komunitas. - Revitalisasi peran lembaga adat dan keagamaan dalam menciptakan ketertiban sosial. - Peningkatan dukungan terhadap forum pemuda, Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan.	- Evaluasi dan pemutakhiran strategi pengelolaan ketertiban dan keamanan. - Duplikasi praktik baik (best practices) ke seluruh kecamatan. - Penguatan insentif dan reward bagi desa/lingkungan tertib dan aman.
	Sasaran 3: Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	▪	▪	▪	▪	▪

Sumber: Hasil Pemetaan Strategi Penahapan Pembangunan Kabupaten Badung

3.5. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Arah kebijakan daerah merupakan pedoman operasional yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan strategi pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan isu-isu strategis, potensi unggulan daerah, serta permasalahan pembangunan yang dihadapi, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Arah kebijakan daerah dalam RPJMD harus berpedoman pada:

- Keterkaitan dengan visi dan misi kepala daerah, sehingga kebijakan yang disusun dapat mencerminkan prioritas pembangunan daerah.
- Keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, termasuk RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJMD Provinsi Bali, untuk memastikan sinergi perencanaan dan implementasi program pembangunan.
- Penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
- Pendekatan berbasis data dan evidence-based policy, sehingga setiap kebijakan didasarkan pada analisis empiris dan kajian ilmiah yang kuat.

Arah kebijakan daerah Kabupaten Badung 2025–2029 akan difokuskan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan sektor pariwisata yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari implementasi strategi pembangunan, arah kebijakan ini juga dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung periode Tahun 2025-2029 untuk implementasi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada **Tabel 3.7** berikut.

Tabel 3. 7**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung**

Misi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali	Penguatan Moderasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama
	Pelestarian dan Penguatan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
	Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya dan Adat
	Revitalisasi Infrastruktur Budaya dan Keagamaan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung Di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.	Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
	Penguatan Pendidikan Berbasis Digital dan Kearifan Lokal
	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Peningkatan Ketahanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
	Penguatan Jaminan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Rentan
	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
	Penciptaan Lingkungan Kabupaten Badung yang semakin ramah untuk perempuan dan anak
Misi 3 : Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah.	Pengembangan Klaster Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah
	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Desa dan Kearifan Lokal
Misi 4 : Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian dengan Pariwisata	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan
	Pemberdayaan Petani dan Nelayan Berbasis Komunitas
	Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Pendukung Kawasan Pertanian dan Perikanan
	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pertanian dan Perikanan
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman serta Membangun Jaringan Jalan Baru	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Publik
	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Jalan Baru
	Peningkatan Sistem Transportasi Publik yang Terintegrasi
	Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi.	Penguatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Pemerintahan Berbasis <i>Smart Governance</i>
	Optimalisasi Pelayanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah

Misi	Arah Kebijakan
	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
	Penguatan Inovasi dalam Birokrasi dan Pelayanan Publik
	Pembentukan dan Pengembangan BUMD untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Umum, Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Pendapatan Daerah
	Pelaksanaan Pinjaman Daerah Untuk Mendukung Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan
Misi 7 : Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas.	Peningkatan Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata Berkualitas
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata
	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata untuk Pelayanan Kelas Dunia
	Penguatan <i>Branding</i> dan Pemasaran Digital Pariwisata Badung
	Pengembangan Ekonomi Kreatif di Seluruh Wilayah
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Keamanan di Masyarakat
	Penguatan mitigasi bencana untuk menjaga rasa aman dan kenyamanan kawasan pariwisata di kabupaten Badung

Sumber: Hasil Pemetaan Arah Kebijakan Kabupaten Badung

3.6. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025–2029, diperlukan program prioritas daerah yang berorientasi pada hasil dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Program prioritas daerah dalam RPJMD harus dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- Program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan ketika masa kampanye pilkada kepada konstituen.
- Keterkaitan dengan isu strategis daerah yang telah diidentifikasi dalam dokumen perencanaan.
- Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga program yang dipilih mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian indikator kinerja daerah.
- Koherensi dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, termasuk RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJMD Provinsi Bali.

- Penerapan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan, untuk memastikan efektivitas program lintas sektor dan keterpaduan pembangunan antarwilayah.

Program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025–2029 berfokus pada penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemantapan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Setiap program dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan mendorong percepatan pencapaian visi Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata berkualitas yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam implementasinya, program prioritas daerah juga didasarkan pada pendekatan berbasis hasil (*result-based planning*) dengan penekanan pada pencapaian indikator kinerja utama. Oleh karena itu, setiap program dalam RPJMD memiliki target yang terukur, baik dalam bentuk kuantitas, kualitas, maupun capaian waktu.

Bab ini akan menguraikan secara rinci program-program prioritas daerah Kabupaten Badung 2026–2030, termasuk keterkaitannya dengan perangkat daerah pengampu, sumber pendanaan, serta indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi program tersebut. Adapun program prioritas daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030 yang merupakan penyesuaian terhadap program strategis bupati dan wakil bupati Badung dapat dilihat pada **Tabel 3.8** dan Tabel Program Prioritas Daerah Kabupaten Badung dengan format sesuai arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 3.9** berikut.

Tabel 3. 8

Program Prioritas Daerah yang Diselaraskan dengan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Badung

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.					
Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali	Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya.		Indeks Harmoni Indonesia		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum
		Sasaran 1: Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Menyelenggarakan pertemuan berkala antara FORKOMPIMDA dengan pimpinan majelis agama	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum
				Meningkatkan peran dan fungsi masing-masing majelis agama dan FKUB dalam pembinaan kehidupan umat beragama	
				Pemberian bantuan uang hari raya keagamaan pada hari besar keagamaan kepada setiap KK	
				Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan upacara keagamaan, perbaikan dan pembangunan tempat ibadah serta fasilitas pengembangan kreativitas seni, adat, dan budaya	
		Sasaran 2: Memperkuatnya Pelestarian Terhadap Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung	Memperkuat eksistensi desa adat	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
				Membantu dan memfasilitasi penyusunan <i>Purana Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan</i> , dan <i>Kahyangan Jagat</i> di Kabupaten Badung	
				Menyelenggarakan Festival Seni Budaya Mangupura	
				Menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan warisan budaya tradisional di kabupaten badung	
Misi 2: Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Tujuan 2: Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Badung		Indeks Pembangunan Manusia		Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
		Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Secara Inklusif dan Berdaya Saing	Indeks Pendidikan	Menyelenggarakan pembelajaran tambahan bagi siswa bekerja sama dengan bimbingan belajar yang terakreditasi	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
				Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris bagi siswa di masing-masing banjar melalui program 1 banjar 1 guru bahasa	
				Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.					
		Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan mutu anak didik	
				Meningkatkan cakupan layanan kesehatan krama badung sehat	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan
				Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	
				Meningkatkan bantuan dan perhatian kepada veteran RI, Penyandang Disabilitas dan lanjut usia	
				Membangun rumah pemberdayaan <i>jana mahottama</i>	
				Penghargaan kepada ketepatan pelaporan kematian	
				Meningkatkan pencegahan dan penanganan <i>stunting</i>	
				Peningkatan kualitas gizi masyarakat	
		Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja	Pengeluaran Perkapita Penduduk		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Penyelenggara Urusan Perdagangan
			Tingkat Kemiskinan		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Tenaga Kerja
		Sasaran 4 : Terbangunnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Pembangunan Keluarga		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Perlindungan Anak		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 3: Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah.	Tujuan 3: Terwujudnya Ekonomi Badung yang Tangguh, Adil, dan Merata		Laju Pertumbuhan Ekonomi		Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
			PDRB Perkapita (Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun)		Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
			Rasio Gini		Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
		Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Masyarakat	Rasio Kewirausahaan		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.					
		Badung berbasis Ekonomi Kerakyatan	Persentase Koperasi Aktif		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perindustrian
		Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Membangun sentra-sentra komoditas hasil pertanian dalam arti luas dalam rangka ketahanan pangan serta mendorong program hilirisasi pertanian	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
				Efisiensi Energi untuk Sektor Publik dan Swasta	
				Membangun Obyek Daya Tarik Wisata <i>Artificial Intelligence</i> di wilayah Badung	
Misi 4 : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata	Tujuan 4: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Badung		Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pertanian
		Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan, Produktivitas dan Integrasi Sektor Pertanian dengan Sektor Pariwisata Secara Berkesinambungan	Indeks Ketahanan Pangan		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
			Nilai Tukar Petani	Mengintegrasikan penataan Subak sebagai objek kunjungan Desa wisata dengan konsep NEWA (<i>Nature, Ecotourism, Wellness, Adventure</i>)	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
				Mengoptimalkan penyerapan produk pertanian dalam mendukung sektor pariwisata melalui Pembangunan berkelanjutan, penguatan rantai pasok yang efisien serta peningkatan daya saing produk lokal berbasis pertanian	
			Nilai Tukar Nelayan		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase Penyerapan Produk Pertanian pada sektor Pariwisata		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
			Persentase Penyerapan Produk Perikanan pada sektor Pariwisata		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan
Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru	Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Publik		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
		Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Terpadu	Persentase Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik	Menata jaringan utilitas untuk mewujudkan Kawasan yang bersih dan berestetika	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Menata pedestrian jalan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki	
				Mewujudkan Badung Terang	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.					
Misi 6 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi.	Tujuan 6 : Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan		Cakupan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Memenuhi ketersediaan air bersih perpipaan bagi kepentingan industri dan rumah tangga masyarakat	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rasio Konektivitas Kabupaten	meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik.	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perhubungan
				Membuka jalan-jalan baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas	
			Indeks Reformasi Birokrasi		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sekretariat Daerah
			Indeks Akses Keuangan Daerah		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sekretariat Daerah
		Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi ASN melalui Pendidikan formal, Bimtek, pelatihan.	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Unsur Kepegawaian
			Indeks Sistem Merit	Menata penempatan jabatan birokrat berbasis kompetensi	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Unsur Kepegawaian
			Nilai AKIP	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sekretariat Daerah
			Opini BPK	Penguatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Keuangan dan Penyelenggara Unsur Pengawasan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Menerapkan digitalisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penelitian dan Pengembangan; Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Kewilayahan; Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
			Indeks Pemerintah Digital		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Komunikasi, dan Informasi
			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
			Indeks Inovasi Daerah		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penelitian dan Pengembangan
			Derajat Desentralisasi Fiskal/DDF		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Keuangan
		Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas	Persentase Desa Mandiri	Membangun taman kreativitas di setiap desa	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.					
Misi 7 : Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.	Tujuan 7: Meningkatkan Kualitas Pariwisata		Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum dalam PDRB		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
		Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	Menyusun strategi dan substansi promosi bersama komponen pariwisata.	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
			Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Mengembangkan dan membina sentra-sentra industri kreatif (Kuliner, Kriya, Fashion, Periklanan, Fotografi, Musik, TV dan Radio, Arsitektur, Penerbitan, Film, Animasi, dan Video, Seni Pertunjukan, Desain Produk, Aplikasi dan Pengembangan Permainan serta Seni Rupa)	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
				Memperkuat pemberdayaan UMKM melalui inovasi, teknologi digital dan ekosistem bisnis berkelanjutan	
				Membangun taman kreativitas di setiap desa	
		Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mewujudkan Badung Bersih dengan menerapkan manajemen pengelolaan sampah secara terintegrasi	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			Indeks Ketahanan Daerah		Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Sasaran 3: Meningkatkan Ketertiban Masyarakat	Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Meningkatkan sistem pengamanan wilayah bersama aparat keamanan untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber: Hasil Pemetaan Program Prioritas Kabupaten Badung

Tabel 3. 9

Program Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.						
Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali	Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya.	Sasaran 1: Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama.		Indeks Harmoni Indonesia		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sosial
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
		Sasaran 2: Menguatnya Pelestarian Terhadap Adat, Tradisi, Seni dan Budaya		Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung		
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dikembangkan /dimanfaat/dimanfaatkan /dibina	Program Pembinaan Sejarah	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Jumlah penyelenggaraan Presentasi Seni dan Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang Dilestarikan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kearsipan
Misi 2: Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Tujuan 2: Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Badung			Indeks Pembangunan Manusia		
		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Secara Inklusif dan Berdaya Saing		Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
			Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
		Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan

VISI/ MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan
		Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja		Pengeluaran Perkapita Penduduk		
				Tingkat Kemiskinan		
				Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sosial
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Tenaga Kerja
		Sasaran 4: Terbangunnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Gender		
				Indeks Pembangunan Keluarga		
				Indeks Perlindungan Anak		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif di tingkat Desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang	Program Perlindungan Khusus Anak	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
			eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	mendapat pendampingan komprehensif		
Misi 3 : Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah.	Tujuan 3: Terwujudnya Ekonomi Badung yang Tangguh, Adil, dan Merata			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				PDRB Perkapita (Ribuan Rupiah/Kapita/Tahun)		
				Rasio Gini		
		Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Badung berbasis Ekonomi Kerakyatan		Rasio Kewirausahaan		
				Persentase Koperasi Aktif		
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Terbinanya IKM Sektor Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perindustrian
		Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal		Persentase Peningkatan Investasi Daerah		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
Misi 4 : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata	Tujuan 4: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Badung			Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB		
		Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Pangan, Produktivitas dan		Indeks Ketahanan Pangan		
				Nilai Tukar Petani		
				Nilai Tukar Nelayan		

VISI/ MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
		Integrasi Sektor Pertanian dengan Sektor Pariwisata Secara Berkesinambungan		Persentase Penyerapan Produk Pertanian pada sektor Pariwisata		
				Persentase Penyerapan Produk Perikanan pada sektor Pariwisata		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Penyuluhan Pertanian	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pertanian
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perdagangan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan
Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru	Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Publik			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		
		Sasaran: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Terpadu		Persentase Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik		
				Cakupan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni		
				Rasio Konektivitas Kabupaten		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Perbaikan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya akses layanan masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perhubungan
Misi 6 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi.	Tujuan 6: Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi		
				Indeks Akses Keuangan Daerah		
		Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Berintegritas		Indeks Profesionalitas ASN		
				Indeks Sistem Merit		
				Nilai AKIP		
				Opini BPK		
				Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Indeks Pemerintah Digital		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Indeks Inovasi Daerah		
				Derajat Desentralisasi Fiskal/DDF		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Unsur Kepegawaian
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Program Kepegawaian Daerah	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Unsur Kepegawaian
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pengawasan
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Komunikasi, dan Informasi

VISI/ MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
				Pemerintah Daerah (survei)		
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Keuangan
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas		Persentase Desa Mandiri		
			Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Persentase desa yang ekonominya diberdayakan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tata kelola pemerintahan desanya ditingkatkan	Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Penataan Desa	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum dalam PDRB		
Misi 7: Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.	Tujuan 7: Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara		
				Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata		

VISI/ MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET (7)
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif		
			Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Cakupan Promosi Pariwisata yang dilakukan	Program Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
		Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Indeks Ketahanan Daerah		
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Sasaran 3: Meningkatnya Ketertiban Masyarakat		Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat		
			meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 3. 10

Penetapan Target Kinerja dan Pagu Program Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
Visi : Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.														
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali	Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya.			Indeks Harmoni Indonesia	6,96		6,98		7,00		7,02		7,03	
		Sasaran 1: Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama.		Indeks Kerukunan Umat Beragama	96,65		96,70		96,75		96,80		96,85	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	-	1.927.298.410,00	-	2.023.663.330,50	-	2.124.846.497,03	-	2.231.088.821,88	-	2.342.643.262,97
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-	1.199.484.698,00	-	1.259.458.932,90	-	1.322.431.879,55	-	1.388.553.473,52	-	1.457.981.147,20
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan Sosial	-	1.771.521.426,00	-	1.860.097.497,30	-	1.953.102.372,17	-	2.050.757.490,77	-	2.153.295.365,31
			Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	-	173.905.933.304,00	-	182.601.229.969,20	-	191.731.291.467,66	-	201.317.856.041,04	-	211.383.748.843,10
		Sasaran 2: Menguatnya Pelestarian Terhadap Adat, Tradisi, Seni dan Budaya		Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung	68,00		71,00		74,00		77,00		81,00	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
Misi 2 : Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Tujuan 2: Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Badung		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	-	62.988.331.211,00	-	66.137.747.771,55	-	69.444.635.160,13	-	72.916.866.918,13	-	76.562.710.264,04
			Program Pembinaan Sejarah	Jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dike mbangkan/dimanfaat kan/dibina	-	6.875.817.100,00	-	7.219.607.955,00	-	7.580.588.352,75	-	7.959.617.770,39	-	8.357.598.658,91
			Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	Jumlah penyelenggaraan Presentasi Seni dan Budaya	-	6.875.817.100,00	-	7.219.607.955,00	-	7.580.588.352,75	-	7.959.617.770,39	-	8.357.598.658,91
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang Dilestarikan	-	66.130.900,00	-	69.437.445,00	-	72.909.317,25	-	76.554.783,11	-	80.382.522,27
		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Secara Inklusif dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	84,11		84,19		84,27		84,35		84,43	
				Indeks Pendidikan	0,6706	749.173.809.744,00	0,6711	786.632.500.231,20	0,6716	825.964.125.242,76	0,6721	867.262.331.504,90	0,6830	910.625.448.080,14
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	100 %	697.132.874.908,00	100 %	731.989.518.653,40	100 %	768.588.994.586,07	100 %	807.018.444.315,37	100 %	847.369.366.531,14
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra										
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sasaran 2: Meningkatnya Derajat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100 %	51.181.887.196,00	100 %	53.740.981.555,80	100 %	56.428.030.633,59	100 %	59.249.432.165,27	100 %	62.211.903.773,53
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	100 %	859.047.640,00	100 %	902.000.022,00	100 %	947.100.023,10	100 %	994.455.024,26	100 %	1.044.177.775,47
				Umur Harapan Hidup	75,93		75,95		75,97		75,99		76,00	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
		Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	2.532.511.500,00	-	2.659.137.075,00	-	2.792.093.928,75	-	2.931.698.625,19	-	3.078.283.556,45
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	248.444.709.229,00	-	260.866.944.690,45	-	273.910.291.924,97	-	287.605.806.521,22	-	301.986.096.847,28
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	640.363.948,00	-	672.382.145,40	-	706.001.252,67	-	741.301.315,30	-	778.366.381,07
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Prosentase pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	-	3.019.423.500,00	-	3.170.394.675,00	-	3.328.914.408,75	-	3.495.360.129,19	-	3.670.128.135,65
		Sasaran 3: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja		Pengeluaran Perkapita Penduduk	19.301.500,00		19.687.530,00		20.081.280,00		20.482.910,00		20.892.570,00	
				Tingkat Kemiskinan	2,10 - 2,45		1,75 - 2,10		1,40 - 1,75		1,25 - 1,95		1,05 - 1,75	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	1,62		1,56		1,50		1,44		1,39	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan sosial	-	1.771.521.426,00	-	1.860.097.497,30	-	1.953.102.372,17	-	2.050.757.490,77	-	2.153.295.365,31
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	4.050.255.990,00	-	4.252.768.789,50	-	4.465.407.228,98	-	4.688.677.590,42	-	4.923.111.469,94
		Sasaran 4: Terbangunnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Gender	96,00		96,03		96,06		96,09		96,11	
				Indeks Pembangunan Keluarga	70,80		71,70		72,60		73,50		74,30	
				Indeks Perlindungan Anak	74,50		75,20		75,80		76,20		78,20	
			Program Pengarusutamaan Gender Dan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan	-	265.501.400,00	-	278.776.470,00	-	292.715.293,50	-	307.351.058,18	-	322.718.611,08

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
			Pemberdayaan Perempuan	n Gender (PUG) yang aktif										
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif di tingkat Desa	-	20.477.600,00	-	21.501.480,00	-	22.576.554,00	-	23.705.381,70	-	24.890.650,79
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapat pendampingan komprehensif	-	30.227.800,00	-	31.739.190,00	-	33.326.149,50	-	34.992.456,98	-	36.742.079,82
Misi 3: Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah.	Tujuan 3: Terwujudnya Ekonomi Badung yang Tangguh, Adil, dan Merata			Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,5 - 7,0		7,0 - 8,0		8,0 - 8,5		8,5 - 9,0		8,75 - 9,25	
				PDRB Perkapita (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)	151.900,00		163.500,00		175.900,00		189.200,00		203.400,00	
				Rasio Gini	0,27		0,27		0,26		0,26		0,26	
		Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Badung berbasis Ekonomi Kerakyatan		Rasio Kewirausahaan	4,25		4,50		4,75		5,00		5,25	4.951.116.342,55
				Persentase Koperasi Aktif	90,46		90,53		90,60		90,70		90,78	
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,19		2,19		2,19		2,19		2,19	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	-	429.057.334,00	-	450.510.200,70	-	473.035.710,74	-	496.687.496,27	-	521.521.871,09
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	403.172.387,00	-	423.331.006,35	-	444.497.556,67	-	466.722.434,50	-	490.058.556,23
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Terbinanya IKM Sektor Industri	-	3.241.065.947,00	-	3.403.119.244,35	-	3.573.275.206,57	-	3.751.938.966,90	-	3.939.535.915,24

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
		Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	11,00		11,50		12,00		12,50		13,00	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	1,00	487.237.200,00	1,00	511.599.060,00	1,00	537.179.013,00	1,00	564.037.963,65	1,00	592.239.861,83
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	137.587.900,00	100 %	144.467.295,00	100 %	151.690.659,75	100 %	159.275.192,74	100 %	167.238.952,37
Misi 4 : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata	Tujuan 4: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Badung			Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	6,14		6,17		6,19		6,21		6,23	
		Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Pangan, Produktivitas dan Integrasi Sektor Pertanian dengan Sektor Pariwisata Secara Berkesinambungan		Indeks Ketahanan Pangan	92,80		93,40		94,00		94,60		95,20	
				Nilai Tukar Petani	112,30		114,80		117,30		119,80		120,30	
				Nilai Tukar Nelayan	107,00		108,00		109,00		110,00		111,00	
				Persentase Penyerapan Produk Pertanian pada sektor Pariwisata	31,30		31,60		31,90		32,20		32,50	
				Persentase Penyerapan Produk Perikanan pada sektor Pariwisata	25,50		26,00		26,50		27,00		27,50	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	100 %	6.886.927.014,00	100 %	7.231.273.364,70	100 %	7.592.837.032,94	100 %	7.972.478.884,58	100 %	8.371.102.828,81
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	54.173.300,00	100 %	56.881.965,00	100 %	59.726.063,25	100 %	62.712.366,41	100 %	65.847.984,73
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	-	116.977.800,00	-	122.826.690,00	-	128.968.024,50	-	135.416.425,73	-	142.187.247,01
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	8475 Ton	5.983.592.833,00	8475 Ton	6.282.772.474,65	8475 Ton	6.596.911.098,38	8475 Ton	6.926.756.653,30	8475 Ton	7.273.094.485,97

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru	Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Publik			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	4,20		4,30		4,40		4,50		4,60	
		Sasaran: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Terpadu		Persentase Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik	91,00		92,00		93,00		94,00		95,00	
				Cakupan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	93,60		95,06		96,72		98,37		100,00	
				Rasio Konektivitas Kabupaten	0,30		0,42		0,50		0,56		0,61	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	-	3.793.003.421.950,00	-	3.982.653.593.047,50	-	4.181.786.272.699,87	-	4.390.875.586.334,87	-	4.610.419.365.651,61
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	-	34.429.210.300,00	-	36.150.670.815,00	-	37.958.204.355,75	-	39.856.114.573,54	-	41.848.920.302,21
			Program Penyelenggaraan Lahu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	100 %	102.657.694.758,00	100 %	107.790.579.495,90	100 %	113.180.108.470,70	100 %	118.839.113.894,23	100 %	124.781.069.588,94
Misi 6 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi.	Tujuan 6: Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	89,00		89,50		90,00		90,50		91,00	
				Indeks Akses Keuangan Daerah	4,83		4,86		4,89		4,91		4,93	
		Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien,		Indeks Profesionalitas ASN	84,30		84,80		85,20		85,70		86,10	
				Indeks Sistem Merit	0,90		0,91		0,92		0,93		0,94	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
dan Berintegritas				Nilai AKIP	77,80		78,10		78,40		78,70		80,10	
				Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	91,99		92,59		93,39		94,89		95,39	
				Indeks Pemerintah Digital	2,00		2,00*		2,60		2,60*		3,20	
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	81,00		82,00		83,00		85,00		85,00	
				Indeks Inovasi Daerah	66,55		70,30		74,15		78,10		82,10	
				Derajat Desentralisasi Fiskal /DDF	80,36		82,35		84,34		86,35		88,35	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	-	16.774.624.636,00	-	17.613.355.867,80	-	18.494.023.661,19	-	19.418.724.844,25	-	20.389.661.086,46
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	-	2.572.146.620,00	-	2.700.753.951,00	-	2.835.791.648,55	-	2.977.581.230,98	-	3.126.460.292,53
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100 %	1.518.601.000,00	100 %	1.594.531.050,00	100 %	1.674.257.602,50	100 %	1.757.970.482,63	100 %	1.845.869.006,76
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	100 %	10.639.782.420,00	100 %	11.171.771.541,00	100 %	11.730.360.118,05	100 %	12.316.878.123,95	100 %	12.932.722.030,15
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	858.553.800,00	100 %	901.481.490,00	100 %	946.555.564,50	100 %	993.883.342,73	100 %	1.043.577.509,86
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai	-	5.759.554.274,00	-	6.047.531.987,70	-	6.349.908.587,09	-	6.667.404.016,44	-	7.000.774.217,26

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
				Landasan dalam Implementasi Pembangunan										
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100 %	7.553.632.680,00	100 %	7.931.314.314,00	100 %	8.327.880.029,70	100 %	8.744.274.031,19	100 %	9.181.487.732,74
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	1.887.842.166,00	100 %	1.982.234.274,30	100 %	2.081.345.988,02	100 %	2.185.413.287,42	100 %	2.294.683.951,79
				Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas										
				Persentase Desa Mandiri	84,50		87,00		89,25		91,25		93,50	
			Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	100 %	9.216.600,00	100 %	9.677.430,00	100 %	10.161.301,50	100 %	10.669.366,58	100 %	11.202.834,90
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	19.320.700,00	100 %	20.286.735,00	100 %	21.301.071,75	100 %	22.366.125,34	100 %	23.484.431,60
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparaturnya desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	2.768.412.888,00	100 %	2.906.833.532,40	100 %	3.052.175.209,02	100 %	3.204.783.969,47	100 %	3.365.023.167,94
Misi 7 : Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.	Tujuan 7: Meningkatnya Kualitas Pariwisata			Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum dalam PDRB	26,42		26,92		27,52		28,22		29,02	
		Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	1,20		1,30		1,40		1,50		1,60	
				Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	23,61		26,38		29,16		31,94		34,72	
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata	-	505.898.068,00	-	531.192.971,40	-	557.752.619,97	-	585.640.250,97	-	614.922.263,52

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Cakupan Promosi Pariwisata yang dilakukan	-	6.592.783.022,00	-	6.922.422.173,10	-	7.268.543.281,76	-	7.631.970.445,84	-	8.013.568.968,13
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	111.561.546.365,00	-	117.139.623.683,25	-	122.996.604.867,41	-	129.146.435.110,78	-	135.603.756.866,32
			Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan perbankan	-	2.631.500.850,00	-	2.763.075.892,50	-	2.901.229.687,13	-	3.046.291.171,48	-	3.198.605.730,06
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	-	155.423.722,00	-	163.194.908,10	-	171.354.653,51	-	179.922.386,18	-	188.918.505,49
		Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,87		71,04		71,22		71,39		71,56	
				Indeks Ketahanan Daerah	0,77		0,78		0,79		0,80		0,81	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	100 %	392.342.400,00	100 %	411.959.520,00	100 %	432.557.496,00	100 %	454.185.370,80	100 %	476.894.639,34
			Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	100 %	99.612.708.541,00	100 %	104.593.343.968,05	100 %	109.823.011.166,45	100 %	115.314.161.724,78	100 %	121.079.869.811,01
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 %	2.134.290.103,00	100 %	2.241.004.608,15	100 %	2.353.054.838,56	100 %	2.470.707.580,49	100 %	2.594.242.959,51
		Sasaran 3: Meningkatnya Ketertiban Masyarakat		Indeks Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Penyelenggaraa n Pelindungan Masyarakat	87,50		90,00		92,50		95,00		97,50	
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase penyelesaian permasalahan ketentraman	90 %	3.026.385.656,00	90 %	3.177.704.938,80	90 %	3.336.590.185,74	90 %	3.503.419.695,03	90 %	3.678.590.679,78

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)	Kinerja	PAGU (Rp)
				dan ketertiban umum										

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Tahun 2026-2030 dibutuhkan program perangkat daerah yang dapat mengakomodir Tujuan dan Sasaran tersebut dengan pengalokasian pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Pada **Tabel 4.1** disajikan program perangkat daerah yang mencakup semua Bidang Urusan/Program, Indikator Outcome, Baseline 2024, Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029 serta Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Program-program perangkat daerah disusun sebagai upaya konkret untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan program-program ini didasarkan pada analisis isu strategis yang telah diidentifikasi dalam tahap perencanaan teknokratik RPJMD. Isu-isu seperti geopolitik dan geoekonomi, alih fungsi lahan pertanian, ekonomi biru, lingkungan hidup, perkembangan teknologi, dan ledakan penduduk menjadi perhatian utama dalam perumusan program perangkat daerah.

Dengan demikian, Program program perangkat daerah ini berperan penting dalam menjabarkan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh oleh setiap perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Badung yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.747.293.021.138		1.773.567.412.826		1.800.211.532.189		1.827.229.678.107		1.854.626.151.538	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.059.660.146.230		1.061.647.660.654		1.070.293.424.385		1.078.430.894.531		1.086.020.273.626	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu (Persentase)	100	100	100	1.059.660.146.230	100	1.061.647.660.654	100	1.070.293.424.385	100	1.078.430.894.531	100	1.086.020.273.626	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					687.632.874.908		711.919.752.172		729.918.107.804		748.798.783.576		768.605.877.912	
Meningkatnya partisipasi usia anak sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	99,93	99,96	100	687.632.874.908	100	711.919.752.172	100	729.918.107.804	100	748.798.783.576	100	768.605.877.912	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					54.547.069.730		55.300.279.405		56.089.175.425		56.915.540.122		57.781.244.964	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					859.047.640		902.000.022		947.100.024		994.455.024		1.044.177.774	
meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (Persentase)	100	100	100	859.047.640	100	902.000.022	100	947.100.024	100	994.455.024	100	1.044.177.774	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN					51.181.887.196		51.766.837.745		52.379.061.680		53.019.920.692		53.690.844.562	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional (Persentase)	100	100	100	51.181.887.196	100	51.766.837.745	100	52.379.061.680	100	53.019.920.692	100	53.690.844.562	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					2.506.134.894		2.631.441.638		2.763.013.721		2.901.164.406		3.046.222.628	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	100	100	100	2.506.134.894	100	2.631.441.638	100	2.763.013.721	100	2.901.164.406	100	3.046.222.628	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
TOTAL KESELURUHAN					1.801.840.090.868		1.828.867.692.231		1.856.300.707.614		1.884.145.218.229		1.912.407.396.502	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.458.990.453.926,2		2.161.415.100.802,65		2.104.163.416.350,25		2.139.695.159.608,15		2.181.013.292.605,81	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					809.814.026.878		1.105.542.743.414,25		1.130.119.771.460,08		1.154.928.505.502,72		1.184.548.669.561,21	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah (%)	75,02	78	80	766.147.070.264	82	777.639.276.318	84	789.303.865.462	86	801.143.423.445	88	813.160.574.796	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.780.000.000		213.162.000.000		216.912.000.000		220.680.000.000		224.464.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.788.071.695		2.927.475.279		3.073.849.043		3.227.541.095		3.388.918.570	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					1.672.612.368		1.756.242.986		1.844.055.135		1.936.257.892		2.033.070.787	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.064.019.050		2.148.215.595		2.275.784.303		2.389.573.518		2.509.052.194	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.385.153.513		2.403.747.296,65		2.448.036.053,08		2.457.565.787,24		2.459.871.706,7	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.660.596.994		3.843.626.843		4.035.808.185		4.237.598.595		4.449.478.524	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.211.301.988		2.838.820.805		2.520.561.070		2.810.653.339		3.243.187.285	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.828.166.394		4.014.040.455		4.187.375.203		3.368.216.182		3.556.921.292	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					5.073.654.954		5.327.337.701		5.593.704.586		5.873.389.816		6.167.059.306	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					4.259.735.385		3.853.201.022		4.110.814.616		4.392.273.971		4.699.934.929	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.331.501.818		2.448.076.958		2.795.073.854		3.074.581.340		3.382.039.573	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.490.428.173		2.519.841.900		2.552.848.500		2.586.300.800		2.620.207.440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					1.832.536.750		1.926.940.207		2.023.287.217		2.124.451.578		2.230.674.157	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					4.289.177.532		4.503.636.408,6		4.728.818.229		4.965.259.140,48		5.213.522.097,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					0		37.115.131.820		40.856.945.002		44.830.709.502		50.485.078.452	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					0		37.115.131.820		40.856.945.002		44.830.709.502		50.485.078.452	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					645.648.177.028,2		1.050.993.633.612		968.717.107.302		978.948.162.118		990.108.272.012	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase FKTP, FKRTL yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (Persentase)	65	70	80	416.174.225.120,2	100	422.416.838.496	100	428.753.091.074	100	435.184.387.440	100	441.712.153.251	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	75	80	85		90		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Cakupan IP SPM Kesehatan (Persentase)	99	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					212.020.000.000		5.875.000.000		5.410.555.000		4.977.393.325		4.578.254.225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					766.372.220		777.867.804		789.535.821		801.378.860		813.399.539	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.063.146.508		1.116.303.833		1.172.119.025		1.230.724.976		1.292.261.225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					104.413.439		109.634.111		115.115.817		120.871.607		126.915.188	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.412.180.920		1.057.053.533		1.072.918.474		1.089.012.157		1.105.347.338	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					2.601.667.121		2.548.288.660		2.799.997.327		3.076.878.929		3.381.434.983	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					733.638.720		553.999.370		572.697.571		591.430.503		560.269.284	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					2.726.592.026		1.535.204.874		1.644.138.442		1.763.296.562		1.893.691.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.479.906.036		1.597.538.592		1.721.551.197		1.860.913.648		2.002.687.371	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.754.256.974		1.476.738.978		1.647.377.141		1.672.087.795		1.697.169.111	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					663.189.160		719.458.076		781.353.488		839.439.272		884.333.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					965.665.677		1.018.851.258		1.075.269.492		1.135.790.326		1.200.376.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					2.286.869.227		2.362.141.629		2.397.573.754		2.433.537.356		2.470.040.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					896.053.880		986.031.268		1.084.874.395		1.193.491.834		1.312.861.019	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					0		303.421.341.565		258.839.469.642		260.488.763.764		260.038.539.039	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					0		303.421.341.565		258.839.469.642		260.488.763.764		265.038.539.039	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					640.313.948		1.481.830.356,4		1.596.394.284,67		1.720.733.650,3		1.855.741.949,07	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	80	85	90	640.313.948	95	672.382.145,4	100	706.001.252,67	100	741.301.315,3	100	778.366.381,07	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	92	94	96		98		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					0		809.448.211		890.393.032		979.432.335		1.077.375.568	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					274.564.672		516.615.795		568.277.374		625.105.112		687.615.623	
Meningkatnya kualitas dan distribusi ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase apotek, toko obat dan usaha kecil obat tradisional memiliki sarana prasarana sesuai standar (Persentase)	75	78	80	274.564.672	82	516.615.795	84	568.277.374	86	625.105.112	88	687.615.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase PIRT memiliki sarana prasarana sesuai standar (Persentase)	90	92	94		96		98		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.613.371.400		2.880.277.625		3.161.865.929,5		3.472.653.225,13		3.812.993.460,53	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan PHBS (Persentase)	100	100	100	2.514.011.500	100	2.777.460.756	100	3.055.206.832	100	3.360.727.515	100	3.696.800.267	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kader posyandu aktif (Persentase)	75	78	80		82		84		86		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase posyandu aktif yang melayani siklus hidup (Persentase)	75	76	78		80		82		84		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.400.000		5.481.000		5.563.215		5.646.663		5.731.363	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					18.107.900		18.443.464		18.720.115		19.000.917		19.285.931	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					12.200.000		12.283.000		12.568.000		12.757.000		12.948.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					15.177.000		15.404.655		15.635.725		15.870.261		16.108.315	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					10.180.000		11.198.000		12.371.000		14.968.910		16.465.801	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					9.810.000		10.300.500		10.815.525		11.356.301		11.924.116	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.800.000		5.887.000		5.975.305		6.064.935		6.155.909	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.012	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.600.000		5.880.000		6.174.000		6.482.700		6.806.835	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					10.085.000		10.589.250		11.118.712,5		11.674.648,13		12.258.380,53	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					1.458.990.453.926		2.161.415.100.803		2.104.163.416.350		2.139.695.159.608		2.181.013.292.606	Total Bidang yang menangani Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					215.800.000.000		219.037.000.000		222.322.555.000		225.657.393.325		229.042.254.225	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.780.000.000		213.162.000.000		216.912.000.000		220.680.000.000		224.464.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.780.000.000		213.162.000.000		216.912.000.000		220.680.000.000		224.464.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					212.020.000.000		5.875.000.000		5.410.555.000		4.977.393.325		4.578.254.225	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					212.020.000.000		5.875.000.000		5.410.555.000		4.977.393.325		4.578.254.225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					215.800.000.000		219.037.000.000		222.322.555.000		225.657.393.325		229.042.254.225	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.559.843.915		3.710.824.083		3.868.948.079		4.034.566.618		4.208.049.472	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.788.071.695		2.927.475.279		3.073.849.043		3.227.541.095		3.388.918.570	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.788.071.695		2.927.475.279		3.073.849.043		3.227.541.095		3.388.918.570	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					766.372.220		777.867.804		789.535.821		801.378.860		813.399.539	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					766.372.220		777.867.804		789.535.821		801.378.860		813.399.539	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5.400.000		5.481.000		5.563.215		5.646.663		5.731.363	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.400.000		5.481.000		5.563.215		5.646.663		5.731.363	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					3.559.843.915,00		3.710.824.083,00		3.868.948.079,00		4.034.566.618,00		4.208.049.472,00	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.753.866.776		2.890.990.283		3.034.894.275		3.185.983.785		3.344.617.943	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.672.612.368		1.756.242.986		1.844.055.135		1.936.257.892		2.033.070.787	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					1.672.612.368		1.756.242.986		1.844.055.135		1.936.257.892		2.033.070.787	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.063.146.508		1.116.303.833		1.172.119.025		1.230.724.976		1.292.261.225	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.063.146.508		1.116.303.833		1.172.119.025		1.230.724.976		1.292.261.225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					18.107.900		18.443.464		18.720.115		19.000.917		19.285.931	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					18.107.900		18.443.464		18.720.115		19.000.917		19.285.931	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					2.753.866.776		2.890.990.283		3.034.894.275		3.185.983.785		3.344.617.943	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.168.432.489		2.257.849.706		2.390.900.120		2.510.445.125		2.635.967.382	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.064.019.050		2.148.215.595		2.275.784.303		2.389.573.518		2.509.052.194	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.064.019.050		2.148.215.595		2.275.784.303		2.389.573.518		2.509.052.194	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					104.413.439		109.634.111		115.115.817		120.871.607		126.915.188	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					104.413.439		109.634.111		115.115.817		120.871.607		126.915.188	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					2.168.432.489		2.257.849.706		2.390.900.120		2.510.445.125		2.635.967.382	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.812.511.433		3.476.205.484,65		3.536.590.252,08		3.562.448.205,24		3.581.327.359,7	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.385.153.513		2.403.747.296,65		2.448.036.053,08		2.457.565.787,24		2.459.871.706,7	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.385.153.513		2.403.747.296,65		2.448.036.053,08		2.457.565.787,24		2.459.871.706,7	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.412.180.920		1.057.053.533		1.072.918.474		1.089.012.157		1.105.347.338	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.412.180.920		1.057.053.533		1.072.918.474		1.089.012.157		1.105.347.338	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					15.177.000		15.404.655		15.635.725		15.870.261		16.108.315	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					15.177.000		15.404.655		15.635.725		15.870.261		16.108.315	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					3.812.511.433		3.476.205.485		3.536.590.252		3.562.448.205		3.581.327.360	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					6.272.444.115		6.403.113.503		6.848.176.512		7.329.446.434		7.847.379.308	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.660.596.994		3.843.626.843		4.035.808.185		4.237.598.595		4.449.478.524	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.660.596.994		3.843.626.843		4.035.808.185		4.237.598.595		4.449.478.524	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2.601.667.121		2.548.288.660		2.799.997.327		3.076.878.929		3.381.434.983	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					2.601.667.121		2.548.288.660		2.799.997.327		3.076.878.929		3.381.434.983	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					10.180.000		11.198.000		12.371.000		14.968.910		16.465.801	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					10.180.000		11.198.000		12.371.000		14.968.910		16.465.801	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					6.272.444.115		6.403.113.503		6.848.176.512		7.329.446.434		7.847.379.308	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.949.940.708		3.398.070.175		3.098.771.141		3.407.871.967		3.809.534.100	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.211.301.988		2.838.820.805		2.520.561.070		2.810.653.339		3.243.187.285	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.211.301.988		2.838.820.805		2.520.561.070		2.810.653.339		3.243.187.285	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					733.638.720		553.999.370		572.697.571		591.430.503		560.269.284	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					733.638.720		553.999.370		572.697.571		591.430.503		560.269.284	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					3.949.940.708		3.398.070.175		3.098.771.141		3.407.871.967		3.809.534.100	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					6.554.758.420		5.549.245.329		5.831.513.645		5.131.512.744		5.450.612.952	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.828.166.394		4.014.040.455		4.187.375.203		3.368.216.182		3.556.921.292	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					3.828.166.394		4.014.040.455		4.187.375.203		3.368.216.182		3.556.921.292	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2.726.592.026		1.535.204.874		1.644.138.442		1.763.296.562		1.893.691.660	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					2.726.592.026		1.535.204.874		1.644.138.442		1.763.296.562		1.893.691.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					6.554.758.420		5.549.245.329		5.831.513.645		5.131.512.744		5.450.612.952	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					6.729.454.794		7.066.177.533		7.419.736.409		7.790.973.230		8.185.771.891	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.073.654.954		5.327.337.701		5.593.704.586		5.873.389.816		6.167.059.306	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					5.073.654.954		5.327.337.701		5.593.704.586		5.873.389.816		6.167.059.306	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.645.989.840		1.728.539.332		1.815.216.298		1.906.227.113		2.006.788.469	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.645.989.840		1.728.539.332		1.815.216.298		1.906.227.113		2.006.788.469	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					9.810.000		10.300.500		10.815.525		11.356.301		11.924.116	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					9.810.000		10.300.500		10.815.525		11.356.301		11.924.116	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					6.729.454.794		7.066.177.533		7.419.736.409		7.790.973.230		8.185.771.891	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					6.019.792.359		5.335.827.000		5.764.167.062		6.070.426.701		6.403.259.949	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.259.735.385		3.853.201.022		4.110.814.616		4.392.273.971		4.699.934.929	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					4.259.735.385		3.853.201.022		4.110.814.616		4.392.273.971		4.699.934.929	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.754.256.974		1.476.738.978		1.647.377.141		1.672.087.795		1.697.169.111	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					1.754.256.974		1.476.738.978		1.647.377.141		1.672.087.795		1.697.169.111	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					5.800.000		5.887.000		5.975.305		6.064.935		6.155.909	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.800.000		5.887.000		5.975.305		6.064.935		6.155.909	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					6.019.792.359		5.335.827.000		5.764.167.062		6.070.426.701		6.403.259.949	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.996.690.978		3.169.635.034		3.578.632.342		3.916.335.862		4.268.803.785	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.331.501.818		2.448.076.958		2.795.073.854		3.074.581.340		3.382.039.573	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.331.501.818		2.448.076.958		2.795.073.854		3.074.581.340		3.382.039.573	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					663.189.160		719.458.076		781.353.488		839.439.272		884.333.200	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					663.189.160		719.458.076		781.353.488		839.439.272		884.333.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.012	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.012	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					2.996.690.978		3.169.635.034		3.578.632.342		3.916.335.862		4.268.803.785	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.446.453.850		3.523.815.558		3.607.625.792		3.695.250.566		3.786.694.424	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.490.428.173		2.519.841.900		2.552.848.500		2.586.300.800		2.620.207.440	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					2.490.428.173		2.519.841.900		2.552.848.500		2.586.300.800		2.620.207.440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					943.825.677		991.690.658		1.042.209.292		1.096.192.766		1.153.538.984	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					943.825.677		991.690.658		1.042.209.292		1.096.192.766		1.153.538.984	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					12.200.000		12.283.000		12.568.000		12.757.000		12.948.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					12.200.000		12.283.000		12.568.000		12.757.000		12.948.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					3.446.453.850		3.523.815.558		3.607.625.792		3.695.250.566		3.786.694.424	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.125.005.977		4.294.961.836		4.427.034.971		4.564.471.634		4.707.521.412	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.832.536.750		1.926.940.207		2.023.287.217		2.124.451.578		2.230.674.157	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					1.832.536.750		1.926.940.207		2.023.287.217		2.124.451.578		2.230.674.157	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2.286.869.227		2.362.141.629		2.397.573.754		2.433.537.356		2.470.040.420	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					2.286.869.227		2.362.141.629		2.397.573.754		2.433.537.356		2.470.040.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5.600.000		5.880.000		6.174.000		6.482.700		6.806.835	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					5.600.000		5.880.000		6.174.000		6.482.700		6.806.835	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					4125005977.00		4294961836.00		4427034971.00		4564471634.00		4707521412.00	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.195.316.412		5.500.256.926,6		5.824.811.336,5		6.170.425.622,61		6.538.641.497,04	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.289.177.532		4.503.636.408,6		4.728.818.229		4.965.259.140,48		5.213.522.097,51	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					4.289.177.532		4.503.636.408,6		4.728.818.229		4.965.259.140,48		5.213.522.097,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					896.053.880		986.031.268		1.084.874.395		1.193.491.834		1.312.861.019	
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, serta UKM sesuai standar					896.053.880		986.031.268		1.084.874.395		1.193.491.834		1.312.861.019	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					10.085.000		10.589.250		11.118.712,5		11.674.648,13		12.258.380,53	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					10.085.000		10.589.250		11.118.712,5		11.674.648,13		12.258.380,53	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					5.195.316.412		5.500.256.927		5.824.811.337		6.170.425.623		6.538.641.497	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0		341.345.921.596		300.586.807.676		306.298.905.601		311.600.993.059	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		37.115.131.820		40.856.945.002		44.830.709.502		50.485.078.452	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					0		37.115.131.820		40.856.945.002		44.830.709.502		50.485.078.452	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0		303.421.341.565		258.839.469.642		260.488.763.764		260.038.539.039	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					0		303.421.341.565		258.839.469.642		260.488.763.764		260.038.539.039	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					0		809.448.211		890.393.032		979.432.335		1.077.375.568	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					0		809.448.211		890.393.032		979.432.335		1.077.375.568	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					-		341.345.921.596		300.586.807.676		306.298.905.601		311.600.993.059	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0		340.536.492.485,4		299.696.433.744,67		305.319.492.366,3		315.523.636.591,07	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		37.115.131.820		40.856.945.002		44.830.709.502		50.485.078.452	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah					0		37.115.131.820		40.856.945.002		44.830.709.502		50.485.078.452	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0		303.421.341.565		258.839.469.642		260.488.763.764		265.038.539.039	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					0		303.421.341.565		258.839.469.642		260.488.763.764		265.038.539.039	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					0		19.100,4		19.100,67		19.100,3		19.100,07	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					0		19.100,4		19.100,67		19.100,3		19.100,07	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					-		340.536.492.485		299.696.433.745		305.319.492.366		315.523.636.591	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					3.066.027.334.304		3.300.828.316.650		3.838.852.898.124		4.492.432.895.331		5.213.729.771.718	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					75.865.146.078		83.451.660.499		91.796.826.549		100.976.509.206		51.612.817.836	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu (Persentase)	-	100	100	75.865.146.078	100	83.451.660.499	100	91.796.826.549	100	100.976.509.206	100	51.612.817.836	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					717.680.711.835		517.819.680.000		537.306.648.444		572.371.972.130		615.078.368.550	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Baik Saluran Irigasi di Kabupaten Badung (Persentase)	-	98,25	98,4	717.680.711.835	99,1	517.819.680.000	99,2	537.306.648.444	99,8	572.371.972.130	100	615.078.368.550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					34.421.389.100		37.863.528.010		41.649.880.811		45.814.868.892		50.396.355.781	
Meningkatnya akses layanan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum-	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum yang aman di pedesaan (Persentase)	-	20	35	34.421.389.100	50	37.863.528.010	70	41.649.880.811	85	45.814.868.892	100	50.396.355.781	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					8.636.908.300		9.500.599.130		10.450.659.043		11.495.724.947		12.645.297.441	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah-	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) aman (Persentase)	-	87,8	89,53	8.636.908.300	92,14	9.500.599.130	94,79	10.450.659.043	97,39	11.495.724.947	100	12.645.297.441	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					192.934.256.352		212.227.681.987		233.450.450.186		256.795.495.205		282.475.044.726	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung-	Persentase Bangunan gedung negara dan fasilitas penunjang strategis kabupaten/ kota yang berkategori baik/berkondisi Baik (Persentase)	-	84,91	86,79	192.934.256.352	92,45	212.227.681.987	96,23	233.450.450.186	98,11	256.795.495.205	100	282.475.044.726	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					3.701.180.300		4.071.298.330		4.478.428.163		4.926.270.980		5.418.898.078	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata-	Persentase bangunan yang memenuhi standar teknis (Persentase)	-	11,08	20	3.701.180.300	40	4.071.298.330	60	4.478.428.163	80	4.926.270.980	100	5.418.898.078	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					2.029.170.088.553		2.431.973.349.530		2.915.467.433.847		3.495.434.225.780		4.191.083.378.298	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman-	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten (Persentase)	-	97,96	98,35	2.029.170.088.553	98,65	2.431.973.349.530	99,04	2.915.467.433.847	99,34	3.495.434.225.780	99,64	4.191.083.378.298	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.485.933.934		1.574.527.328		1.671.980.061		1.779.178.067		1.897.095.872	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi-					1.485.933.934		1.574.527.328		1.671.980.061		1.779.178.067		1.897.095.872	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.131.719.852		2.345.991.836		2.580.591.020		2.838.650.124		3.122.515.136	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang-					2.131.719.852		2.345.991.836		2.580.591.020		2.838.650.124		3.122.515.136	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL KESELURUHAN					3.066.027.334.304		3.300.828.316.650		3.838.852.898.124		4.492.432.895.331		5.213.729.771.718	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.060.880.467		14.763.924.490		15.502.120.714		16.277.226.750		17.091.088.089	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.345.190.126		3.512.449.632		3.688.072.113		3.872.475.719		4.066.099.507	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah daerah-					3.345.190.126		3.512.449.632		3.688.072.113		3.872.475.719		4.066.099.507	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
persentase terlaksananya urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
persentase pelaksanaan pengembang perumahan														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					439.038.438		460.990.360		484.039.878		508.241.872		533.653.965	
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman-					439.038.438		460.990.360		484.039.878		508.241.872		533.653.965	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
persentase terwujudnya permukiman tanpa kumuh														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
Perbaikan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman tidak layak huni														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					10.276.651.903		10.790.484.498		11.330.008.723		11.896.509.159		12.491.334.617	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman-					10.276.651.903		10.790.484.498		11.330.008.723		11.896.509.159		12.491.334.617	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
persentase terlaksananya penyerahan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di kabupaten badung														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0		0		0		0		0	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat -					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pemerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
TOTAL KESELURUHAN					14.060.880.467		14.763.924.490		15.502.120.714		16.277.226.750		17.091.088.089	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					50.908.491.141		51.672.118.508		52.447.200.285		53.233.908.290		54.032.416.914	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.882.105.485		49.143.737.862		49.792.400.606		50.446.368.628		51.184.589.768	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)	100	100	100	47.882.105.485	100	49.143.737.862	100	49.792.400.606	100	50.446.368.628	100	51.184.589.768	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.026.385.656		2.528.380.646		2.654.799.679		2.787.539.662		2.847.827.146	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman dan Ketertibaan Umum Yang ditindaklanjuti (Persentase)	95	95	95	3.026.385.656	95	2.528.380.646	95	2.654.799.679	95	2.787.539.662	95	2.847.827.146	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertibaan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					50.908.491.141		51.672.118.508		52.447.200.285		53.233.908.290		54.032.416.914	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertibaan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					81.720.870.844		87.588.868.173		96.999.986.803		104.163.472.150		115.295.031.253	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					65.604.050.332		70.666.206.636		79.231.192.189		85.506.237.805		95.704.935.191	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	88,25	88,31	88,5	65.604.050.332	88,75	70.666.206.636	88,9	79.231.192.189	88,95	85.506.237.805	90	95.704.935.191	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					16.116.820.512		16.922.661.537		17.768.794.614		18.657.234.345		19.590.096.062	
Meningkatnya kualitas pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (%)	88,25	88,31	88,5	16.116.820.512	88,75	16.922.661.537	88,9	17.768.794.614	88,95	18.657.234.345	90	19.590.096.062	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					81.720.870.844		87.588.868.173		96.999.986.803		104.163.472.150		115.295.031.253	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					27.903.440.492		33.272.569.255		37.088.302.355		39.014.815.670		41.847.654.439	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.764.446.980		30.034.810.145		32.868.476.946		33.893.278.690		36.922.858.503	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah					25.764.446.980		30.034.810.145		32.868.476.946		33.893.278.690		36.922.858.503	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.138.993.512		3.237.759.110		4.219.825.409		5.121.536.980		4.924.795.936	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					815.849.312		1.809.908.002		2.025.898.281		2.665.408.039		2.537.589.767	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat					887.693.200		1.017.830.108		1.123.612.435		1.235.768.679		1.359.346.048	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana					435.451.000		410.021.000		1.070.314.693		1.220.360.262		1.027.860.121	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					27.903.440.492		33.272.569.255		37.088.302.355		39.014.815.670		41.847.654.439	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					282.487.638.815		291.941.454.657		300.490.688.064		309.023.713.670		317.538.361.497	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.858.576.215		16.283.520.179		16.563.015.552		16.578.210.983		16.319.493.729	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	14.858.576.215	100	16.283.520.179	100	16.563.015.552	100	16.578.210.983	100	16.319.493.729	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.597.425.100		1.645.347.853		1.694.708.289		1.745.549.537		1.797.916.023	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persentase)	100	100	100	1.597.425.100	100	1.645.347.853	100	1.694.708.289	100	1.745.549.537	100	1.797.916.023	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.111.522.400		3.204.868.072		3.301.014.114		3.400.044.538		3.502.045.874	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar (Persentase)	100	100	100	3.111.522.400	100	3.204.868.072	100	3.301.014.114	100	3.400.044.538	100	3.502.045.874	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					261.988.072.700		269.847.714.881		277.943.146.327		286.281.440.717		294.869.883.939	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase)	100	100	100	261.988.072.700	100	269.847.714.881	100	277.943.146.327	100	286.281.440.717	100	294.869.883.939	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					244.171.700		251.496.851		259.041.756		266.813.009		274.817.399	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan sosial (Persentase)	100	100	100	244.171.700	100	251.496.851	100	259.041.756	100	266.813.009	100	274.817.399	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					687.870.700		708.506.821		729.762.026		751.654.886		774.204.533	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kewenangan kabupaten/kota (Persentase)	100	100	100	687.870.700	100	708.506.821	100	729.762.026	100	751.654.886	100	774.204.533	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
TOTAL KESELURUHAN					282.487.638.815		291.941.454.657		300.490.688.064		309.023.713.670		317.538.361.497	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					375.469.204.773		503.922.501.168,4		550.286.877.974,92		581.496.157.666,77		637.231.598.624,95	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					115.397.756.302		123.317.874.387		129.278.305.251		135.581.556.494		147.978.893.332	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	115.397.756.302	100	123.317.874.387	100	129.278.305.251	100	135.581.556.494	100	147.978.893.332	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					865.240.000		205.449.860		951.764.000		0		0	
Meningkatnay kualitas perencanaan lingkungan hidup-	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	0	0	100	865.240.000	100	205.449.860	100	951.764.000	0	0	0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					385.864.500		385.864.500		385.864.500		385.864.500		385.864.500	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup-	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	91,02	80,53	80,73	385.864.500	80,93	385.864.500	81,13	385.864.500	81,33	385.864.500	81,53	385.864.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50,4	71,56	71,76		71,96		72,16		72,36		72,56		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					157.895.599.286		175.264.115.207		194.543.167.880		197.986.441.936		216.670.590.403	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati-	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	157.895.599.286	100	175.264.115.207	100	194.543.167.880	100	197.986.441.936	100	216.670.590.403	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					139.645.100		146.627.355		146.627.355		146.627.355		146.627.355	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbahn Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)-	Persentase Limbah B3 yang dikelola (%)	100	100	100	139.645.100	100	146.627.355	100	146.627.355	100	146.627.355	100	146.627.355	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					258.686.696		258.863.500		259.724.030		260.670.613		261.711.854	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan persetujuan lingkungan yang diterbitkan-	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Pelaku Usaha)	0	75	80	258.686.696	85	258.863.500	90	259.724.030	95	260.670.613	100	261.711.854	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					132.644.700		132.644.700		132.644.700		132.644.700		132.644.700	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup-	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	75	132.644.700	80	132.644.700	85	132.644.700	95	132.644.700	100	132.644.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.146.000		50.146.000		50.146.000		50.146.000		50.146.000	
meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup-	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	65	50.146.000	80	50.146.000	85	50.146.000	95	50.146.000	100	50.146.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					730.913.648		767.459.330,4		805.832.296,92		846.123.911,77		888.430.106,95	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup-	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	55	60	730.913.648	65	767.459.330,4	70	805.832.296,92	75	846.123.911,77	80	888.430.106,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					99.612.708.541		203.393.456.329		223.732.801.962		246.106.082.157		270.716.690.374	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	68,4	71,6	75,7	99.612.708.541	79,8	203.393.456.329	83,9	223.732.801.962	88	246.106.082.157	89	270.716.690.374	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					375.469.204.773		503.922.501.168		550.286.877.975		581.496.157.667		637.231.598.625	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					76.430.534.557		84.081.219.633		92.487.457.974		101.734.320.152		111.905.868.549	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.091.125.191		28.703.737.710		31.574.111.480		34.731.522.628		38.204.674.892	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah dalam mendukung tujuan pembangunan daerah-	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100	26.091.125.191	100	28.703.737.710	100	31.574.111.480	100	34.731.522.628	100	38.204.674.892	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					2.807.842.166		3.088.626.383		3.397.489.020		3.737.237.923		4.110.961.715	
Meningkatnya jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan-	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan (Persentase)	100	100	100	2.807.842.166	100	3.088.626.383	100	3.397.489.020	100	3.737.237.923	100	4.110.961.715	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					47.088.199.400		51.797.019.340		56.976.721.274		62.674.393.401		68.941.832.742	
Meningkatnya jumlah dokumen atas pelaporan peristiwa penting-	Persentase Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Persentase)	98	98	98	47.088.199.400	98,2	51.797.019.340	98,3	56.976.721.274	98,4	62.674.393.401	98,5	68.941.832.742	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					443.367.800		491.836.200		539.136.200		591.166.200		648.399.200	
Meningkatnya jumlah perangkat daerah/instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan (Persentase)	58	67	67,2	443.367.800	67,3	491.836.200	67,4	539.136.200	67,5	591.166.200	67,6	648.399.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					76.430.534.557		84.081.219.633		92.487.457.974		101.734.320.152		111.905.868.549	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					23.839.346.206		25.718.387.430		29.173.051.801		31.072.580.871		34.152.635.854	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.188.219.606		18.850.070.000		20.708.400.500		22.752.551.505		25.001.133.020	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	-	-	100	17.188.219.606	100	18.850.070.000	100	20.708.400.500	100	22.752.551.505	100	25.001.133.020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					9.216.600		9.677.430		10.161.301		10.669.366		11.202.834	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	-	-	100	9.216.600	100	9.677.430	100	10.161.301	100	10.669.366	100	11.202.834	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					75.000.000		111.100.000		131.680.000		144.850.000		159.340.000	
Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	-	-	100	75.000.000	100	111.100.000	100	131.680.000	100	144.850.000	100	159.340.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.092.490.000		2.925.680.000		4.118.780.000		3.540.070.000		3.894.080.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	-	-	100	3.092.490.000	100	2.925.680.000	100	4.118.780.000	100	3.540.070.000	100	3.894.080.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.474.420.000		3.821.860.000		4.204.030.000		4.624.440.000		5.086.880.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	-	-	100	3.474.420.000	100	3.821.860.000	100	4.204.030.000	100	4.624.440.000	100	5.086.880.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TOTAL KESELURUHAN					23.839.346.206		25.718.387.430		29.173.051.801		31.072.580.871		34.152.635.854	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					23.275.191.300		23.510.242.543		23.675.103.639		24.233.550.542		25.384.753.634	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.642.049.408		22.851.861.872		22.987.848.450		23.515.014.300		24.635.837.760	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	22.642.049.408	100	22.851.861.872	100	22.987.848.450	100	23.515.014.300	100	24.635.837.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					266.273.400		272.143.300		285.178.000		296.874.330		306.471.300	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	IPG ()	-	96,16	96,19	266.273.400	96,22	272.143.300	96,25	285.178.000	96,28	296.874.330	96,31	306.471.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					52.479.200		55.103.160		53.260.000		54.500.000		55.210.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	IPG ()	-	96,16	96,22	52.479.200	96,25	55.103.160	96,28	53.260.000	96,31	54.500.000	96,34	55.210.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					20.477.600		22.525.360		24.777.896		27.255.686		29.981.254	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	74,08	74,2	74,5	20.477.600	75,2	22.525.360	75,8	24.777.896	76,2	27.255.686	77	29.981.254	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					65.042.192		68.294.301		71.709.016		75.294.467		79.059.190	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	74,08	74,2	74,5	65.042.192	75,2	68.294.301	75,8	71.709.016	76,2	75.294.467	77	79.059.190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					198.641.700		208.575.360		219.004.128		229.619.307		241.452.051	
Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	74,08	74,2	74,5	198.641.700	75,2	208.575.360	75,8	219.004.128	76,2	229.619.307	77	241.452.051	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					30.227.800		31.739.190		33.326.149		34.992.452		36.742.079	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelataran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	74,08	74,2	74,5	30.227.800	75,2	31.739.190	75,8	33.326.149	76,2	34.992.452	77	36.742.079	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.855.358.273		3.944.530.963		4.044.564.747		4.164.241.093		4.295.205.988	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					55.900.020		59.020.000		61.970.000		66.725.000		73.221.000	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR) ()	1,45	1,5	1,6	55.900.020	1,7	59.020.000	1,8	61.970.000	1,9	66.725.000	2	73.221.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	5,6	5,5	5,5		5,5		5,4		5,4		5,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					887.392.887		967.077.668		1.060.200.212		1.169.662.257		1.288.148.885	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	56,2	56,2	56,3	887.392.887	56,4	967.077.668	56,5	1.060.200.212	56,6	1.169.662.257	56,7	1.288.148.885	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	50	50	55		60		60		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.912.065.366		2.918.433.295		2.922.394.535		2.927.853.836		2.933.836.103	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	68,7	69,8	70,8	2.912.065.366	71,7	2.918.433.295	72,6	2.922.394.535	73,5	2.927.853.836	74,3	2.933.836.103	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					27.130.549.573		27.454.773.506		27.719.668.386		28.397.791.635		29.679.959.622	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					155.453.716.667		157.785.522.417		160.152.305.253		162.554.589.832		164.992.908.680	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.203.117.705		58.992.645.325		61.083.204.042		59.673.474.526		73.124.165.104	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu (Persentase)	-	100	100	64.203.117.705	100	58.992.645.325	100	61.083.204.042	100	59.673.474.526	100	73.124.165.104	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					91.250.598.962		98.792.877.092		99.069.101.211		102.881.115.306		91.868.743.576	
Meningkatnya cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Presentase Capaian Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (%)	-	-	100	91.250.598.962	100	98.792.877.092	100	99.069.101.211	100	102.881.115.306	100	91.868.743.576	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
TOTAL KESELURUHAN					155.453.716.667		157.785.522.417		160.152.305.253		162.554.589.832		164.992.908.680	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					141.976.305.387		146.235.594.549		150.622.662.384		155.141.342.255		159.795.582.524	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.493.677.198		29.348.487.514		30.228.942.139		31.135.810.404		32.069.884.716	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	28.493.677.198	100	29.348.487.514	100	30.228.942.139	100	31.135.810.404	100	32.069.884.716	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					10.639.782.420		10.958.975.893		11.287.745.169		11.626.377.523		11.975.168.850	
Meningkatnya Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (%)	100	100	100	10.639.782.420	100	10.958.975.893	100	11.287.745.169	100	11.626.377.523	100	11.975.168.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					102.842.845.769		105.928.131.142		109.105.975.076		112.379.154.328		115.750.528.958	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Penerapan Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Kabupaten Badung (%)	100	100	100	102.842.845.769	100	105.928.131.142	100	109.105.975.076	100	112.379.154.328	100	115.750.528.958	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					1.148.848.700		1.183.314.161		1.218.813.586		1.255.377.993		1.293.039.333	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					1.148.848.700		1.183.314.161		1.218.813.586		1.255.377.993		1.293.039.333	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral oleh Produsen Data (%)	100	100	100	1.148.848.700	100	1.183.314.161	100	1.218.813.586	100	1.255.377.993	100	1.293.039.333	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					3.217.187.150		3.313.702.765		3.413.113.847		3.515.507.263		3.620.972.481	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					3.217.187.150		3.313.702.765		3.413.113.847		3.515.507.263		3.620.972.481	
Meningkatnya Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	3.217.187.150	100	3.313.702.765	100	3.413.113.847	100	3.515.507.263	100	3.620.972.481	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					146.342.341.237		150.732.611.475		155.254.589.817		159.912.227.511		164.709.594.338	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika serta Bidang Statistik dan Bidang Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					23.120.828.943		25.304.658.425		26.763.316.305		28.173.495.112		29.673.551.840	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.212.425.595		21.191.943.705		22.138.417.201		23.135.490.451		24.183.600.286	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah					19.212.425.595		21.191.943.705		22.138.417.201		23.135.490.451		24.183.600.286	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					8.453.700		8.876.385		9.320.204		9.786.214		10.275.525	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam					8.453.700		8.876.385		9.320.204		9.786.214		10.275.525	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN					399.473.500		419.447.175		440.419.534		462.440.510		485.562.536	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi					399.473.500		419.447.175		440.419.534		462.440.510		485.562.536	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					16.098.900		17.708.790		19.479.669		21.427.636		23.570.399	
Meningkatnya koinerja pengelolaan koperasi					16.098.900		17.708.790		19.479.669		21.427.636		23.570.399	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					169.450.600		186.395.660		205.035.226		225.538.749		248.092.623	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian					169.450.600		186.395.660		205.035.226		225.538.749		248.092.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					72.221.200		75.118.260		78.874.173		82.817.882		86.958.776	
Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					72.221.200		75.118.260		78.874.173		82.817.882		86.958.776	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN					425.746.700		447.049.625		469.893.960		493.929.698		519.221.326	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri					425.746.700		447.049.625		469.893.960		493.929.698		519.221.326	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.816.958.748		2.958.118.825		3.401.876.338		3.742.063.972		4.116.270.369	
Meningkatnya daya saing UMKM					2.816.958.748		2.958.118.825		3.401.876.338		3.742.063.972		4.116.270.369	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.289.502.115		2.595.022.818		2.856.482.462		3.137.935.943		3.441.325.034	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PEMBERDAYAAN					0		150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					0		150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA					19.584.700		1.021.543.170		1.123.697.487		1.236.067.237		1.359.673.961	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi yang efisien, merata dan terintegrasi					19.584.700		1.021.543.170		1.123.697.487		1.236.067.237		1.359.673.961	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					626.717.145		689.388.860		758.327.746		834.160.522		917.576.576	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang					626.717.145		689.388.860		758.327.746		834.160.522		917.576.576	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					317.706.000		338.026.048		354.927.350		372.673.718		391.307.404	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor					317.706.000		338.026.048		354.927.350		372.673.718		391.307.404	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN					209.310.470		273.238.050		325.561.855		378.118.041		430.929.846	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk					209.310.470		273.238.050		325.561.855		378.118.041		430.929.846	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					116.183.800		122.826.690		128.968.024		135.416.425		142.187.247	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri					116.183.800		122.826.690		128.968.024		135.416.425		142.187.247	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
TOTAL KESELURUHAN					24.410.331.058		27.899.681.243		29.619.798.767		31.311.431.055		33.114.876.874	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah serta Bidang Perdagangan
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					37.024.653.661		37.594.542.534		38.170.652.691		38.736.421.116		39.315.084.993	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.314.519.661		35.052.477.300		35.581.384.600		36.113.800.426		36.618.973.999	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	34.314.519.661	100	35.052.477.300	100	35.581.384.600	100	36.113.800.426	100	36.618.973.999	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					487.237.200		490.443.500		501.932.700		508.693.200		517.135.600	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	487.237.200	100	490.443.500	100	501.932.700	100	508.693.200	100	517.135.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.166.246.500		976.141.300		989.850.600		994.383.200		1.033.696.700	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	1.166.246.500	100	976.141.300	100	989.850.600	100	994.383.200	100	1.033.696.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					137.587.900		138.631.500		141.722.700		143.972.600		147.330.600	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	137.587.900	100	138.631.500	100	141.722.700	100	143.972.600	100	147.330.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					41.505.700		41.741.100		42.752.100		44.301.500		48.052.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	41.505.700	100	41.741.100	100	42.752.100	100	44.301.500	100	48.052.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					877.556.700		895.107.834		913.009.991		931.270.190		949.895.594	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	877.556.700	100	895.107.834	100	913.009.991	100	931.270.190	100	949.895.594	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					37.024.653.661		37.594.542.534		38.170.652.691		38.736.421.116		39.315.084.993	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					968.147.863.455		896.890.887.871		941.711.399.676,65		986.989.213.903,85		1.003.590.561.270	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.564.854.969		31.421.340.466		32.992.407.493		34.642.027.864		36.374.129.259	
meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah-	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	28.564.854.969	100	31.421.340.466	100	32.992.407.493	100	34.642.027.864	100	36.374.129.259	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					280.433.910.804		302.489.439.244		317.612.911.208		332.694.616.793,4		340.778.978.505	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan-	Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan Upacara Adat (%)	100	100	100	280.433.910.804	100	302.489.439.244	100	317.612.911.208	100	332.694.616.793,4	100	340.778.978.505	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					52.205.704.580		57.426.275.038		60.297.588.790		62.312.468.229,4		64.444.010.759	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional-	Persentase Penduduk yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni (%)	100	100	100	52.205.704.580	100	57.426.275.038	100	60.297.588.790	100	62.312.468.229,4	100	64.444.010.759	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					7.418.764.800		8.160.641.280		8.558.673.345		8.987.107.011,21		9.441.962.362	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah-	Persentase Penduduk yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah (%)	100	100	100	7.418.764.800	100	8.160.641.280	100	8.558.673.345	100	8.987.107.011,21	100	9.441.962.362	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					447.054.545.011		491.759.999.512		516.339.999.489		542.148.399.461,41		546.034.356.113	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan-	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Diwarisi (Unit)	3	3	3	447.054.545.011	3	491.759.999.512	3	516.339.999.489	3	542.148.399.461,41	3	546.034.356.113	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Unit)	10	10	10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					152.470.083.291		5.633.192.331		5.909.819.351,65		6.204.594.544,43		6.517.124.272	
Meningkatnya tata kelola museum-	Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Museum (DAK) (Unit)	1	1	1	152.470.083.291	1	5.633.192.331	1	5.909.819.351,65	1	6.204.594.544,43	1	6.517.124.272	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					968.147.863.455		896.890.887.871		941.711.399.677		986.989.213.904		1.003.590.561.270	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					42.540.698.318		43.178.809.837		43.826.491.759		44.483.888.844		45.151.148.028	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.542.967.822		24.084.478.000		21.189.190.244		23.029.847.938		25.069.020.136	
Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	Jumlah pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan (Bulan)	-	12	12	16.542.967.822	12	24.084.478.000	12	21.189.190.244	12	23.029.847.938	12	25.069.020.136	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					3.357.370.600		3.693.107.660		4.182.643.784		4.468.660.269		8.047.775.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-	-	8.592	3.357.370.600	8.976	3.693.107.660	9.415	4.182.643.784	9.871	4.468.660.269	10.365	8.047.775.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					20.776.444.396		11.873.399.000		14.565.060.000		4.211.448.339		7.196.846.000	
Meningkatnya prosudki perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	-	-	573	20.776.444.396	579	11.873.399.000	585	14.565.060.000	591	4.211.448.339	597	7.196.846.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					211.137.254		239.181.239		263.099.362		289.409.298		318.350.228	
Meningkatnya jumlah kawasan sumber daya perikanan yang tertata lestari	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari (Kawasan)	-	1	1	211.137.254	1	239.181.239	1	263.099.362	1	289.409.298	1	318.350.228	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.652.778.246		3.288.643.938		3.626.498.369		12.484.523.000		4.519.156.664	
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Jumlah Produk Hasil Perikanan (Ton)	-	-	7.154	1.652.778.246	7.297	3.288.643.938	7.443	3.626.498.369	7.592	12.484.523.000	7.744	4.519.156.664	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
TOTAL KESELURUHAN					42.540.698.318		43.178.809.837		43.826.491.759		44.483.888.844		45.151.148.028	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					30.184.907.546		29.505.890.546		29.910.177.204		30.283.954.862		30.635.872.685	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.537.904.920		27.959.218.474		28.290.177.204		28.588.954.862		28.810.872.685	
meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	22.537.904.920	100	27.959.218.474	100	28.290.177.204	100	28.588.954.862	100	28.810.872.685	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					7.580.871.726		1.312.000.000		1.365.000.000		1.420.000.000		1.525.000.000	
Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	0	96,3	96,48	7.580.871.726	96,65	1.312.000.000	96,82	1.365.000.000	97	1.420.000.000	97,17	1.525.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					66.130.900		234.672.072		255.000.000		275.000.000		300.000.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	20	66.130.900	20	234.672.072	20	255.000.000	20	275.000.000	20	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					143.590.796		1.277.535.271		1.335.000.000		1.429.900.000		1.553.690.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					134.402.596		619.833.109		649.000.000		703.200.000		761.020.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis-	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	0	100	134.402.596	100	619.833.109	100	649.000.000	100	703.200.000	100	761.020.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					5.524.400		615.080.491		641.000.000		679.700.000		742.670.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK-	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0	100	5.524.400	100	615.080.491	100	641.000.000	100	679.700.000	100	742.670.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					3.663.800		42.621.671		45.000.000		47.000.000		50.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup-	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	20	3.663.800	20	42.621.671	20	45.000.000	20	47.000.000	20	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
TOTAL KESELURUHAN					30.328.498.342		30.783.425.817		31.245.177.204		31.713.854.862		32.189.562.685	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan serta Bidang Kearsipan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					148.262.120.268		117.333.852.578		123.200.545.207,25		129.360.572.466,74		135.828.601.090,84	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.687.673.477		57.827.099.673		60.718.454.657		63.754.377.389		66.942.096.259	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah					54.687.673.477		57.827.099.673		60.718.454.657		63.754.377.389		66.942.096.259	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					86.133.409.533		50.356.051.869		52.873.854.462		55.517.547.186		58.293.424.545	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata					86.133.409.533		50.356.051.869		52.873.854.462		55.517.547.186		58.293.424.545	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					6.619.469.710		7.888.051.271		8.282.453.835		8.696.576.526		9.131.405.353	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata					6.619.469.710		7.888.051.271		8.282.453.835		8.696.576.526		9.131.405.353	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					281.744.900		372.162.870		390.771.013,5		410.309.564		430.825.042	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif					281.744.900		372.162.870		390.771.013,5		410.309.564		430.825.042	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					539.822.648		890.486.895		935.011.239,75		981.761.801,74		1.030.849.891,84	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif					539.822.648		890.486.895		935.011.239,75		981.761.801,74		1.030.849.891,84	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					148.262.120.268		117.333.852.578		123.200.545.207		129.360.572.467		135.828.601.091	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					6.946.252.614		7.291.544.665		7.214.304.234		7.269.335.528		7.497.825.828	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN					6.700.197.414		6.892.944.522		6.963.619.377		7.016.544.483		7.091.706.711	
Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan lokal yang beragam	Presentase Desa Tahan Pangan (%)	100	100	100	6.700.197.414	100	6.892.944.522	100	6.963.619.377	100	7.016.544.483	100	7.091.706.711	Dinas/Badan yang menangani Bidang
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN					202.178.200		204.286.978		206.017.187		207.766.034		209.533.906	
Menurunnya prevalensi daerah dengan status rawan pangan	POU (Prevalency of Nourishment) (Nilai)	-	1,02	1,01	202.178.200	1	204.286.978	0,99	206.017.187	0,98	207.766.034	0,97	209.533.906	Dinas/Badan yang menangani Bidang
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN					43.877.000		194.313.165		44.667.670		45.025.011		196.585.211	
Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat	Persentase Komoditi Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan	-	-	80	43.877.000	80	194.313.165	80	44.667.670	80	45.025.011	80	196.585.211	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					96.583.012.018		96.008.222.146		99.881.425.921		104.212.073.077		102.770.268.182	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					56.072.566.002		53.723.867.049		54.954.131.193		55.405.799.257		56.305.954.656	
Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran tetap	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	-	90	56.072.566.002	90,1	53.723.867.049	90,2	54.954.131.193	90,4	55.405.799.257	90,5	56.305.954.656	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					13.810.768.560		15.237.123.134		15.388.544.528		32.510.542.191		16.644.666.767	
Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (Ton)	-	-	100.112	13.810.768.560	101.613	15.237.123.134	103.137	15.388.544.528	104.684	32.510.542.191	106.254	16.644.666.767	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					22.514.911.914		22.322.376.846		24.788.560.153		11.528.445.838		24.972.327.504	
Meningkatnya kualitas dan daya dukung infrastruktur pertanian	Persentase Infrastruktur Pertanian yang dapat dimanfaatkan secara optimal (%)	-	-	84,8	22.514.911.914	85	22.322.376.846	85,2	24.788.560.153	85,4	11.528.445.838	85,6	24.972.327.504	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.442.250.092		3.466.961.343		3.484.296.149		3.491.264.741		3.561.090.037	
Terkendalinya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian kasus penyakit hewan di wilayah kabupaten/kota	-	-	5	3.442.250.092	5	3.466.961.343	5	3.484.296.149	5	3.491.264.741	5	3.561.090.037	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA					682.217.150		687.674.888		691.113.261		696.642.167		702.215.305	
Menurunnya luas areal pertanian yang terdampak bencana pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggapulangi (%)	100	100	100	682.217.150	100	687.674.888	100	691.113.261	100	696.642.167	100	702.215.305	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					60.298.300		570.218.886		574.780.637		579.378.883		584.013.913	
Meningkatnya kemandirian petani dalam mengelola usaha tani yang berdaya saing	Jumlah kelembagaan petani (poktan, gapoktan, P4S) yang meningkat klasifikasinya (Kelompok)	-	-	2	60.298.300	2	570.218.886	2	574.780.637	2	579.378.883	2	584.013.913	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan serta
TOTAL KESELURUHAN					103.529.264.632		103.299.766.811		107.095.730.155		111.481.408.605		110.268.094.010	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan serta Bidang Pertanian
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					10.921.953.800		11.013.058.170		11.113.272.977		11.223.509.265		11.344.769.181	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.020.875.200		4.027.325.220		4.034.420.242		4.042.224.766		4.050.809.743	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja					4.020.875.200		4.027.325.220		4.034.420.242		4.042.224.766		4.050.809.743	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					155.987.100		171.585.810		188.744.391		207.618.831		228.380.713	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja					155.987.100		171.585.810		188.744.391		207.618.831		228.380.713	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					6.745.091.500		6.814.147.140		6.890.108.344		6.973.665.668		7.065.578.725	
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja					6.745.091.500		6.814.147.140		6.890.108.344		6.973.665.668		7.065.578.725	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					21.426.400.690		23.425.227.339		24.854.856.573		26.145.719.634		27.504.146.965	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.413.669.790		20.223.036.769		21.456.227.966		22.541.009.185		23.682.746.493	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah					18.413.669.790		20.223.036.769		21.456.227.966		22.541.009.185		23.682.746.493	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.011.436.400		3.198.799.020		3.394.897.902		3.600.606.673		3.816.886.319	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri					3.011.436.400		3.198.799.020		3.394.897.902		3.600.606.673		3.816.886.319	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					1.294.500		1.423.950		1.566.345		1.722.980		1.895.277	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian					1.294.500		1.423.950		1.566.345		1.722.980		1.895.277	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		1.967.600		2.164.360		2.380.796		2.618.876	
Meningkatnya pertumbuhan pelaku industri serta produk industri					0		1.967.600		2.164.360		2.380.796		2.618.876	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					32.348.354.490		34.438.285.509		35.968.129.550		37.369.228.899		38.848.916.146	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja serta Bidang Perindustrian
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					241.264.300		677.882.091		677.882.091		693.230.853		762.070.853	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					6.320.000		229.272.437		229.272.437		229.272.437		229.272.437	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	6.320.000	100	229.272.437	100	229.272.437	100	229.272.437	100	229.272.437	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					196.199.500		420.961.238		420.961.238		436.310.000		505.150.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	196.199.500	100	420.961.238	100	420.961.238	100	436.310.000	100	505.150.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					38.744.800		27.648.416		27.648.416		27.648.416		27.648.416	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	100	100	100	38.744.800	100	27.648.416	100	27.648.416	100	27.648.416	100	27.648.416	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					429.549.701.708		427.728.398.950		460.297.088.455		491.641.402.087		530.589.458.469	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					316.603.934.963		314.765.672.442		346.242.239.687		376.539.920.180		414.193.912.198	
Meningkatnya dukungan administratif, manajerial, dan operasional Pemerintah Daerah.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat (Persentase)	100	100	100	316.603.934.963	100	314.765.672.442	100	346.242.239.687	100	376.539.920.180	100	414.193.912.198	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					110.648.672.120		107.625.462.118		108.374.713.075		109.214.462.028		110.280.953.786	
Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Efektivitas dukungan administratif, manajerial, dan operasional Pemerintah Daerah (Persentase)	100	100	100	110.648.672.120	100	107.625.462.118	100	108.374.713.075	100	109.214.462.028	100	110.280.953.786	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.297.094.625		5.337.264.390		5.680.135.693		5.887.019.879		6.114.592.485	
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	2.297.094.625	100	5.337.264.390	100	5.680.135.693	100	5.887.019.879	100	6.114.592.485	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					429.790.966.008		428.406.281.041		460.974.970.546		492.334.632.940		531.351.529.322	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					171.670.380.888		180.253.899.933		189.266.594.936		198.729.924.673		208.666.420.914	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					108.754.090.236		114.191.794.748		119.901.384.488		125.896.453.708		132.191.276.397	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah					108.754.090.236		114.191.794.748		119.901.384.488		125.896.453.708		132.191.276.397	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					62.916.290.652		66.062.105.185		69.365.210.448		72.833.470.965		76.475.144.517	
Meningkatnya jumlah paket pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Persentase terlaksanannya program gukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					62.916.290.652		66.062.105.185		69.365.210.448		72.833.470.965		76.475.144.517	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
TOTAL KESELURUHAN					171.670.380.888		180.253.899.933		189.266.594.936		198.729.924.673		208.666.420.914	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					33.568.941.647		36.685.560.063,7		40.249.837.114,87		44.355.072.204,16		48.098.724.358,38	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.233.018.005		31.916.044.057,5		35.003.369.508,05		38.583.957.836,66		41.750.498.554,12	
Meningkatnya cakupan layanan penunjang urusan pemrintah daerah kabupaten	Persentase Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)	-	100	100	29.233.018.005	100	31.916.044.057,5	100	35.003.369.508,05	100	38.583.957.836,66	100	41.750.498.554,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.078.799.494		1.186.679.443,4		1.305.347.387,74		1.435.882.126,51		1.579.470.339,17	
Meningkatnya jumlah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang konsisten	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	100	100	1.078.799.494	100	1.186.679.443,4	100	1.305.347.387,74	100	1.435.882.126,51	100	1.579.470.339,17	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.257.124.148		3.582.836.562,8		3.941.120.219,08		4.335.232.240,99		4.768.755.465,09	
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan kabupaten	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten (Persentase)	-	100	100	3.257.124.148	100	3.582.836.562,8	100	3.941.120.219,08	100	4.335.232.240,99	100	4.768.755.465,09	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
TOTAL KESELURUHAN					33.568.941.647		36.685.560.064		40.249.837.115		44.355.072.204		48.098.724.358	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					2.639.885.024.522		2.899.712.493.490		3.185.222.709.354		3.406.983.896.805		3.862.065.664.404	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					75.886.014.706		79.313.582.692		82.783.907.477		85.301.264.741		109.104.714.132	
Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran (%)	0	0	100	75.886.014.706	100	79.313.582.692	100	82.783.907.477	100	85.301.264.741	100	109.104.714.132	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.557.450.150.916		2.813.195.166.008		3.094.514.682.608		3.312.966.150.868		3.743.372.765.957	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	0	0	59	2.557.450.150.916	60	2.813.195.166.008	61	3.094.514.682.608	62	3.312.966.150.868	63	3.743.372.765.957	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					6.548.858.900		7.203.744.790		7.924.119.269		8.716.481.196		9.588.184.315	
Meningkatnya pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks)	0	0	2,89	6.548.858.900	2,91	7.203.744.790	2,92	7.924.119.269	2,94	8.716.481.196	2,95	9.588.184.315	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					2.639.885.024.522		2.899.712.493.490		3.185.222.709.354		3.406.983.896.805		3.862.065.664.404	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02 - KEUANGAN					381.600.681.421		400.680.715.491,5		420.714.751.265,89		441.750.488.829,4		463.838.013.269,94	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					374.047.048.741		392.749.401.177,5		412.386.871.236,89		433.006.214.798,4		454.656.525.537,94	
Meningkatnya cakupan penunjang urusan pemerintah daerah					374.047.048.741		392.749.401.177,5		412.386.871.236,89		433.006.214.798,4		454.656.525.537,94	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.553.632.680		7.931.314.314		8.327.880.029		8.744.274.031		9.181.487.732	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD					7.553.632.680		7.931.314.314		8.327.880.029		8.744.274.031		9.181.487.732	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					381.600.681.421		400.680.715.492		420.714.751.266		441.750.488.829		463.838.013.270	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					26.467.798.056		26.890.190.035		27.293.542.885		27.702.946.026		28.118.490.207	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.895.651.436		24.254.086.210		24.617.897.501		24.987.165.963		25.361.973.444	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah					23.895.651.436		24.254.086.210		24.617.897.501		24.987.165.963		25.361.973.444	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.572.146.620		2.636.103.825		2.675.645.384		2.715.780.063		2.756.516.763	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian					2.572.146.620		2.636.103.825		2.675.645.384		2.715.780.063		2.756.516.763	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					21.530.442.616		21.853.399.277		22.181.200.267		22.513.918.270		22.851.627.043	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					21.530.442.616		21.853.399.277		22.181.200.267		22.513.918.270		22.851.627.043	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional					21.530.442.616		21.853.399.277		22.181.200.267		22.513.918.270		22.851.627.043	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
TOTAL KESELURUHAN					47.998.240.672		48.743.589.312		49.474.743.152		50.216.864.296		50.970.117.250	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian serta Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					21.730.104.843		22.100.375.133		22.949.315.424		23.399.899.547		25.842.722.604	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.872.319.493		16.052.843.146		16.599.406.838		16.732.495.532		18.841.948.388	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah (%)	-	100	100	15.872.319.493	100	16.052.843.146	100	16.599.406.838	100	16.732.495.532	100	18.841.948.388	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					5.857.785.350		0		0		0		0	
Meningkatnya pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan (%)	0	0	0	5.857.785.350	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Jumlah Inovasi yang terfasilitasi (Laporan)	0	0	0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		6.047.531.987		6.349.908.586		6.667.404.015		7.000.774.216	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Hasil Riset yang Direkomendasikan (Laporan)	-	14	17	0	17	6.047.531.987	17	6.349.908.586	18	6.667.404.015	14	7.000.774.216	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengembangan
	Jumlah Invensi dan Inovasi yang terfasilitasi (Inovasi)	-	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN					21.730.104.843		22.100.375.133		22.949.315.424		23.399.899.547		25.842.722.604	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					43.857.121.803		44.514.978.630		45.182.703.309		45.860.443.859		46.548.350.517	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.332.214.803		39.227.647.055		39.816.061.760		40.413.302.687		41.019.502.225	
Meningkatnya persentase efektivitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah dalam mendukung tujuan pembangunan daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	37.332.214.803	100	39.227.647.055	100	39.816.061.760	100	40.413.302.687	100	41.019.502.225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.518.601.000		1.549.044.717		1.572.280.386		1.595.864.592		1.619.802.560	
Meningkatnya kegiatan yang bersifat Assurance (penjamin)	Persentase kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) sesuai PKPT (Persentase)	100	100	100	1.518.601.000	100	1.549.044.717	100	1.572.280.386	100	1.595.864.592	100	1.619.802.560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					5.006.306.000		3.738.286.858		3.794.361.163		3.851.276.580		3.909.045.732	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) sesuai dengan PKPT (Persentase)	100	100	100	5.006.306.000	100	3.738.286.858	100	3.794.361.163	100	3.851.276.580	100	3.909.045.732	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					43.857.121.803		44.514.978.630		45.182.703.309		45.860.443.859		46.548.350.517	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					18.767.585.825		19.049.099.604,38		19.334.836.106,36		19.624.858.647,55		19.919.231.527,89	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.554.160.608		14.772.473.009,12		14.994.060.112,17		15.218.971.013,95		15.447.255.579,28	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran					14.554.160.608		14.772.473.009,12		14.994.060.112,17		15.218.971.013,95		15.447.255.579,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.495.700		11.668.135,5		11.843.157,54		12.020.804,89		12.201.116,97	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					11.495.700		11.668.135,5		11.843.157,54		12.020.804,89		12.201.116,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.340.565.887		3.390.674.375,31		3.441.534.490,93		3.493.157.507,81		3.545.554.870,92	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.340.565.887		3.390.674.375,31		3.441.534.490,93		3.493.157.507,81		3.545.554.870,92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					84.527.700		85.795.615,5		87.082.549,73		88.388.787,98		89.714.619,8	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					84.527.700		85.795.615,5		87.082.549,73		88.388.787,98		89.714.619,8	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					708.995.630		719.630.564,45		730.425.022,92		741.381.398,26		752.502.119,24	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					708.995.630		719.630.564,45		730.425.022,92		741.381.398,26		752.502.119,24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					67.840.300		68.857.904,5		69.890.773,07		70.939.134,66		72.003.221,68	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					67.840.300		68.857.904,5		69.890.773,07		70.939.134,66		72.003.221,68	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					18.767.585.825		19.049.099.604		19.334.836.106		19.624.858.648		19.919.231.528	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					21.368.054.047		21.682.336.380		22.007.571.424		22.337.684.997		22.672.750.271	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.303.759.927		17.557.077.847		17.820.434.015		18.087.740.525		18.359.056.633	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran					17.303.759.927		17.557.077.847		17.820.434.015		18.087.740.525		18.359.056.633	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.935.200		12.114.228		12.295.941		12.480.381		12.667.586	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					11.935.200		12.114.228		12.295.941		12.480.381		12.667.586	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.120.140.308		3.166.942.413		3.214.446.549		3.262.663.247		3.311.603.196	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.120.140.308		3.166.942.413		3.214.446.549		3.262.663.247		3.311.603.196	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					38.404.600		38.980.669		39.565.379		40.158.860		40.761.243	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					38.404.600		38.980.669		39.565.379		40.158.860		40.761.243	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					801.900.912		813.929.426		826.138.367		838.530.443		851.108.399	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					801.900.912		813.929.426		826.138.367		838.530.443		851.108.399	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					91.913.100		93.291.797		94.691.173		96.111.541		97.553.214	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					91.913.100		93.291.797		94.691.173		96.111.541		97.553.214	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					21.368.054.047		21.682.336.380		22.007.571.424		22.337.684.997		22.672.750.271	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					64.514.596.199		65.482.315.143		66.464.549.868		67.461.518.118		68.473.440.889	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.817.058.547		39.399.314.425		39.990.304.142		40.590.158.704		41.199.011.084	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran					38.817.058.547		39.399.314.425		39.990.304.142		40.590.158.704		41.199.011.084	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.129.994.980		6.221.944.905		6.315.274.078		6.410.003.189		6.506.153.237	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					6.129.994.980		6.221.944.905		6.315.274.078		6.410.003.189		6.506.153.237	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					18.609.051.560		18.888.187.334		19.171.510.143		19.459.082.796		19.750.969.038	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.053.925.096		3.099.733.973		3.146.229.982		3.193.423.432		3.241.324.783	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					4.021.177.440		4.081.495.102		4.142.717.528		4.204.858.291		4.267.931.165	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.483.041.196		1.505.286.814		1.527.866.116		1.550.784.108		1.574.045.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.738.870.560		2.779.953.618		2.821.652.923		2.863.977.717		2.906.937.382	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.751.717.220		3.807.992.978		3.865.112.873		3.923.089.566		3.981.935.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.560.320.048		3.613.724.849		3.667.930.721		3.722.949.682		3.778.793.928	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					61.224.200		62.142.563		63.074.701		64.020.822		64.981.134	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					61.224.200		62.142.563		63.074.701		64.020.822		64.981.134	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					810.319.212		822.474.000		834.811.110		847.333.277		860.043.276	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					810.319.212		822.474.000		834.811.110		847.333.277		860.043.276	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					86.947.700		88.251.916		89.575.694		90.919.330		92.283.120	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					86.947.700		88.251.916		89.575.694		90.919.330		92.283.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					64.514.596.199		65.482.315.143		66.464.549.868		67.461.518.118		68.473.440.889	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					4.021.177.440		4.081.495.102		4.142.717.528		4.204.858.291		4.267.931.165	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.021.177.440		4.081.495.102		4.142.717.528		4.204.858.291		4.267.931.165	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					4.021.177.440		4.081.495.102		4.142.717.528		4.204.858.291		4.267.931.165	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4.021.177.440		4.081.495.102		4.142.717.528		4.204.858.291		4.267.931.165	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					1.483.041.196		1.505.286.814		1.527.866.116		1.550.784.108		1.574.045.870	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.483.041.196		1.505.286.814		1.527.866.116		1.550.784.108		1.574.045.870	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.483.041.196		1.505.286.814		1.527.866.116		1.550.784.108		1.574.045.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					1.483.041.196		1.505.286.814		1.527.866.116		1.550.784.108		1.574.045.870	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					2.738.870.560		2.779.953.618		2.821.652.923		2.863.977.717		2.906.937.382	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.738.870.560		2.779.953.618		2.821.652.923		2.863.977.717		2.906.937.382	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.738.870.560		2.779.953.618		2.821.652.923		2.863.977.717		2.906.937.382	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					2.738.870.560		2.779.953.618		2.821.652.923		2.863.977.717		2.906.937.382	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					3.751.717.220		3.807.992.978		3.865.112.873		3.923.089.566		3.981.935.910	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.751.717.220		3.807.992.978		3.865.112.873		3.923.089.566		3.981.935.910	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.751.717.220		3.807.992.978		3.865.112.873		3.923.089.566		3.981.935.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.751.717.220		3.807.992.978		3.865.112.873		3.923.089.566		3.981.935.910	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang
7.01 - KECAMATAN					3.560.320.048		3.613.724.849		3.667.930.721		3.722.949.682		3.778.793.928	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.560.320.048		3.613.724.849		3.667.930.721		3.722.949.682		3.778.793.928	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.560.320.048		3.613.724.849		3.667.930.721		3.722.949.682		3.778.793.928	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.560.320.048		3.613.724.849		3.667.930.721		3.722.949.682		3.778.793.928	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					46.794.337.450		52.409.601.945		58.698.754.174		65.742.604.670		73.631.717.239	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.763.744.743		35.575.394.112		39.844.441.406		44.625.774.374		49.980.867.299	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran					31.763.744.743		35.575.394.112		39.844.441.406		44.625.774.374		49.980.867.299	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.035.909.439		6.760.218.572		7.571.444.800		8.480.018.176		9.497.620.357	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					6.035.909.439		6.760.218.572		7.571.444.800		8.480.018.176		9.497.620.357	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.039.152.519		9.003.794.822		10.084.250.197		11.294.360.216		12.649.683.450	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					3.063.139.780		3.430.716.554		3.842.402.540		4.303.490.845		4.819.909.746	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					904.354.900		1.012.877.488		1.134.422.783		1.270.553.513		1.423.019.943	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.593.661.115		2.904.844.449		3.253.425.783		3.643.836.877		4.081.097.302	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.477.996.724		1.655.356.331		1.853.999.091		2.076.478.981		2.325.656.459	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					36.187.866		40.530.410		45.394.059		50.841.346		56.942.308	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					36.187.866		40.530.410		45.394.059		50.841.346		56.942.308	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					714.433.799		800.165.855		896.185.757		1.003.728.048		1.124.175.414	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					714.433.799		800.165.855		896.185.757		1.003.728.048		1.124.175.414	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					204.909.084		229.498.174		257.037.955		287.882.510		322.428.411	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					204.909.084		229.498.174		257.037.955		287.882.510		322.428.411	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					46.794.337.450		52.409.601.945		58.698.754.174		65.742.604.670		73.631.717.239	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					904.354.900		1.012.877.488		1.134.422.783		1.270.553.513		1.423.019.943	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					904.354.900		1.012.877.488		1.134.422.783		1.270.553.513		1.423.019.943	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					904.354.900		1.012.877.488		1.134.422.783		1.270.553.513		1.423.019.943	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					904.354.900		1.012.877.488		1.134.422.783		1.270.553.513		1.423.019.943	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					2.593.661.115		2.904.844.449		3.253.425.783		3.643.836.877		4.081.097.302	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.593.661.115		2.904.844.449		3.253.425.783		3.643.836.877		4.081.097.302	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.593.661.115		2.904.844.449		3.253.425.783		3.643.836.877		4.081.097.302	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					2.593.661.115		2.904.844.449		3.253.425.783		3.643.836.877		4.081.097.302	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					1.477.996.724		1.655.356.331		1.853.999.091		2.076.478.981		2.325.656.459	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.477.996.724		1.655.356.331		1.853.999.091		2.076.478.981		2.325.656.459	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.477.996.724		1.655.356.331		1.853.999.091		2.076.478.981		2.325.656.459	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					1.477.996.724		1.655.356.331		1.853.999.091		2.076.478.981		2.325.656.459	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					62.434.620.275		69.926.774.709		78.317.987.671		87.716.146.196		98.242.083.738	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.100.579.596		46.032.649.148		51.556.567.045		57.743.355.091		64.672.557.702	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran					41.100.579.596		46.032.649.148		51.556.567.045		57.743.355.091		64.672.557.702	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.389.359.188		4.916.082.291		5.506.012.165		6.166.733.625		6.906.741.660	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					4.389.359.188		4.916.082.291		5.506.012.165		6.166.733.625		6.906.741.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.819.836.571		17.718.216.959		19.844.402.993		22.225.731.356		24.892.819.117	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.620.367.600		2.934.811.712		3.286.989.117		3.681.427.812		4.123.199.149	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.944.089.600		2.177.380.352		2.438.665.994		2.731.305.914		3.059.062.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					4.418.560.170		4.948.787.390		5.542.641.877		6.207.758.903		6.952.689.971	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.483.433.516		2.781.445.538		3.115.219.002		3.489.045.283		3.907.730.717	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.707.750.000		3.032.680.000		3.396.601.600		3.804.193.792		4.260.697.047	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.645.635.685		1.843.111.967		2.064.285.403		2.311.999.652		2.589.439.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					179.925.840		201.516.941		225.698.974		252.782.851		283.116.793	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					179.925.840		201.516.941		225.698.974		252.782.851		283.116.793	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					944.919.080		1.058.309.370		1.185.306.494		1.327.543.273		1.486.848.466	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					944.919.080		1.058.309.370		1.185.306.494		1.327.543.273		1.486.848.466	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					62.434.620.275		69.926.774.709		78.317.987.671		87.716.146.196		98.242.083.738	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					1.944.089.600		2.177.380.352		2.438.665.994		2.731.305.914		3.059.062.623	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.944.089.600		2.177.380.352		2.438.665.994		2.731.305.914		3.059.062.623	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.944.089.600		2.177.380.352		2.438.665.994		2.731.305.914		3.059.062.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					1.944.089.600		2.177.380.352		2.438.665.994		2.731.305.914		3.059.062.623	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					4.418.560.170		4.948.787.390		5.542.641.877		6.207.758.903		6.952.689.971	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.418.560.170		4.948.787.390		5.542.641.877		6.207.758.903		6.952.689.971	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					4.418.560.170		4.948.787.390		5.542.641.877		6.207.758.903		6.952.689.971	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					4.418.560.170		4.948.787.390		5.542.641.877		6.207.758.903		6.952.689.971	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					2.483.433.516		2.781.445.538		3.115.219.002		3.489.045.283		3.907.730.717	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.483.433.516		2.781.445.538		3.115.219.002		3.489.045.283		3.907.730.717	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.483.433.516		2.781.445.538		3.115.219.002		3.489.045.283		3.907.730.717	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					2483433516.00		2781445538.00		3115219002.00		3489045283.00		3907730717.00	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					2.707.750.000		3.032.680.000		3.396.601.600		3.804.193.792		4.260.697.047	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.707.750.000		3.032.680.000		3.396.601.600		3.804.193.792		4.260.697.047	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.707.750.000		3.032.680.000		3.396.601.600		3.804.193.792		4.260.697.047	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					2.707.750.000		3.032.680.000		3.396.601.600		3.804.193.792		4.260.697.047	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					1.645.635.685		1.843.111.967		2.064.285.403		2.311.999.652		2.589.439.610	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.645.635.685		1.843.111.967		2.064.285.403		2.311.999.652		2.589.439.610	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.645.635.685		1.843.111.967		2.064.285.403		2.311.999.652		2.589.439.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					1.645.635.685		1.843.111.967		2.064.285.403		2.311.999.652		2.589.439.610	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					54.465.293.489		55.282.272.893		56.111.506.984		56.953.179.589		57.807.477.285	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.142.421.452		31.609.557.775		32.083.701.141		32.564.956.657		33.053.431.008	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran					31.142.421.452		31.609.557.775		32.083.701.141		32.564.956.657		33.053.431.008	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.668.144.400		4.738.166.566		4.809.239.064		4.881.377.650		4.954.598.315	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					4.668.144.400		4.738.166.566		4.809.239.064		4.881.377.650		4.954.598.315	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					17.471.618.105		17.733.692.377		17.999.697.762		18.269.693.228		18.543.738.628	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					2.536.705.160		2.574.755.737		2.613.377.073		2.652.577.730		2.692.366.396	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					8.897.651.245		9.031.116.014		9.166.582.754		9.304.081.495		9.443.642.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					4.631.513.500		4.700.986.203		4.771.500.996		4.843.073.510		4.915.719.613	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.405.748.200		1.426.834.423		1.448.236.939		1.469.960.493		1.492.009.901	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					329.921.600		334.870.424		339.893.480		344.991.883		350.166.761	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					329.921.600		334.870.424		339.893.480		344.991.883		350.166.761	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					830.823.632		843.285.986		855.935.276		868.774.306		881.805.920	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					830.823.632		843.285.986		855.935.276		868.774.306		881.805.920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					22.364.300		22.699.765		23.040.261		23.385.865		23.736.653	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					22.364.300		22.699.765		23.040.261		23.385.865		23.736.653	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					54.465.293.489		55.282.272.893		56.111.506.984		56.953.179.589		57.807.477.285	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					8.897.651.245		9.031.116.014		9.166.582.754		9.304.081.495		9.443.642.718	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.897.651.245		9.031.116.014		9.166.582.754		9.304.081.495		9.443.642.718	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					8.897.651.245		9.031.116.014		9.166.582.754		9.304.081.495		9.443.642.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					8.897.651.245		9.031.116.014		9.166.582.754		9.304.081.495		9.443.642.718	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					4.631.513.500		4.700.986.203		4.771.500.996		4.843.073.510		4.915.719.613	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.631.513.500		4.700.986.203		4.771.500.996		4.843.073.510		4.915.719.613	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					4.631.513.500		4.700.986.203		4.771.500.996		4.843.073.510		4.915.719.613	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4.631.513.500		4.700.986.203		4.771.500.996		4.843.073.510		4.915.719.613	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01 - KECAMATAN					1.405.748.200		1.426.834.423		1.448.236.939		1.469.960.493		1.492.009.901	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.405.748.200		1.426.834.423		1.448.236.939		1.469.960.493		1.492.009.901	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1.405.748.200		1.426.834.423		1.448.236.939		1.469.960.493		1.492.009.901	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					1.405.748.200		1.426.834.423		1.448.236.939		1.469.960.493		1.492.009.901	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					49.053.471.495		51.949.753.685		106.870.178.154		72.816.744.016		55.944.183.791	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.669.901.758		17.086.648.302		17.513.810.534		17.951.650.923		18.400.432.446	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah (%)	-	100	100	16.669.901.758	100	17.086.648.302	100	17.513.810.534	100	17.951.650.923	100	18.400.432.446	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					13.236.009.142		15.236.855.775		15.617.777.169		16.008.221.598		16.408.427.138	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	-	-	100	13.236.009.142	100	15.236.855.775	100	15.617.777.169	100	16.008.221.598	100	16.408.427.138	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					8.906.286.600		9.128.943.765		62.978.851.960		27.828.139.543		9.830.873.956	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60,01	60,02	60,03	8.906.286.600	60,04	9.128.943.765	60,05	62.978.851.960	60,06	27.828.139.543	60,07	9.830.873.956	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					4.512.724.000		4.625.542.100		4.741.180.652		4.859.710.168		4.981.202.922	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dan sehat (Persentase)	-	-	70	4.512.724.000	71	4.625.542.100	72	4.741.180.652	73	4.859.710.168	74	4.981.202.922	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					3.378.336.900		3.462.795.321		3.549.365.206		3.638.099.336		3.729.051.819	
Meningkatnya ketahanan eekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Masyarakat (IKM) (Indeks)	-	-	60	3.378.336.900	60,2	3.462.795.321	60,4	3.549.365.206	60,6	3.638.099.336	60,8	3.729.051.819	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2.350.213.095		2.408.968.422		2.469.192.633		2.530.922.448		2.594.195.510	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial (Persentase)	-	-	70	2.350.213.095	70,5	2.408.968.422	71	2.469.192.633	71,5	2.530.922.448	72	2.594.195.510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					49.053.471.495		51.949.753.685		106.870.178.154		72.816.744.016		55.944.183.791	Total Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup penetapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah. IKU diambil dari indikator sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD dan berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD), atau sering disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. IKD mencakup berbagai aspek, termasuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Penetapan IKD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan menetapkan IKU dan IKD yang jelas dan terukur, pemerintah Kabupaten Badung dapat memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara objektif. Hal ini memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan serta penguatan, sehingga upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Badung, Sedangkan Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari tiga aspek pencapaian kinerja melalui aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung dalam aspek pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengarusutamaan

gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah Kabupaten Badung dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) untuk menilai kinerja organisasi, mesti memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2025–2029.

Pada **Tabel 4.2** berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, **Tabel 4.3** menggambarkan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Tabel 4.4 menggambarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 4.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Badung Tahun 2026-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,95	6,96	6,98	7	7,02	7,03	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	96,6	96,65	96,7	96,75	96,8	96,85	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
3	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung	Angka	n/a	68	71	74	77	81	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	84,03	84,11	84,19	84,27	84,35	84,43	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
5	Indeks Pendidikan	Angka	0,6701	0,6706	0,6711	0,6716	0,6721	0,6830	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
6	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,92	75,93	75,95	75,97	75,99	76	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,00-2,17	2,10 - 2,45	1,75 - 2,10	1,40 - 1,75	1,25 - 1,95	1,05 - 1,75	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,97	96	96,03	96,06	96,09	96,11	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,01	6,00-6,80	7,0 - 8,0	8,0 - 8,5	8,5 - 9,0	8,75 - 9,00	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (unsur perencanaan)
10	Rasio Kewirausahaan	Angka	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
12	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	Persen	6,12	6,14	6,17	6,19	6,21	6,23	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pertanian
13	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	90,89	91,34	91,79	92,24	92,64	93	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
14	Nilai Tukar Petani	Angka	109,8	112,3	114,8	117,3	119,8	120,3	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
15	Persentase Penyerapan Produk Pertanian pada sektor Pariwisata	Persen	15	15,5	16	16,5	17	17,5	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
16	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									pemerintahan (unsur perencanaan)
17	Persentase Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik	Persen	96,24	96,71	97,23	97,72	98,31	98,72	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	88,5	89	89,5	90	90,5	91	Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Unsur Sekretariat Daerah)
19	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	- Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah) - Perangkat Daerah Penyelenggara Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)
20	Persentase Desa Mandiri	Persen	82,5	84,5	87	89,25	91,25	93,5	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum dalam PDRB	Persen	26,02	26,42	26,92	27,52	28,22	29,02	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
22	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	Persen	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70,7	70,87	71,04	71,22	71,39	71,56	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
24	Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Angka	85	87,5	90	92,5	95	97,5	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber : Pemetaan IKU Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2030

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	90,89	91,34	91,79	92,24	92,64	93
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	angka	70,7	70,87	71,04	71,22	71,39	71,56
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4	Indeks Risiko Bencana	angka	90	85	78	71	65	60
5	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
7	Rasio Penduduk	persen	99%	99%	99%	99%	99%	99%
8	Persentase RTH	Persen (%)	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,7	70,87	71,04	71,22	71,39	71,56
10	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	100
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen (%)	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5
12	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen (%)	83	83,85	84,7	85,55	86,4	87,25
13	Sampah terkumpul (ton/hari)	Ton/Hari	534,8	549,43	564,06	578,69	593,31	607,94
14	Daur Ulang Sampah (<i>Recycling</i>) (%)	Persen (%)	23	24	25	26	27	28
15	Residu Sampah di Lahan Urug Residu (%)	Persen (%)	39	40	41	42	43	44
16	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,53	80,73	80,93	81,13	81,33	81,53
17	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Kwh/Kapita	1.323,71	1.346,58	1.369,45	1.392,32	1.415,18	1.438,05
18	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	1,23	1,24	1,24	1,25	1,25	1,26
19	Kapasitas Produksi Air Bersih	Liter/Detik	100	100	100	100	100	100
20	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen (%)	77,15	77,45	77,75	78,05	78,35	78,65

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II ASPEK KESEJATERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,01	6,5 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 8,5	8,5 - 9,0	8,75 - 9,25
2	Tingkat Kemiskinan	persen	2,00-2,17	2,10 - 2,45	1,75 - 2,10	1,40 - 1,75	1,25 - 1,95	1,05 - 1,75
3	PDRB Per Kapita ADHK (Dalam Rp.)	Rp	37.698.580,98	40.337.481,65	42.354.355,73	44.472.073,51	46.695.677,19	49.030.461,05
4	PDRB Per Kapita ADHB (Dalam Rp.)	Rp	141.500,00	151.900,00	163.500,00	175.900,00	189.200,00	203.400,00
5	Tingkat pengangguran terbuka	persen	1,69	1,62	1,56	1,50	1,44	1,39
6	Rasio Gini	angka	0,2733	0,270	0,2668	0,2636	0,2604	0,257
7	Indeks Pembangunan Manusia	angka	84,03	84,11	84,19	84,27	84,35	84,43
8	Umur Harapan Hidup	tahun	75,92	75,93	75,95	75,97	75,99	76,00
9	Prevalensi Stunting	persen	1,80	1,50	1,20	1,00	0,80	0,50
10	Indeks Literasi	Indeks	74,92	76,72	78,52	80,32	82,12	83,92
11	Indeks Numerasi	Indeks	63,75	65,95	68,15	70,35	72,55	74,75
12	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,16	11,19	11,21	11,24	11,26	11,29
13	Harapan lama sekolah	Tahun	14,27	14,29	14,32	14,34	14,36	14,39
14	Angka Partisipasi Sekolah Usia Dini (PAUD)	Persen (%)	81,29	84,25	87,22	90,19	92,74	95,29
15	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun (SD)	Persen (%)	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun (SMP)	Persen (%)	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Angka Kelulusan SMP (%)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen (%)	2,00-2,17	2,10 - 2,45	1,75 - 2,10	1,40 - 1,75	1,25 - 1,95	1,05 - 1,75
19	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen (%)	57,68	59,80	61,91	64,03	66,14	68,26
20	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen (%)	9,64	9,83	10,03	10,22	10,41	10,60
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80	96,85
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	68,00	72,00	75,00	78,00	82,00	85,00
24	Indeks Perlindungan Anak	angka	74,00	74,50	75,20	75,80	76,20	78,20
25	Indeks Pembangunan Keluarga	angka	69,80	70,80	71,70	72,60	73,50	74,30

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Indeks Pembangunan Gender	angka	95,97	96,00	96,03	96,06	96,09	96,11
27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
28	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36
29	Tingkat inflasi (%)	persen	2,0 ±1	2,0 ±1	2,0 ±1	2,0 ±1	2,0 ±1	2,0 ±1
30	Persentase balita gizi buruk	persen	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30
31	Persentase Balita gizi kurang (%)	persen	2,20	2,10	2,00	1,90	1,80	1,70
32	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Per 1.000 kelahiran hidup	41,03	39,14	37,25	35,36	33,47	31,58
33	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen (%)	1,80	1,50	1,20	1,00	0,80	0,50
34	Penemuan Kasus TBC (treatment coverage)	Persen (%)	52,30	54,29	56,27	58,26	60,24	62,23
35	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Persen (%)	87,20	87,49	87,78	88,07	88,36	88,65
36	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
38	Penguatan Cadangan Pangan (%)	persen	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
39	Penanganan daerah rawan pangan		-	-	-	-	-	-
40	Produksi kakao		103,84	105,92	106,98	108,05	109,13	110,22
41	Produksi kelapa		2.292,60	2.343,56	2.367,00	2.390,67	2.414,57	2.438,72
42	Produksi Kapas				-	-	-	-
43	Produksi Kopi		761,32	776,55	784,32	792,16	800,08	808,08
44	Produksi Vanili		0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
45	Produksi Kapuk		46,37	47,76	48,24	48,72	49,21	49,70
46	Produksi Jambu Mete		7,42	7,64	7,72	7,79	7,87	7,95
47	Produksi cengkeh		46,95	47,88	48,36	48,84	49,33	49,82
48	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (%)	Persen (%)	6,12	6,14	6,17	6,19	6,21	6,23
49	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	24,97	25,15	25,25	25,45	25,59	25,75
50	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Distribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen (%)	6,93	7,09	7,26	7,42	7,58	7,75
52	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen (%)	10,37	10,52	10,66	10,81	10,96	11,11
53	Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan terhadap daerah (<i>Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Badung terhadap PDRB Provinsi Bali</i>) (%)	Persen (%)	25,00	25,25	25,50	25,75	26,00	26,25
54	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (<i>Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dengan luas lantai per kapita diatas 10m²</i>) (%)	Persen (%)	95,90	96,01	96,11	96,22	96,32	96,43
55	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	persen	2,20	2,17	2,15	2,12	2,09	2,07
56	Pengeluaran per Kapita (Rp.)	Rp	19.205.000,00	19.882.000,00	20.557.000,00	21.298.000,00	22.048.000,00	22.827.000,00
57	IDG	angka	95,97	96,00	96,03	96,06	96,09	96,11
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Rasio Kewirausahaan	persen	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Pertanian pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	12,12	12,09	12,06	12,03	12	11,97
3	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	87,88	87,91	87,94	87,97	88	88,03
4	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	8,15	8,19	8,24	8,28	8,32	8,36
5	Rasio Kewirausahaan (%)	Persen (%)	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25
6	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	Persen (%)	11,15	11,3	11,45	11,6	11,75	11,9
7	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	Persen (%)	11,58	11,74	11,91	12,07	12,24	12,4
8	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persen (%)	82,18	83,07	83,96	84,85	85,74	86,64
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	75,77	75,96	76,14	76,32	76,51	76,69
10	Indeks Inovasi Daerah	angka	62,90	66,55	70,30	74,15	78,10	82,10
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	angka	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
12	Angka kriminalitas	angka	781	738	695	652	609	566
13	Jumlah demo	angka	0	0	0	0	0	0
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta rupiah)	Juta Rp	22.800.000	23.205.000	23.610.000	24.015.000	24.420.000	24.825.000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Net ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	Persen (%)	1,8	1,88	1,95	2,03	2,1	2,18
16	Rasio Total Penerimaan Daerah terhadap PDRB	Persen (%)	12,18	14,13	16,07	18,02	19,96	21,91
17	Total Penerimaan Daerah	Rp	9,1	13,46	17,82	22,18	26,54	30,9
18	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp	74,5	79,59	84,67	89,76	94,84	99,93
19	Rasio kredit terhadap PDRB (%PDRB)	Persen (%)	11,49	11,26	11,03	10,8	10,57	10,34
20	Total Kredit (Juta Rp)	Juta Rp	8.547.500,92	8.712.496,88	8.877.492,84	9.042.488,79	9.207.484,75	9.372.480,71
21	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	Juta Rp	74.544.555,62	79.630.637,39	84.716.719,16	89.802.800,93	94.888.882,70	99.974.964,47
IV ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Persentase Penegakan Perda	persen	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	angka	85	87,5	90	92,5	95	97,5
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	0,55	0,56	0,58	0,59	0,61	0,62
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,8	3,83	3,86	3,89	3,92	3,95
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,61	4,63	4,65	4,67
6	Indeks Integritas Daerah	Indeks	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95
7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Peningkatan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen (%)	90	90,5	91	91,5	92	92,5
9	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penegakan Perda	Persen (%)	100	100	100	100	100	100
V INDIKATOR KINERJA KUNCI								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):		100	100	100	100	100	100
1.2.	Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)	persen	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.	Angka Partisipasi Murni	persen						
1.4. 1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	100	100	100	100	100	100
1.4. 2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B	persen	100	100	100	100	100	100
1.5	Angka partisipasi sekolah	persen						
1.5. 1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	persen	99,96	100	100	100	100	100
1.5. 2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	persen	99,96	100	100	100	100	100
1.6	Angka Putus Sekolah	persen						
1.6. 1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	persen	0	0	0	0	0	0
1.6. 2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	persen	0	0	0	0	0	0
1.7	Angka Kelulusan :							
1.7. 1	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.7. 2	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM) :	persen						
1.8. 1	Angka Melanjutkan Ke SMP (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.8. 2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100	100
1.9	Fasilitas Pendidikan :							
1.9. 1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	100	100	100	100	100	100
1.9. 2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	100	100	100	100	100	100
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	persen	4,82	4,82	5,066	5,066	5,066	5,066
1.11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah	persen						
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	persen	0,055555556	0,055555556	0,055555556	0,055555556	0,055555556	0,055555556
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	persen	0,063888889	0,063888889	0,063888889	0,063888889	0,063888889	0,063888889
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	persen	0,055555556	0,055555556	0,055555556	0,055555556	0,055555556	0,055555556
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	persen	0,063888889	0,063888889	0,063888889	0,063888889	0,063888889	0,063888889

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	persen	100	100	100	100	100	100
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	100	100	100	100	100	100
1.16	APK TK (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.21	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :							
1.17	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.18	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.19	Angka Kelulusan Paket A (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.20	Angka Kelulusan Paket B (%)	persen	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	persen	81,29	84,25	87,22	90,19	92,74	95,29
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	persen	99,96	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	persen	99,96	100	100	100	100	100
	Indeks Pendidikan	angka	0,6701	0,6706	0,6711	0,6716	0,6721	0,6830
2.	Kesehatan :							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	/1000 KLH	2.21 per 1000 KH	2.19 per 1000 KH	2.21 per 1000 KH	2.19 per 1000 KH	2.21 per 1000 KH	2.19 per 1000 KH
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	/1000 KLH	1-2,09/1000 KH	1-2,04/1000 KH	1-2,09/1000 KH	1-2,04/1000 KH	1-2,09/1000 KH	1-2,04/1000 KH
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KLH	2.73per 1000 KH	2.72 per 1000 KH	2.73per 1000 KH	2.72 per 1000 KH	2.73per 1000 KH	2.72 per 1000 KH
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KLH	1.87 per 1000 KH	1.86 per 1000 KH	1.87 per 1000 KH	1.86 per 1000 KH	1.87 per 1000 KH	1.86 per 1000 KH
2.5	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	/1000 KLH	110.45 per 100.000 KH	109.45 per 100.000 KH	110.45 per 100.000 KH	109.45 per 100.000 KH	110.45 per 100.000 KH	109.45 per 100.000 KH
2.6	Rasio Posyandu per 1.000 balita	/1000 balita	25	25	25	25	25	25
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	/1000 penduduk	-	-	-	-	-	-
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	/1000 penduduk	189 /100,000	190 /100,000	189 /100,000	190 /100,000	189 /100,000	190 /100,000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	1	1	1	1	1	1
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	1	1	1	1	1	1
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	1	1	1	1	1	1
2.13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	persen	1	1	1	1	1	1
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	100	100	100	100	100	100
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	100	100	100	100	100	100
2.16	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	100	100	100	100	100	100
2.17	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	93	95	97	99	100	100
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100	100
2.19	Penderita diare yang ditangani		100	100	100	100	100	100
2.20	Angka kejadian Malaria		< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	persen	0	0	0	0	0	0
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2.23	Cakupan kunjungan bayi	persen	1	1	1	1	1	1
2.24	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	99	1	1	1	1	1
2.25	Cakupan pelayanan nifas	persen	100	100	100	100	100	100
2.26	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	75	78	80	85	89	95
2.27	Cakupan pelayanan anak balita	persen	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
2.28	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	1	1	1	1	1	1
2.29	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	100	100	100	100	100	100
2.30	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	1	1	1	1	1	1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.31	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.32	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	persen	75	78	80	85	89	95
2.33	Prevalensi Balita Stunting (%)	persen	1,8	1,5	1,2	1	0,8	0,5
2.34	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.35	Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)	persen	75	75	75	75	75	75
2.36	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.37	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan sederajat (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.38	Persentase Puskesmas kondisi baik (%)	persen	1	1	1	1	1	1
2.39	Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk)	/ 1000 penduduk	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.40	Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.41	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	/ 1000 penduduk	245	245	245	245	245	245
2.42	Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)	/ 1000 penduduk	560	560	560	560	560	560
2.60	Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%)	persen	-	-	-	-	-	-
2.43	Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS	persen	50	55	60	65	70	80
2.44	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)	persen	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7
2.45	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	persen	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2
2.46	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.47	Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.48	AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun		0	0	0	0	0	0
2.49	Cakupan penanganan pneumonia balita sesuai standar (100%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.50	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100
2.51	Penderita DBD yang ditangani (%)	persen	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.52	Pelaksanaan tata laksana Diare Sesuai Standar (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.53	Penemuan dan penanganan HIV AIDS (%)	persen	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2.54	Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)	persen	100	100	100	100	100	100
2.55	Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%)	persen	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	persen	100	100	100	100	100	100
	Umur Harapan Hidup	tahun	75,92	75,93	75,95	75,97	75,99	76
3								
3.1	Pekerjaan Umum :							
3.3	Rasio Jaringan Irigasi		67	69	73	75	78	80
3.8	Rasio rumah layak huni		85	87	90	92	95	96
3.9	Rasio permukiman layak huni		85	87	90	92	95	96
3.4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik		11158	11158	11158	11158	11158	11158
3								
3.1	Rasio rumah layak huni	persen	85	87	90	92	95	96
3.2	Rasio permukiman layak huni	persen	85	87	90	92	95	96
3.4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		90	93	95	97	99	100
	Persentase Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik	persen	96,24	96,71	97,23	97,72	98,31	98,72
	Persentase Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	persen	91,681	93,601	95,063	96,715	98,365	100
4.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
4.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	persen	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61
4.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	0,9944	0,9944	0,9944	0,9944	0,9944	0,9944
4.3	Persentase Penegakan PERDA	persen	0,9	0,9	1	1	1	1
5.6	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	orang	58	58	58	58	58	58
5.7	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)	orang	140	140	140	140	140	140
5.8	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	persen	-	-				
5.9	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	/ 1000 penduduk	40	40	40	40	40	40
5.10	Jumlah kasus Penegakan PERDA		-	-				
5.11	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	persen	81	85	87	90	95	100
5.12	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	persen	1	1	1	1	1	1
5.13	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	persen	0,9944	0,9944	0,9944	0,9944	0,9944	0,9944
5.17	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten		-	-				
5.14	Status audit Keuangan BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.19	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)	persen	-	-				
5.20	Tersusunnya LKPJ Bupati		-	-				
5.15	Tersusunnya LPPD Bupati		57 buku	57 buku	57 buku	57 buku	57 buku	57 buku
5.16	Persentase Desa tertib administrasi ADD (%)	persen	100	100	100	100	100	100
5.17	Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)	persen	92	95	97	99	100	100
5.18	Angka kriminalitas	angka	1096	1096	1096	1096	1096	1096
5.19	Jumlah demo		-	-	-	-	-	-
5.20	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		2	2	2	2	2	2
5.21	Kegiatan pembinaan politik daerah		4	4	4	4	4	4
5.22	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	/ 10.000 penduduk	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.23	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	/10.000 penduduk	40	40	40	40	40	40
5.24	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	/desa atau kelurahan	378	378	378	378	378	378
5.25	Penegakan PERDA	jumlah kasus	100	100	100	100	100	100
5.26	Cakupan patroli petugas Satpol PP	persen	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari
5.27	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	persen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
5.28	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	orang	1922	1922	1922	1922	1922	1922
5.29	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	angka	100	100	100	100	100	100
	Indeks Harmoni Indonesia	angka	6,95	6,96	6,98	7	7,02	7,03
5.	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program	persen	100	100	100	100	100	100
	pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	persen						
6.5	Persentase panti sosial yang menerima programpemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	persen	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100
	(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen						
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi	persen	100	100	100	100	100	100
	dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen						
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental,	persen	100	100	100	100	100	100
	serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial							
5.1	Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	KUBE	4 KUBE	5 KUBE	4 KUBE	5 KUBE	4 KUBE	5 KUBE
5.2	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	persen	150	150	150	150	150	150
5.3	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	persen	9	10	9	10	9	10
5.4	Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	persen	5.907 orang	6.286 orang	6.286 orang	6.286 orang	6.286 orang	6.286 orang
5.5	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	persen	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1.	Tenaga Kerja							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	jumlah kasus	-	-				
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	-	-				
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	-	-				
1.4	Keselamatan dan perlindungan		-	-				
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	persen	-	-				
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	jumlah kasus	-	-				
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		-	-				
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		-	-				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		-	-				
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		-	-				
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	-	-				
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	persen	-	-				
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,35
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
1.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	-	-				
1.4	Rasio KDRT		0,00015	0,00014	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	persen	-	-				
2.6	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	persen	-	-				
1.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	1	1	1	1	1	1
1.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	1	1	1	1	1	1
1.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	persen	0,557	0,56	0,56	0,56	0,56	0,6
1.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai	persen	1	1	1	1	1	1
	dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen						
1.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	0,557	0,56	57	60	66	0,7
1.10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	1	1	1	1	1	1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	1	1	1	1	1	1
1.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		0,9985	0,999	1	1	1	1
1.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		0,855	0,8575	1	1	1	1
1.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		0,8025	0,8027	1	1	1	1
1.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		0,3425	0,3455	0,4	0,4	0,4	0,4
1.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		1	1	1	1	1	1
1.17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	persen	-	-				
1.17	Jumlah organisasi perempuan aktif (%)	persen	100	100	100	100	100	100
1.18	Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit)	unit	60	60	60	60	60	60
1.19	Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD)	unit	60	60	60	60	60	60
1.20	Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)	kelompok	7	7	7	7	7	7
1.21	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%)	persen	63	70	75	80	85	90
1.22	Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah)	buah	55	55	55	55	55	55
1.23	Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah)	buah	-	-				
1.24	Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit)	unit	6	6	6	6	6	6
1.25	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	persen	1	1	1	1	1	1
1.26	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	orang	2	2	2	2	2	2
1.27	Rasio akseptor KB (%)	persen	80	81	82	83	84	85
1.28	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	persen	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
1.29	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	persen	0,8	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89
1.30	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	persen	0,033	0,032	0,031	0,03	0,025	0,02

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.31	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan		1:(1-2)	1:(1-2)	1:(1-2)	1:(1-2)	1:(1-2)	1:(1-2)
1.32	Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan		0,042361111	0,042361111	0,042361111	0,042361111	0,042361111	0,042361111
1.33	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun		1	1	1	1	1	1
1.34	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun		1	1	1	1	1	1
1.35	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	persen	0,92	0,93	0,95	0,97	0,99	1
1.36	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	persen	0,8284	0,8284	0,8284	0,8284	0,8284	0,8284
1.37	Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit)	unit	31	31	31	31	31	31
1.38	Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)	persen	8	8	8	8	8	8
1.39	Penyelesaian Penerimaan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	persen	1	1	1	1	1	1
1.40	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan (%)	persen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2.	Pangan							
2.1	Ketersediaan pangan utama		-	-				
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita		110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2
2.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	jumlah kegiatan	600 sample	600 sample	600 sample	600 sample	600 sample	600 sample
2.4	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	gram/kap/hr	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71
2.5	Penguatan Cadangan Pangan (%)	persen	-	-				
2.6	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	persen	-	-				
2.7	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	persen	-	-				
2.5	Stor Pola Pangan Harapan (SPPH)	angka	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.6	Ketersediaan pangan utama							
2.7	Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	kkal/kap/hr	2174	2174	2174	2174	2174	2174
2.8	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	gram/kap/hr	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75
2.9	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	orang	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2.10	Rasio akseptor KB	persen	0,7927	0,7927	0,7927	0,7927	0,7927	0,7927
2.11	Cakupan peserta KB aktif	persen	0,7927	0,7927	0,7927	0,7927	0,7927	0,7927
3.	Pertanahan							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	persen						
3.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	jumlah	-	-				
3.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	jumlah	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek
3.2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	jumlah	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek
3.3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	jumlah kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus
3.4	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang
3.6	Penyelesaian izin lokasi	jumlah izin	-	-				
4.	Lingkungan Hidup							
4.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	persen	71,56	71,76	71,96	72,16	72,36	
4.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	persen	80,53	80,73	80,93	81,13	81,33	
4.3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	persen	51,05	51,12	51,19	51,26	51,33	
4.4	Laporan Inventarisasi GRK	jumlah dokumen	-	-				
4.4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	kg	96.146 kg	98.137 kg	98.137 kg	98.137 kg	98.137 kg	98.137 kg
4.6	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	jumlah desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa
4.7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	jumlah penghargaan	0	0	0	0	0	0

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang	lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota							
4.9	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana	jumlah perusahaan	100 perusahaan/	100 perusahaan/	100 perusahaan/	100 perusahaan/	100 perusahaan/	100 perusahaan/
	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan
4.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	jumlah kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus
4.11	Timbulan sampah yang ditangani	ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton
4.12	Persentase jumlah sampah yang berkurang	persen	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	melalui 3R							
4.13	Persentase cakupan area pelayanan	persen	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
4.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	72	72	74	76	78	80
4.15	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	persen	100	100	100	100	100	100
4.15	Penurunan nilai indeks pencemaran (IP) air		4,1	4	3,9	3,8	3,7	3,6
4.17	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	persen	100	100	100	100	100	100
4.18	Pencemaran status mutu air (%)	persen	75	75	75	75	75	75
4.19	Penegakan hukum lingkungan (%)	persen	100	100	100	100	100	100
4.20	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	persen	100	100	100	100	100	100
4.21	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%)	persen	18	18	18	18	18	18
4.22	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)	ha	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
4.23	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	persen	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.24	Persentase penanganan sampah	persen	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85
	Indeks Kualitas Air	angka	71,56	71,76	71,96	72,16	72,36	72,56
	Indeks Kualitas Udara	angka	80,53	80,73	80,93	81,13	81,33	81,53
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	51,05	51,12	51,19	51,26	51,33	51,4
5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	persen	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	persen	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	persen	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		0,9965	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
5.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		0,988	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
5.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
5.8	Kepemilikan KTP (%)	persen	100	100	100	100	100	100
5.9	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%)	persen	100	100	100	100	100	100
5.10	Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	persen	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	angka	100	100	100	100	100	100
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	46 kelompok	46 kelompok	46 kelompok	46 kelompok	46 kelompok	46 kelompok
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	jumlah TP PKK	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa
6.4	Persentase LPM Berprestasi	kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok
6.5	PKK aktif	jumlah TP PKK	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
6.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	kelompok	67 kelompok	67 kelompok	67 kelompok	67 kelompok	67 kelompok	67 kelompok
6.8	Jumlah LSM	jumlah unit	2	2	2	2	2	2
6.9	Posyandu aktif	kelompok	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok
6.10	Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.11	Tersusunnya RPJMDes	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.12	Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.13	Tersusunnya Profil Desa	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.14	Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender	lembaga	1	1	1	1	1	1
6.15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.16	Terfasilitasnya kerjasama desa	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.17	Terbangunnya infrastruktur desa	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.18	Terbangunnya kantor desa yang layak	desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.19	Terbentuknya BUMDES	bumdesa	6 Bumdesa	6 Bumdesa	6 Bumdesa	6 Bumdesa	6 Bumdesa	6 Bumdesa
	Persentase Desa Mandiri	persen	82,5	84,5	87	89,25	91,25	93,5
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	jumlah anak per wanita subur	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	persen	30	30	30	35	35	35

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen	5	5	5	5	10	10
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	buah	1	1	1	1	1	1
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	jumlah sektor	1	1	1	1	1	1
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan		1	1	1	1	1	1
	kependudukan							
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2	2	2	2	2	2
7.9	Ratio Akseptor KB	persen	80	80	80	80	80	80
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	persen	50	51	52	53	54	55
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	/1000 perempuan 15-19 tahun	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4
7.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	persen	0,0323	0,0322	0,0322	0,0322	0,0322	0,0322
7.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,980
7.14	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi	persen	80,07	80,23	80,38	80,53	80,68	80,83
7.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	0,93	0,95	0,97	0,99	1	1
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	0,9757	0,9758	0,98	0,99	1	1
7.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	persen	0,8421	0,8423	0,8425	0,8427	0,8429	0,8431
7.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	persen	0,8421	0,8423	0,8425	0,8427	0,8429	0,8431
7.19	Indeks lansia Berdaya	indeks	61,3	62,3	63,3	64,2	65,1	66
7.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	persen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	persen	93,1	93,6	94,1	94,5	94,9	95,3
7.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen	0,8391	0,8993	0,8993	0,8993	0,8993	0,8993
7.23	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	persen	35,5	41,3	44,8	46,9	48,1	48,9
7.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	1	1	1	1	1	1
7.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	1	1	1	1	1	1
7.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	persen	1	1	1	1	1	1
7.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	persen	0,5	0,45	0,41	0,36	0,33	0,3
7.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	51	56	62	68	75	82
7.29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	22	23	23	23	23	23
7.30	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668
7.31	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	69,8	70,8	71,7	72,6	73,5	74,3
8.	Perhubungan							
8.1	Rasio Konektivitas	Indeks	0,13	0,30	0,42	0,50	0,56	0,61
8.2	Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupate Badung	Orang	7.200	43.200	79.200	115.200	151.200	187.200
8.3	Persentase laik jalan kendaraan bermotor	%	20,74	21,09	21,42	21,73	22,04	22,33
8.4	Jumlah terminal penumpang yang ada di Kabupaten Badung	Nilai	2	2	2	2	2	2
8.5	Persentase rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi baik	%	90	91	92	93	94	95
8.6	Jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang	Nilai	27.500	29.865	32.865	35.865	38.865	41.865

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Komunikasi dan Informatika							
	Indeks Pemerintah Digital	angka	n/a	2	2,00*	2,6	2,60*	3,2
10.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah							
10.1	Persentase koperasi aktif (%)	persen	89,51	90,46	90,53	90,6	90,7	90,78
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	persen	-	-				
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	persen	-	-				
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Keci	persen	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975
	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Rp.	18.923.040	19.301.500	19.687.530	20.081.280	20.482.910	20.892.570
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	angka	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
11.	Penanaman Modal							
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah investor	4425	4425	4425	4425	4425	4425
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Milyar Rp.	13.255.240.571. 493	13.918.002.600. 068	14.000.000.000. 000	14.000.000.000. 000	14.000.000.000. 000	1,40E+13
	(PMDN/PMA)							
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja		10,49	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
11.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp.	9.724.213.189.7 89	11.548.340.511. 457	11.500.000.000. 000	11.500.000.000. 000	11.500.000.000. 000	1,15E+13
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	persen	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
12.	Kepemudaan dan Olahraga							
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	60,96	61,94	62,56	63,19	63,82	64,46
12.2	Persentase wirausaha muda	persen	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
12.3	Cakupan pembinaan olahraga	persen	100	100	100	100	100	100
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	0	0	100	100	100	100
12.5	Cakupan pembinaan atlet muda	persen	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.6	Jumlah atlet berprestasi	orang	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33
12.7	Jumlah prestasi olahraga		100	100	100	100	100	100
13.	Statistik							
13.1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,66	2,66	2,7	2,7	2,75	2,75
14.	Persandian							
14.1	Nilai Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	angka	1,88	2	2,25	2,5	2,75	3
15.	Kebudayaan							
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	-	-				
15.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya
	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali di Kabupaten Badung	angka	n/a	68	71	74	77	81
Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata	orang/tahun	1087295	1092652	1103578,52	1114614,31	1125760,45	1137018,05
1.2	Lama Kunjungan wisata	hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
1.3	PAD sektor pariwisata	Rp.	-	-				
1.4	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	persen	26	28,6	31,46	34,61	38,07	41,87
28.3	Persentase kunjungan wisatawan ke wilayah Kab. Badung	persen	-	-				
1.5	Persentase desa wisata yang aktif	persen	55	60	65	70	75	80
1.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	28,67	28,67	28,67	28,67	28,67	30

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.7	Persentase DTW yang ditata	persen	72	80	85	90	95	100
1.8	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	persen	-	-				
4.5	Persentase kunjungan wisatawan ke wilayah Kab. Badung	persen	1	1	1	1	1,5	1,5
1.9	Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian	jumlah desa	6	6	7	8	9	10
	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah	persen	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
	Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum dalam PDRB	persen	26,02	26,42	26,92	27,52	28,22	29,02
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	hari	3	3	3	3	3	3
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	persen	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
	Persentase Pengembangan Kawasan dan Daya Tarik Wisata	persen	20,83	23,61	26,38	29,16	31,94	34,72
2.	Pertanian							
2.1	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan							
	terhadap PDRB							
	- Produksi Jagung		43,8	44,24	44,68	45,13	45,58	46,03
	- Produksi Kedelai		13,44	13,57	13,71	13,85	13,99	14,13
	- Produksi Kacang Tanah		13,05	13,18	13,31	13,45	13,58	13,72
	- Produksi Kacang Hijau		9,34	9,43	9,53	9,62	9,72	9,82
	- Produksi Ubi Kayu		190,15	192,05	193,97	195,91	197,87	199,85
	- Produksi Ubi Jalar		185,2	187,05	188,92	190,81	192,72	194,65
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		-	-				
	Produksi kakao		103,84	105,92	106,98	108,05	109,13	110,22
	Produksi kelapa		2292,6	2343,56	2367	2390,67	2414,57	2438,72
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		-	-				
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		-	-				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		62,54	63,17	63,8	64,44	65,08	65,73
2.6	Cakupan bina kelompok petani		490	500	500	500	500	500
2.7	Produksi kelapa		-	-				
2.8	Produksi tebu		-	-				
2.8	Produksi kapas		-	-				
2.9	Produksi kopi		689,55	696,45	703,41	710,44	717,55	724,72
2.10	Produksi Vanili		0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
2.11	Produksi Kapuk		40	40,4	40,8	41,21	41,62	42,04
2.12	Produksi Jambu Mette		6,4	6,46	6,53	6,59	6,66	6,73
2.13	Produksi kemiri		-	-				
2.14	Produksi cengkeh		41,6	42,02	42,44	42,86	43,29	43,72
2.18	Jumlah populasi sapi		32183	32505	32830	33158	33490	33825
2.19	Jumlah populasi kambing		414	418	422	427	431	435
2.20	Jumlah populasi itik		71571	72287	73010	73740	74477	75222
2.21	Jumlah populasi ayam		1257471	1270046	1282746	1295574	1308529	1321615
2.22	Angka Kesakitan Ternak		5,5	5,56	5,61	5,67	5,72	5,78
2.23	Jumlah Ternak yang diberikan vaksin		1513	1528	1543	1559	1574	1590
2.24	Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak		26467	26732	26999	27269	27542	27817
2.25	Nilai tukar petani	angka	109,8	112,3	114,8	117,3	119,8	120,3
2.26	Jumlah Populasi Ternak		1327904	1341183	1354595	1368141	1381822	1395640
	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	persen	6,12	6,14	6,17	6,19	6,21	6,23
	Nilai Tukar Petani		109,8	112,3	114,8	117,3	119,8	120,3
	Persentase Penyerapan Produk Pertanian pada sektor Pariwisata	persen	15	15,5	16	16,5	17	17,5
3.	Perdagangan							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan		59260445,35	59760445,1	60260444,85	60760444,6	61260444,35	61760444,1
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		-	-				
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		3	3	3	4	4	4
4.	Kelautan dan Perikanan							
8.1	Persentase transmigran swakarsa	persen	0	0				
4.1	Konsumsi ikan		38,05	38,81	38,81	38,81	38,81	40
4.2	Cakupan bina kelompok nelayan		56	56	56	56	56	56
4.3	Produksi perikanan kelompok nelayan		7892	8050	8150	8250	8250	8250
8.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	persen	-	-				
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	persen	-	-				
8.7	Nilai tukar nelayan	angka	106	107	108	109	110	111
	Persentase Penyerapan Produk Perikanan pada sektor Pariwisata	persen	25	25,5	26	26,5	27	27,5
Penunjang Urusan								
1.	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ya/Tidak	-	-				
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ya/Tidak	-	-				
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ya/Tidak	-	-				
1.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ya/Tidak	-	-				
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	-	-				
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	-	-				
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Hasil Evaluasi RKPD (dokumen)	dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen)	dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	Ya/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	Ya/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	Ya/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	1	1	1	1	1	1
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	n/a	81	82	83	85	85
2.	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Akses Keuangan Daerah	angka	4,81	4,83	4,86	4,89	4,91	4,93
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	87,5	87,6	87,8	88	88,25	88,5
	Derajat Desentralisasi Fiskal		78,39	80,36	82,35	84,34	86,35	88,35
2.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
2.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam/pegawai	17,66 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP
2.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	0,2166	0,25	0,3	0,4	0,45	0,5
2.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	0,9757	1	1	1	1	1
2.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jumlah jabatan	37	37	37	37	37	37
2.5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jumlah jabatan	37	37	37	37	37	37
2.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jumlah jabatan	3145	2445	2445	2445	2445	2445
	Indeks Profesionalitas ASN	angka	82,10	82,60	83,00	83,50	84,10	84,80
	Indeks Sistem Merit	angka	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Penelitian dan Pengembangan							
3.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	65	70	75	80	85	90
3.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	persen	80	85	90	95	100	100
3.3	Penerapan SIDA:		0	0	0	0	0	0
3.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73,7	76,3	80	85	90	100
3.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	100	100	100	100	100	100
4.	Pengawasan							
5.1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	persen	1	1	1	1	1	1
4.1	Jumlah temuan BPK	jumlah kasus	18	18	18	18	18	18
5.	Sekretariat Dewan							
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	persen	1	1	1	1	1	1
5.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	persen	82,25	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
5.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	persen	82,25	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	88,5	89	89,5	90	90,5	91
	Nilai AKIP	angka	77,5	77,8	78,1	78,4	78,7	80,1
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90,89	91,99	92,59	93,39	94,89	95,39

Tabel 4.4.**Penetapan Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026-2030**

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pendidikan Dasar	%	99,26	99,35	99,45	99,55	99,65	99,85	100	
2	Pendidikan kesetaraan	%	0,74	0,65	0,55	0,45	0,35	0,15	0	
3	Pendidikan Anak usia Dini	%	99,45	99,55	99,56	99,57	99,58	99,59	99,6	
4	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	97,34	97,39	97,44	97,49	97,55	97,6	97,65	
17	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
26	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Rehabilitas Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan. RPJMD ini telah disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Sebagai kabupaten dengan potensi ekonomi unggulan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan Kabupaten Badung harus diarahkan pada penguatan daya saing daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian adat, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dalam RPJMD ini telah dirancang dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara ekonomi dan sosial, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029 juga memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Bali, RPJMD Provinsi Bali, RPJPD Kabupaten Badung, RTRW Kabupaten Badung, serta KLHS RPJMD Kabupaten Badung. Keselarasan ini penting agar kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan yang lebih luas.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RPJMD, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, sektor swasta, maupun masyarakat. RPJMD ini harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Selain itu, pelaksanaan RPJMD akan dikendalikan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik serta dapat menyesuaikan dengan tantangan dan dinamika yang terjadi. Evaluasi ini penting untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas pembangunan, serta untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Badung.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Badung dalam periode 2025-2029 dapat mewujudkan pariwisata berkualitas yang berlandaskan nilai-nilai budaya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial. Kesuksesan implementasi RPJMD ini membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, sehingga Kabupaten Badung dapat terus berkembang sebagai kabupaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan di masa depan.

KABUPATI BADUNG,
I WAYAN ADI ARNAWA